

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan di dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui otonomi daerah diharapkan juga pemerintah daerah kabupaten/kota selain mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokratis, pemerataan, keadilan dalam pembangunan juga mampu meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Walaupun peraturan perundang-undangan secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi, dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun pelayanan umum serta keuangan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Dalam penyusunannya, RPJMD Tahun 2016-2021 ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 ini terstruktur berdasarkan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD. Selanjutnya pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan "Perencanaan pembangunan

daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.

Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021 dengan tahun pertama perencanaan 2016, merupakan Tahap III (ketiga) RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya; disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
3. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas telah dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, Pendekatan Politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Medan, yang mengacu pada ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

Di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwasannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempersiapkan rancangan RPJMD. Rancangan awal tersebut selanjutnya dikaji ulang disesuaikan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota terpilih. Kepentingannya adalah merumuskan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Wali Kota, dan arah kebijakan keuangan daerah selaras dengan visi dan misi Wali Kota terpilih. Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Medan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 50 ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 perubahan dokumen RPJMD Kota Medan ini dilakukan apabila: (1), hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; [2] hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan [3] terjadi perubahan yang mendasar. Maka sesuai dengan aturan di atas revisi atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 ini dilakukan karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
4. Peraturan Wali Kota Medan No 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
5. Dinas Pendidikan : Sekolah SMA/Sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, maka nomenklatur OPD sebelum dan sesudah perubahan disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Perbandingan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan
Sebelum dan Sesudah perubahan

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAMA	NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BARU
1	Dinas Pendidikan	1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan	2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi	3	
4	Dinas Bina Marga	4	Dinas Pekerjaan Umum
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
6	Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan	6	
7	Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran	7	Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Dinas Perhubungan	9	Dinas Perhubungan
10	Badan Lingkungan Hidup	10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Pertamanan	11	Dinas Pertamanan dan Kebersihan
12	Dinas Kebersihan	12	
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	14	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	16	Dinas Sosial
		17	Dinas Ketenagakerjaan
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	18	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
18	Badan Penanaman Modal	19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
19	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu		
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20	Dinas Kebudayaan
		21	Dinas Parawisata
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	22	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	24	Satuan Polisi Pamong Praja
24	Sekretariat daerah	25	Sekretariat daerah
25	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	26	Bagian Kesejahteraan Rakyat
26	Bagian Administrasi Pembangunan	27	Bagian Pembangunan
27	Bagian Administrasi Perekonomian	28	Bagian Perekonomian

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAMA	NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BARU
28	Bagian Hubungan Kerjasama	29	Bagian Hubungan Kerjasama Antar Kota, Daerah, Lembaga
29	Bagian Agama dan Pendidikan	30	Bagian Keagamaan
30	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	31	Bagian Pemerintahan
31	Bagian Umum	32	Bagian Umum
32	Bagian Hubungan Masyarakat	33	Bagian Hubungan Masyarakat
33	Bagian Hukum	34	Bagian Hukum
34	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	35	Bagian Organisasi dan Tatalaksana
35	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam		-
36	Bagian Perlengkapan dan Aset	36	Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
37	Bagian Administrasi Kemasyarakatan	37	Bagian Administrasi Kemasyarakatan
38	Bagian Sosial, Pendidikan	38	Bagian Sosial, Pendidikan
39	Sekretariat DPRD	39	Sekretariat DPRD
40	Dinas Pendapatan	40	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
41	Badan Penelitian dan Pengembangan	41	Badan Penelitian dan Pengembangan
42	Kantor Pendidikan dan Pelatihan		-
43	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri		-
44	Badan Kepegawaian Daerah	42	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya manusia
45	Inspektorat	43	Inspektorat
46	Badan Pengelola Keuangan Daerah	44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
47	Kecamatan Medan Belawan	45	Kecamatan Medan Belawan
48	Kecamatan Medan Labuhan	46	Kecamatan Medan Labuhan
49	Kecamatan Medan Kota	47	Kecamatan Medan Kota
50	Kecamatan Medan Timur	48	Kecamatan Medan Timur
51	Kecamatan Medan Helvetia	49	Kecamatan Medan Helvetia
52	Kecamatan Medan Marelan	50	Kecamatan Medan Marelan
53	Kecamatan Medan Denai	51	Kecamatan Medan Denai
54	Kecamatan Medan Area	52	Kecamatan Medan Area
55	Kecamatan Medan Baru	53	Kecamatan Medan Baru
56	Kecamatan Medan Polonia	54	Kecamatan Medan Polonia
57	Kecamatan Medan Tembung	55	Kecamatan Medan Tembung

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAMA	NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BARU
58	Kecamatan Medan Perjuangan	56	Kecamatan Medan Perjuangan
59	Kecamatan Medan Barat	57	Kecamatan Medan Barat
60	Kecamatan Medan Tuntungan	58	Kecamatan Medan Tuntungan
61	Kecamatan Medan Selayang	59	Kecamatan Medan Selayang
62	Kecamatan Medan Petisah	60	Kecamatan Medan Petisah
63	Kecamatan Medan Johor	61	Kecamatan Medan Johor
64	Kecamatan Medan Maimun	62	Kecamatan Medan Maimun
65	Kecamatan Medan Deli	63	Kecamatan Medan Deli
66	Kecamatan Medan Amplas	64	Kecamatan Medan Amplas
67	Kecamatan Medan Sunggal	65	Kecamatan Medan Sunggal
68	Badan Ketahanan Pangan	66	Dinas Ketahanan Pangan
69	Badan Pemberdayaan Masyarakat	67	Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
70	Kantor Sandi Daerah	68	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sandi daerah
71	Dinas Komunikasi dan Informatika		
72	Kantor Perpustakaan	69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
73	Kantor Arsip		
74	Dinas Pertanian dan Kelautan	70	Dinas Pertanian dan Perikanan
75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	71	Dinas Perdagangan
		72	Dinas perindustrian

Berdasarkan atas rasionalitas tersebut, maka kedudukan dan fungsi RPJMD Tahun 2016-2021 ini cukup strategis dan penting guna menjamin proses pembangunan kota yang semakin terstruktur, terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen resmi yang nantinya menjadi payung hukum dalam perencanaan pembangunan daerah. Landasan hukum penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ Tahun 2016 yang menyatakan “Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

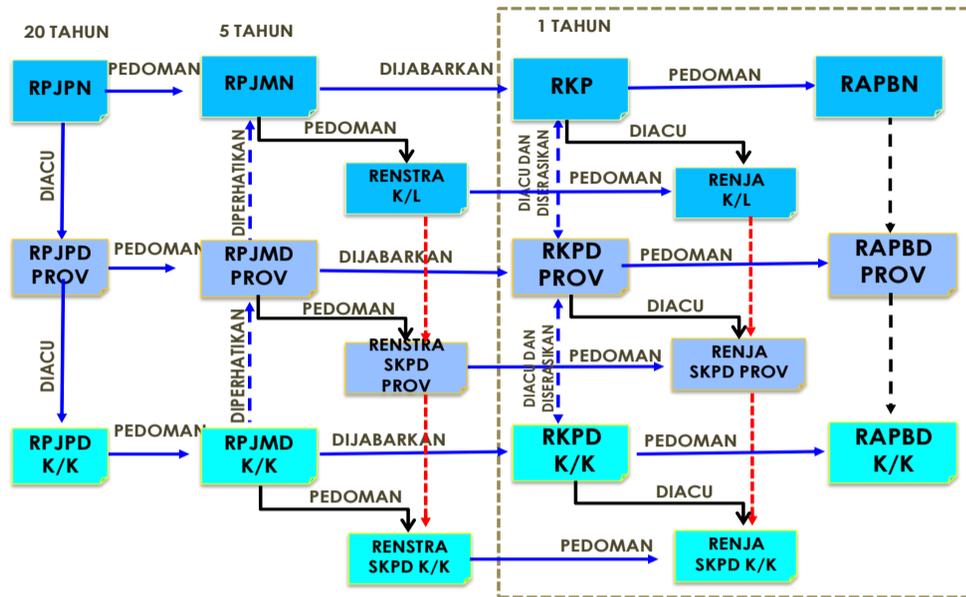
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
22. Peraturan Wali Kota Medan No 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RTRW Kota Medan, serta keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan dan pemutakhiran Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk RKPD Pemerintah Daerah, sekaligus juga akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD.

Hal yang perlu diperhatikan, walaupun proses perencanaan bersifat cukup dinamis, tidak statis, dan kaku, namun rencana pembangunan tahunan, diupayakan harus tetap memiliki kerangka dasar yang konsisten dengan rencana pembangunan kota jangka menengah yang sudah ditetapkan nantinya.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selanjutnya, dalam kaitannya dengan sistem keuangan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah untuk lebih memantapkan landasan kebijakan pembangunan kota dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan program Wali Kota sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 ini digunakan oleh seluruh SKPD sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan awal dan pelaksanaan pembangunan kota periode 2016-2021 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan tuntutan RPJPD Tahun 2006-2025 dalam mempercepat pembangunan Kota berdasarkan atas karakteristik perkotaan yang fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan serta

- terciptanya kondisi perluasan dan percepatan pembangunan kota;
2. sebagai landasan operasional awal pelaksanaan penjabaran visi dan misi Wali Kota terpilih yang dituangkan ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD sekaligus sebagai acuan/tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah;
 3. merumuskan rancangan awal kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan kota untuk periode Tahun Anggaran 2016-2021;
 4. penjabaran visi, misi, dan program kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan kota yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
 5. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan kota;
 6. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 7. menjamin keterkaitan dan konsistensi awal antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 8. mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kota Medan;
 9. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kota Medan secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
 10. menjaga kesinambungan awal dan kesaturan arah antar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.5. Sistematika Penulisan

Secara umum RPJMD Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Medan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (i) geografi dan demografi; (ii) kesejahteraan masyarakat; (iii) pelayanan umum; serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan kota disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan. untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IX PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis Dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah administratif Kota Medan memiliki luas 29.204,9 ha yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2001 (dua ribu satu) lingkungan. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Adapun mengenai batas-batas wilayah administratif Kota Medan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Malaka.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Timur : Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Kota Medan dapat dilihat pada Gambar 2.1. dan Tabel 2.1.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Medan terletak diantara koordinat 2° 27'-2° 47' Lintang Utara dan 98° 35'-98° 44' Bujur Timur. Kota Medan terletak di posisi pantai Timur Sumatera Utara yang bagian Utara merupakan daerah pesisir. Dengan demikian, Kota Medan termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi kemaritiman yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Topografi

Kota Medan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan kota ini sebahagian besar di dominasi dataran rendah yang berada di bagian Utara kota dan sebahagian landai atau agak miring yang berada pada bagian Selatan kota. Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah menyebabkan pada beberapa kawasan cukup sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering menjadi potensi langganan genangan/banjir. Oleh karena itu, salah satu kebutuhan dasar infrastruktur kota yang harus dioptimalkan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah tersedianya sistem jaringan sungai dan drainase yang handal.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kota Medan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%	Kelurahan	Lingkungan
1	2	3	4	5	6
1	Medan Tuntungan	2.869,84	9,82	9	75
2	Medan Johor	1.700,83	5,82	6	81
3	Medan Amplas	1.160,39	3,97	7	77
4	Medan Denai	943,46	3,23	6	82
5	Medan Area	423,64	1,45	12	172
6	Medan Kota	573,48	1,96	12	146
7	Medan Maimun	301,51	1,03	6	66
8	Medan Polonia	876,40	3,00	5	46
9	Medan Baru	542,42	1,85	6	64
10	Medan Selayang	1.646,25	5,63	6	63
11	Medan Sunggal	1.325,41	4,53	6	88
12	Medan Helvetia	1.314,83	4,50	7	88
13	Medan Petisah	527,64	1,80	7	69
14	Medan Barat	630,81	2,16	6	98
15	Medan Timur	888,76	3,04	11	128
16	Medan Perjuangan	452,76	1,55	9	128
17	Medan Tembung	779,53	2,66	7	95
18	Medan Deli	2.039,98	6,98	6	105
19	Medan Labuhan	3.722,31	12,74	6	99
20	Medan Marelan	3.321,46	11,37	5	88
21	Medan Belawan	3.163,19	10,83	6	143
Jumlah		29.204,9	100,00	151	2.001

Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.

Dengan mengacu Tabel 2.1. tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa luas wilayah setiap kecamatan relatif bervariasi. Kecamatan Medan Labuhan merupakan kecamatan terluas, kemudian disusul Kecamatan Medan Belawan, dan Medan Marelan. Berdasarkan luas wilayah dan perkembangan dinamika sosial ekonomi yang ada sampai saat ini, maka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota Tahun 2016-2021 "Menjadi Kota Masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius", maka secara hipotesis ada baiknya beberapa kecamatan dan kelurahan yang memiliki potensi ekonomi dan wilayah yang relatif luas dapat dimekarkan secara terencana sampai ke tingkat lingkungan.

D. Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah Kota Medan dilewati oleh 9 (sembilan) sungai yaitu Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Sikambing, Sungai Putih, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Sulang-Saling, Sungai Kera, dan Sungai Tuntungan. Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Medan cenderung telah mengalami pencemaran. Penerapan regulasi yang tidak tegas dan kurang konsisten terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan

air kotor oleh warga. Meskipun begitu, sungai-sungai tersebut oleh sebagian penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK, selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan.

Oleh karena itu, salah satu pendekatan wilayah dalam pembangunan kota haruslah berbasis sungai (*water front city*) yang relatif belum dioptimalkan khususnya untuk Medan Bagian Utara. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Polonia dan Stasiun Sampali berkisar antara 23,2°C-24,3°C dan suhu maksimum berkisar antara 30,8°C-33,2°C. Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata berkisar antara 84-85%. Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,48 m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 104,3 mm. Hari hujan di Kota Medan rata-rata per bulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan per bulannya 226,0 mm-299,5 mm. Kondisi iklim tersebut di atas menyebabkan Kota Medan sangat membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus semakin memadai.

E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Medan jika dipersentasekan sebagai berikut:

1. pemukiman 36,3% (tiga puluh enam koma tiga persen);
2. perkebunan 3,1% (tiga koma satu persen);
3. lahan jasa 1,9% (satu koma sembilan persen);
4. sawah 6,1% (enam koma satu persen);
5. perusahaan 4,2% (empat koma dua persen);
6. kebun campuran 45,4% (empat puluh lima koma empat persen);
7. industri 1,5% (satu koma lima persen); dan
8. hutan rawa 1,8% (satu koma delapan persen).

Ciri penggunaan lahan tersebut di atas menyebabkan Kota Medan membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ruang yang semakin konsisten.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara geografis, Kota Medan didukung oleh daerah-daerah sekitarnya yang kaya sumber alam seperti Deli Serdang, Karo, Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

F. Pengembangan Kawasan Budidaya

1) Perwujudan kawasan Lindung

Kawasan Lindung merupakan kawasan yang di dalamnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% (dua persen) dari luas kawasan lindung. Di dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kawasan lindung yang akan dikembangkan di Kota Medan, antara lain; hutan mangrove sekunder yang terdapat di Kecamatan Medan

Belawan, jalur hijau sempadan sungai, pantai, danau, rel kereta api dan jalur hijau SUTET.

2) Perwujudan Kawasan Budi daya

Program pengembangan kawasan budidaya terdiri dari pengembangan kawasan perumahan; kawasan komersial (perdagangan, jasa, pemerintahan dan bangunan umum); kawasan perindustrian; kawasan khusus (pelabuhan, militer, pertamina, PLN), fasilitas sosial dan umum, pertanian dan Ruang Terbuka Hijau Kota (taman, lapangan olahraga, TPU, hutan kota, dan tempat wisata).

G. Kawasan Strategis Kota Medan

Pembangunan kawasan strategis memiliki manfaat sebagai pendorong utama pertumbuhan kota, seperti pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pusat kota, pengembangan pusat pemerintahan dan pembangunan kawasan wisata. Kawasan strategis adalah kegiatan-kegiatan yang memiliki fungsi tertentu dan tidak semua orang bisa masuk secara bebas (kawasan terbatas). Pada kawasan strategis tidak dibenarkan adanya kegiatan lain, kecuali kegiatan yang berfungsi mendukung kegiatan strategis tersebut dengan persyaratan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Strategis adalah; kawasan pusat pemerintahan, kawasan militer, pertamina, pembangkit dan gardu listrik PLN, dan kawasan pelabuhan.

Kawasan-kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan strategis di Kota Medan, antara lain:

1. Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah di Pusat CBD Polonia;
2. Kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan dengan kegiatan utama, pelabuhan penumpang, pelabuhan peti kemas, dan perikanan samudera;
3. Kawasan militer;
4. Kawasan depot pertamina di Kecamatan Medan Labuhan;
5. Bangunan Pembangkit listrik PLN di Sicanang Kecamatan Medan Belawan; dan
6. Kawasan wisata yang dapat dikembangkan sekaligus berfungsi sebagai RTH adalah kawasan wisata di Utara Medan (Kecamatan Medan Marelan), yang meliputi: *Theme Park*, *Water Front City*, dan danau Siombak. Kawasan Wisata di Selatan meliputi Kebun Binatang, Hairos, dan Taman Mora Indah. Luas RTH tersebut diperkirakan mencapai sekitar 959,08 Ha (sembilan ratus lima puluh sembilan koma nol delapan hektar).

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara geologis Kota Medan kecil potensinya dalam bencana gempa tektonik dan vulkanik. Beberapa wilayah rawan bencana alam di Kota Medan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Kebakaran

Dari data luasan kebakaran yang terjadi di Kota Medan, kecamatan yang rawan kebakaran adalah, Kecamatan Medan Area, Medan Timur dan Medan Sunggal. Menurut catatan, kerugian akibat kebakaran terbesar pada tahun 2013 mencapai Rp42,28 milyar.

2. Daerah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya berturut-turut adalah Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Kerawanan banjir sedang terdapat pada Kecamatan Medan Johor, Medan Amplas, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Petisah, Medan Perjuangan, dan Medan Labuhan. Selanjutnya, yang paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan sebahagian Kecamatan Medan Marelan.

2.1.4. Kondisi Demografis

Komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam terbentuknya suatu wilayah adalah Penduduk, Tempat/Lokasi, dan Pemerintahan. Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu.

Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang kurang didukung oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya.

Penduduk Kota Medan sepanjang tahun 2013–2017 menunjukkan jumlah yang berfluktuasi. Fluktuasi jumlah penduduk kota disebabkan oleh faktor-faktor alami, seperti: tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan kepadatan penduduk Kota Medan selama tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Tabel 2.2, berikut ini:

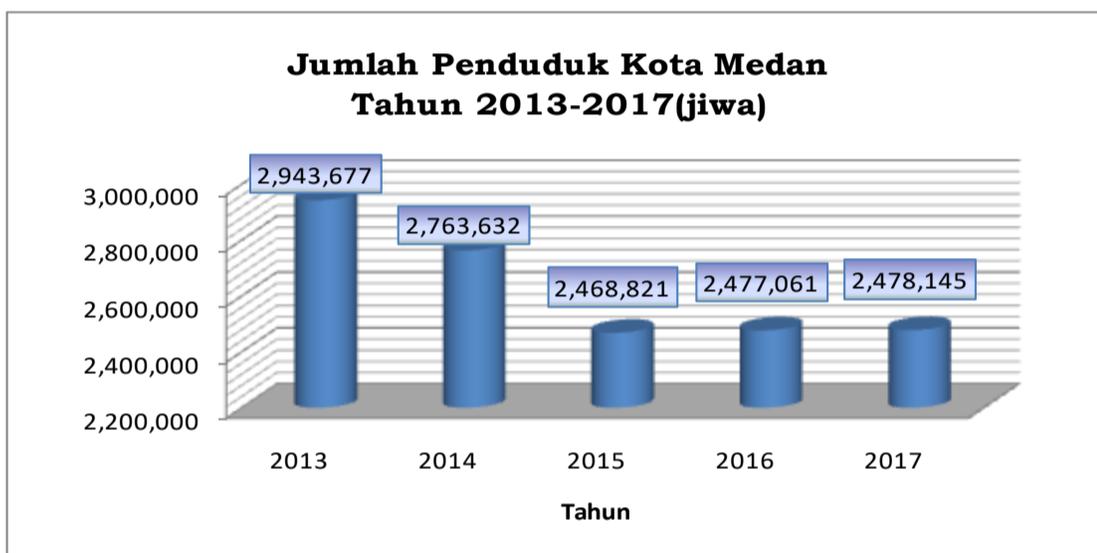
Tabel 2.2.
Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	2	3	4	5 = [(2)/(4)]
2013	2.943.677	-1,08	265.10	11.104

2014	2.763.632	-6,12	265.10	10.425
2015	2.468.821	-10,66	265,10	9,310
2016	2.477.061	0.33	265.10	9.344
2017	2.478.145	0.04	265,10	9.348

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Perubahan jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 6.12 persen dibandingkan dengan tahun 2013, dan 10.66 persen dibandingkan tahun 2014, kemudian sejak tahun 2015-2017 jumlah penduduk menunjukkan trend yang meningkat, hal ini berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk disebabkan luas wilayah Kota Medan sampai tahun 2017 tetap. Jumlah penduduk kota selama tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Grafik 2.1. berikut ini:



Grafik 2.1. : Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2013-2017

Penurunan jumlah penduduk Kota Medan yang terjadi sejak tahun 2014 dan tahun 2015 sebenarnya lebih disebabkan adanya penyesuaian hasil klarifikasi data ganda dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembuatan e-KTP, meningkatnya jumlah pengurusan akte kematian dan meningkatnya jumlah pengurusan surat pindah (migrasi keluar) dari Kota Medan, sehingga perkiraan jumlah penduduk cenderung semakin akurat.

Hal yang paling penting dalam dimensi kependudukan ini adalah bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal pada masa datang.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Analisis fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator PDRB, pertumbuhan PDRB, struktur perekonomian, PDRB perkapita, dan laju inflasi.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB secara umum digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu daerah, terutama yang berhubungan dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Konsep PDRB dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar merupakan basis utama perekonomian suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Untuk mengetahui perkembangan kinerja perekonomian Kota Medan, dapat dideskripsikan melalui PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2013-2016 berada dalam kisaran 41,51- 49.47 triliun rupiah. Selama periode tahun 2013-2017 PDRB-ADHK menunjukkan peningkatan sebesar 15,15% atau rata-rata meningkat sebesar 6.38% (enam koma tiga puluh delapan persen) per tahun, namun perhitungan PDRB atas dasar harga konstan untuk Tahun 2016 telah mengalami perubahan sehingga PDRB-ADHK menjadi 132.06 triliun rupiah.

Perkembangan nilai PDRB-ADHK sebagaimana disebutkan di atas terutama didorong oleh beberapa sektor/lapangan usaha seperti industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan dan jasa perusahaan. Peningkatan nilai PDRB-ADHK tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas perekonomian yang cukup signifikan dalam mendukung dan menggerakkan kegiatan pembangunan di Kota Medan. Perkembangan PDRB-ADHK Kota Medan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kota relatif mampu memberikan hasil yang cukup berarti selama periode dimaksud. PDRB Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK-2000)
Tahun 2013-2016 (Milyar Rp)

Sektor/Lapangan Usaha	Tahun		
	2013	2014	2015*
1	4	5	6
Pertanian	880,47	860,86	888,41
Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,53	0,53
Industri Pengolahan	5.289,71	5.536,27	5.740,83
Listrik, Gas dan Air Bersih	553,83	580,54	606,66
Konstruksi	4.980,88	5.309,48	5.696,55

Perdagangan, Hotel, dan Restoran	12.014,04	12.182,63	13.400,20
Transportasi dan Telekomunikasi	9.458,08	7.618,29	8.700,08
Keuangan dan Jasa Perusahaan	6.630,31	7.234,59	7.878,46
Jasa-jasa	4.786,37	5.151,38	5.940,00
PDRB	44.594,27	45.474,58	49.471,08
Sektor/Lapangan Usaha			Tahun 2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			1.419,38
Pertambangan dan Penggalian			1,89
Industri Pengolahan			19.489,29
Pengadaan Listrik dan Gas			137,85
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang			225,73
Konstruksi			25.707,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			33.699,14
Transportasi dan Pergudangan			7.931,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			3.323,82
Informasi dan Komunikasi			8.700,39
Jasa Keuangan dan Asuransi			8.903,05
Real Estate			9.955,21
Jasa Perusahaan			3.047,71
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			2.207,18
Jasa Pendidikan			3.952,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			1.970,52
Jasalainnya			1.390,45
PDRB			132.062,86

Sumber: BPS Kota Medan

Sejalan dengan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Kostan, perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2013-2016. PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Berlaku selama periode tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2016 (Milyar Rp)

Sektor/ Lapangan Usaha	Tahun		
	2013	2014	2015
1	4	5	6
Pertanian	2.821,37	1,740.47	1,866.48
Pertambangan dan Penggalian	3,34	2.4	2.35
Industri Pengolahan	16.305,79	23,881.03	24,948.10
Listrik, Gas dan Air Bersih	1.783,96	411.48	439.18

Konstruksi	13.377,65	26,548.48	29,408.29
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	31.240,49	40,791.24	45,087.64
Transportasi dan Telekomunikasi	23.363,14	16,979.14	17,686.71
Keuangan dan Jasa Perusahaan	18.624,32	26,382.09	29,294.16
Jasa-jasa	13.792,47	10,588.82	11,713.48
PDRB	121.312,54	147,325.15	160,446.38
Sektor/Lapangan Usaha			Tahun 2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			2.265,06
Pertambangan dan Penggalian			2,40
Industri Pengolahan			27.719,51
Pengadaan Listrik dan Gas			155,67
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang			345,71
Konstruksi			35.076,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			47.105,21
Transportasi dan Pergudangan			11.713,72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			5.743,19
Informasi dan Komunikasi			9.206,95
Jasa Keuangan dan Asuransi			12.998,99
Real Estate			15.543,39
Jasa Perusahaan			4.640,54
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			3.409,19
Jasa Pendidikan			5.035,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			3.006,57
Jasainnya			2.081,13
PDRB			186.049,04

Sumber: BPS Kota Medan

Sejalan dengan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2013-2016. PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2013-2016 mengalami perkembangan dari 121.31 triliun Rupiah tahun 2013 meningkat menjadi 186.04 triliun Rupiah pada tahun 2016. Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2013-2016 PDRB-ADHB menunjukkan peningkatan sebesar 53.73% (lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga persen) atau rata-rata meningkat sebesar 17.91% (Tujuh belas koma Sembilan puluh satu persen) per tahun.

Secara umum nilai PDRB-ADHB selama 2013-2016 mengalami peningkatan cukup signifikan, dimana terdapat beberapa sektor/lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB-ADHB tersebut. Sektor/lapangan usaha yang memberikan kontribusi utama adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan dan jasa

perusahaan. Peningkatan nilai PDRB-ADHB tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di Kota Medan cukup signifikan dalam mendukung dan menggerakkan kegiatan pembangunan kota secara dinamis.

Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD perkembangan nilai PDRB-ADHB tersebut telah mampu mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Kondisi ini juga merupakan indikasi bahwa berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah telah berada pada koridor yang tepat dalam rangka membangun Kota Medan dalam bidang perekonomian secara lebih progresif.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Kota Medan merupakan gambaran aktivitas perekonomian masyarakat Kota Medan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan berdasarkan sektor dan sub sektor selama periode tahun 2013-2016 dapat disajikan pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2016 (%)

Sektor/Lapangan Usaha	Tahun		
	2013	2014	2015
1	3	4	5
Primer			
Pertanian	3,64	3,17	2,89
Pertambangan dan Penggalian	4,68	1,57	-4,29
Sekunder			
Industri Pengolahan	2,83	2,81	2,22
Listrik, Gas, dan Air Bersih	3,92	4,55	4,31
Konstruksi	7,98	7,21	8,09
Tersier			
Perdagangan, Hotel & Restoran	6,90	6,44	8.19
Transportasi dan Telekomunikasi	9,73	9.30	6.34
Keuangan dan Jasa Perusahaan	8,97	8,91	6.74
Jasa-jasa	7,87	8,38	7.88
PDRB	7,41	7,10	6.67

Sektor/Lapangan Usaha	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,78
Pertambangan dan Penggalian	-2,73
Industri Pengolahan	4,90
Pengadaan Listrik dan Gas	7,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,42
Konstruksi	8,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,42
Transportasi dan Pergudangan	6,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,33
Informasi dan Komunikasi	7,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,89
Real Estate	5,02
Jasa Perusahaan	6,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,19
Jasa Pendidikan	7,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,40
Jasa lainnya	7,16
PDRB	6,27

Sumber: BPS Kota Medan

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan selama tahun 2013-2016 relatif cukup tinggi yaitu rata-rata di atas 6,86% (enam koma delapan puluh enam persen), suatu prestasi yang menggembarakan mengingat kondisi ekonomi regional/nasional yang relatif melemah. Kondisi ini menggambarkan bahwa faktor fundamental ekonomi Kota Medan relatif cukup baik. Walaupun di Tahun 2015 dan 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami perlambatan menjadi 6,67% dan 6,27 % (enam koma enam puluh tujuh persen dan enam koma dua puluh tujuh persen). Namun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada tahun 2015 dan 2016 ini tetap masih melampaui pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi nasional yang pertumbuhannya masing-masing sebesar 5,10% (lima koma sepuluh persen) untuk Sumatera Utara dan 5% (lima persen) untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang relatif tinggi sebagaimana disajikan di atas, tentunya memberikan dampak positif terhadap pergerakan sektor riil yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa sehingga juga akan membuka lapangan kerja yang semakin luas. Pada gilirannya, jika kondisi dimaksud dapat dipertahankan dan dioptimalkan tentu akan mampu menekan tingkat pengangguran menjadi lebih kecil. Menurunnya angka tingkat pengangguran menunjukkan indikasi baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa ada peningkatan pendapatan masyarakat, yang sekaligus menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Pertumbuhan ekonomi kota yang relatif tinggi juga tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB. Selama periode 2013-2016 secara umum semua sektor ekonomi masih tumbuh positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, walaupun beberapa sektor mengalami perlambatan. Sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor transportasi dan telekomunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan. Sedangkan sektor yang mengalami perlambatan, yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dan sektor keuangan serta jasa perusahaan.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan di atas 6% (enam persen) selama periode tahun 2013-2016, tetapi pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Penurunan pertumbuhan sub sektor perdagangan besar, sub sektor hotel dan sub sektor restoran, terutama selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah disebabkan oleh melambatnya ekspor dan impor. Namun demikian sektor tersebut masih tetap dapat tumbuh berkisar 6% (enam persen) karena masih didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat, bertahannya kinerja sektor industri, maraknya perdagangan ritel di masyarakat, serta meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan asing ke Kota Medan dan Sumatera Utara.

Beberapa sektor lainnya yang masih tumbuh tetapi cenderung melemah antara lain sektor konstruksi dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,21% (tujuh koma dua puluh satu persen) selama periode 2013-2016. Pertumbuhan sektor ini didukung oleh maraknya pembangunan properti berupa perumahan dan pusat perbelanjaan di berbagai wilayah Kota Medan. Sektor listrik, gas, dan air bersih juga masih mengalami pertumbuhan selama periode 2013-2016 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 4% (empat persen). Peningkatan pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih didorong oleh meningkatnya permintaan akan listrik, gas, dan air bersih mengikuti pertumbuhan penduduk Kota Medan. Namun demikian, sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan yaitu dari 2.22% (dua koma dua puluh dua persen) tahun 2013 menjadi 4.90% (empat koma Sembilan puluh persen) tahun 2016. Kondisi ini erat kaitannya dengan melambatnya ekspor.

Berdasarkan atas uraian di atas menunjukkan bahwa beberapa sektor ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan, sementara sektor lainnya ada yang pertumbuhannya melambat, tetapi secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Medan termasuk kategori cukup tinggi yaitu di atas 6 % (tujuh persen). Namun demikian tingkat pertumbuhan tersebut relatif masih berada di bawah target tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD periode 2011-2015 dan RPJMD periode 2016-2021.

Tentu hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah agar selalu berusaha seoptimal mungkin membangun ekonomi Kota Medan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja di bidang ekonomi sebagaimana diuraikan di atas tentu tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Daerah beserta seluruh stakeholder dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ekonomi daerah yang cukup efektif selama periode tahun 2013-2016.

Tantangannya adalah ternyata pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis tersebut, ternyata belum mampu mewujudkan pertumbuhan kesempatan kerja baru, yang lebih masif, guna menekan angka pengangguran yang lebih kecil. Di samping itu, menjadi catatan juga bahwa kesempatan kerja baru yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang ada, juga tidak sepenuhnya diisi oleh angkatan kerja lokal, sebab secara empirik cukup banyak diisi oleh angkatan kerja dari luar daerah, terutama di sektor bangunan-bangunan dan perhotelan, sehingga perlu kebijakan yang dapat lebih mendorong masuknya angkatan kerja lokal di pasar kerja.

C. Struktur Ekonomi

Struktur PDRB Kota Medan menggambarkan kontribusi masing-masing sub sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Medan. Dari ketiga sektor ekonomi yakni sektor primer, sekunder, dan tersier, diketahui bahwa sektor tersier merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB dan kemudian diikuti oleh sektor sekunder dan primer. Struktur PDRB Kota Medan menurut lapangan usaha dan Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Struktur Produk Regional Bruto Kota Medan
Menurut Lapangan Usaha (%) ADHB Tahun 2013-2016

Sektor/Lapangan Usaha	Tahun		
	2013	2014	2015
1	4	5	6
Primer	1,98	1,18	1,16
Pertanian	1,98	1,18	1,16
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
Sekunder	24,27	34,51	33,96
Industri Pengolahan	11,86	16,21	15,55
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,24	0,28	0,27
Konstruksi	11,17	18,02	18,33
Tersier	73,75	64,31	64,68
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	26,94	27,69	28,10
Transportasi dan Telekomunikasi	21,21	11,52	11,02
Keuangan dan Jasa Perusahaan	14,87	17,91	18,26
Jasa-jasa	10,73	7,19	7,30
PDRB	100,00	100,00	100,00
Sektor/Lapangan Usaha	2016		
PRIMER	1.08		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.07		
Pertambangan dan Penggalian	0.00		

SEKUNDER	33.81
Industri Pengolahan	15.10
Pengadaan Listrik dan Gas	0.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.17
Konstruksi	18.45
TERSIER	65.12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26.66
Transportasi dan Pergudangan	6.15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.07
Informasi dan Komunikasi	4.65
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.76
Real Estate	8.10
Jasa Perusahaan	2.44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.87
Jasa Pendidikan	2.74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.57
Jasa lainnya	1.10
PDRB	100.00

Sumber: BPS Kota Medan.

Mengamati Tabel 2.6 di atas, dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor dan sub sektor terhadap PDRB Kota Medan. Apabila dianalisis lebih jauh, kontribusi sektor primer dan sekunder dalam struktur PDRB cenderung turun selama periode 2013-2016, kecuali konstruksi. Sedangkan sektor tersier cenderung meningkat selama periode 2013-2016 dan berperan dominan dalam struktur PDRB. Perbedaan kontribusi masing-masing sektor sebagaimana diuraikan di atas sangat berkaitan dengan situasi, kondisi, dan ciri Kota Medan sebagai Kota Metropolitan.

Potensi unggulan Kota Medan ditentukan berdasarkan atas struktur PDRB. Struktur PDRB terdiri atas 3 (tiga) sektor, yaitu: sektor tersier, sekunder, dan primer.

Sektor tersier merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB selama periode tahun 2013-2016 dengan kontribusi rata-rata 66,96% (enam puluh enam koma sembilan puluh enam persen). Sektor Sekunder merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB kota selama periode tahun 2013-2016 dengan kontribusi rata-rata 31,64% (tiga puluh satu koma enam puluh empat persen). Sektor primer merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling rendah dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi rata-rata 1.35 % (satu koma tiga puluh lima persen).

Kontribusi sektor tersier dan sekunder dalam pembentukan PDRB yang cukup besar menggambarkan bahwa kedua sektor

tersebut merupakan potensi unggulan Kota Medan. Oleh karena itu tingkat capaian yang telah diperoleh harus diusahakan semakin meningkat pada periode berikutnya sesuai dengan kondisi Kota Medan sebagai Kota Metropolitan.

Pada sektor tersier, sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB selama periode tahun 2013-2016 adalah sub sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, kemudian diikuti oleh sub sektor Transportasi dan Komunikasi, sub sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan dan sub sektor Jasa-Jasa

Mengacu pada rata-rata kontribusi masing-masing sub sektor tersier terhadap pembentukan PDRB, maka sektor unggulan dari sektor tersier adalah sub sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah kecenderungan menurunnya kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB, padahal sektor ini cenderung menumbuhkan lapangan kerja secara masif di samping produktivitasnya yang juga cenderung tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk dapat mengoptimalkan kontribusi sektor sekunder ini terhadap pembentukan PDRB pada masa datang.

D. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa selama satu periode. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, namun demikian parameter ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara menyeluruh. PDRB Kota Medan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
PDRB Perkapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2013-2016

Tahun	PDRB Perkapita (Jutaan Rupiah)		Perubahan (%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
1	2	3	4	5
2013	56,38	21,01	13,87	7,39
2014	61,71	20,75	11,89	4,01
2015	72,58	21,76	12,85	4,9
2016	82,76	59,03	11,14	5,00

Sumber: BPS Kota Medan.

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. PDRB Perkapita berdasarkan atas harga berlaku pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan lebih besar dibandingkan dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai 61,71 juta rupiah, angka ini meningkat 11,89%

(sebelas koma delapan puluh sembilan persen) dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 56,38 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2016 PDRB-ADHB Kota Medan telah mencapai 82,76 (delapan puluh dua koma tujuh puluh enam) juta rupiah. Peningkatan PDRB perkapita ini juga diharapkan dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu juga memperhatikan distribusinya sehingga dapat lebih merata dan berkeadilan.

E. Laju Inflasi

Indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi dan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata. Adapun inflasi Kota Medan selama periode tahun 2013-2017 dapat diuraikan pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Inflasi Kota Medan Menurut Komoditi Tahun 2013-2017
(%)

No	Kelompok Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Bahan Makanan	12,60	7.4	4.90	15.55	2.59
2	Makanan Jadi, Minuman/ Rokok dan Tembakau	5,56	6.46	5.69	13.29	2.25
3	Perumahan, air, listrik, Gas, dan Bahan bakar	8.43	5.93	4.18	2.64	6.44
4	Sandang	2,71	2.40	3.33	2.66	1.12
5	Kesehatan	1,80	4.94	6.23	4.86	1.61
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	8,94	7.20	6.77	4.7	0.41
7	Transportasi dan Komunikasi	19,51	15.49	-2,48	-1.89	2.79
	Umum	10.09	8.24	3.32	6,6	3,18

Sumber: BPS Kota Medan

Berdasarkan atas data tabel 2.8 di atas di Kota Medan tingkat inflasi secara sektoral berfluktuasi cenderung menurun selama periode tahun 2013-2017. Menurunnya tingkat inflasi umum di Kota Medan disebabkan dari berbagai faktor eksternal dan internal yang secara relatif terkendali. Penurunan laju inflasi seluruh sektor yang relatif cukup besar kecuali sektor perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, disebabkan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium, Solar, Pertamina, dan Pertamina Plus pada 22 Juli 2013 serta kenaikan tarif listrik. Di samping itu, untuk menjaga agar tingkat inflasi terus terjaga telah dilakukan koordinasi secara intensif

dengan penyedia barang (*supplier*), melakukan pemantauan terhadap jalur distribusi, menindak para pedagang yang sengaja melakukan penimbunan (spekulasi) hingga arahan ke masyarakat agar berkonsumsi secara bijak. Bentuk lainnya menjamin pasokan ketersediaan barang melalui komunikasi verbal, melakukan operasi pasar, mempercepat penyaluran beras miskin (Raskin) kemudian harus menjadi pilihan opsional adalah mendorong impor sejumlah barang kebutuhan dari negara lain melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sehingga program-program yang sifatnya antisipatif dapat dilakukan oleh masing-masing pihak.

Di sisi lain, tingkat inflasi di Kota Medan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 1,73% (satu koma tujuh puluh tiga persen). Penurunan laju inflasi seluruh sektoral yang relatif cukup besar yakni berasal dari bahan makanan rata-rata sebesar 2,50% (dua koma lima persen), makanan jadi, minuman/rokok/tembakau rata-rata sebesar 0.83% (nol koma delapan puluh tiga persen), perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rata-rata sebesar 0,49% (nol koma empat puluh Sembilan persen), sandang rata-rata sebesar 0,39% (nol koma tiga puluh sembilan persen), kesehatan rata-rata sebesar 0.05% (nol koma nol lima persen), pendidikan, rekreasi, dan olahraga rata-rata sebesar 2.13% (dua koma tiga belas persen), khusus transportasi dan komunikasi pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami deflasi masing-masing sebesar 2.48 % dan sebesar 1.89 % akan tetapi tahun 2017 inflasi tahun 2017 sebesar 2.79 % (dua koma tujuh puluh sembilan persen).

Penurunan tingkat inflasi pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2013 tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, untuk menjamin keseimbangan sisi permintaan dan penawaran, sehingga permintaan total tidak jauh melebihi penawaran total. Di samping itu, dilakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait melalui peran pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*), dan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia dan TPID melalui komunikasi verbal, melakukan operasi pasar (pasar murah), mempercepat penyaluran Raskin kemudian harus menjadi pilihan (opsional) adalah mengimpor sejumlah barang kebutuhan dari negara/daerah lain sehingga program-program yang sifatnya antisipatif dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Di samping itu, untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap terjaga telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan penyedia barang (*supplier*), melakukan pemantauan terhadap jalur distribusi, menindak para pedagang yang sengaja melakukan penimbunan (spekulasi) hingga arahan ke masyarakat agar berkonsumsi secara bijak.

Dalam rangka menjaga stabilitas pasar, oleh karenanya diperlukan kebijakan dan program pengendalian harga pasar khususnya terhadap 9 (sembilan) kebutuhan pokok melalui koordinasi TPID.

F. Ekspor dan Impor

Perkembangan ekonomi Kota Medan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekspor dan impor yang memiliki peran penting untuk

memperluas pasar produk yang dihasilkan dan sekaligus mendukung perekonomian Kota Medan yang semakin terbuka. Untuk nilai ekspor Kota Medan berdasarkan nilai *free on board* (fob), yaitu nilai barang ekspor hingga berada di atas kapal baik di Pelabuhan Belawan maupun Bandara Polonia yang siap diekspor ke negara tujuan. Begitu pun nilai impor yang dicatat berdasarkan atas nilai *cost insurance and freight* (cif) yang merupakan nilai barang di atas kapal berdasarkan atas pelabuhan bongkar. Ekspor melalui wilayah Kota Medan menurut kelompok barang ekonomi adalah pertanian, pertambangan dan penggalian, industri dan lainnya. Adapun nilai ekspor dan impor melalui wilayah Kota Medan tahun 2013-2016 dapat diuraikan pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
 Nilai Ekspor Melalui Wilayah Kota Medan
 Menurut Kelompok Barang Ekonomi Tahun 2013-2017

Tahun	Ekspor (Nilai FO B000 USD)	Impor (Nilai CIF 000USD)	Surplus Perdagangan (000 USD)
[1]	[2]	[3]	[4]
2013	8,825,693	5,104,647	3,966,072
2014	8,825,693	4.788,67	3.054.37
2015	8,825,693	3.801.92	2.930,80
2016	6.058.488	3.231.633	2,827.815
2017	7.760.00	3.920.00	3.840.00

Sumber: BPS Kota Medan.

Nilai ekspor melalui wilayah Kota Medan yang dicatat nilai *free on board* (FOB) menunjukkan penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Nilai ekspor melalui wilayah Kota Medan tahun 2014 menurun sebesar 11,78% (sebelas koma tujuh puluh delapan persen) dibandingkan tahun 2013. Selanjutnya turun sebesar 0,94% (nol koma sembilan puluh empat persen) tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, Selanjutnya turun sebesar 0,94% (nol koma sembilan puluh empat persen) tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 28,08 % (dua puluh delapan koma nol delapan persen) jika dibandingkan tahun 2016.

Penurunan ekspor melalui wilayah Kota Medan disebabkan kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya kondusif. Sebagaimana diketahui bahwa tren pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan dan resesi global yang terjadi sejak tahun 2008 masih menjadi perhatian dunia. Akan tetapi hingga tahun 2013, fase pemulihan tersebut tidak berjalan secepat seperti yang diperkirakan. Hal itu terjadi karena berlarut-larutnya penyelesaian krisis fiskal dan utang di Eropa, yang diperkirakan masih akan menjadi tantangan

yang harus dihadapi di tahun berikutnya. Tingginya beban utang yang terjadi dapat menjadi hambatan bagi upaya-upaya stimulus yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Di samping itu, kegiatan investasi dan arus modal diperkirakan belum dapat pulih sepenuhnya sebagai dampak diturunkannya peringkat kredit (*credit rating*) beberapa negara Eropa sejak tahun 2012.

Nilai ekspor melalui wilayah Kota Medan yang dicatat nilai *free on board* (fob) menunjukkan penurunan pada tahun 2013-2016 secara rata-rata sebesar sebesar 10.45% (sepuluh koma empat puluh lima persen) setiap tahun. Penurunan ekspor melalui wilayah Kota Medan disebabkan kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya kondusif serta semakin tingginya tingkat persaingan di sektor industri yang secara global mempengaruhi kinerja industri lokal, khususnya produk-produk yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, dengan adanya penandatanganan kesepakatan Perdagangan Bebas (AEC) *Asean Economics Community* sejak Desember 2015 juga memberikan peluang pasar dan tekanan pada tingkat daya saing industri lokal. Selain nilai ekspor, nilai impor selama tahun 2013-2016 melalui wilayah Kota Medan juga menunjukkan penurunan secara rata-rata sebesar 6,37 % (enam koma tiga uluh tujuh persen). Penurunan impor disebabkan relatif stagnan kinerja investasi terutama didorong oleh penurunan dalam bentuk investasi mesin dan perlengkapan yang berasal dari impor, serta alat angkut impor. Dengan membandingkan nilai ekspor dan impor melalui wilayah Kota Medan, tampak jelas bahwa nilai ekspor lebih besar dari pada nilai impor sehingga masih mengalami surplus perdagangan. Kondisi ini mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara khususnya Kota Medan.

Menjadi tantangan bagi seluruh pelaku usaha (sektor swasta) untuk dapat mendapatkan peluang yang seluas-luasnya dari pemberlakuan MEA. Oleh karena itu, dari sisi pemerintah daerah perlu terus memformulasikan kebijakan dan program yang terpadu untuk lebih menggairahkan ekspor-impor terutama dari sisi debirokratisasi dan deregulasi.

G. Investasi

Kota Medan memiliki letak geografis yang strategis dan merupakan pintu gerbang utama di kawasan Indonesia Bagian Barat sehingga memiliki potensi besar untuk penanaman modal bagi para investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini didukung oleh ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai, seperti: pelabuhan Belawan dan bandara Kuala Namu Deli Serdang yang sangat dekat dengan Kota Medan. Selain hal tersebut, Pemerintah Daerah juga telah melakukan berbagai program dalam rangka meningkatkan nilai investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Program-program tersebut diantaranya: program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, program peningkatan iklim investasi, maupun program peningkatan pelayanan. Perkiraan total investasi baik PMDN

maupun PMA di Kota Medan selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.10. berikut:

Tabel 2.10
Perkiraan PMA dan PMDN Tahun 2013-2017
(Trilyun Rupiah)

Tahun	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Target RPJMD (Triliun Rupiah)
1	2	3
2013	21.907	21,45
2014	23,782	23,03
2015	26,99	25,47
2016	29,36	31.70
2017	30,98	32.46

Sumber: BPS Kota Medan.

Nilai investasi di Kota Medan menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Peningkatan nilai investasi hingga mencapai *double digit* tidak terlepas dari peningkatan iklim investasi melalui penyederhaan, percepatan prosedur investasi, dan kemudahan berusaha, stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik dan peningkatan belanja modal pemerintah untuk proyek infrastruktur serta berbagai program yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Medan. Oleh karenanya, nilai investasi yang semakin besar di Kota Medan perlu dipertahankan dan ditingkatkan khususnya yang berhubungan dengan sektor tersier dan sekunder. Peningkatan nilai investasi pada kedua sektor tersebut lebih sesuai dengan kondisi Kota Medan sebagai kota Metropolitan. Di samping itu, kedua sektor tersebut juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB dan proporsi angkatan kerja yang bekerja pada kedua sektor tersebut yang relatif cukup besar akan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sehingga kondisi sosial ekonomi Kota Medan akan semakin meningkat di masa depan.

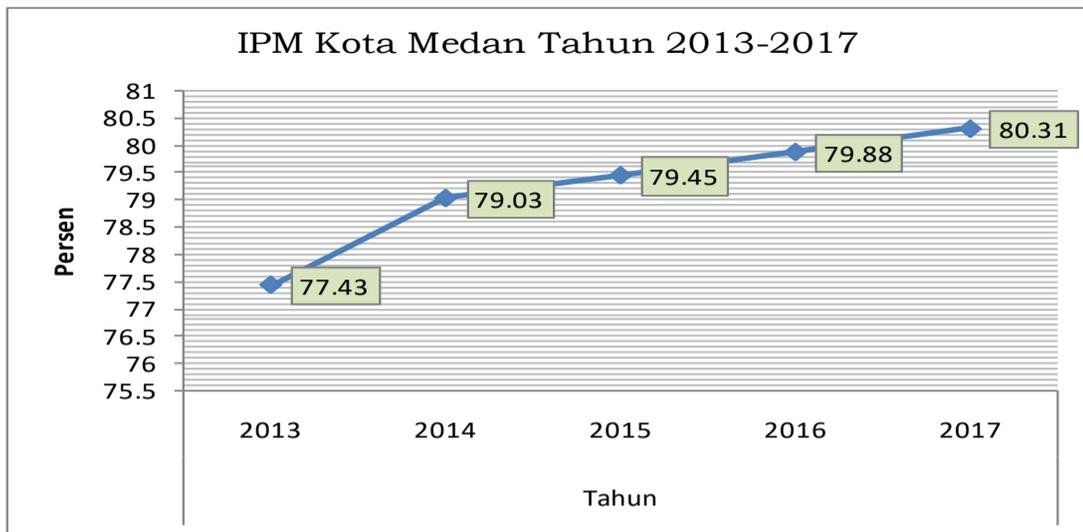
Dengan demikian, dalam rangka terus menarik minat berinvestasi di Kota Medan, Pemerintah Daerah perlu terus menyiapkan berbagai fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal, sehingga Kota Medan dapat menjadi tujuan investasi secara nasional, baik dalam bentuk PMDN maupun PMA.

2.2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia, yang selanjutnya disingkat IPM adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, dan indeks ekonomi dilihat dari daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.

Perkembangan IPM kota Medan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Di tahun 2013, angka IPM kota Medan 77,43 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh tiga) dan pada tahun 2017, angka IPM meningkat menjadi 80,31 (delapan puluh koma tujuh belas).



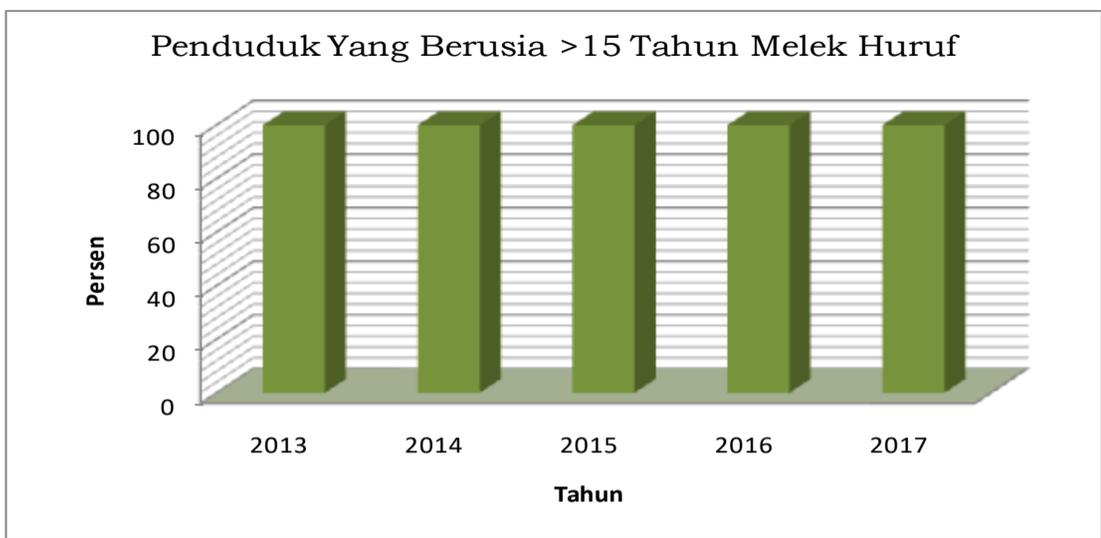
Grafik 2.2 IPM Kota Medan tahun 2013-2017

B. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Perkembangan angka melek huruf di Kota Medan cenderung semakin membaik yang ditandai dengan semakin kecilnya warga masyarakat yang buta huruf. Saat ini hanya 0,6% (nol koma enam persen) penduduk usia >15 tahun yang buta huruf. Angka ini tidak akan menjadi lebih besar sebab drop out SD sudah semakin kecil, yaitu 0,07% (nol koma nol tujuh persen). Selama ini besarnya angka drop out, terutama drop out pada kelas 1 (satu) dan 2 (dua) potensial menjadi buta huruf. Meskipun masih ada angka *drop out* di masa datang mereka bukanlah menjadi warga yang buta huruf, karena sesungguhnya sebelum memasuki dunia sekolah sudah diberikan keterampilan membaca dan menulis.

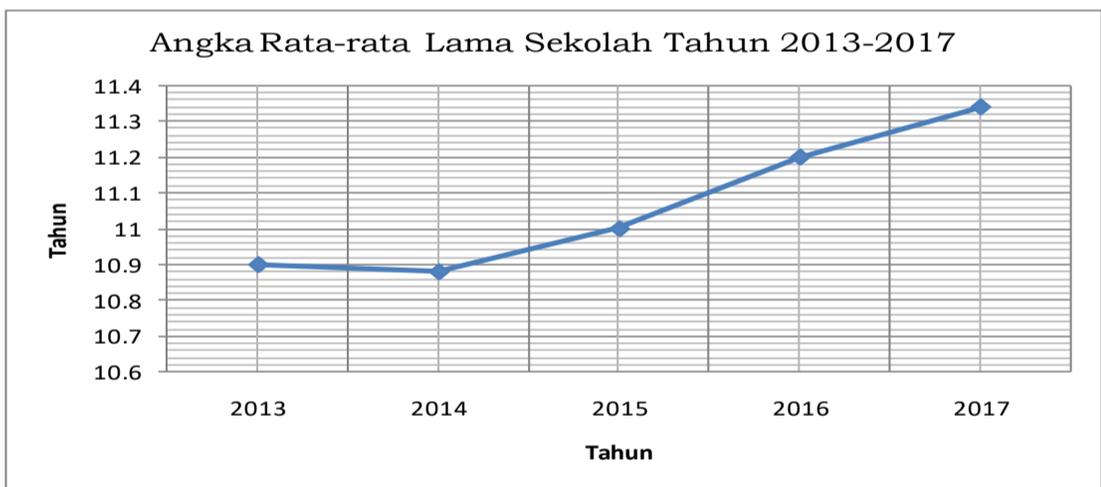
Isu-isu yang muncul ke depan adalah bahwa jika angka buta huruf sudah selesai lalu apakah persoalan melek huruf ini masih muncul. Pemberantasan buta huruf sesungguhnya memiliki substansi agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Hal itu hanya bisa terjadi apabila substansi buta aksara sudah dapat ditingkatkan menjadi keberaksaraan fungsional. Dengan keberaksaraan fungsional semua warga akan dapat memfungsikan kegiatan membaca dan menulis untuk memenuhi informasi dan pengetahuan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup.



Grafik 2.3 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Medan selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, angka rata-rata lama sekolah sebesar 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) tahun dan mencapai angka 13,2 (tiga belas koma dua) tahun di tahun 2017, meskipun pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan.



Grafik 2.4 Angka rata-rata lama sekolah 2013-2017

3. Angka Partisipasi Kasar

Jika dilihat dari Angka Partisipasi Kasar, ketersediaan sekolah bagi warga Kota Medan sudah memadai bahkan kelebihan dari angka 100% (seratus persen), yang menggambarkan bahwa ada penduduk dari luar Kota Medan yang bersekolah di Medan, yaitu seperti penduduk dari Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang. Sejak tahun 2013, APK di semua jenjang pendidikan selalu berada di atas 100% (seratus persen).

Tabel 2.11

Angka Partisipasi Kasar dan Murni Kota Medan Tahun 2013-2017

Jenjang	Tahun
---------	-------

	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	124	127	127	101,01	104,31
SMP/MTs	119	117	123	109,21	103,23
SMA/SMK/MA	111	109	113	111.24	
Jenjang	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	103,6	104,7	109,9	87,65	90,51
SMP/MTs	84,01	87,52	88,23	73,36	77,28
SMA/SMK/MA	76,98	78,88	77,87	80.22	

Sumber: BPS Kota Medan

4. Angka Partisipasi Murni

Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP dan SMA masih di bawah 100% (seratus persen). Hal itu disebabkan ketidakkonsistenan usia masuk sekolah dan hal itu ditengarai sebagai salah satu penyebab rendahnya APM Kota Medan. Penduduk usia pra sekolah yang telah duduk pada tingkat I SD yakni mencapai angka diatas 103,6 % (seratus tiga koma enam persen) dari total siswa kelas I SD. Hal ini menggambarkan bahwa kesiapan masyarakat kota Medan dalam menyekolahkan anak-anak mereka cukup tinggi. Banyak siswa SD yang belum lagi mencapai usia 7 (tujuh) tahun bahkan ada yang belum mencapai usia enam tahun sudah diterima di sekolah terutama di sekolah-sekolah swasta. Adapun angka partisipasi murni Kota Medan tahun 2013-2017 disajikan pada tabel 2.11 di atas.

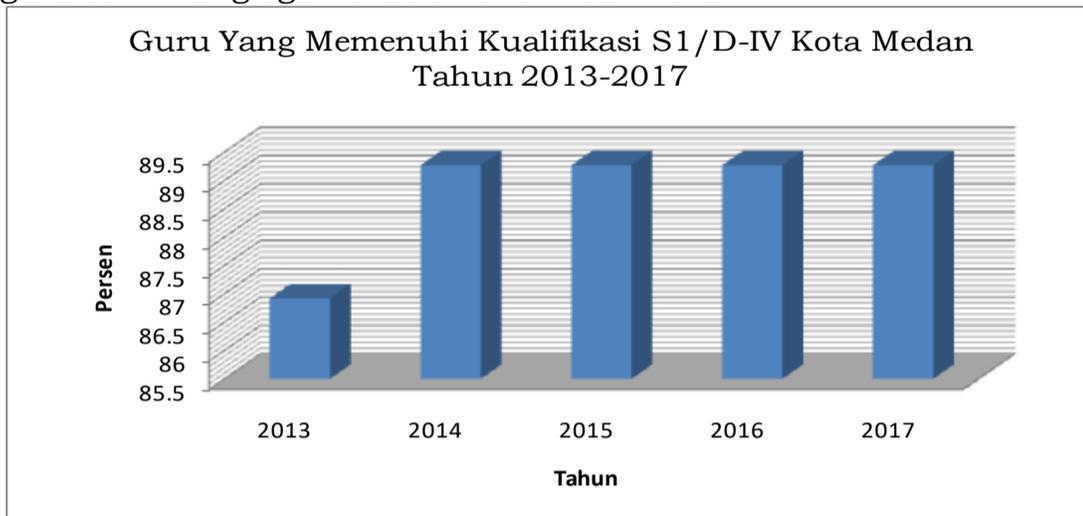
Karakter usia penduduk pada satuan sekolah dasar ini pada gilirannya mengikut ke satuan pendidikan SMP yang usia siswa tidak berada pada kelompok umur 13-15 tahun atau pendidikan menengah 16-18 tahun. Penduduk usia kota Medan sudah banyak yang menamatkan pendidikan pada usia 17 (tujuh belas) tahun, yaitu mereka yang masuk SD enam tahun

5. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Persoalan guru juga sudah banyak diselesaikan pada lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari kualifikasi guru yang sudah mencapai 86,92% (delapan puluh enam koma sembilan dua persen) pada tahun 2013. Dalam Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2004 disebutkan bahwa dikatakan guru apabila memenuhi kualifikasi S1/D-IV, memiliki sertifikasi dan remunerasi.

Menurut Undang-Undang tersebut batas pelaksanaan kualifikasi dan sertifikasi adalah tahun 2014. Tetapi ternyata hingga tahun 2014 masih ada 13% (tiga belas persen) guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Selain kualifikasi, status guru juga ditentukan oleh sertifikasi dan remunerasi. Dalam Undang-Undang yang disebut tadi bahkan sangat tegas dikatakan bahwa dikatakan seorang guru apabila sudah tersertifikasi dan dengan sertifikasi dimaksud merupakan jaminan adanya remunerasi pada guru. Ketiga hal ini, kualifikasi, sertifikasi dan remunerasi merupakan kunci

untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas guru menyumbang sekitar 30% (tiga puluh persen) terhadap mutu pendidikan sementara 50% (lima puluh persen) bergantung kepada anak itu sendiri. Sumbangan guru terhadap kualitas itu sangat signifikan dibanding pada perbaikan sarana dan prasarana atau pemenuhan buku dan alat bantu belajar mengajar. Kondisi pemberdayaan dan penataan guru cenderung agar terabaikan di Kota Medan.



Grafik 2.5 Guru yang memenuhi kualifikasi S-1

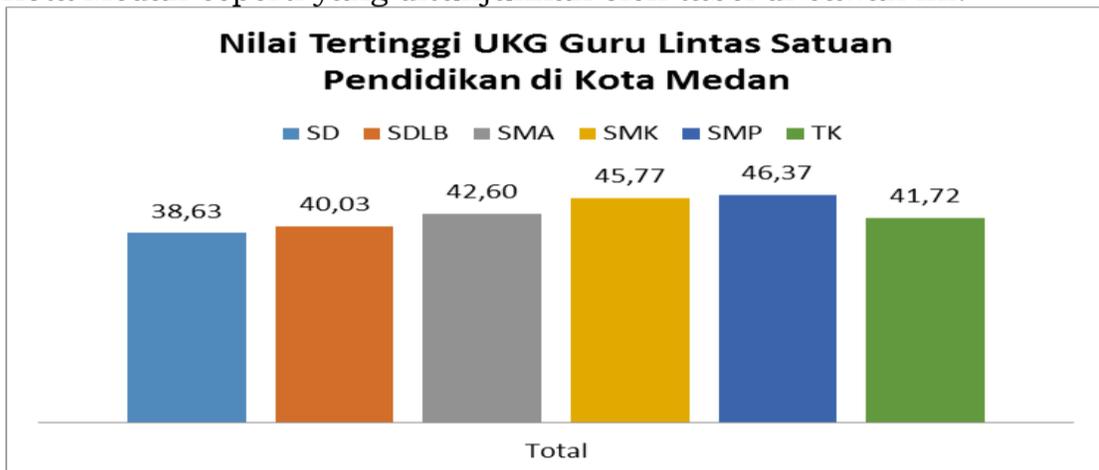
Salah satu isu yang krusial berkaitan dengan mutu guru terlihat pada kemampuan guru berdasarkan data UKG (Uji Kompetensi Guru) yang sudah dilaksanakan semenjak tahun 2012. Data UKG merupakan data dari hasil Uji kompetensi guru (UKG). UKG itu sendiri dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. UKG wajib diikuti semua guru dalam jabatan baik guru PNS maupun bukan PNS. Pelaksanaan UKG melibatkan berbagai instansi antara lain BPSDMPK-PMP, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, data UKG ini dipandang sangat penting karena akan dapat selalu diakses, merupakan data resmi tentang kompetensi guru yang penyelenggaraannya bersifat nasional, dan termutakhirkan karena rutin dilaksanakan setiap tahun.

Kementerian Pendidikan menyelenggarakan UKG dimaksud untuk dapat memperoleh peta penguasaan kompetensi guru. Lebih lanjut disebutkan bahwa hasil UKG akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Hasil UKG difokuskan untuk identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional.

UKG mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (*subject matter*) dan pedagogik dalam domain content. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

Pendekatan yang digunakan adalah tes penguasaan *subject matter* atau Bidang Studi berdasarkan atas latar belakang pendidikannya. Instrumen tes untuk guru bidang studi pada jenjang SMP, SMA, dan SMK tidak dibedakan karena secara akademik guru wajib menguasai kompetensi dasar lulusan sarjana (S-1) sesuai bidang studi yang ditempuhnya. Uji kompetensi pedagogik menggunakan pendekatan inti sel dari varian dari kompetensi pedagogik dimaksud.

Berdasarkan atas data UKG dimaksud tampak kualitas guru di Kota Medan seperti yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:



Grafik 2.6 Rata-rata Nilai UKG Guru di Kota Medan Lintas Satuan Pendidikan

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dapat dilihat komponen pedagogik dan profesional. Selanjutnya setiap komponen diberikan tanda (kode) P1 sd. P5 untuk komponen Pedagogik dan Pr. 1 sd. Pr. 3 untuk komponen Profesional.

Adapun komponen bidang pedagogik, meliputi:

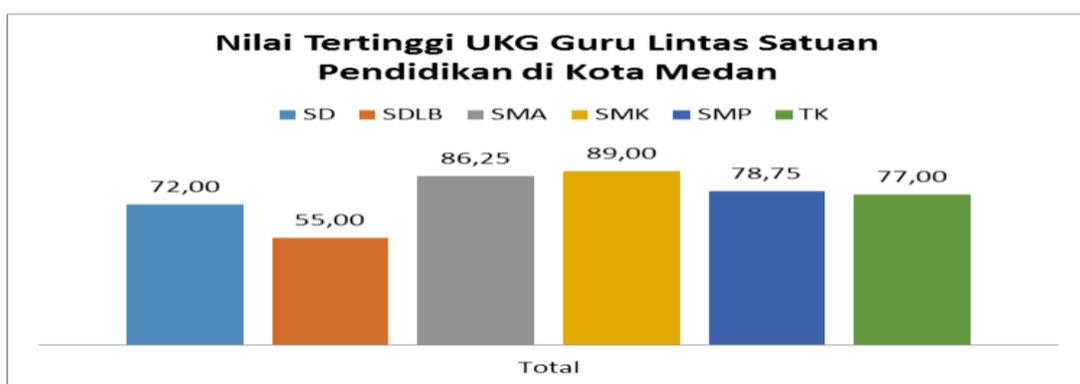
1. kompetensi mengenal karakteristik dan potensi peserta didik (P1);
2. kompetensi penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif (P2);
3. kompetensi dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum (P3);
4. kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif (P4); dan
5. kompetensi dalam menilai dan mengevaluasi pembelajaran (P5)

Sedangkan komponen profesional mencakup:

1. kompetensi guru dalam penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan (Pr. 1);
2. kompetensi guru dalam mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif (Pr. 2);
3. konsistensi penguasaan materi guru antara content dengan performance (Pr. 3):
 - teks, konteks, dan realitas;
 - fakta, prinsip, konsep, dan prosedur; dan

- ketuntasan tentang penguasaan filosofi, asal-usul, dan aplikasi ilmu

Berdasarkan atas data UKG di atas, guru yang paling tinggi nilainya adalah guru SMP, Rata-Rata 46,37 (empat puluh enam koma tiga puluh tujuh), disusul guru SMK 45,77 (empat puluh lima koma tujuh puluh tujuh), dan Guru SMA 42,60 (empat puluh dua koma enam puluh). Berdasarkan atas hal tersebut, maka isu yang dapat diangkat adalah perlunya pelatihan guru pada guru-guru SD di Kota Medan. Paling tidak proporsi untuk pelatihan guru SD. Jenis pelatihan yang perlu diberikan kepada guru SD adalah pada Pedagogik dan Profesional. Berdasarkan atas data UKG tampak yang perlu dilatih adalah pada P1, P2 dan P5. Sementara itu dalam bidang professional tampak kelemahan guru merata pada semua bidang studi. Oleh karena itu diperlukan pelatihan guru bidang studi (1) Bahasa Indonesia, (b) Matematika, (c) IPA, (d) IPS), dan (e) PPKn.



Grafik 2.7 Nilai Tertinggi UKG Lintas Satuan Pendidikan

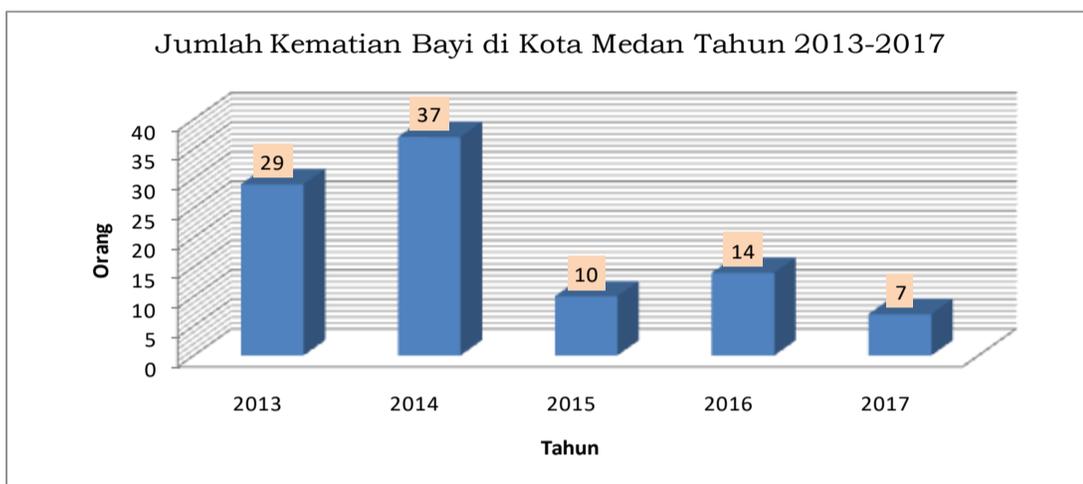
Tetapi jika dilihat dari nilai tertinggi yang diperoleh guru di Kota Medan adalah yang memperoleh nilai tertinggi berturut-turut, SMK dengan nilai 89,00 (delapan puluh sembilan), SMA nilai tertinggi 86,25 (delapan puluh enam koma dua puluh lima), dan SMP dengan nilai tertinggi 78,25 (tujuh puluh delapan koma dua puluh lima). Berdasarkan atas hasil ini dapat diambil kebijakan bahwa pelatihan terhadap guru SD perlu dilakukan secara intensif, karena dilihat dari individu guru nilai tertinggi maupun dilihat dari rata-rata guru bahwa guru SD cukup rendah perolehan hasil UKGnya. Demikian juga halnya dengan guru SDLB perlu diambil kebijakan untuk meningkatkan kemampuan mereka melalui program-program pelatihan dan penyegaran.

C. Kesehatan

Tingkat status kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah umumnya dinilai dari beberapa aspek seperti angka kematian, angka kesakitan dan angka harapan hidup. Angka kematian masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberikan gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dan dapat juga digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan melakukan survei dan penelitian. Indikator angka kematian yang paling penting dinilai berdasarkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka-angka tersebut juga menggambarkan tingkat

pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan sistem kesehatan di wilayah tersebut.

Kasus kematian bayi sampai saat ini masih dijumpai di Kota Medan. Selama tahun 2013-2017, setiap tahunnya hampir terjadi kasus kematian bayi, terkecuali pada tahun 2014. Jumlah kematian bayi selama periode tersebut juga mengalami naik turun, yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.8 Jumlah kematian bayi 2013-2017

Kematian ibu melahirkan di kota Medan selama 2013-2017 setiap tahun juga terjadi bahkan mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2013-2014 jumlah kematian ibu masing-masing sebanyak 4 (empat) orang. Lalu di tahun 2015-2016 masing-masing sebanyak 6 (enam) orang dan pada tahun 2017 jumlah tersebut berkurang menjadi 5 (lima) orang.

Tabel 2.12
Angka Kematian Ibu Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Angka Kematian Ibu (jiwa)
2013	4
2014	4
2015	6
2016	6
2017	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan

Usia harapan hidup di kota Medan pada periode 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 usia harapan hidup penduduk kota Medan adalah 72,37 (tujuh puluh dua koma tiga puluh tujuh) tahun dan meningkat menjadi 72,70 (tujuh puluh dua koma tujuh puluh) tahun pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan penduduk kota Medan semakin baik setiap tahunnya.

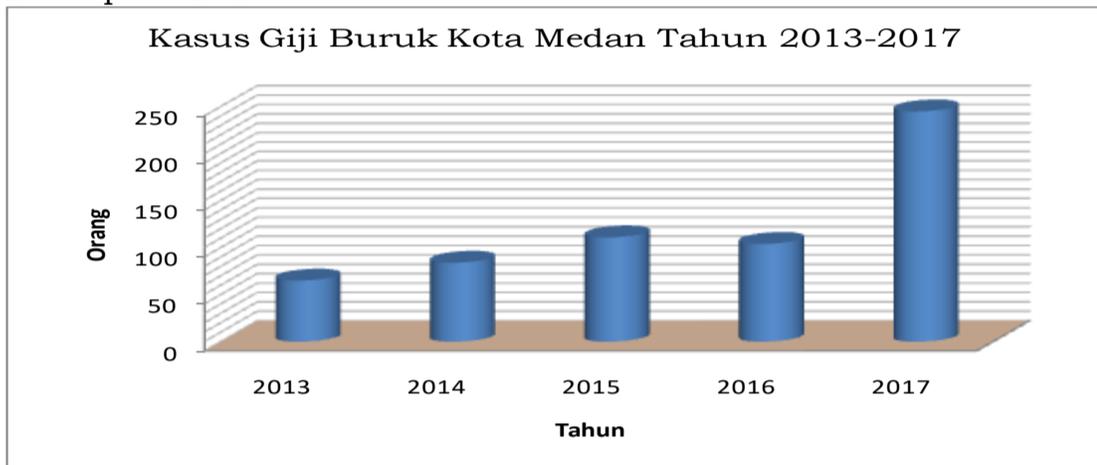
Tabel 2.13
Angka Harapan Hidup Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Usia Harapan Hidup
2013	72,37
2014	72,54

2015	72,68
2016	72.68
2017	72.70

Sumber: BPS Kota Medan

Terkait gizi masyarakat, jumlah kasus gizi buruk di Kota Medan selama 2013-2017 mengalami pasang surut. Sempat mengalami penurunan pada 2016, namun mengalami kenaikan kasus pada 2017.



Grafik 2.9 Kasus gizi buruk 2013-2017

D. Penduduk Miskin

Sebagaimana diketahui, kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional, yang fenomenanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi lingkungan. Secara umum kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, rendahnya akses terhadap pelayanan publik, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, hal ini lah merupakan salah satu tantangan pembangunan kota saat ini dan saat mendatang. Oleh karena itu sampai tahun 2017 Pemerintah Kota Medan dalam pengentasan kemiskinan melakukan berbagai program di antaranya: Program PNPM Perkotaan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang diintegrasikan dengan JKN, Pemberian Makanan Tambahan untuk Gizi Buruk dan Gizi Kurang, Program Peningkatan Keterampilan untuk UMKM, Program Pendidikan bagi Panti Asuhan di PAUD, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pembangunan MCK, Penyediaan Air Bersih dan Sistem Sambungan dan Air program sanitasi, dan lain-lain. Adapun realisasi program dalam mengentaskan kemiskinan pada tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. Program PNPM Perkotaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan atau PNPM Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan merupakan program pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan. PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk mencapai target-target yang telah disepakati dalam Millennium Development Goals (MDGs) hingga tahun 2015. Oleh karena itu tujuan utama dari PNPM Mandiri adalah menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja dalam kerangka pengentasan kemiskinan dan pencapaian target MDGs. Adapun alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Program Pengentasan Kemiskinan melalui Intervensi Program PNPM Perkotaan Tahun 2013-2015 ditunjukkan pada Tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14
Program PNPM Kota Medan Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah		Alokasi BLM (Rp Milyar)
	Kecamatan	Kelurahan	
1	2	3	4
2013	21	149	11.71
2014	21	149	42.36
2015	21	149	6.31

Dari data Tabel 2.14 nampak bahwa pada tahun 2015 alokasi BLM mengalami penurunan sebesar 36,05 milyar jika dibandingkan tahun 2014. Penurunan alokasi BLM pada tahun 2015 disebabkan dialihkannya alokasi dana PNPM Mandiri pada 2015 kepada alokasi dana untuk mendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, walaupun PNPM Mandiri Perkotaan tetap berjalan yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan program 100% (seratus persen) akses air bersih, 0% (nol persen) permukiman kumuh dan 100% (seratus persen) akses sanitasi. Penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan, sebagian besar digunakan untuk membangun akses transportasi/ jalan, kegiatan kesehatan, pendidikan, dan termasuk dalam bentuk modal usaha kegiatan ekonomi kelompok-kelompok UKM-Mikro di 21 (dua puluh satu) kecamatan atau 149 (seratus empat puluh sembilan) kelurahan setiap tahunnya. Manfaat lain program ini antara lain penyediaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan/kecamatan.

2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Tujuan pelaksanaan program JKN adalah : (1) terselenggaranya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien, (2) Meningkatkan cakupan masyarakat tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan Rumah Sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Setiap peserta JKN berhak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat. Pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Kota Medan telah diintegrasikan dengan

BPJS. Kebijakan penyaluran dana dilakukan langsung kepada pemberi pelayanan kesehatan baik kepada Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan. Jumlah peserta JKN dan alokasi dana tahun 2013-2017 yang sudah diintegrasikan tersebut ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.15
Program JKN Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Program Pengentasan Kemiskinan	
	Peserta JKN	Alokasi (Rp Milyar)
1	2	3
2013	453.437	49.40
2014	453.437	49.40
2015	253.735	84.70
2016	253.174	70.03
2017	253.724	70.03

Sumber :Dinas Kesehatan Kota Medan.

Dari data Tabel nampak bahwa alokasi dana program pengentasan kemiskinan melalui intervensi Program JKN pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 35.3 milyar jika dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan alokasi anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2017, diharapkan agar setiap peserta JKN mendapat kepastian jaminan yang baik dan sejahtera yang sesuai dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas. Dengan terintegrasinya program JKN dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah pada masyarakat miskin dengan harapan semakin meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan dengan titik beratnya pada upaya peningkatan kualitas menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif hidup dan pencegahan penyakit, selain pengobatan dan pemulihan.

3. Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga miskin dan rentan. Dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Adapun implementasi program pengentasan kemiskinan melalui intervensi program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Kota Medan tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Program Bantuan Pangan Non Tunai/ Beras Untuk Masyarakat
Miskin (RASKIN) Tahun 2013-2017

Tahun	Program Raskin	
	Jumlah RTS	Jumlah Beras (ton)/Rp
1	2	3
2013	73.110	1.164.810
2014	73.110	1.096.650
2015	73.110	1.960.650
2016	73.110	1.960.650 kg
2017	73.110	Rp 106.151.760.000,- BPNT

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Medan.

Penyelenggaraan program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi. Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Program Raskin bermanfaat: (1) Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, (2) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS, (3) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, (4) Stabilisasi harga beras di pasaran, (5) Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp1.600,00/kg, dan menjaga stok pangan nasional, (6) Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS)

Pemerintah Kota Medan sampai tahun 2015 masih menyelenggarakan program JPKMS dengan tujuan meningkatkan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kelompok sasaran program kesehatan ini adalah anggota masyarakat yang belum dapat dicakup oleh program-program pelayanan asuransi kesehatan lainnya yang telah ada. Program pelayanan kesehatan melalui JPKMS diberikan kepada pelayanan kesehatan di tingkat dasar (Puskesmas) maupun rujukan (Rumah Sakit). Pada Tabel berikut nampak bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kota Medan tetap menyelenggarakan program JPKMS dengan jumlah penduduk yang dilayani dan alokasi anggaran yang sama dengan tahun 2014 yakni jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 354.955 (tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) orang dengan alokasi biaya sebanyak Rp4.88 (empat koma delapan delapan) milyar, dengan harapan masyarakat mendapatkan peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar, betul-betul tepat sasaran, dan diyakini masyarakat miskin sepenuhnya telah terjamin mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak terjadi diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap rakyat miskin di Kota Medan.

Tabel 2.17
Program Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS)
Tahun 2013-2015

Tahun	Program JPKMS	
	Jumlah Penduduk yang dilayani	Alokasi (Rp Milyar)
1	2	3
2013	55.875	49.401
2014	55.875	49.401
2015	354.855	4.88

5. Program Pembinaan Koperasi dan UMKM

Program pemberdayaan koperasi UMKM diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro dalam rangka memperkuat usaha-usaha masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM untuk menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan dan penguatan daya saing perekonomian daerah. Untuk lebih jelasnya, program pembinaan koperasi dan UMKM pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut ini:

Tabel 2.18
Program Peningkatan Keterampilan untuk UMKM
dan Realisasi Pembiayaan di Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	No	Program Kemiskinan	Realisasi (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]
2013	1	Pelatihan Ketrampilan usaha Home Industry di Kecamatan	56.923.100
	2	Pelatihan Keterampilan Tata Boga	83.768.300
	TOTAL		140.691.400
2014	1	Pelatihan Kerajinan Batik	125.000.000
	2	Peningkatan Keterampilan Home Industri di Kecamatan	100.000.000
	3	Pelatihan Bordir	150.000.000
	4	Pelatihan Keterampilan Tata Boga	150.000.000
	TOTAL		525.000.000
Tahun 2015			
2015	1	Pelatihan Home Industri	133.595.000
	2	Pelatihan Akuntansi bagi Pelaku UMKM	80.775.000
	3	Pelatihan Bordir	111.632.000
	4	Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomi	107.607.500
		Pelatihan keterampilan tata Boga	112.520.000
	TOTAL		546.129.500
2016	1	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya dengan rincian kegiatan: (1) Pelatihan Jahit Menjahit2 angkatan di Kel. Sempakata dan Ladang Bambu, (2) Pelatihan Melukis di atas Kain di Kel. Helvetia Timur dan Kel. Sunggal, (3)	669.570.000

		Pelatihan pembuatan Souvenir/ Cendramata di Kel. Sililas dan Sei Seekambing, (4) Pelatihan Pengolahan Barang Bekas di Kel. Belawan dan Belawan Bahari	
	2	Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan di Kel. Terjun dan Kel Paya pasir	148.265.000
	TOTAL		817.835.000
2017	1	Pelatihan keterampilan pemanfaatan aneka limbah menjadi produk bernilai ekonomis yang dihadiri oleh 40 peserta dari kelurahan pada tanggal 4 s.d 10 September 2017 di Kelurahan Tanjung Mulia	91.724.500
	2	Keterampilan usaha home industri di kecamatan yang dihadiri oleh 30 peserta pada tanggal 2 s.d 7 September 2017 bertempat di Kantor Camat Medan Marelan	91.068.000
	TOTAL		182.792.500

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.

Dari Tabel di atas diketahui sampai tahun 2017 Pemerintah Kota Medan tetap menjalankan program peningkatan keterampilan yang diselenggarakan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Melalui berbagai program pemberdayaan koperasi UMKM yang dilaksanakan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan keterampilan (*skills*) dan kemampuan (*capabilities*), seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi secara berkelanjutan. Program ini adalah proses membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan melakukan perubahan khususnya dalam menghadapi pasar bebas Asean yang telah diberlakukan sejak tahun 2015, termasuk melalui program-program lainnya.

Walaupun program-program pembinaan terhadap koperasi dan UMKM terus dilakukan, namun harus diakui masih belum optimal, mengingat jumlah koperasi dan UMKM yang ada cenderung cukup besar sehingga memerlukan berbagai program fasilitasi dan pembinaan yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya terhadap kebutuhan prasarana dan sarana pasar (pusat-pusat penjualan) bagi produk-produk UMKM guna meningkatkan akses pasarnya, termasuk promosi terpadu.

6. Program Pendidikan Bagi Panti Asuhan di PAUD

Pendidikan nonformal merupakan suatu program yang dekat dengan masyarakat dimana mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini dapat menjadi jawaban bagi penyelenggaraan pendidikan nonformal maupun informal bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang ada di setiap lingkungan masyarakat. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dari sisi pendidikan bagi PAUD di panti asuhan yang dilakukan semuanya bersumber dari APBD. Program kemiskinan di bidang PAUD ini sampai tahun 2015 dilakukan dalam bentuk

Bantuan Perpustakaan bagi Panti Asuhan dan Pelayanan Anak Usia Dini (PAUD). Adapun Pelaksanaan Program Pelatihan bagi Panti Asuhan di PAUD dan realisasi biayanya di Kota Medan pada tahun 2013-2017 dapat diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.19
Program Pendidikan Bagi Panti Asuhan di PAUD di Kota Medan
Tahun 2013-2017

Tahun	Program/Kegiatan	Sasaran	Volume (eks)	Realisasi (Rp)
1	3	4	5	6
2013	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan			
	Layanan terpadu pada per Pustakaaan pada Panti Asuhan dan Rumah Singgah	Panti Asuhan	1.500	133.288.500,-
	Layanan Anak usia Dini Pada PAUD	10 PAUD	1.500	113.292.500,-
2014	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan			
	Layanan terpadu pada per Pustakaaan pada Panti Asuhan dan Rumah Singgah	3 Panti Asuhan	1.500	48.000.000
	Layanan Anak usia Dini Pada PAUD	5 PAUD	1.309	125.000.000
2015	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan			
	Layanan terpadu pada per Pustakaaan pada Panti Asuhan dan Rumah Singgah	3 Panti Asuhan	1500	99.400.000
	Layanan Anak usia Dini Pada PAUD	5 PAUD	2.000	139.300.000
2016	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan			
	Layanan terpadu pada per Pustakaaan pada Panti Asuhan dan Rumah Singgah	3 Panti Asuhan/ Rumah Singgah	350 Eks (@ 450 Eks, 1 Unit Rak)	110.600.000
	Layanan Anak usia Dini Pada PAUD	5PAUD	3.000 Eks (@ 500 Eks, 1Unit Rak, 1 Set Alat Peraga)	191.069.000
2017	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan			
	Layanan terpadu pada per Pustakaaan pada Panti Asuhan dan Rumah Singgah	3 Panti Asuhan/ Rumah Singgah	350 Eks (@ 450 Eks, 1 Unit Rak)	67.297.500
	Layanan Anak usia Dini Pada PAUD	6 PAUD	3.000 Eks (@ 500 Eks, 1Unit Rak, 1 Set Alat Peraga)	132.111.000

Sumber :Perpustakaan Kota Medan

Dari data Tabel 2.19 di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Medan sampai tahun 2017 tetap mengalokasikan anggaran

untuk pendidikan di Pantai Asuhan di PAUD dengan harapan terpenuhinya tujuan pengembangan Anak Usia Dini yakni (a) kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; serta (b) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD, dengan harapan dapat menambah pengetahuan tentang cara menstimulasi perkembangan sosial emosional anak usia 3-4 tahun. Hal ini disebabkan setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

7. Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan, ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah: (1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, (2) Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, dan (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota RTSM/Keluarga Sangat Miskin (KSM). Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas. PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program, yaitu: (i) menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan dan menghadiri kelas minimal 85% (delapan puluh lima persen) hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dan (ii) melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan bagi anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas. Untuk lebih jelasnya, realisasi jumlah RTSM dan jumlah dana bantuan PKH pada tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.20
Realisasi Jumlah RTSM dan Jumlah Dana Bantuan PKH
di Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah RTSM (KK)	Jumlah Dana Bantuan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
2013	17.331	23.880.007.500	21 Kecamatan
2014	17.335	28.472.158.000	21 Kecamatan
2015	16.309	30.108.551.250	21 Kecamatan
2016	29.309	35.515.171.401	21 Kecamatan
2017	29.036	14.518.000.000	21 Kecamatan

Sumber :PKH Kota Medan.

Berdasarkan atas data tabel di atas diketahui bahwa jumlah RTSM yang mengikuti program PKH di Kota Medan cenderung fluktuatif, demikian juga alokasi biayanya, namun kepesertaannya tetapi tersebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan program ini relatif cukup berhasil, terutama guna meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat terutama dari kelompok RTSM.

8. Pembangunan MCK, Penyediaan Air Bersih dan Sistem Sambungan Air Limbah

Salah satu kawasan yang menjadi kantong kemiskinan adalah kawasan Medan bagian Utara, khususnya di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli serta Medan Marelan. Sebahagian wilayah kecamatan tersebut adalah daerah pantai/pesisir yang salah satu fenomena alamnya adalah keterbatasan sumber air bersih/minum. Untuk itu, baik melalui APBD murni maupun kerjasama dengan pihak ketiga (PDAM Tirtanadi, Jaring Kesehatan Masyarakat (JKM) dan USAID) telah diselenggarakan program pembangunan MCK, penyediaan air bersih, pembangunan sarana sanitasi dan sistem sambungan air limbah pada kawasan-kawasan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui program ini, masyarakat yang umumnya merupakan kelompok masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan air bersih, sekaligus memperbaiki sanitasi lingkungannya secara lebih baik. Adapun realisasi program pembangunan MCK, penyediaan Air Bersih dan sistem sambungan Air Limbah di Kota Medan tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.21
Program Pembangunan MCK, Penyediaan Air Bersih dan Sistem Sambungan Air Limbah di Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	No	Program	Alokasi Dana
1	2	3	6
2013	1	Penyediaan Air Bersih, Pemasangan pipa	9.325.667,000,-

		Distribusi, Sumur Bor Dangkal Sumur Bor Dalam	
	3	Pembangunan MCK Komunal, Pembangunan MCK, House Connection	2.801.469.000,-
	4	Sistem Sambungan Air Limbah	733.152.855,-
2014	1	Penyediaan Air Bersih Pemasangan pipa Distribusi Sumur Bor Dangkal Sumur Bor Dalam	746,030,000 368,460,000 6,712,490,000
	2	Pembangunan MCK Komunal Pembangunan MCK House Connection	959,922,500 8,307,120,000
	3	Pembangunan WC Terapung	5,915,995,000
2015	1	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Cabang Labuhan, Amplas, dan Padang Bulan	3,022,000,000
	2	Pembuatan MCK Komunal dan Treatment	1,022,960,000
	3	Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah House Connection (Zona 9) Kecamatan Medan Perjuangan	7,215,800,000
	4	Pembuatan WC Terapung (Bio Filter) Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan	2,060,000,000
2016	1	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Cabang Labuhan, Amplas dan Padang Bulan	9.800.000.000
	2	Pembuatan MCK Komunal dan Treatment	1.500.000.000
	3	Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah House Connection (Zona 9) Kec. Medan Perjuangan	5.800.000.000
	4	Pembuatan WC Terapung (Bio Filter) Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan	4.600.000.000
2017	1	Pipa Distribusi Air Bersih untuk masyarakat Keca Medan Labuhan	1.141.700.000
	2	Pembuatan MCK Komunal Treatment	1.550.224.000
	3	Pembuatan Pipa Distribusi Air Limbah House Connection Zona 10 dan 11 Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Timur	7.813.700.000
	4	Pembuatan WC Terapung (Bio Filter)	-
	5	Pembuatan Pipa Distribusi Air Bersih MBR di Kecamatan Medan Selayang	1.144.614.000
	6	Pemasangan Pipa Distribusi Air Air Limbah di Zona I	1.440.940.000
	7	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Untuk MBR di Kecamatan Medan Tuntungan	1.140.102.000

Sumber: Bappeda Kota Medan.

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa beberapa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan diantaranya: pemasangan pipa distribusi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Cabang Labuhan, Amplas, dan Padang Bulan, pembuatan MCK komunal dan treatment, pemasangan pipa distribusi air limbah *house connection* (Zona 9) Kecamatan Medan

Perjuangan, pembuatan WC terapung (Bio Filter) Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan juga tetap dilakukan sampai 2017 di bidang fisik/lingkungan oleh Pemerintah Kota Medan.

Manfaat dari berbagai program yang dilaksanakan ini adalah untuk pengentasan kemiskinan dari pembangunan MCK, penyediaan air bersih dan sistem sambungan air limbah di Kota Medan adalah: (1) terlayannya kebutuhan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah, (2) masyarakat yang telah memiliki septictank terapung telah menggunakannya, sehingga lingkungan juga menjadi lebih bersih, (3) masyarakat telah menggunakan MCK komunal yang sudah dibangun, sehingga lingkungan menjadi lebih tertata dan sehat, dan (4) pencemaran lingkungan semakin berkurang karena air limbah rumah tangga tidak lagi tergenang di pekarangan rumah dan mencemari air tanah.

Berdasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan maka dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut berbagai tantangan yang muncul berhubungan dengan faktor struktural, kultural dan natural. Secara struktural faktor penghambat upaya menurunkan angka kemiskinan banyak disebabkan kebijakan-kebijakan nasional yang mempengaruhi dinamika makro ekonomi seperti: inflasi, laju pertumbuhan ekonomi yang progresif dan berkualitas. Secara kultural tantangan penurunan angka kemiskinan disebabkan kondisi-kondisi sosial budaya yang melekat pada kelompok masyarakat miskin, seperti: etos kerja yang rendah dan sikap-sikap membangun yang juga masih rendah, sedangkan faktor penghambat penurunan angka kemiskinan secara natural, disebabkan lapangan kerja yang masih terbatas, disamping pertumbuhan angkatan kerja yang relatif masih cukup tinggi dan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas pada kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan baik melalui program pemerintah maupun pemerintah kota harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk semaksimal mungkin dapat menurunkan jumlah masyarakat miskin yang masih ada melalui program-program yang berhubungan dengan faktor kultural dan natural.

Berbagai program keluaran dan *outcome* program penanggulangan kemiskinan di atas menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2013-2017 berjalan relatif efektif. Walaupun dari sudut pandang ekonomi pembangunan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama menurunkan tingkat kemiskinan.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Kesadaran warga masyarakat Kota Medan untuk mengakses Pendidikan Anak Usia Dini terhadap anak-anak mereka menunjukkan angka yang mengembirakan. Selama lima tahun terakhir terjadi kenaikan pada angka partisipasi PAUD dan terakhir pada tahun 2017 sebesar 80.01% (delapan puluh koma nol satu

persen). Tampaknya masyarakat Kota Medan dapat meningkatkan akses mereka terhadap PAUD dan hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Hal pertama karena adanya kesadaran masyarakat sebagai dampak dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan mengenai perlunya PAUD ini, baik melalui PAUD resmi yang dikelola Diknas dan Kemenag maupun PAUD yang dikelola oleh Dharma Wanita di setiap Kelurahan di Kota Medan. Dampak dari adanya perkembangan PAUD ini adalah semakin baiknya mutu masukan SD di Kota Medan. Anak-anak yang menjadi alumni PAUD tampak lebih siap untuk belajar dan bersosialisasi di kelas-kelas awal di SD.



Grafik 2.10 Perkembangan Anak Usia Dini

Kondisi pelayanan pendidikan di tingkat dasar dan menengah selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator antar lain Angka Putus Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AL), Angka Melanjutkan (AM), rasio guru-murid dan indikator lainnya. Siswa putus sekolah merupakan salah satu ancaman bagi kelangsungan pendidikan pada dewasa ini. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap pendidikan merupakan salah satu faktor timbulnya putus sekolah selain dari faktor eksternal lainnya. Keberhasilan Pemerintah Kota Medan menekan pertumbuhan putus sekolah dapat dilihat pada tingkat pendidikan dasar tingkat sekolah menengah. Pada tingkat sekolah dasar, jumlah siswa putus sekolah sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) pada tahun 2017, sedangkan pada tingkat SMP sederajat sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) di tahun 2017. Selanjutnya, pada tingkat SMA sederajat, angka putus sekolah di tahun 2016 sebesar 0,37% (nol koma tiga puluh tujuh persen). Secara keseluruhan angka putus sekolah untuk sekolah dasar dan tingkat SMP dibawah 1% (satu persen) dan hal ini sudah melampaui batas indikator nasional. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang dicapai pada lima tahun terakhir di Kota Medan.

Tabel 2.22
Perkembangan Indikator Pendidikan Kota Medan
Periode 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah (APS)					
SD/MI/Paket-A	0,07	0,06	0,09	0,05	0,03
SMP/MTs/Paket-B	0,32	0,25	0,15	0,11	0,20

SMA/SMK/MA/Paket-C	0,84	0,63	0,66	0,37	-
Angka Kelulusan (AL)					
SD/MI/Paket-A	99,99	99,99	99,99	99,99	100
SMP/MTs/Paket-B	99,76	99,93	99,96	99,96	99,05
SMA/SMK/MA/Paket-C	99,91	99,88	99,92	99,92	-
Angka Melanjutkan (AM)					
dari SD/MI ke SMP/MTs	102,93	107,93	106,42	106,74	108,69
dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	104,92	116,47	112,71	112,39	

Terkait dengan Angka Kelulusan, diketahui bahwa angka kelulusan pada tahun 2017 di tingkat SD/MI sudah mencapai 100.00% (seratus persen), di tingkat SMP/MTs sebesar 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dan tingkat SMA pada tahun 2016 sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen). Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Medan selama periode 2013-2017 berada di atas 100% (seratus persen). Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Medan selama periode 2013-2017 juga di atas 100% (seratus persen). Pada tahun 2017, AM dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 108,69% (seratus enam koma empat puluh dua persen), sedangkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 112.39% (seratus dua belas koma tujuh puluh satu persen).

Dalam penyediaan fasilitas pendidikan khususnya sekolah, pada tahun ajaran 2015/2016, jumlah TK sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) unit dengan jumlah siswa sebesar 22.424 (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat) siswa. Pada tingkat sekolah dasar, jumlah SD sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua) unit dengan jumlah siswa sebesar 263.156 (dua ratus enam puluh tiga seratus lima puluh enam) siswa di tahun ajaran 2015/2016.

Tabel 2.23

Jumlah Siswa di Kota Medan Berdasarkan atas Tingkatan dan Tahun ajaran

Jumlah Siswa	Tahun Ajaran			
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
TK	21.598	21.642	23.087	22.424
SD	268.792	264.804	267.571	263.156
SMP	117.075	118.467	120.512	119.061
SMA	69.207	70.272	71.267	73.951
SMK	60.166	57.862	56.766	56.276

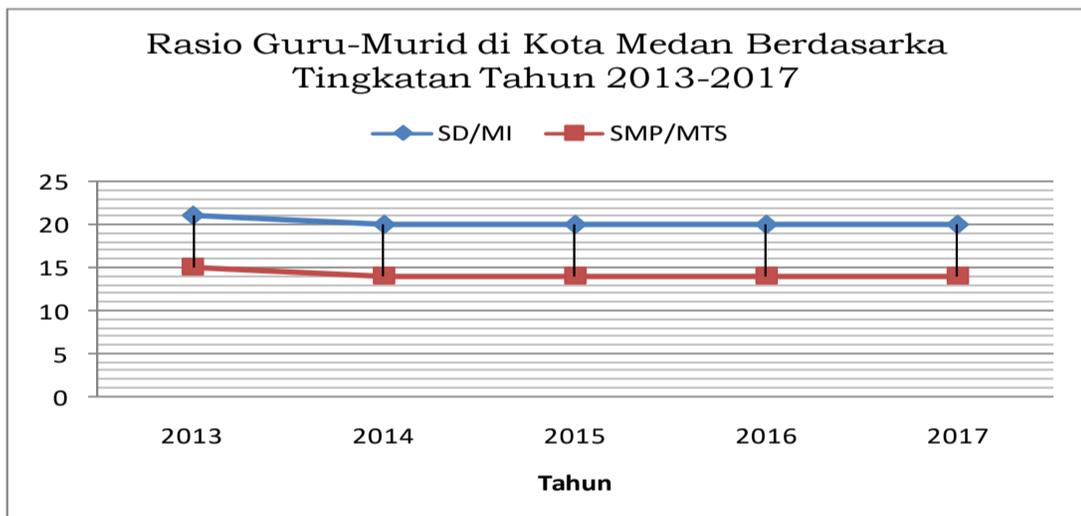
Pada tingkat SMP, di tahun ajaran 2015/2016 jumlah siswa sebanyak 119.061 (seratus sembilan belas ribu enam puluh satu) siswa dengan jumlah SMP 365 (tiga ratus enam puluh lima) unit. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) unit sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 130.227 (seratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh) siswa.

Tabel 2.24

Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Jenjang Pendidikan	Tahun		
	2013	2014	2015
SD			
Jumlah sekolah	824	832	832
Jumlah penduduk usia 6-12 tahun	254.115	261.788	266.122
Rasio	308	314	319
SMP			
Jumlah sekolah	355	356	366
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	112.633	115.387	109.974
Rasio	317	324	300
SMA/SMK			
Jumlah sekolah	344	362	361
Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	125.639	128.472	126.941
Rasio	365	354	350

Dalam aspek rasio murid dan guru, pada periode 2013-2015 menunjukkan angka yang relatif stabil. Pada tingkat SD/MI rasio murid-guru tahun 2013 sebesar 26:1 dan di tahun 2015 menjadi 24:1. Untuk tingkat SMP/MTs, di tahun 2013 rasio murid-guru sebesar 15:1 dan tahun 2015 menjadi 14:1. Sedangkan tingkat SMA/SMK/MA, di tahun 2013 rasionya adalah 12:1 dan menjadi 12:1 pada tahun 2015.



Grafik 2.11 Rasio Murid-Guru di Kota Medan Berdasarkan Tingkatan
Tabel 2.25
Jumlah guru menurut ijazah tertinggi

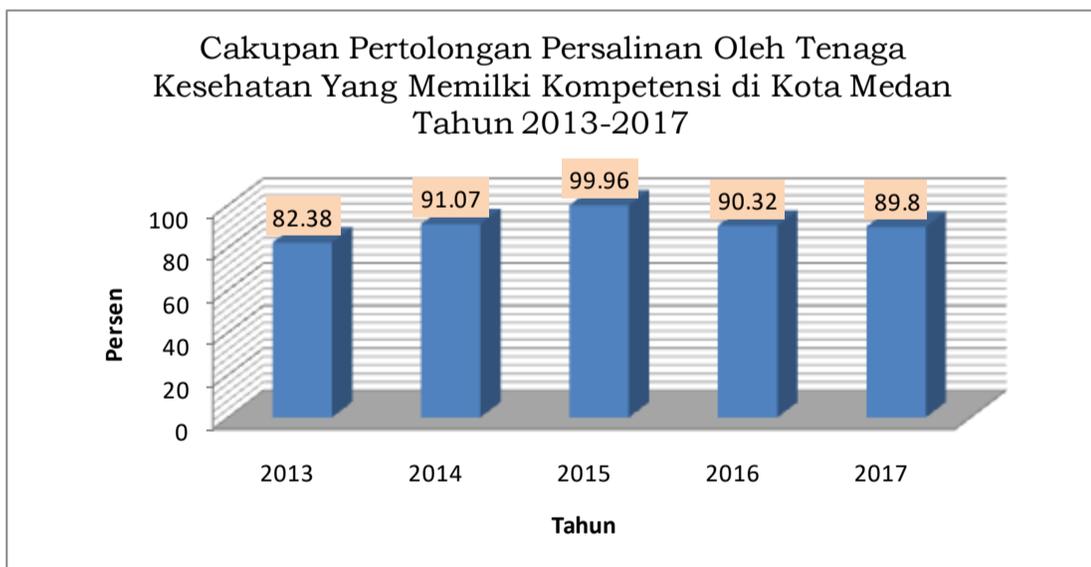
Jenjang Pendidikan Guru Sekolah	Tahun					
	2013		2014		2015	
	S-1	S-2/ S-3	S-1	S-2/S-3	S-1	S-2/ S-3
SD	9.822	122	9.980	131	11.015	139
SMP	7.567	304	7.360	638	7.561	340
SMA	5.309	935	5.267	689	5.063	652
SMK	4.029	257	4.397	245	5.059	652

Berdasarkan atas hasil evaluasi prasarana dan sarana pendidikan yang dimiliki Kota Medan baik yang dimiliki Pemerintah Kota Medan maupun swasta. Tantangan masa depannya adalah bagaimana menjadikan Kota Medan sebagai pusat pendidikan regional yang lebih maju di luar Pulau Jawa.

B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir dan batin menuju peradaban yang madani dalam menghadapi persaingan regional dan global. Pembangunan pelayanan kesehatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti pelayanan terhadap ibu hamil dan bayi, penanganan balita gizi buruk, penanganan penyakit TBC dan DBD serta indikator lainnya.

Sesuai dengan program *Making Pregnancy Safer* yang telah dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setiap persalinan hendaknya ditolong oleh tenaga kesehatan terampil. Meskipun di masyarakat peran dukun persalinan masih tetap dimanfaatkan terutama oleh masyarakat dengan sosial ekonomi rendah, namun dari tahun ke tahun terdapat peningkatan penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten khususnya oleh bidan disamping oleh dokter dan dokter kebidanan. Analisis data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Medan menunjukkan ada peningkatan yang optimal hingga pada tahun 2017, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2016.



Grafik 2.12 Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Medan Tahun 2013-2017

Dari diagram di atas dapat dilihat cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi juga meningkat jika dibanding dengan tahun 2013. Puncaknya adalah

pada 2015 mencapai angka 99,96% sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen).

Kematian akibat komplikasi kebidanan saat kehamilan, persalinan dan masa nifas merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap Angka Kematian Ibu (AKI). Penanganan komplikasi kebidanan ini harus dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi kebidanan. Sesuai dengan program *Making Pregnancy Safer* telah diisyaratkan ada tiga pesan kunci utama yaitu setiap persalinan ditolong oleh tenaga terlatih, setiap komplikasi kebidanan dan neonatus mendapat pelayanan yang adekuat dan setiap wanita usia subur mempunyai akses untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Analisis data tentang cakupan penanganan komplikasi kebidanan pada tahun 2013-2017 menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana pada periode tersebut seluruh komplikasi kebidanan telah mendapatkan penanganan definitif atau mencapai angka 100% (seratus persen).

Bayi merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi, terutama untuk umur kurang dari satu bulan. Upaya kesehatan untuk mengurangi resiko tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan mulai dari melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, hingga pelayanan kesehatan neonatus dan bayi. Pelayanan kesehatan ini meliputi pelayanan kesehatan neonatus dasar seperti tindakan resusitasi, pencegahan infeksi, pemberian ASI dini, pemberian Vitamin K, imunisasi, manajemen terpadu balita muda.

Hasil analisis cakupan kunjungan bayi di Kota Medan telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan sampai pada tahun 2017 yaitu rata-rata sebesar 95.78% (sembilan puluh lima koma tujuh puluh delapan persen), walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2014 dan 97 seperti terlihat pada diagram berikut:



Grafik 2.13 Perkembangan Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Medan Tahun 2013-2017

Angka Kematian Bayi (angka mortalitas maupun morbiditas) dapat bersumber dari penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah tersebut yaitu tuberkulosis, difteri, pertussis, tetanus, tetanus neonatorum, campak, dan hepatitis B. Melalui pemberian imunisasi dasar pada bayi, timbulnya masalah-masalah kesehatan pada bayi dapat ditekan serendah mungkin. Cakupan imunisasi dasar (*Universal Child Immunization*) ini meliputi pemberian imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Analisis data di Kota Medan telah menunjukkan pencapaian cakupan *Universal Child Immunization (UCI)* yang memuaskan hingga mencapai 100% (seratus persen) dalam 5 (lima) tahun terakhir ini. Cakupan kelurahan yang telah melakukan universal child immunization terhadap bayi sudah tertangani secara keseluruhan 100% (seratus persen).

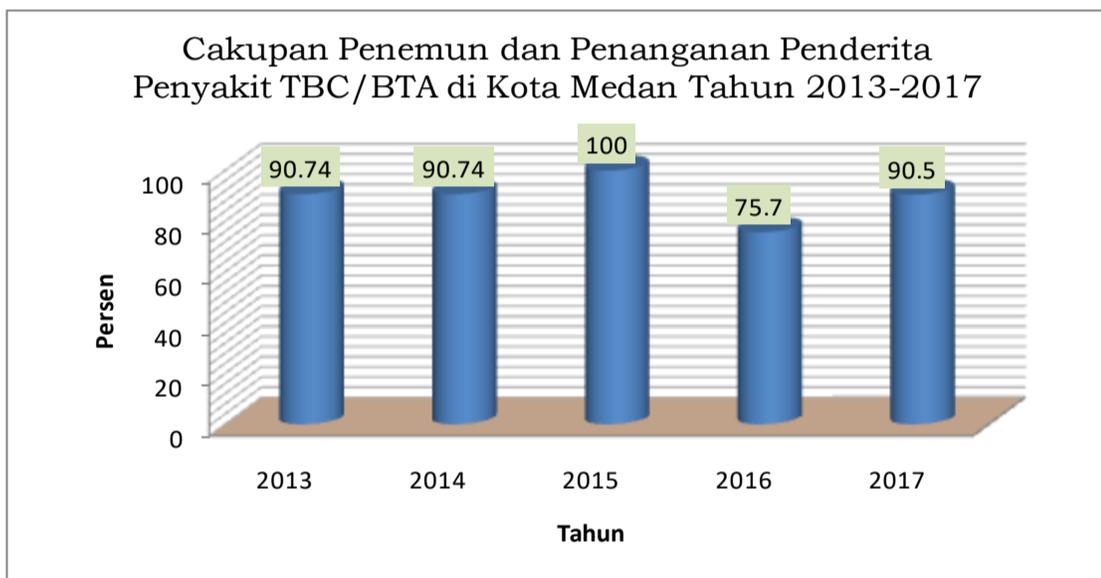
Terkait dengan perawatan balita gizi buruk, dipahami bahwa balita dengan gizi buruk dapat memberikan kontribusi bagi angka kematian dan angka kesakitan bayi. Pembangunan kesehatan suatu bangsa dimulai dengan menciptakan generasi yang sehat dan produktif, oleh karenanya penanganan dan perawatan balita gizi buruk penting untuk diprioritaskan. Seperti yang ditarget secara nasional program perbaikan gizi nasional yaitu menurunkan prevalensi gizi buruk dan kurang pada tahun 2017. Kota Medan sendiri telah mampu menangani kasus-kasus gizi buruk yang terjadi dan mendapatkan perawatan yang adekuat. Namun pencegahan agar jangan terjadi kasus-kasus gizi buruk harus lebih digiatkan lagi melalui program kesehatan ibu dan anak (KIA) di pelayanan-pelayanan kesehatan masyarakat. Analisis data cakupan perawatan gizi buruk di Kota Medan telah menunjukkan hasil yang optimal dalam 5 tahun terakhir ini (2013-2017), yaitu mencapai angka 100% (seratus persen). Artinya, seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapat perawatan di sarana kesehatan. Namun demikian perlu pencegahan agar kasus gizi buruk jangan sampai terjadi kembali dalam lima tahun ke depan.

Kondisi yang sama juga terjadi pada penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). DBD merupakan penyakit yang endemik di Kota Medan, artinya kasus atau penyakit DBD ini hampir yang selalu dijumpai sepanjang tahunnya di Medan. Penyakit DBD merupakan penyakit menular dan bersifat fatal yang bisa mengakibatkan kematian. Peran lingkungan dan perilaku masyarakat juga mempengaruhi berkembangbiaknya vektor penyakit DBD ini (nyamuk *Aedes*). Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Medan pada periode 2013-2017 sudah cukup memuaskan hingga mencapai 100% (seratus persen) dalam 5 (lima) tahun berturut-turut.

Meskipun bila terjadi KLB (kejadian luar biasa) DBD, masyarakat dapat berobat dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan. Namun upaya-upaya pencegahan DBD perlu ditingkatkan, seperti merubah perilaku masyarakat agar mau membersihkan lingkungannya, melaksanakan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Hal ini sangat membutuhkan kerjasama dan koordinasi berbagai sektor. Permasalahan dalam pencegahan DBD pada dasarnya tidak hanya pada masyarakat,

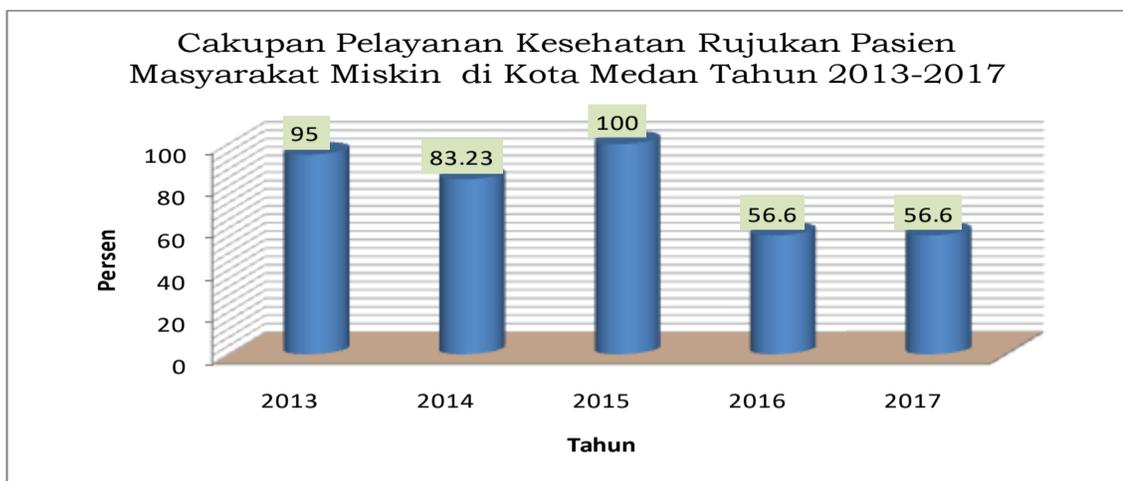
tetapi lebih pada iktikad berbagai sektor untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama.

Penyakit lainnya yang perlu mendapat perhatian bersama adalah tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan nasional, dimana prevalensi penyakit tuberkulosis di Indonesia menempati urutan ke empat tertinggi di dunia. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang mudah menular ke orang lain, disamping itu untuk pengobatannya pun diperlukan waktu yang relatif lama yaitu minimal 6-7 bulan. Oleh karena itu penanganan tuberkulosis, mulai pemeriksaan dahak (*sputum*) melalui pemeriksaan BTA (basil tahan asam) untuk menegakkan diagnosanya hingga pemantauan kepatuhan dalam pengobatannya harus menjadi proritas program pembangunan kesehatan di Kota Medan. Hasil analisis data periode tahun 2013-2017 menunjukkan upaya penanganan TB yang sudah semakin baik dalam pengobatan TB dan pemeriksaan BTA, dimana secara rata-rata telah mencapai angka 89,54% (delapan puluh Sembilan koma lima puluh empat persen).



Grafik 2.14 Perkembangan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Medan Tahun 2013-2017

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan mulai diberlakukan *Universal Health Coverage (UHC)* dimana semua penduduk seharusnya tercakup untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, melalui program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). Persentase penduduk miskin di Kota Medan yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada tahun 2017 sudah cukup mencapai angka 100% (seratus persen).



Grafik 2.15 Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Medan Tahun 2013-2017

Dari berbagai informasi di atas terlihat bahwa penanganan terhadap kesehatan inti masyarakat sudah semakin baik. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan di Kota Medan jumlahnya sudah cukup memadai. Saat ini di Kota Medan terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Puskesmas dan 41 (empat puluh satu) Puskesmas Pembantu serta 1406 Posyandu. Namun yang menjadi permasalahan adalah kualitas dan penyebaran sarana dan tenaga kesehatan tersebut. Pada beberapa tempat terdapat sarana dan tenaga kesehatan yang berlebih, tetapi di tempat lain mengalami kekurangan.

Tabel 2.26
Rasio dan Jumlah Fasilitas Kesehatan 2013-2017

Fasilitas Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Sakit					
Jumlah	78	79	79	79	79
Rasio per penduduk	27.378	27.735	27.982	31.355	31.368
Puskesmas/Pustu/Klinik/Balai Pengobatan					
Jumlah	827	827	827	827	827
Rasio per penduduk	2.582	2.649	2.673	2.995	2.996

Permasalahan lainnya adalah masih belum optimalnya kualitas sarana dan tenaga kesehatan yang tersedia. Untuk meningkatkan kualitas sarana dan tenaga kesehatan tersebut dibutuhkan komitmen secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta didukung oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan.

Berdasarkan atas hasil evaluasi di atas diketahui, untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Medan, perlu kebijakan untuk meningkatkan penyebaran dan kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, baik itu melalui peningkatan status Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas, dari Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit Tipe C, maupun pengembangan RSUD. Dr. Pirngadi Kota Medan.

C. Pekerjaan Umum

Pembangunan prasarana dan sarana merupakan bagian integral dari pembangunan kota dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Penyediaannya juga merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Prasarana dan sarana sosial ekonomi yang diprioritaskan adalah infrastruktur jalan/jembatan, transportasi, taman-taman kota (ruang terbuka hijau), pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman. Implementasi pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan kota ini relatif berjalan baik dengan fokus pada peningkatan berbagai kualitas infrastruktur kota, walaupun demikian belum sepenuhnya diwujudkan secara optimal. Jaringan transportasi darat terdiri dari jalan dan kereta api. Panjang jaringan jalan di Kota Medan pada tahun 2015 adalah 4.184,10 km (empat ribu seratus delapan puluh empat koma sepuluh kilometer), yang terdiri dari jalan negara sepanjang 170,70 km (seratus tujuh puluh koma tujuh puluh kilometer), jalan provinsi sepanjang 35,20 km (tiga puluh lima koma dua puluh kilometer) dan jalan kota sepanjang 3.978,20 km (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan kilometer). Di samping itu, Kota Medan juga memiliki jalan tol Balmera yang menghubungkan Belawan-Medan-Tanjung Morawa.

Tabel 2.27
Prasarana Jalan Kota Medan Berdasarkan atas
Kelas Jalan dan Penanggung Jawab Tahun 2013-2017

KelasJalan/Status	Negara (Km)	Provinsi (Km)	Kota (Km)	Jumlah (Km)
2013	170,70	35,20	3505,84	3711,74
2014	170,70	35,20	3734,56	3940,46
2015	170,70	35,20	3978,20	4184,10
2016	170,70	35,20	3978,20	4184,10
2017	170,70	35,20	3978,20	4184,10
Kelas I				
Kelas II	-	-	96.03	96.03
Kelas III	-	-	566.47	566.47
Kelas III A	-	-	762.58	762.58
Kelas III B	-	-	1.493,57	1.493,57
Kelas III C				
Tidak diperinci	-	-	587,19	587,19

Sumber: Dinas Bina Marga Kota Medan

Ketersediaan prasarana jalan menurut kelasnya menunjukkan perlunya pengaturan penggunaan jalan agar lalu lintas dapat diperlancar dengan memperhatikan jenis angkutan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terbesar dan dimensi kendaraan bermotor. Banyaknya kategori jalan kelas III menunjukkan bahwa secara umum jalan-jalan di Kota Medan hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 1.200 mm (seribu dua ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm (sembilan ribu milimeter) ukuran paling tinggi 3.500 mm (tiga ribu lima ratus milimeter) dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Tabel 2.28
Prasarana Jalan Kota Medan Berdasarkan Atas Kondisi

Tahun 2013-2017

Kondisi Jalan \ Status	Negara (Km)	Provinsi (Km)	Kota (Km)	Jumlah (Km)
2013	170,70	35,20	3505,84	3711,74
2014	170,70	35,20	3734,56	3940,46
2015	170,70	35,20	3978,20	4184,10
2016	170,70	35,20	3734,56	3940,46
2017	170,70	35,20	3978,20	4184,10
Baik	170,70	35,20	2956,71	3162,61
Sedang	-	-	177,49	177,49
Rusak	-	-	113,80	113,80
Rusak berat	-	-	38,69	38,69
Tidak diperinci	-	-	219,15	219,15

Sumber: Dinas Bina Marga Kota Medan

Tabel 2.29
Prasarana Jalan Kota Medan Berdasarkan Atas
Jenis Permukaan Tahun 2013-2017

Jenis Permukaan / Status	Negara (Km)	Provinsi (Km)	Kota (Km)	Jumlah (Km)
2013	170,70	35,20	3.505,84	3.711,74
2014	170,70	35,20	3.734,56	3.940,46
2015	170,70	35,20	3.978,20	4.184,10
2016	170,70	35,20	3.734,56	3.940,46
2017	170,70	35,20	3.978,20	4.184,10
Aspal	170,70	35,20	3.141,81	3.347,71
Tanah	-	-	63,20	63,20
Tidak diperinci	-	-	300,83	300,83

Sumber: Dinas Bina Marga Kota Medan

Jaringan jalan kereta api di Kota Medan pada dasarnya mempunyai pola mengikuti jalur jalan arteri yaitu menghubungkan kota-kota pusat kegiatan ekonomi dari Kota Medan ke kota lainnya di sekitar Kota Medan seperti Binjai, Rantau Prapat, Siantar, dan Tanjung Balai. Selain kondisi eksisting tersebut, pada tahun 2015, telah dilaksanakan peningkatan/pembetonan jalan di 27 (dua puluh tujuh) lokasi sepanjang 18,4 km (delapan belas koma empat kilometer) atau seluas 101.453 m² (seratus satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) serta pembangunan trotoar di 2 (dua) lokasi sepanjang 4,2 km (empat koma dua kilometer) atau seluas 6.921 m² (enam ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) dan jumlah saluran drainase yang terbangun sepanjang 89 km (delapan puluh sembilan kilometer), pemasangan *box culvert* sepanjang 4.566 m (empat ribu lima ratus enam puluh enam meter), pembangunan titi penduduk sepanjang 1.518 m (seribu lima ratus delapan belas meter), normalisasi sepanjang 8.843 m (delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga meter), pemasangan bendungan sementara 455 m (empat ratus lima puluh lima meter), pembangunan

bak kontrol 50 (lima puluh) buah, dan bronjong sepanjang 70 m (tujuh puluh meter).

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase merupakan salah satu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari perasana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.

Permasalahan drainase di Kota Medan dapat diuraikan sebagai berikut sebagian besar genangan yang tercatat di lokasi produktif, elevasi sungai Deli lebih tinggi dari daerah lainnya, *Over Load* debit Saluran Sulang Saling, Saluran Sei putih, Bamban, Batuan, dan Badra masih di dominasi dengan saluran alami, tidak ada aturan standar baku tentang saluran tertutup, Flood Way tidak dapat terlalu membantu masalah over debit drainase Kota Medan secara langsung, Tidak ada saluran drainase yang melintas pada rel kereta yang membujur dari Selatan ke Utara di Kota Medan, Belawan mengalami genangan akibat ROB dan sebab-sebab lainnya.

1. Drainase Makro

Drainase Makro yang berakaitan dengan Kota Medan ada 3 (tiga) sistem yaitu:

- a. Sistem Sungai Sunggal, dengan Drainase Makronya Sungai Sunggal;
- b. Sistem Sungai Deli, dengan Drainase Makronya Sungai Deli dan Sungai Barbura; dan
- c. Sistem Sungai Percut, dengan Drainase Makronya Sungai Percut.

Kondisi drainase Makro yang ada saat ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sistem Sungai Sunggal
 1. Sungai utama adalah Sungai Sunggal dengan lebar sekitar 25 m (dua puluh lima meter) dan kedalaman sekitar 5 m (lima meter);
 2. Merupakan sungai alam yang belum dilakukan penanganan secara sistemik; dan
 3. Sungai ini berapa kali mengalami banjir walaupun jarang, akan tetapi tahun 2011 mengalami banjir yang berdampak cukup luas.
- b. Sungai Deli
 1. Sungai utama adalah Deli dengan lebar 20-45 meter, kedalaman sungai 2,5-7,0 meter.
 2. Kedua sungai tersebut sering mengalami banjir yang berakibat cukup luas.

3. Telah dilakukan penanganan untuk Sungai Deli yaitu dengan pembuatan *Flood Way* yang dialirkan ke Sungai Percut akan terjadi masih sering terjadi banjir.
- c. Sungai Percut
 1. Sungai utama adalah Sungai Percut;
 2. Sungai ini telah dilakukan normalisasi sehubungan dengan pembuatan *flood way* pada Sungai Deli; dan
 3. Tidak pernah mengalami banjir yang meluas.

2. Drainase Mikro

Yang disebut drainase mikro pada perencanaan ini adalah drainase yang *cathment* areanya masih di dalam Kota Medan. Pada pekerjaan ini telah dilakukan pembuatan *cathment* area berdasarkan survey dan topografi yang ada. Selanjutnya drainase mikro dibagi menjadi beberapa Drainase Area untuk memudahkan dalam penanganannya. Pada studi ini Drainase Area (DA) dibagi menjadi 10 (sepuluh) DA sebagai berikut:

1. Sistem Sunggal;
2. Sistem Bandera;
3. Sistem Bamban;
4. Sistem Sei Putih;
5. Sistem Sungai Babura;
6. Sistem Sungai Deli;
7. Sistem Sungai Batuan;
8. Sistem Sulang Saling;
9. Sistem Percut; dan
10. Sistem Belawan.

Permasalahan Jalan dan Jembatan:

- a. kondisi jaringan jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan penanganannya dan perawatannya;
- b. terdapatnya penyempitan alur (*bottleneck*) akibat beberapa jembatan di kota medan;
- c. pola hirarki kelas dan fungsi jalan belum tertata dengan baik; dan
- d. rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan jalan dan jembatan.

Permasalahan Saluran Drainase:

- a. meluasnya lahan kritis di Daerah Hulu, Tengah Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Belawan yang disebabkan oleh Kabupaten/Kota terkait tidak konsekuen melaksanakan konsep tata ruangnya;
- b. berkurangnya daerah resapan akibat adanya proses penetrasi;
- c. mengecilnya penampang basah akibat pendangkalan/pelumpuran.
- d. rendahnya penegakan *law enforcement* (sanksi terhadap pelanggaran tata ruang dan garis sempadan);
- e. saluran drainase banyak tersumbat akibat sampah;
- f. penanganan banjir masih partial; dan
- g. minimnya peran serta masyarakat untuk pemeliharaan drainase di lingkungannya.

Kondisi dan kemampuan drainase eksisting yang tidak/kurang memadai dalam menampung dan menyalurkan limpasan (*run off*) air

hujan merupakan salah satu faktor utama selain faktor alam yang dapat menyebabkan banjir. Informasi ini diperoleh melalui kegiatan lokasi drainase eksisting.

D. Perumahan

Sampai akhir Tahun 2017, jumlah rumah layak huni yang ada di Kota Medan tercatat sekitar 97,79% (sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh Sembilan persen), sehingga ada 2,21% (dua koma dua puluh satu persen) rumah tinggal dalam keadaan tidak layak huni. Rumah yang tidak layak huni ini mengakibatkan munculnya kawasan permukiman kumuh di Kota Medan yang diperkirakan mencapai 0,68% (nol koma enam puluh delapan persen) dari luas wilayah Kota Medan yang terdiri dari 11,706 (sebelas ribu koma tujuh ratus enam) unit rumah atau 2,71% (dua koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah rumah yang ada di Kota Medan. Kawasan permukiman kumuh tersebut tersebar di 145 (seratus empat puluh lima) kelurahan, dimana pada umumnya berada pada bantaran sungai dan rel KA terutama di pusat kota.

Berdasarkan atas hasil analisis RTRW Kota Medan 2011-2031 diperkirakan kebutuhan lahan bagi perumahan sampai tahun 2031 untuk Kota Medan adalah 110.738.040 m² (11.074 Ha) yang terdiri atas 3.592 Ha kavling rumah kecil (359.150 unit), 4.489 Ha kavling rumah sedang (179.575 unit), serta 2.993 Ha kavling rumah besar (59.858 unit). Berdasarkan atas pendataan pembangunan perumahan oleh pihak swasta, diperoleh lokasi pertumbuhan perumahan ada pada 4 (empat) kecamatan. Lokasi perumahan tersebut tersebar pada Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Barat, Medan Johor, dan Medan Denai. Berdasarkan 4 kecamatan tersebut terdapat lebih 80 (delapan puluh) perumahan yang tersebar dalam lokasi berbeda.

Kebutuhan sarana prasarana permukiman terdiri atas penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan berupa penyediaan sanitasi dasar yang layak serta pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan. Proporsi penduduk Kota Medan yang memiliki akses air bersih berasal dari sumber yang terlindungi telah mencapai 78,93% (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh tiga persen). Pada tahun 2016-2021 direncanakan air bersih di Kota Medan memiliki capaian 85% (delapan puluh lima persen). Berdasarkan atas analisa RTRW Kota Medan tahun 2011-2031 diperkirakan kebutuhan total air bersih rata-rata untuk Kota Medan pada tahun 2030 dengan rencana tingkat pelayanan 90% (sembilan puluh persen) adalah sebesar 6.235,27 (enam ribu dua ratus tiga puluh lima koma dua puluh tujuh) liter/detik. Jika dilihat peningkatan kebutuhan air bersih pada tahun 2030, diperlukan adanya langkah-langkah dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih dimulai pada periode lima tahun pertama jangka waktu pelaksanaan RTRW Kota Medan ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan PDAM untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sampai Tahun 2017, sebagian masyarakat Kota Medan masih menggunakan jamban dengan septik tank sebagai sarana sanitasi rumah tangganya dan sebagian lain sudah dilayani melalui jaringan pipa air limbah Kota Medan yang sayangnya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Dari total kapasitas instalasi pengolahan air limbah Kota Medan sebesar 60.000 m³ (enam puluh ribu meter kubik), saat ini yang termanfaatkan baru sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga atau 20.000 m³ (dua puluh ribu meter kubik).

Untuk kondisi jaringan jalan setapak/lingkungan sampai dengan tahun 2017 sebenarnya relatif baik terutama di inti kota. Sedangkan pada daerah pinggiran kota, peningkatan jaringan jalan setapak/lingkungan telah dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan dengan kemampuan alokasi anggaran. Peningkatan jaringan jalan setapak dilaksanakan mulai dari 22.000 (dua puluh dua ribu) jumlah jalan setapak/lingkungan di Kota Medan. Adapun kondisi jalan lingkungan yang ada saat ini terdiri dari kondisi baik 29,48% (dua puluh sembilan koma empat puluh delapan persen); kondisi sedang 36,75% (tiga puluh enam koma tujuh puluh lima persen); serta rusak dan rusak berat 33,48% (tiga puluh tiga koma empat puluh delapan persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa 36,75% (tiga puluh enam koma tujuh puluh lima persen) jaringan jalan lingkungan masih memerlukan peningkatan kualitas berupa rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan. Sedangkan 33,48% (tiga puluh tiga koma empat puluh delapan persen) membutuhkan peningkatan kualitas berupa pembangunan fisik.

E. Penataan Ruang

Pola ruang dan struktur ruang Kota Medan memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat hidup (*to live*), bekerja (*to work*), dan bermain (*to play*), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator “tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang”, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pada tahun 2012 telah terealisasi.

Dalam hal pemanfaatan ruang, berdasarkan atas indikator pemanfaatan ruang yang tertib, dari target sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dapat terealisasi sesuai target. Dalam konteks pengendalian, berdasarkan indikator pengendalian ruang yang tertib, dari target sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dapat terealisasi sebesar 65% (enam puluh lima persen). Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan selama periode 2013-2017 cenderung mengalami

peningkatan. Jika pada tahun 2013, persentase RTH berada di angka 11% (sebelas persen), maka di akhir tahun 2017 meningkat menjadi 29,78% (dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen).

Perkembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan dilihat dari luasan (hektar) dan persentase RTH dari keseluruhan lahan yang ada dapat dilihat dalam Grafik berikut ini:



Grafik 2.16 Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan periode 2013-2017

Walaupun luasan RTH masih cukup memadai, tetapi masih harus ditingkatkan kualitasnya, sehingga juga dapat difungsikan secara optimal sebagai area bermain/interaksi sosial. Di samping itu, tentu juga perlu memperbanyak RTH publik, di samping privat.

F. Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kota Medan telah menetapkan RPJPD dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025, sehingga menjadikan periode 2013-2017 telah tersusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. RPJMD Tahun 2011-2015 sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2011-2015 dan RPJMD Tahun 2016-2021 juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021. Namun di tengah proses pelaksanaannya, RPJMD 2016-2021 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyelarasan (revisi) lebih lanjut, terkait konsep dan substansi yang telah termaktub.

Selama periode 2013-2017 dokumen RKPD setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Perwal. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) juga sudah terakomodasi secara optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplementasikan lebih lanjut di dalam RKPD.

Walaupun secara formal berbagai dokumen perencanaan kota telah tersedia, baik jangka panjang, menengah dan pendek, namun tetap harus ditingkatkan kualitasnya, terutama rencana-rencana yang bersifat mikro, sektoral dan spasial yang lebih detail sebagai pedoman dasar pelaksanaan pembangunan kota.

G. Perhubungan

Secara institusional, Dinas Perhubungan melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa kondisi eksisting yang dicapai dari kinerja urusan perhubungan Kota Medan ialah meningkatnya kualitas penyelenggaraan perhubungan, meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terpenuhinya fasilitas lalu lintas, optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas, terpenuhinya persyaratan laik jalan dan teknis kendaraan wajib uji, dan meningkatnya SDM aparatur dan masyarakat.

Beberapa masalah dan tantangan yang ditemukan adalah tingkat pertumbuhan kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jalan, tingkat gangguan akibat pemanfaatan sebagian jalan di luar kepentingan lalu lintas (pedagang asongan dan pedagang kaki lima), kurangnya disiplin pengguna sarana dan prasarana jalan, angkutan umum hanya mampu menarik captive user tidak memiliki alternatif lain; kondisi fisik amada dan rehabilitasi/keandalan pelayanan angkutan umum; sistem manajemen angkutan yang masih konvensional (sistem setoran), kurangnya rencana kegiatan berupa panduan dan pedoman bagi urusan Perhubungan Kota Medan untuk menata kondisi transportasi di Kota Medan, kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, perlunya lebih memadai tenaga pengatur dan pengawas lalu lintas di lapangan sehingga menjamin terlaksananya sistem lalu lintas yang baik di Kota Medan yang bergerak secara mobile, perlunya ditetapkan regulasi berupa peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan perhubungan di Kota Medan, rendahnya disiplin pengemudi angkutan umum di Kota Medan, kurang berfungsinya fasilitas penumpang sebagai tempat menaikkan/menurunkan penumpang karena kondisi prasarana yang kurang mendukung, belum tersedianya sistem angkutan umum massal yang biasanya menggunakan angkutan umum dengan kapasitas besar dan mendapat prioritas, dan kemacetan di persimpangan masih tinggi karena kapasitas di persimpangan kurang mampu menampung arus.

Pola jaringan jalan Kota Medan yang berbentuk *grid* mempunyai struktur dan karakteristik dasar yang ditandai dengan adanya lintasan rute yang secara paralel mengikuti ruas-ruas jalan yang ada dari pinggir kota yang satu ke pinggir kota lainnya dengan melewati pusat kota *Central Business Distric* (CBD) yang letaknya di tengah. Tipe ini dimaksudkan agar jaringan yang terbentuk dapat melayani masyarakat secara merata. Keuntungan utama dari

struktur ini adalah bahwa sistem rute yang terbentuk menjadi mudah diingat dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Selain itu daerah pelayanannya menjadi lebih merata. Untuk melakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas dimungkinkan untuk melakukan perubahan jaringan sirkulasi arus lalu lintas apabila terjadi permasalahan dalam arus sirkulasi lalu lintas. Pengguna jalan dimungkinkan untuk dapat menggunakan ruas jalan dimanapun berada untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan walaupun memperpanjang jalan namun tidak mengalami kemacetan. Bagi angkutan umum kelemahan struktur jaringan grid ini adalah bahwa tidak semua arah pergerakan dari satu zona asal ke tempat tujuan dapat dipenuhi dengan hanya menggunakan satu lintasan rute. Akan diperlukan pergantian lintasan rute yang menyebabkan timbulnya kebutuhan transfer. Akibatnya calon penumpang akan merasakan waktu perjalanan yang cukup panjang akibat diperlukan transfer.

Jalan utama sebagai koridor dalam kota adalah Jl. Thamrin, Jl. (Hj. Ani Idrus dahulu disebut Jl. Pandu, Jl. Sutomo, Jl. Pemuda, Jl. Ahmad Yani, Jl. Balai Kota, Jl. Haryono MT, Jl. Cirebon, Jl. Raden Saleh, Jl. Guru Patimus dan Jl. Perintis Kemerdekaan serta Jl. HM. Yamin. Sedangkan koridor luar yang menghubungkan daerah pinggiran kota yaitu Jl. Yos Sudarso, Jl. Putri Hijau dan Jl. Krakatau sebagai jalan yang menghubungkan daerah utara dengan pusat kota, Jl. Letda Sujono sebagai jalan yang menghubungkan daerah bagian barat dengan pusat kota, Jl. Gatot Subroto sebagai jalan yang menghubungkan daerah timur dengan pusat kota, Jl. Sisingamangaraja, dan Jl. Brigjen Katamso serta Jl. Letjend. Jamin Ginting merupakan jalan yang menghubungkan daerah selatan dengan pusat kota. Untuk menghubungkan daerah pinggiran kota secara langsung tanpa harus melalui pusat kota disediakan jalan lingkar luar kota luar utara yaitu Jl. Karya Jasa, Jl. Lingkar Luar Barat yang menembus ke Jl. Asrama. Selain itu juga terdapat jalan tol yang menghubungkan daerah bagian selatan (Tanjung Morawa) dengan daerah bagian utara (Belawan). Panjang jalan dan statusnya seperti yang diuraikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Panjang Jalan di Kota Medan Tahun 2017

No	Status	Panjang (km)	Lebar (m)
1	Jalan Nasional	170,70	8-10
2	Jalan Provinsi	35,20	6-8
3	Jalan Kota	3978,20	4-6
	Jumlah	4184,10	

Sumber : Dinas Bina Marga Kota Medan

Dengan melihat kondisi panjang jalan yang kurang lebih 4.184,10 km (empat ribu seratus delapan puluh empat koma sepuluh kilometer) dan persimpangan yang ada kemungkinan besar tidak akan mengalami penambahan yang berarti dan pertumbuhan jumlah kendaraan dari Tahun 2013-2017, hanya sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen), menyebabkan kondisi ini tetap memberikan potensi kemacetan lalu lintas.

Tabel 2.31 menunjukkan kondisi dan jumlah perlengkapan jalan di Kota Medan yang dikendalikan dengan *traffic light* yang sifatnya masih manual. Prasarana lalu lintas yang demikian tampaknya tidak memadai lagi dalam kondisi Kota Medan saat ini. Peran dari persimpangan dalam jaringan jalan sangat penting, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki ruas-ruas jalan relatif pendek, karena kapasitas sistem jaringan jalan sangat ditentukan oleh kapasitas persimpangan yang ada.

Tabel 2.31
Perlengkapan Prasarana Jalan Kota Medan

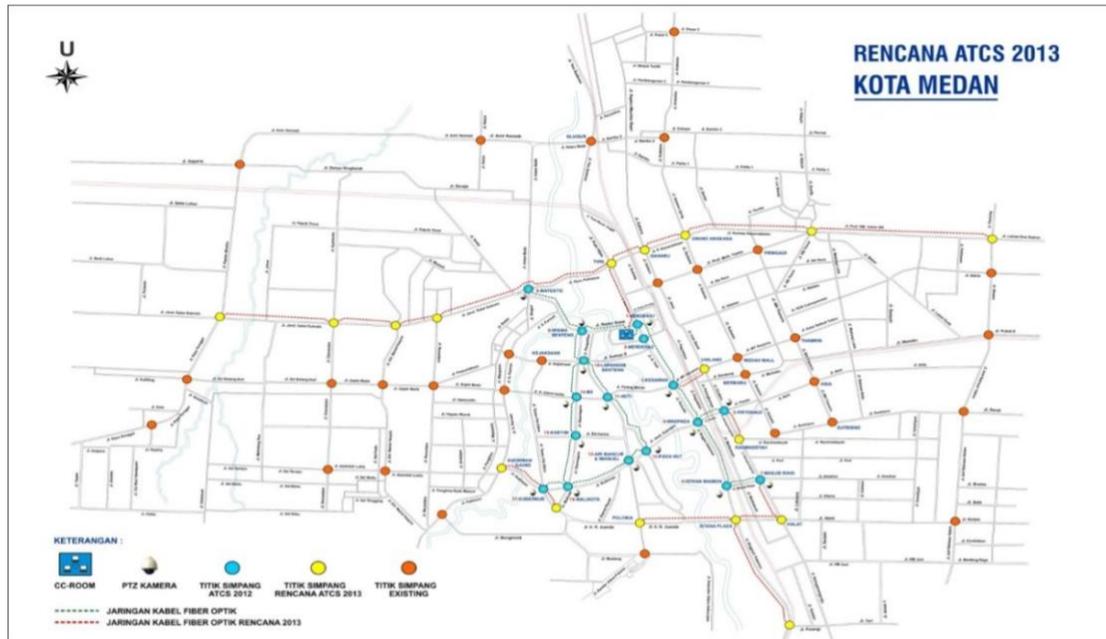
No.	Prasarana Jalan	Jumlah
1.	Rambu : Rambu Peringatan Rambu Larangan Rambu Perintah Rambu Petunjuk	3.784 unit 446 unit 1.967 unit 668 unit 703 unit
2.	Marka Jalan	25.545 M ²
3.	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) <i>Traffic Light</i> <i>Warning Light</i> <i>Traffic Pedestrian</i>	116 unit 98 unit 11 unit 7 unit
4.	<i>Delineator</i>	800 unit
5.	Halte : Dengan Bangunan Tanpa Bangunan	119 buah 36 buah 83 buah
6.	Jembatan Penyeberangan	5 unit
7.	Zebra Cross	306 unit

Sumber : WTN 2015, Dinas Perhubungan Kota Medan

Dengan kondisi *traffic light* sistem manual saat ini setting yang dilakukan dengan standar jam padat telah mengakibatkan optimasi kapasitas ruas dan persimpangan tidak efisien. Tidak semua persimpangan yang mengalami kemacetan arus lalu lintas dapat dilakukan setting ulang secara cepat dan tepat serta menghubungkan antara persimpangan yang satu dengan persimpangan yang lain. Kekurangan kapasitas persimpangan atau dan kondisi persimpangan yang didukung dengan *traffic light* yang sifatnya masih manual telah menyebabkan tundaan lalu lintas dan antrian kendaraan yang berlebihan. Potensi konflik lalu lintas yang banyak pada persimpangan, juga menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan menjadi lebih tinggi dibanding bagian jaringan jalan lainnya. Hal ini disebabkan belum adanya koordinasi antar *traffic light* di persimpangan.

Dalam mendukung kebijakan rekayasa dan manajemen lalu lintas, Kota Medan telah menggunakan teknologi *Area Traffic Control System* (ATCS) yang diharapkan dapat menciptakan arus lalu lintas yang aman, tertib dan lancar tanpa melakukan penambahan jalan dan pelebaran jalan. Sasaran penerapan *Area Traffic Control System* (ATCS) adalah untuk mencapai kinerja lalu lintas yang optimal dengan meminimumkan tundaan di persimpangan dengan menciptakan pergerakan lalu lintas yang relatif kontinu dengan menggunakan konsep gelombang hijau pada setiap persimpangan yang dikoordinasikan dan dioperasikan

dan dikendalikan secara *on line*. Agar kondisi ini dapat tercapai maka pada setiap lengan persimpangan yang berada di bawah koordinasi *Area Traffic Control System* (ATCS) dilengkapi dengan alat detektor lingkaran yang akan merekam data arus kendaraan yang melewati detektor tersebut. Berikut adalah peta pelaksanaan ATCS Kota Medan:



Gambar 2.2 Pelaksanaan ATCS di Kota Medan Tahun 2013-2017

H. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

Persoalan pengelolaan sampah di Kota Medan, harus mendapat perhatian khusus. Jumlah sampah yang terangkut lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.32
Penanganan Sampah Kota Medan Tahun 2013-2017

Uraian	Capaian Kinerja				
	2013	2014	2015	2016	2017
% Penanganan Sampah	87,73	81,45	91,29	91,29	90,33

Sumber: LPPD AMJ Kota Medan, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat penanganan sampah menunjukkan kinerja yang semakin baik, sebab mencapai angka 90,33% (sembilan puluh koma tiga puluh tiga persen) pada tahun 2017, dan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2013 yang hanya 87,73% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh tiga persen). Hal ini berarti, pada tahun 2017, ada sekitar 9,67% (Sembilan koma enam puluh tujuh persen) sampah yang belum terangkut, yang diperkirakan dikelola oleh masyarakat sendiri atau dibuang ke sungai, lahan kosong atau pinggir jalan.

Secara umum angka-angka capaian kinerja pengelolaan sampah relatif cukup baik bila dibandingkan dengan target sasaran sampai tahun 2017 sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD. Kesuksesan program ini berdampak oleh adanya penghargaan dari pemerintah dalam bentuk piagam penghargaan atau piala penghargaan, seperti: Pemerintah Kota Medan mendapatkan penghargaan Piala Adipura, Kalpataru, dan Sekolah Adiwiyata secara bersamaan. Adapun penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kota Medan dapat memotivasi masyarakatnya menjadikan Medan yang asri dan peduli terhadap lingkungan hidup dan dapat mengubah perilaku dan pola konsumsi untuk menyelamatkan lingkungan hidup pada tanggal 10 Juni 2013.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya volume kegiatan sosial ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan sektor

I. Kependudukan dan Catatan Sipil

Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 (dua koma lima) juta jiwa, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Medan pada tahun 2013 baru mencapai 90,94 % (sembilan puluh koma sembilan puluh empat sembilan persen), kemudian mengalami kenaikan di tahun berikutnya, dan mencapai 92,17% (sembilan puluh dua koma tujuh belas persen) pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan dengan penerapan e-KTP pada tahun 2015, tingkat kepemilikan e-KTP di Kota Medan sudah mencapai 77,09% (tujuh puluh tujuh koma nol sembilan persen). Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan, sehingga menjadi 87,57% (delapan puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen) pada tahun 2017.

Dengan demikian, penerapan KTP Nasional berbasis NIK untuk Kota Medan sudah terlaksana relatif baik.

Tabel 2.33
Kepemilikan KTP dan akta kelahiran di Kota Medan
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepemilikan KTP	90,94	92,17	77,09	84,94	87,57
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	30	514	606	672	844

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran di Kota Medan pada tahun 2013 mencapai 30/1000 penduduk, dan di tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 844/1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran.

Namun demikian, salah satu tuntutan publik yang masih harus diperbaiki adalah kualitas pelayanan kependudukan yang semakin baik, yang distandarisasi dan sekaligus bebas dari pungutan-pungutan liar.

J. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama periode 2013-2017 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34
Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
di Kota Medan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	34,41	65,40	66,58	66,58	66,49
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	89,60	89,75	3,87	3,87	3,87
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	75,43	90,74	90,74	90,74	90,74

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan

Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan kemajuan pada periode 2013-2017. Jika pada tahun 2013 tingkat partisipasi di lembaga pemerintahan hanya 34,41% (tiga puluh empat koma empat puluh satu persen), namun pada tahun 2017 meningkat cukup baik menjadi 66,49% (enam puluh enam koma empat puluh sembilan persen). Partisipasi angkatan kerja perempuan juga mengalami kenaikan di tahun 2017 mencapai 90,74% (sembilan puluh koma tujuh empat persen) dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 75,43% (tujuh puluh lima koma empat puluh tiga persen).

K. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama periode 2011-2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35
Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
di Kota Medan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Prevalensi peserta KB aktif	68,92	72,87	74,29	76,38	76,01
2	Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap kelurahan	111,85	106,33	104,86	104,86	104,86
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	21,93	21,15	22,07	22,07	22,07

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan

Jika dilihat dari tabel di atas, prevalensi peserta KB aktif di Kota Medan mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 prevalensi peserta KB aktif masih sebesar 68,92% (enam puluh delapan koma Sembilan puluh dua persen). Hal

sebaliknya terjadi pada rasio PLKB/PKB yang mengalami penurunan dari 111,85% (seratus sebelas koma delapan puluh lima persen) di tahun 2013 menjadi 104,86% (seratus empat koma delapan puluh enam persen) di tahun 2017. Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I relatif tidak mengalami banyak perubahan pada periode 2013-2017.

L. Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang seyogianya disediakan oleh pemerintah kota. Sarana sosial di Kota Medan seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi hingga tahun 2015 berjumlah 104 unit. Kota Medan sebagai kota metropolitan juga tidak terlepas dari masalah kesejahteraan sosial. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan. PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2015 sebesar 9,89% (sembilan koma delapan puluh sembilan persen).

Salah satu tantangan pokok yang masih harus ditangani adalah ketersediaan pusat/panti rehabilitasi bagi PMKS, sehingga pembinaannya dapat dilakukan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan.

M. Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja secara keseluruhan tercatat pada tahun 2017 sebesar 2.997 (dua ribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) orang dengan status sudah dipenuhi sebesar 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) orang. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh para pencari kerja di Kota Medan paling banyak adalah Sarjana. Dari data ketenagakerjaan terlihat bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar yang belum ditempatkan pada tahun 2013-2017 mengalami penurunan yang signifikan.

Kemajuan di bidang pembangunan akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Medan. Struktur pencari kerja yang ditempatkan merupakan salah satu indikator perkembangan kegiatan usaha atau investasi di Kota Medan. Berdasarkan data terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2013, hanya ada 3,66% (tiga koma enam puluh enam) persen dari pencari kerja yang mampu ditempatkan pada lapangan kerja yang ada, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 59,42% (lima puluh Sembilan koma empat puluh dua) persen dari pencari kerja yang mampu ditempatkan pada lapangan kerja yang ada.

Pembangunan kota pada dasarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang menempatkan penduduk sebagai subyek pembangunan. Untuk mewujudkan program pembangunan kota yang berhasil guna dan berdaya guna perlu didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah penduduk kotayang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Jumlah penduduk Kota Medan yang termasuk dalam angkatan kerja selama tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.36

Jumlah Penduduk Kota Medan yang Termasuk Dalam Kelompok
Angkatan Kerja Tahun 2013-2016 (Jiwa)

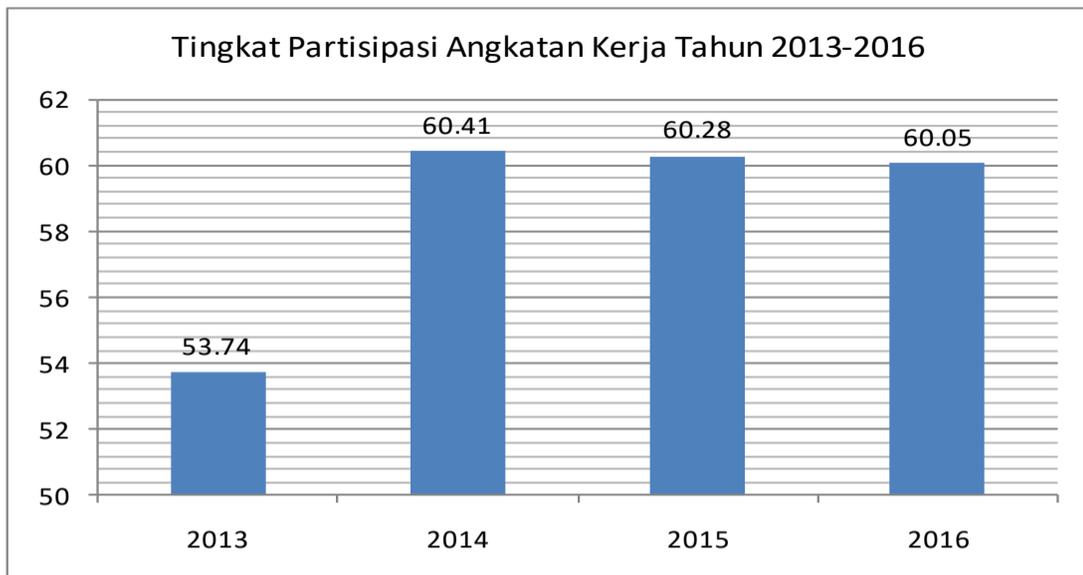
No	Kegiatan Utama	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Angkatan Kerja	907.098	974.951	912.037	973.156
2	Pengangguran (%)	9,40	9,48	9,86	9,46
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	53,74	60,41	60,28	60,05

Sumber : BPS Kota Medan

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa jumlah angkatan kerja periode tahun 2013–2016 berada dalam kisaran 907.098 – 973.156 jiwa. Jumlah angkatan kerja tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,87% (dua koma delapan puluh tujuh persen) rata-rata per tahun, dari tahun 2013 ke tahun 2016. Angkatan kerja tersebut terdiri atas angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

Peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan bahwa penduduk Kota Medan yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu mengalami peningkatan serta berubahnya struktur penduduk kota. Oleh karena itu, dimasa depan program-program ketenagakerjaan dan pendidikan harus dilaksanakan secara lebih berkelanjutan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dapat diturunkan. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, angka pengangguran menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap tingkat pengangguran sejak tahun 2013–2017 menggambarkan bahwa program-program yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di pemerintahan kota belum berjalan secara efektif.

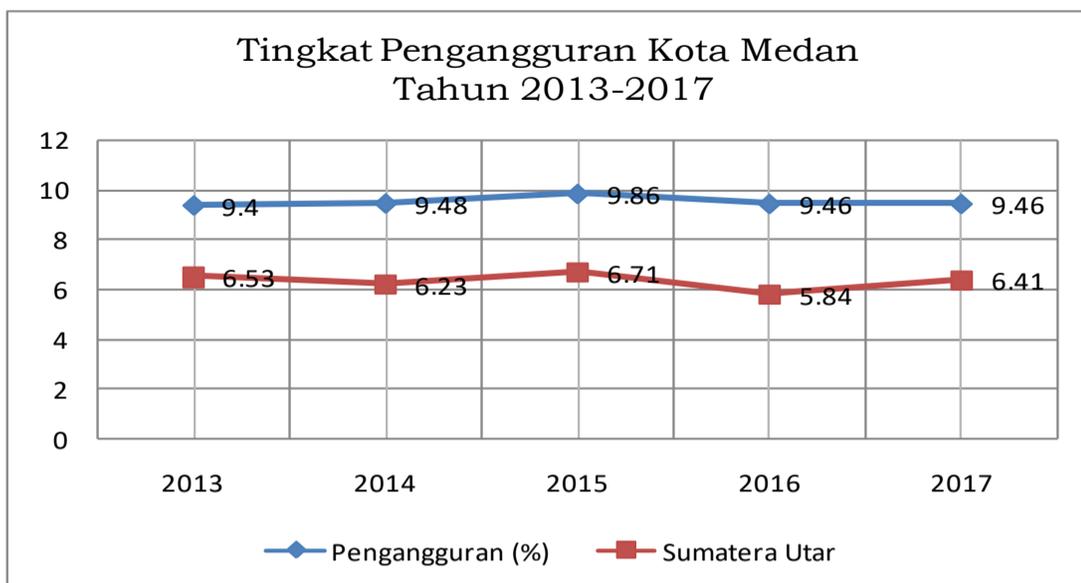
Sebagai bagian dari sumber daya ekonomi, peranan angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi dapat diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Medan ditunjukkan pada Grafik 2.17. Berdasarkan atas data di atas dapat dikemukakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan peningkatan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja selama periode tahun 2013-2017 menggambarkan semakin meningkatnya angkatan kerja yang hendak mencari pekerjaan. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan semakin membaiknya kondisi pendidikan di Kota Medan dan di sisi lain merupakan suatu tantangan yang perlu diperhatikan dalam mengurangi tingkat pengangguran dimasa yang akan datang. Perubahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2013-2017 divisualisasikan pada grafik berikut ini:



Grafik 2.17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013-2016

Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka Kota Medan selama 5 (lima) tahun terakhir belum mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,40% (sembilan koma empat puluh persen), pada tahun 2014 turun menjadi 9,48% (sembilan koma empat puluh delapan persen), hingga pada akhir tahun 2017, tingkat pengangguran masih menunjukkan angka 9,86% (sembilan koma delapan puluh enam persen). Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian Kota Medan, belum secara masif memberikan pengaruh yang berarti pada tingkat pengangguran kota.

Disamping itu, tingkat pengangguran Kota Medan hingga tahun 2017 masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara (6,71%) dan tingkat Nasional (6,18%). Kondisi ini perlu penanganan yang lebih intensif lagi di masa yang akan datang. Upaya pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kreativitas bagi para pencari kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja secara kontinyu dan konsisten harus dilakukan dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja sesuai kompetensinya.



Grafik 2.18 Tingkat Pengangguran Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Dan Indonesia Tahun 2013-2017

Lebih lanjut, dengan mempergunakan data nilai PDRB atas dasar harga berlaku serta data jumlah angkatan kerja yang bekerja dapat ditentukan tingkat produktivitas tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.37
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
PDRB ADHK (Rp. Milyar)	121.312,54	147.325,15	164.628,28	184.515,57
Angkatan Kerja yang Bekerja	907.098	974.951	875,794	973.156
Produktivitas Tenaga Kerja (Dalam Milyar Rp/Jiwa)	0.1225	0.1331	0.1879	0.2107

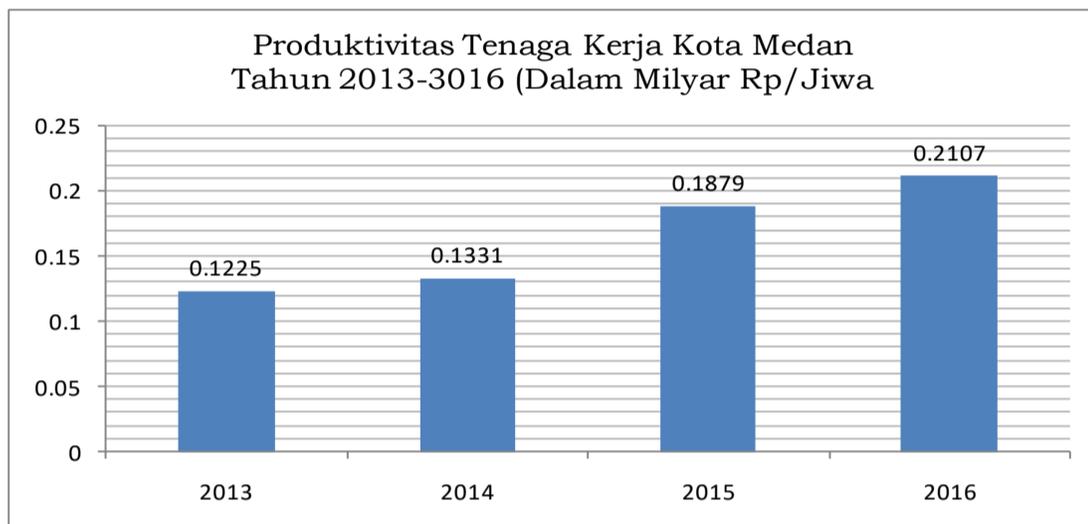
Sumber: BPS Kota Medan.

Berdasarkan atas tabel di atas dapat dikemukakan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Kondisi ini menggambarkan bahwa angkatan kerja yang bekerja semakin efektif dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Beberapa faktor menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja tersebut antara lain kondisi kerja dan sarana bantu, keahlian aparatur, faktor umur atau usia pekerja, pengalaman dalam bekerja, kesehatan pekerja, koordinasi dan perencanaan, jenis kontrak kerja, manajerial atau manajemen lapangan yang semakin baik. Tingkat pendapatan per kapita yang semakin besar memiliki konsekuensi terhadap banyak hal, yakni kemampuan masyarakat dalam menyekolahkan anggota keluarganya semakin besar sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin besar. Efek Multiplier pendapatan per kapita yang semakin besar juga mempengaruhi konsumsi masing-masing

rumah tangga. Dengan meningkatnya konsumsi masing-masing rumah tangga berdampak pada peningkatan investasi sehingga produksi baik dalam bentuk barang dan jasa juga naik. Dengan demikian, dunia usaha semakin dinamis, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Medan semakin tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi kota yang semakin tinggi mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat semakin rendah.

Tingkat produktivitas tenaga kerja selama tahun 2013-2016 dapat divisualisasikan pada Gambar berikut:



Grafik 2.19 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Medan Tahun 2013-2016

Di samping tingkat produktivitas tenaga kerja secara totalitas, dapat juga ditentukan tingkat produktivitas tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan. Tingkat produktivitas tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan dimaksudkan untuk melihat keselarasan kontribusi sektor sekunder dan tersier sebagai pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan produktivitas tenaga kerja pada kedua sektor tersebut.

Sebagai kota menuju Kota Metropolitan, Kota Medan diharapkan memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor sekunder dan tersier yang semakin baik. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja di kedua sektor tersebut diharapkan Kota Medan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

N. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

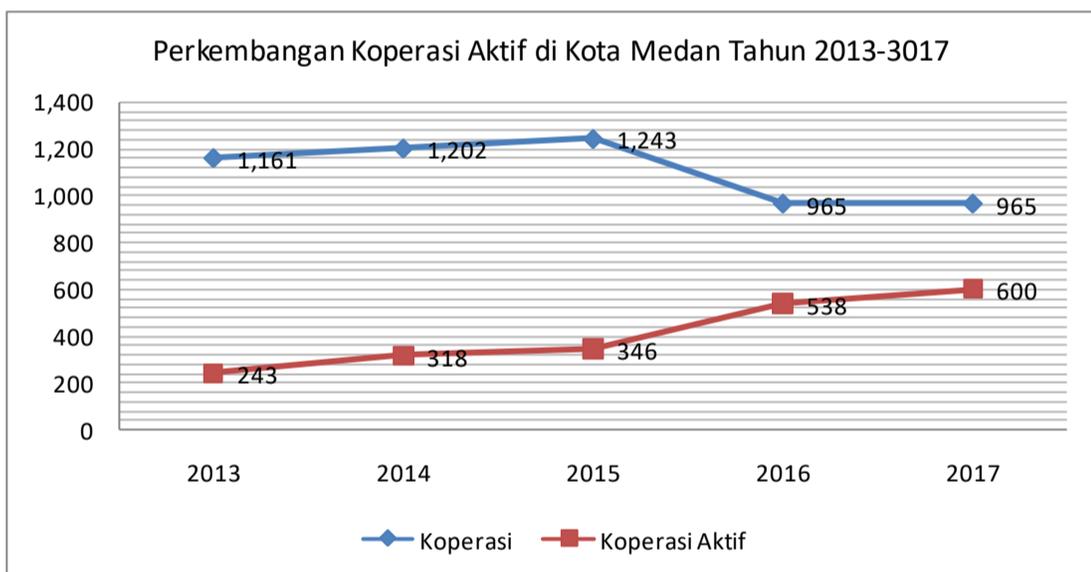
Perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Medan mengalami peningkatan dalam hal jumlah unit. Perkembangan jumlah koperasi dan usaha kecil menengah terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.38
Perkembangan Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Koperasi	1.161	1.202	1.243	965	965
Koperasi Aktif	243	318	346	538	600
Usaha Mikro dan Kecil	225.319	2.129	2.880	3.41	3.341

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Medan

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan terus tumbuh hingga mencapai angka 3.341 (tiga ribu tiga ratus empat puluh satu) unit usaha pada tahun 2017. Dengan melihat manfaat, kontribusi serta sifatnya yang “*easy entrance*”, UMKM harus dibantu dan difasilitasi oleh berbagai stakeholders, seperti pemerintah, perbankan, lembaga keuangan mikro, serta kemitraan dengan pelaku usaha besar sehingga potensi besar yang dimiliki UMKM dapat terus ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan mendorong akses permodalan UKM kepada lembaga keuangan melalui penerbitan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

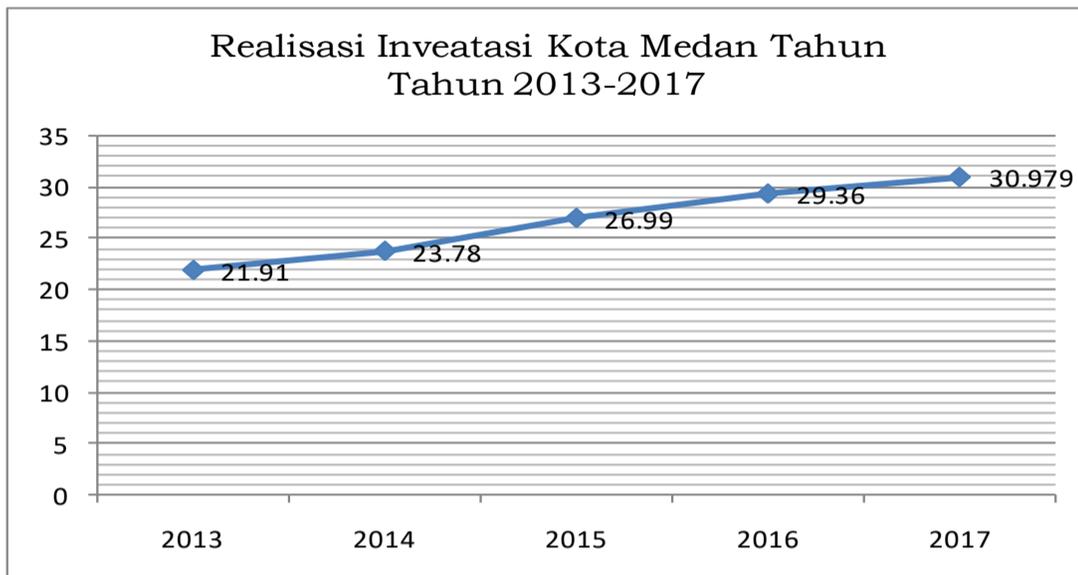


Grafik 2.20 Perkembangan Kinerja Koperasi Aktif dan Usaha Mikro/Kecil

O. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu akselerator/percepatan dalam perekonomian suatu daerah. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya suatu penanaman modal akan selalu terkait dengan aktivitas atau kegiatan dari variabel ekonomi seperti tingkat kesempatan kerja, laju pertumbuhan pendapatan daerah. Peningkatan dalam penanaman modal akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih cepat.

Penanaman modal swasta di suatu daerah berasal dari PMDN dan penanaman modal asing (PMA). PMDN Kota Medan terlihat mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Perkembangan PMDN terlihat pada gambar di bawah ini:



Grafik 2.21 Realisasi PMDN Kota Medan Tahun 2012-2015 (Rp. Milyar)

Secara umum, dari tahun 2013 hingga 2017 nilai realisasi inveatasi (PMDN dan PMA) di Kota Medan mengalami trend peningkatan, pada tahun 2013 realisasi investasi, yaitu Rp 21.91 Trilyun (naik 16,73%), sedangkan di tahun 2014 realisasi inveatsi 23,78 trilyun naik sebesar 8,58% (delapan koma lima puluh delapan persen), dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2015 menjadi Rp 26,99 trilyun (naik sebesar 13,50%), di tahun 2015 realisasi inveatsi 29,36 trilyun naik sebesar 8,80% (delapan koma delapan puluh persen), dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2017 menjadi Rp 30,97 trilyun (naik sebesar 5,48%). Menurunnya persentase peningkatan investasi tahun 2016 dan 2017 menunjukkan perlunya regulasi yang lebih baik dalam mengatur kemudahan dan insentif penanaman modal baik dalam negeri maupun asing untuk menggerakkan perekonomian kota.

P. Kebudayaan

Kota Medan merupakan salah satu kota multukulturalisme dengan 8 (delapan) etnis besar di dalamnya menjadikan uniknya kebudayaan Kota Medan. Sebagai wahana untuk memperkenalkan dan melestarikan seni budaya lokal yang ada di masyarakat, Kota Medan setiap tahunnya menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda situs, dan cagar budaya.

Berbagai event seni dan budaya diselenggarakan di Kota Medan, baik dalam skala regional hingga nasional. Salah satunya adalah Kota Medan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Silaturahmi Raja-Raja Nasional pada Tahun 2013 yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dan nusantara. Melalui Disbudpar, secara akumulatif berbagai pagelaran seni dan budaya dilaksanakan

sebanyak 104 (seratus empat) kali pada tahun 2014. Secara keseluruhan penyelenggaraan seni dan budaya dimaksud diantaranya: Karnaval Budaya dan kendaraan antik, Ramadhan Fair, Perayaan Agama Budha, Perayaan Agama Hindu, Christmast Season, Silaturahmi Raja-Raja Nasional, Gelar Melayu Serumpun, Melayu Fashion Day, Festival Kuliner, Pagelaran Seni, dan Budaya Multi Etnis lainnya.

Kota Medan membutuhkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif, seperti Gedung Convention dengan daya tampung di atas 10.000 (sepuluh ribu) pengunjung, sehingga event-event kebudayaan internasional dapat dilangsungkan di Kota Medan sekaligus mengokohkan Kota Medan sebagai Kota MICE.

Bangunan-bangunan tua khususnya yang berlanggam arsitektur *art deco* merupakan potensi luar biasa yang dimiliki Kota Medan, namun saat ini satu demi satu bangunan tua yang menjadi aset berharga dari Kota ini hilang karena rusak dan tak terawat, bahkan sebagian diantaranya telah hilang. Hal tersebut disebabkan pemeliharaan aset budaya masih belum optimalnya upaya pelestarian benda, situs serta kawasan cagar budaya yang hanya mencapai 65% (enam puluh lima persen) pada tahun 2014 dan 2015. Inventarisasi aset dan pemeliharaan cagar budaya merupakan salah satu upaya yang harus segera dilakukan. Hal ini penting untuk tetap melestarikan dan memanfaatkan sebagai potensi pariwisata kota.

Q. Kepemudaan dan Olahraga

Kebutuhan sarana dan prasarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Medan. Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti gelanggang dan balai remaja hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa jumlah lapangan olahraga di Kota Medan saat ini tercatat sebanyak 24 (dua puluh empat) unit atau 0,009 (nol koma nol nol sembilan) per seribu penduduk.

Oleh karena itu, tantangan bagi Kota Medan pada masa yang akan datang adalah tersedianya pusat sarana olahraga (*Sport Center*), guna mendukung Kota Medan sebagai kota atletik dan pariwisata olahraga/pemuda.

R. Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dilakukan melalui beberapa kegiatan pembinaan setiap tahunnya. Sedangkan dalam pembinaan politik daerah di Kota Medan, setiap tahunnya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan semakin bertambah. Kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan kota saat ini juga telah berjalan dengan cukup baik terutama melalui peran Forum Kerukunan Umat Beragama, dan wadah-wadah lainnya.

S. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ialah melalui penegakan Perda yang telah disusun. Penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan selama ini masih belum cukup optimal dilakukan, walaupun selama Selama periode 2013-2017 penegakan Perda sudah mencapai 100% (seratus persen). Besarnya luas wilayah dan objek yang perlu diawasi, kemungkinan masih terdapat pelanggaran perda yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Tata kelola keuangan daerah Kota Medan sudah dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan yang tetap di level Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini perlu terus ditingkatkan dan dapat menyesuaikan perubahan sistem akuntansi pemerintahan yang dari cash basis menjadi *accrual basis* untuk mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

T. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial, agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat adalah antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna.

Selama periode 2013-2017 seluruh PKK dan Posyandu yang ada di Kota Medan dalam kondisi aktif. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kota Medan, khususnya tingkat kecamatan dan kelurahan telah berjalan dengan cukup baik. Salah satu yang cukup efektif adalah keterlibatan PKK dalam pendidikan anak usia dini dan pelestarian lingkungan, serta terlaksananya musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan setiap tahunnya. Salah satu aspek pemberdayaan masyarakat yang masih harus ditingkatkan adalah dari sisi ekonomi, sehingga kelompok masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan akses sumber daya ekonomi secara lebih memadai.

V. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Medan hingga tahun 2015 sudah mencapai 93,24% (sembilan puluh tiga koma dua puluh empat) dari seluruh SKPD yang ada. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya. Selama periode 2013-2017 telah terlaksana 52 kali kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota Medan.

Tabel 2.39
Pengelolaan Kearsipan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	82,5	93,24	93,24	100	100
2	Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan (kali)	15	4	4	11	18

Sumber: Kantor Arsip Kota Medan

W. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penunjang pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar dengan fungsi membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat yang dilayani. Berdasarkan aspek dan dimensi urusan perpustakaan tersebut maka tujuan penyelenggaraan perpustakaan adalah membantu dan memberi kesempatan belajar masyarakat dalam segala umur melalui jasa pelayanan perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, kreatif, ikut serta dalam pembangunan nasional, menghargai hasil budaya bangsa dan meningkatkan taraf hidup.

Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Medan sebesar 34,41% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen), sedangkan jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2017 sebanyak 2,72% (tiga koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani.

Tabel 2.40
Koleksi Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	33,33	33,33	33,33	34.22	34.41
2	Pengunjung perpustakaan	6,11	6,11	3,75	3.75	2.72

Sumber: Kantor Perpustakaan Kota Medan

Guna menjadikan Medan sebagai pusat pendidikan regional, perlu terus mengembangkan adanya perpustakaan umum yang semakin representatif sebagai sudah satu simbol Kota Pelajar.

Z. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang pokok dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kota Medan telah tersedia selama ini, yaitu <http://www.pemkomedan.go.id/>, yang memuat ragam informasi terkait Kota Medan yang dapat secara mudah diakses oleh siapapun.

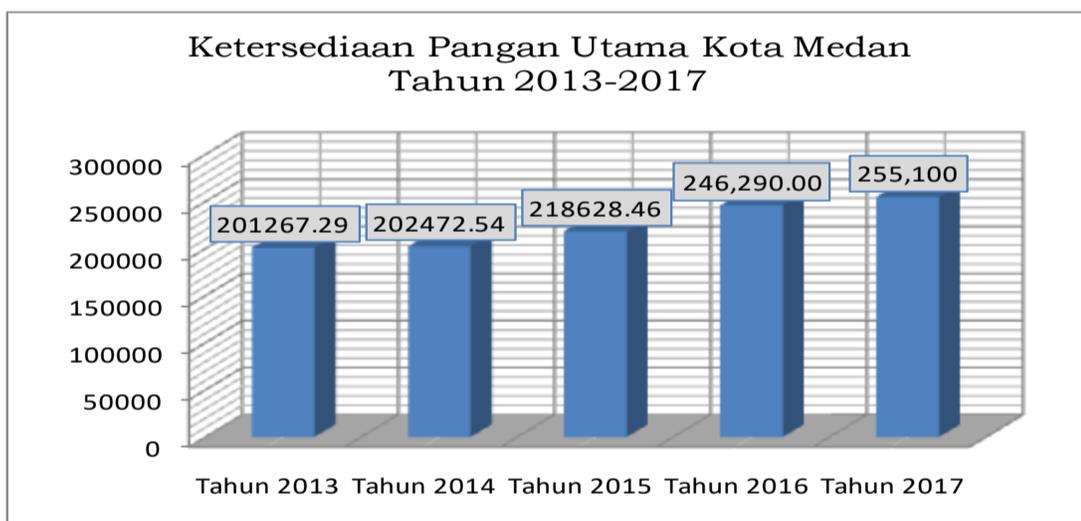
Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota Medan menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses

informasi pelayanan dasar masyarakat baik mengenai pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, informasi mengenai pelayanan perizinan, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya sudah menjadi sebuah keharusan di era keterbukaan informasi sekarang ini. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola Pemerintah Kota diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Kota Medan sudah dirasa cukup besar. Dalam mewujudkan Kota Medan sebagai *Smart City*, hal ini telah dimulai pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau di seluruh fasilitas umum yang ada di Kota Medan, salah satunya di ruang terbuka hijau, bekerjasama dengan PT Telkom. Untuk itu, harus ada kebijakan dan program yang komprehensif untuk mendukung terwujudnya Medan sebagai Kota *Smart City*.

AA. Ketahanan Pangan

Dilihat dari ketersediaan pangan utama, Kota Medan mengalami peningkatan yakni mulai dari 201.267,29 Kg/jiwa pada tahun 2013, naik menjadi 202.472,54 kg/jiwa pada tahun 2014 kemudian menjadi 218.628,46 Kg/jiwa pada tahun 2015, kemudian menjadi 246.290 Kg/jiwa pada tahun 2016, kemudian menjadi 255.100 Kg/jiwa pada tahun 2017.



Grafik 2.23 Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2013-2017

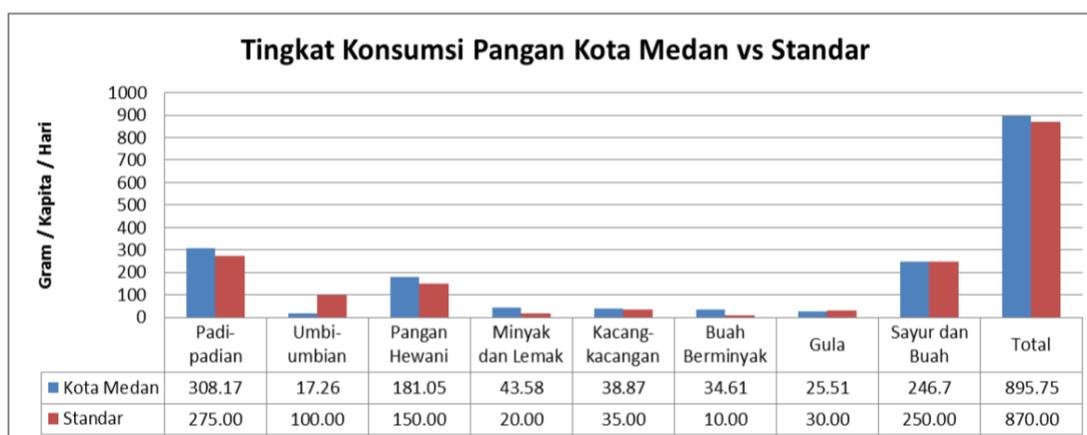
Tabel 2.41

Analisis Ketersediaan Beras di Sumatera Utara Terhadap Kebutuhan Beras Kota Medan

No.	Keterangan	Jumlah	Satuan
1	Konsumsi beras per Kapita (Nasional)	114	Kg/Kap/ Thn
2	Jumlah Penduduk Kota Medan	2.286.540	Jiwa
3	Konsumsi beras per tahun di Kota Medan	182.190,38	Ton
4	Produksi Beras di Kota Medan	10.727,29	Ton
5	Kekurangan beras di Kota Medan	171.463,09	Ton

6	Konsumsi beras per Kapita di Kota Medan berdasarkan atas produksi beras di Kota Medan	4,69	Kg
7	Jumlah penduduk Sumatera Utara	13.937.747	Jiwa
8	Konsumsi beras Sumatera Utara	1.766.798	Ton
9	Produksi beras Sumatera Utara	2.360.084	Ton
10	Surplus beras Sumatera Utara	593.886	Ton

Tetapi tingkat konsumsi pangan masyarakat di Kota Medan umumnya berada di bawah tingkat konsumsi pangan nasional seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Sementara itu tingkat konsumsi pangan masyarakat di Kota Medan apabila dibandingkan dengan standar konsumsi pangan terlihat pada grafik di bawah ini relatif lebih tinggi.



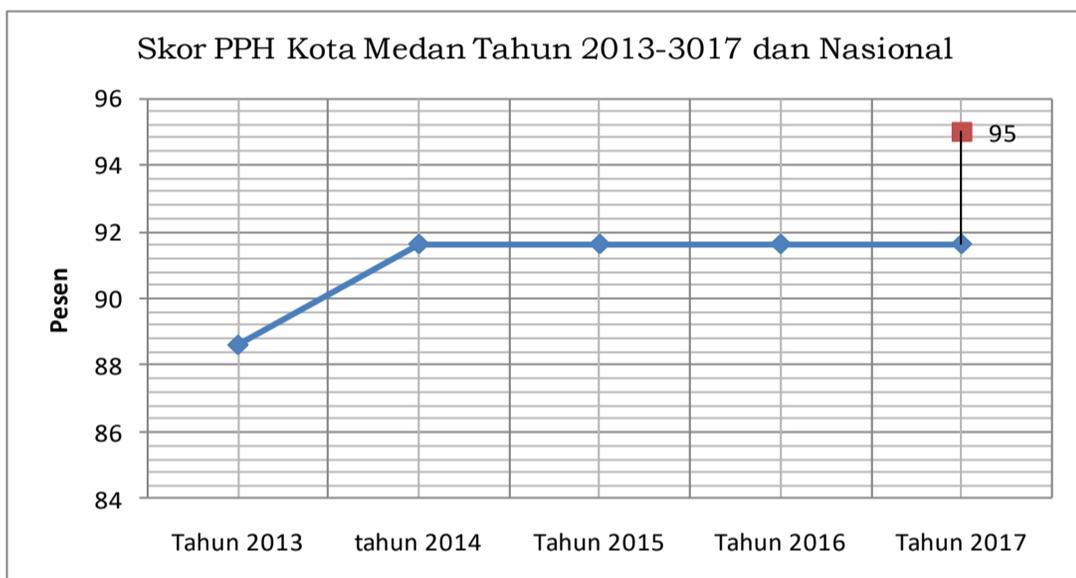
Grafik 2.24: Perbandingan Tingkat Konsumsi Pangan Kota Medan terhadap Standar Tahun 2017

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya di bidang ketahanan pangan diantaranya telah menyusun *Road Map* Ketahanan Pangan Kota Medan. Ketersediaan pangan di Kota Medan masih tergantung dari daerah di luar Kota Medan 94,11% (sembilan puluh empat koma sebelas persen), hanya 5,89% (lima koma delapan puluh sembilan persen) berasal dari produksi sendiri.

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu, juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di Kota

Medan. Adapun perbandingan ketersediaan tingkat pangan di Kota Medan terhadap tingkat konsumsi (gram/kapita/tahun) adalah surplus 76,7 (tujuh puluh enam koma tujuh gram/kapita/tahun berdasarkan atas data tahun 2017. Tetapi angka surplus tersebut tetap menempatkan Kota Medan sebagai kota yang rentan terhadap ketahanan pangan karena tingkat konsumsinya mencapai 91,44% (sembilan puluh satu koma empat puluh empat persen) dari tingkat ketersediaan. Seharusnya tingkat konsumsi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari tingkat ketersediaan untuk mencapai kondisi tahan pangan.

Akan tetapi apabila dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan, secara umum masih di bawah standar nasional walaupun ada kenaikan mulai dari skor 91,63 (Sembilan puluh satu koma enam puluh tiga) pada tahun 2013, naik menjadi (Sembilan puluh satu koma enam puluh tiga) pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

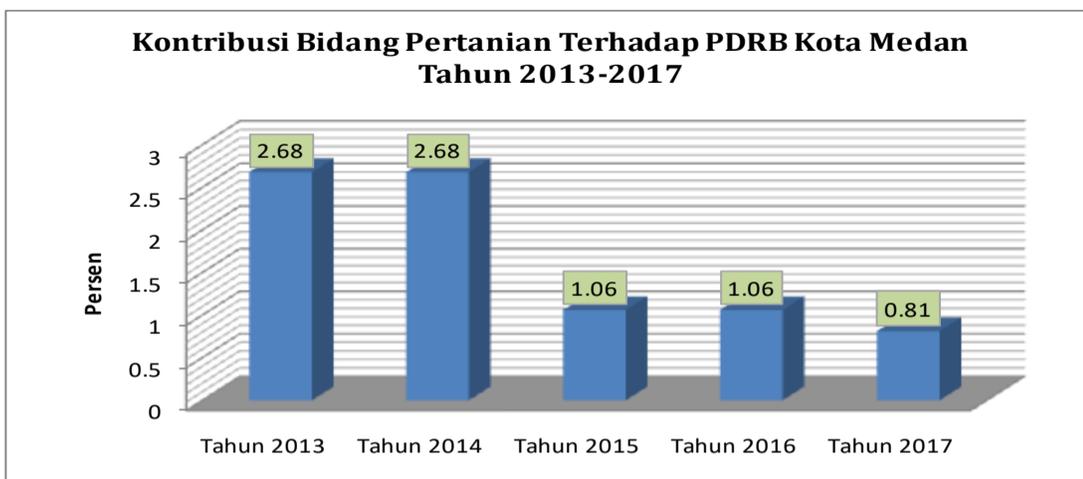


Grafik 2.25 Perbandingan Skor PPH Kota Medan (2011 – 2015) dan Nasional

2.2.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian, Perikanan, dan Kelautan

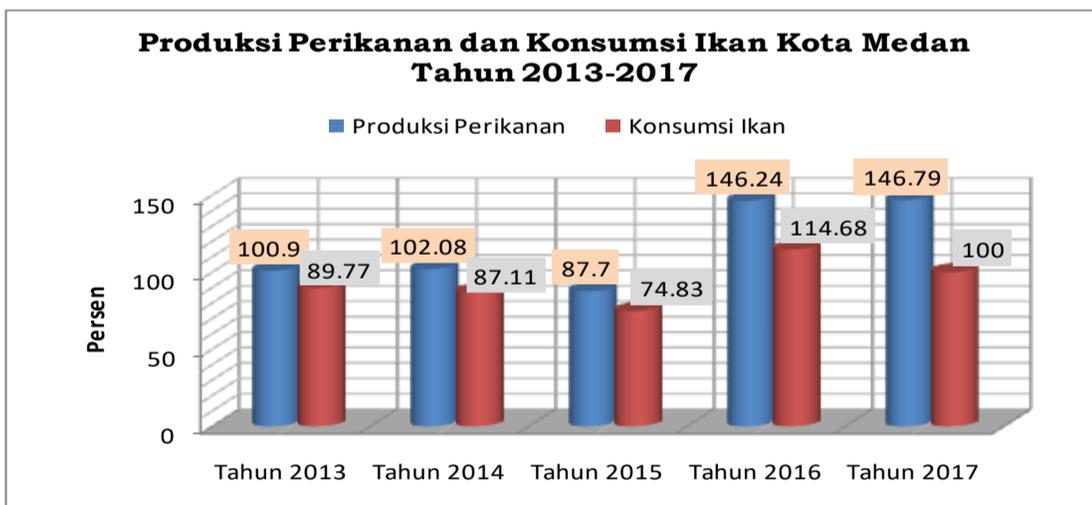
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar juga mengalami fluktuasi, mulai dari 4,83 ton/ha pada tahun 2013, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,27 ton/ha pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,23 ton/ha pada tahun 2015, kemudian mengalami peningkatan menjadi 4,33 ton/ha pada tahun 2016, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,23 ton/ha pada tahun. Dalam catatan statistik, Kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB Kota Medan juga terus mengalami penurunan, mulai dari 2,68% (dua koma enam puluh delapan persen) pada tahun 2013 dan tahun 2014, turun menjadi 1,06 % (satu koma enam persen) pada tahun 2015 dan tahun 2016, dan turun hingga hanya mencapai 0,81% (nol koma delapan puluh satu persen) pada tahun 2017.



Grafik 2.26 Kontribusi Bidang Pertanian Terhadap PDRB 2013-2016

Sedangkan untuk urusan perikanan, produksi perikanan Kota Medan mengalami naik turun dalam rentang waktu 2013-2016, 100,90 % (seratus koma sembilan puluh persen) tahun 2013 menjadi 102,08% (seratus dua koma delapan persen) tahun 2014, tetapi turun kembali menjadi 87,7% (delapan puluh tujuh koma tujuh persen) pada tahun 2015, meningkat menjadi 146,24% (seratus empat puluh enam koma dua puluh empat persen) pada tahun 2016, dan meningkat menjadi 146,79% (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan empat persen) pada tahun 2017 dari target produksi ikan daerah.

Realisasi konsumsi ikan oleh masyarakat juga berfluktuasi, mengalami naik turun dari tahun 2013-2016, mulai dari 89,77% (delapan puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2013 dan sebesar 87,11% (delapan puluh tujuh koma seelas persen) pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 74,84% (tujuh puluh empat koma delapan puluh empat persen) pada tahun 2015, dan kemudian mengalami peningkatan masing-masing sebesar 114,68 % (seratus empat belas koma enam puluh delapan persen) pada tahun 2016, hingga 100 % (seratus persen) pada tahun 2017.



Grafik 2.27: Jumlah Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kota Medan Tahun 2013-2016

Sebagai bagian sektor ekonomi primer, maka sub sektor pertanian dan perikanan cenderung tidak terlalu besar kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Medan, namun demikian peringkat produktivitas sektor ini cukup diperlukan, sebab pelaku ekonominya merupakan mayoritas kelompok berpenghasilan rendah, sehingga menjadi kelompok sasaran utama dalam program penanggulangan kemiskinan.

B. Pariwisata

Kota Medan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Nasional, terlebih lagi gencarnya rencana pengembangan Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Secara umum, perkembangan pariwisata Kota Medan ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai elemen primer maupun sekunder, seperti: sejarah, budaya, *heritage*, kuliner, belanja hingga MICE. Jumlah kunjungan wisata Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 2.28 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Medan Tahun 2013-2017

Berdasarkan statistik kunjungan wisatawan di atas, diketahui bahwa tingkat kunjungan wisatawan khususnya yang berasal dari mancanegara sesungguhnya belumlah optimal, sehingga diperlukan kebijakan dan program pengembangan pariwisata daerah yang lebih terintegrasi lagi, terutama dengan pemberlakuan MEA dan rencana pengembangan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.

C. Perindustrian dan Perdagangan

Sesuai dengan karakteristik Kota Medan yaitu Kota Perdagangan dan Jasa, maka sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Medan dan terus menunjukkan tren perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor industry dan perdagangan terhadap perekonomian Kota Medan.

Tabel 2.42
Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap PDRB Kota Medan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

			(%)
1	2013	25,51	13,82
2	2014	25,51	13,82
3	2015	26,9	11,86
4	2016	24,77	15,54
5	2017	24,77	6,59

Sumber: BPS Kota Medan

Dari tabel 2.42 terlihat bahwa selama kurun waktu 2013-2017 sektor perdagangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kota Medan, meskipun angka persentasenya bergerak fluktuatif. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di Kota Medan sebagian besar didominasi oleh sektor perdagangan. Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Medan menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pusat perdagangan dan jasa.

Selanjutnya, ekspor bersih perdagangan Kota Medan pada tahun 2013 mencapai \$ 3,17 Milyar dan tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan menjadi sebesar \$ 3,84 Milyar. Penurunan ekspor bersih tersebut sampai tahun 2016 disebabkan ekspor melalui wilayah kota medan sejak tahun 2013 terus mengalami penurunan yakni tahun 2013 sebesar \$ 8,02 Milyar dan menjadi \$ 6,06 milyar pada tahun 2016.

Tabel 2.43
Nilai Ekspor dan Impor Melalui Wilayah Kota Medan
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ekspor (Milyar USD)	8,02	7,84	6,73	6,06	7,76
2	Impor (Milya USD)	4,85	4,79	3,8	3,23	3,92
3	Ekspor Bersih	3,17	3,05	2,93	2,83	3,84

Sumber: BPS Kota Medan

Kecenderungan penurunan ekspor dan impor tersebut pada dasarnya tidaklah terjadi secara riil, sebab penurunannya lebih disebabkan perpindahan bandara, dari Polonia ke Kuala Namu. Namun demikian, tentunya tetap harus ada kebijakan daerah untuk bisa terus mendorong meningkatnya ekspor terutama dari pelabuhan laut Belawan.

Selanjutnya untuk mendukung aktivitas perdagangan, Kota Medan saat ini tercatat memiliki 53 (lima puluh tiga) pasar rakyat dahulu disebut pasar tradisional yang berada di bawah naungan PD. Pasar, dimana jumlah ini telah berkurang dari tahun 2013 sebanyak 55 (lima puluh lima) pasar, menjadi 53 (lima puluh tiga) pasar pada tahun 2017. Pasar-pasar tersebut tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kota Medan dimana terdapat 4 (empat) kecamatan yang belum memiliki pasar tradisional. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan terus melakukan upaya untuk lebih meratakan persebaran Pasar Tradisional di tiap kecamatan Kota

Medan agar memberikan akses yang lebih dekat kepada konsumen dan produsen dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan di dalam pasar untuk menambah kenyamanan dan pelayanan terhadap konsumen. Pasar-pasar ini diharapkan dapat menarik konsumen sehingga pasar ini nantinya dapat menjadi pusat perekonomian yang baru dan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitar pasar tersebut.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, terhitung diperlukan kebijakan untuk mendorong program revitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada bahkan membangun pasar-pasar tradisional modern baru, termasuk pasar induk sesuai tata ruang Kota Medan.

2.4. Daya Saing Daerah

2.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang.

Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga tampak sektor-sektor andalan yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan.

Dari Tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Medan dapat dijelaskan menurut kelompok sektor primer, sekunder, dan tersier. Pada tahun 2013 - 2016 kontribusi sektor primer terhadap PDRB Kota Medan berdasarkan harga berlaku rata-rata sebesar sebesar 1.57 persen. Kontribusi sektor primer tersebut hanya berasal dari sektor pertanian. Kelompok sektor sekunder merupakan penyumbang terbesar kedua bagi PDRB Kota Medan yaitu 30.54 persen yang berasal dari sub sektor konstruksi, sub sektor industri pengolahan, dan sub sektor listrik, gas dan air bersih, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Kelompok sektor tersier masih merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Medan yaitu 54.83 persen yang berasal dari sub sektor perdagangan, hotel dan, sub sektor transportasi dan telekomunikasi, sub sector jasa keuangan dan jasa-jasa, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, enyediaan akomodasi dan makan minum, dan real estate. Berdasarkan uraian di atas, diketahui struktur perekonomian Kota Medan selama periode 2013-2016 masih digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder.

Laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2013-2016 cenderung menunjukkan peningkatan yaitu tahun 2013 sebesar 7,41 persen, tahun 2014 sebesar 7,10 persen, tahun 2015 sebesar 6,67 persen dan tahun 2016 sebesar 5,89 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 ini akibat adanya percepatan investasi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi negara-negara berkembang serta membuka kesempatan bagi angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Secara rinci RDRB per kapita sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.7 di atas menunjukkan terjadinya kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2013-2016 yakni sebesar 56,38 juta perkapita/tahun pada tahun 2013, menjadi 61,71 juta perkapita/tahun pada tahun 2014, kemudian menjadi 72,58 juta perkapita/tahun pada tahun 2015, dan menjadi 82,76 juta perkapita/tahun pada tahun 2016. Peningkatan PDRB per kapita tersebut, belum sepenuhnya menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat. Hal tersebut, disebabkan beberapa faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk melihat perkembangan daya beli masyarakat secara riil digunakan PDRB berdasarkan harga konstan. Berdasarkan harga konstan, PDRB per kapita Kota Medan selama tahun 2013-2016 atas dasar harga konstan meningkat secara rata-rata sekitar 5,32 persen/tahun yakni 21,01 juta perkapita/tahun tahun 2013, kemudian 20,75 juta perkapita/tahun pada tahun 2014, menjadi 21,76 juta perkapita/tahun tahun 2015, dan menjadi 59,03 juta perkapita/tahun pada tahun 2016.

Selain PDRB indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah inflasi. Tingkat inflasi di Kota Medan selama periode tahun 2013-2017 cenderung menunjukkan angka yang berfluktuasi yakni sebesar 10,09 persen selama tahun 2013, menjadi sebesar 8,24 selama tahun 2014, sebesar 3,32 persen pada tahun 2015, sebesar 6,60 persen pada tahun 2016 dan 3,18 persen pada tahun 2017. Sedangkan menurut komoditi yang mempengaruhi inflasi tahun 2017 cenderung didominasi oleh perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 6,44 persen, bahan makanan sebesar 2,59 persen, makanan jadi, minuman/rokok dan tembakau 2,25 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,41 persen, sandang sebesar 1,12 persen, sedangkan transportasi dan komunikasi mengalami deflasi sebesar -2,799 persen, kesehatan sebesar 1,61 persen. sebagaimana tahun-tahun sebelumnya inflasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan atas data tersebut di atas, maka Kota Medan merupakan salah satu pasar potensial yang besar, didukung oleh jumlah penduduk yang besar pada masa yang akan datang.

2.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Selama tahun 2013-2017 fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja kunci antara lain:

A. Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik.

Selama 5 (lima) tahun terakhir kondisi jalan di Kota Medan mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2013, ada 86.76% (delapan puluh enam koma tujuh puluh enam persen) jalan dalam kondisi baik dan di tahun 2017 menjadi 97.57% (sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen) jalan yang kondisinya baik. Ketidakmampuan memperbaiki seluruh jalan menjadi kondisi baik umumnya disebabkan keterbatasan dana yang tersedia.

Tabel 2.44

Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik
Kota Medan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (%)
1	2	3
1.	2013	86,76
2.	2014	91,29
3.	2015	93,50
4.	2016	97,34
5.	2017	97,57

Sumber : Dinas Bina Marga Kota Medan

Selain sebagai urat nadi perekonomian daerah, jalan juga sekaligus mempengaruhi persepsi terhadap sebuah kota. Oleh karena itu, perlu kebijakan baru untuk mewujudkan kondisi jalan seluruhnya dalam kondisi baik/mantap, guna meningkatkan citra Kota Medan sebagai kawasan investasi yang menarik, misalnya dengan lebih mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengelolaan urusan kebinamargaan.

B. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Medan mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2013 hanya 82.80% (delapan puluh dua koma delapan puluh persen) rumah tangga bersanitasi di Kota Medan dan meningkat terus sampai dengan tahun 2017 menjadi 89,40% (delapan puluh sembilan koma empat puluh persen). Hal ini dapat diartikan ada peningkatan sejak tahun 2013 sampai tahun 2017, rumah tangga bersanitasi di Kota Medan.

Tabel 2.45

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Di Kota Medan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Rumah Tangga Bersanitasi (%)
1	2	3
1.	2013	82,80
2.	2014	82,80
3.	2015	82,80
4.	2016	84,40
5.	2017	89,40

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan

Namun demikian, Kota Medan tentunya masih membutuhkan program-program pembangunan sanitasi yang lebih progresif sebagaimana target nasional.

C. Jumlah Rumah Layak Huni

Selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah rumah layak huni di Kota Medan cenderung mengalami peningkatan. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah, pada tahun 2013 terdapat 402.274 (empat ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) rumah layak huni di Kota Medan dan meningkat cukup tajam pada tahun 2014 hingga menjadi 410.572 (empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh dua) rumah layak huni, namun tahun 2015, 2016 cenderung meningkat menjadi 421.463 (empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga) dan pada tahun 2017 menjad 432.243 (empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga). Peningkatan yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir disebabkan antara lain meningkatnya jumlah penduduk akibat arus urbanisasi yang mengakibatkan tumbuhnya wilayah kumuh di Kota Medan.

Tabel 2.46

Jumlah Rumah Layak Huni Di Kota Medan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Rumah Layak Huni
1	2	3
1.	2013	402.274
2.	2014	410.572
3.	2015	421.463
4.	2016	421.463
5.	2017	432.243

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan

Berdasarkan atas data tabel di atas, diketahui Kota Medan membutuhkan program-program terpadu untuk mengurangi rumah tidak layak huni, guna menghapus kawasan-kawasan kumuh Kota sebagaimana program nasional yang dicanangkan.

D. Persentase Rumah ber IMB

Pada tahun 2013, terdapat 71,66% (tujuh puluh satu koma enam puluh enam persen) rumah yang ber IMB dan pada tahun 2017 sebanyak 62,40% (enam puluh dua koma empat puluh persen). Dalam 5 (dua) tahun terakhir terjadi penurunan persentase rumah ber-IMB, disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB terhadap renovasi maupun pembangunan rumah baru.

Tabel 2.47

Persentase Rumah ber IMB Di Kota Medan Tahun 2013-2017

No	Tahun	% Rumah ber IMB
1	2	3
1.	2013	71.66
2.	2014	51,67
3.	2015	52,07
4.	2016	57,57
5.	2017	62,40

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Berdasarkan atas data tabel di atas, perlu kebijakan yang lebih terpadu, dalam meningkatkan tata bangunan, sebab juga akan berpengaruh terhadap aspek-aspek lingkungan hidup lainnya.

2.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.

Kasus kriminalitas di Kota Medan tahun 2013-2017 untuk Jenis Tindak Pidana (JTP) cenderung mengalami penurunan yakni secara rata-rata sebesar 8.84% (delapan koma delapan puluh enam persen) setiap tahun sedangkan untuk Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) untuk periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yakni secara rata-rata sebesar 17.66% (tujuh belas koma enap puluh enam persen). Kasus kriminalitas pada tahun 2013-2017 mengalami penurunan yakni secara rata-rata sebesar 16.88 % (enam belas koma delapan puluh delapan persen). Kasus kriminal yang sangat menonjol adalah curas, curat, curanmor, anirat, judi, peras/ancam dan narkoba. Adapun kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Medan selama tahun 2013-2017 dapat diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.48
Jumlah Jenis Tindakan Pidana dan Penyelesaian Tindak
Pidana Tahun 2013-2017

No	Jenis Kejadian	2013	2014	2015	2016	2017
		JTP	JTP	JTP	JTP	JTP
1	2	3	4	5	6	7
1	Curas	606	734	619	479	416
2	Curat	2.238	2.255	1.623	1.399	1396
3	Curanmor	3.469	2.798	2.071	1.782	1427
4	Anirat	1.497	1.412	1.206	1.028	981
5	Judi	115	193	334	434	444
6	Peras/Ancam	204	153	157	163	142
7	Narkoba	1.010	1.165	1.677	1.898	1028
Jumlah Kasus Menonjol		9.171	5.351	4.214	4378	4005
Jumlah Kasus		13.783	14.061	11.905	10421	9423
		PTP	PTP	PTP	PTP	PTP
1	Curas	266	461	407	394	306
2	Curat	1.023	1.135	1.052	999	852
3	Curanmor	361	521	632	546	389
4	Anirat	1.060	1.178	962	749	724
5	Judi	161	344	373	410	431
6	Peras/Ancam	81	126	164	149	160
7	Narkoba	1.038	1.187	1.439	1.890	856
Jumlah Kasus Menonjol		3.004	4.729	3.585	3471	3217
Jumlah Kasus		4.695	9.681	8.614	7610	6629

Sumber : Polresta Medan

Walaupun jumlah angka kriminalitas cenderung dapat terus ditekan dari tahun ke tahun, namun untuk meningkatkan citra kota yang aman dan nyaman, perlu kebijakan yang lebih terpadu untuk dapat terus menekan angka kriminalitas yang terjadi, khususnya terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan.

B. Perizinan dan Investasi

Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis ditingkat nasional mau pun tingkat regional dan lokal, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya strategis nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak ganda (*multiplier effect*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertumbuhan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkan akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah Kota Medan telah memiliki Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Badan tersebut berfungsi untuk mengendalikan pemberian izin dan non izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan melalui satu atap. Diantara izin yang proses administrasinya telah diserahkan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berasal dari Dinas Kesehatan, Bina Marga, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perhubungan.

Guna mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi dan terpusat satu pintu, masih perlu kebijakan kreatif untuk mendorong seluruh perizinan khususnya yang terkait dengan perizinan usaha dapat dikelola 1 (satu) SKPD secara keseluruhan, termasuk untuk meningkatkan iklim penanaman modal yang semakin kondusif dan menarik di Kota Medan.

2.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia

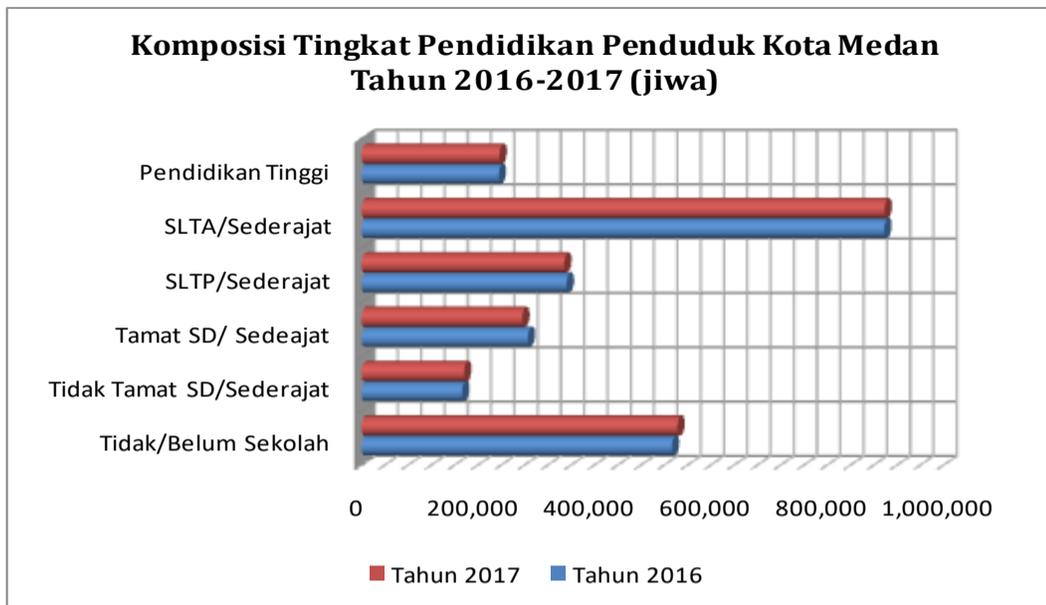
Pembangunan sumber daya manusia mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja tetapi juga terkait dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

A. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu bangsa. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah

menerima dan menyerap berbagai informasi pembangunan. Pendidikan mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti kesejahteraan keluarga. Dari Tabel sebelumnya nampak bahwa pada tahun 2017 persentase penduduk yang tidak/belum sekolah, tidak/belum tamat SD/ sederajat, tamat SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat, cenderung mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.342.752 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua) jiwa pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2013 atau menurun sebanyak 5,47 % (lima koma empat puluh tujuh persen). Sedangkan penduduk yang memiliki ijazah SLTA/ sederajat mengalami peningkatan sebanyak 898.476 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam) jiwa pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2013 atau meningkat sebanyak 5,77% (lima koma tujuh puluh tujuh persen), dan penduduk yang memiliki ijazah pendidikan tinggi mengalami peningkatan sebanyak 236.917 (dua ribu delapan ratus empat puluh tiga) pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2013 atau meningkat sebanyak 4,26% (empat koma dua puluh enam persen).

Perubahan komposisi tingkat penduduk seperti yang diuraikan di atas nampak bahwa hal yang cukup menggembirakan persentase jumlah penduduk yang telah mengeyam pendidikan tinggi di Kota Medan sampai tahun 2017 telah mendekati 10% (sepuluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi telah mengalami perkembangan, selain karena kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan. Proses pencerdasan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Medan dalam jangka panjang. Dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat diharapkan juga dapat terbentuk insan Kota Medan yang cerdas intelektual, emosional dan sosial, serta spiritual. Dinamika yang berkembang saat ini, aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan sentral dalam upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk lebih jelasnya komposisi tingkat pendidikan penduduk Kota Medan pada tahun 2017 dapat divisualisasikan pada Grafik berikut:



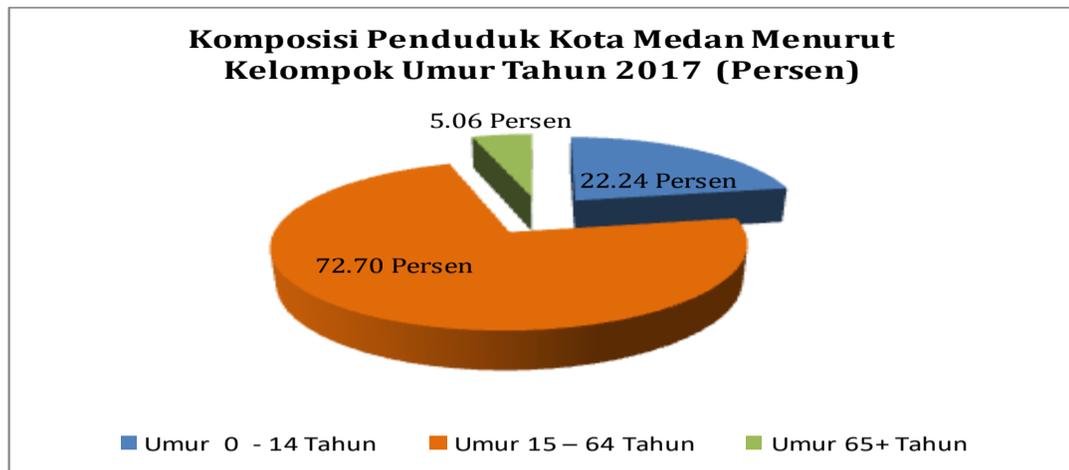
Grafik 2.29 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Medan
Tahun 2016-2017

Berdasarkan perkembangan dunia pendidikan saat ini, di berbagai jenjang pendidikan, Kota Medan sesungguhnya cukup potensial berkembang menjadi pusat pendidikan regional wilayah barat di luar Jawa.

B. Tingkat Ketergantungan

Indikator ketenagakerjaan diperoleh dari penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu penduduk yang termasuk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan menganggur. Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Komposisi penduduk Kota Medan secara signifikan tidak mengalami perubahan tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2013, walaupun jumlah penduduk secara administratif mengalami penurunan sebesar 10,66% (sepuluh koma enam puluh enam persen) pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2017 proporsi penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebesar 21,14% (dua puluh satu koma empat belas persen), penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebesar 73,48% (tujuh puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dan proporsi penduduk kelompok umur 65 (enam puluh lima) tahun ke atas sebesar 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) yang merupakan penduduk yang tidak produktif dan umumnya cenderung ditanggung oleh penduduk kelompok usia produktif. Komposisi penduduk tersebut akan berimplikasi pada kebijakan pembangunan kota dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, transportasi, serta pendidikan bagi anak-anak usia dini baik secara kualitas maupun kuantitas maupun dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.



Grafik 2.30 Komposisi Penduduk Kota Medan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017 (jiwa)

C. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Tiga pilihan yang dianggap paling penting yaitu, panjangumur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia disuatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Medan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Dengan demikian, IPM dapat dijelaskan dari berbagai indikator, diantaranya, angka melek huruf, lama sekolah, dan konsumsi perkapita.

Angka melek huruf di Kota Medan selama tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan. Peningkatan angka melek huruf tersebut menggambarkan menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara. Penurunan jumlah penduduk yang buta aksara selama periode tahun 2013-2017 diikuti dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah 11,41 (sebelas koma empat puluh satu) tahun kemudian meningkat menjadi 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) tahun untuk tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 12 (dua belas) tahun. Pada tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah telah mencapai 12 (dua belas) tahun.

Meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kota Medan tentu juga didukung konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2015. Konsumsi per kapita pada tahun 2014 meningkat sebesar 5,48% (lima koma empat puluh delapan persen) dibandingkan dengan pada tahun 2013. Pada tahun 2015 pertumbuhan konsumsi per kapita sebesar 3,72% (tiga koma tujuh puluh dua persen).

Berbagai indikator tersebut di atas dapat dipergunakan untuk menjelaskan IPM Kota Medan. IPM Kota Medan selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.49
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Manusia (%)	77,43	79,03	79,45	79.88	80.31

Sumber : BPS Kota Medan.

Dengan mengacu dari berbagai indikator tersebut dapat dikemukakan bahwa IPM Kota Medan selama tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan. IPM Kota Medan meningkat sebesar 1.6% (satu koma enam persen) pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 dan selanjutnya, IPM meningkat sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua persen) pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, kemudian IPM meningkat sebesar 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen) pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 IPM tumbuh sebesar 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen).

Peningkatan IPM Kota Medan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung semakin membaik, seiring dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Di samping itu, peningkatan IPM tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya yang ditandai dengan bertambahnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan meningkatnya konsumsi (daya beli) per kapita masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan atas profil pembangunan Kota Medan sebagaimana yang disajikan di atas, maka diketahui Kota Medan sesungguhnya terus tumbuh akan berkembang dari waktu ke waktu, dengan berbagai keberhasilan yang diprioritaskan diberbagai bidang pembangunan kota. Namun demikian, dibalik keberhasilan-keberhasilan tersebut, tentunya masih ada masalah dan tantangan pokok yang harus dapat diatasi secara bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* pembangunan kota.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2013-2017

Sebagaimana diketahui keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, arah kebijakan keuangan daerah adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Struktur APBD terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Selanjutnya, secara umum komponen APBD, terdiri atas:

A. Komponen Pendapatan.

Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintahan Kota Medan dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) jenis pendapatan, yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Khusus terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seterusnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. (b) Dana Alokasi Umum (DAU) dan (c) Dana Alokasi Khusus (DAK). Penetapan dan

penyesuaian alokasi pagu dana perimbangan pada masing-masing daerah diatur melalui Peraturan Presiden dan Menteri Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti, Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pajak Provinsi, bantuan dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya.

Berdasarkan atas komponen pendapatan daerah tersebut di atas, diketahui bahwa pendapatan daerah ada yang bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri dan ada juga yang berasal dari subsidi pemerintah tingkat atasan (provinsi/pusat).

B. Komponen Belanja

Anggaran Belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja Tidak Langsung Daerah adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja daerah ini terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja tak terduga; dan
 - f. belanja bantuan keuangan.
2. Belanja Langsung Daerah adalah belanja daerah yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja daerah ini terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, maka setiap daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan daerahnya dengan cara lebih mengoptimalkan belanja langsungnya dari pada belanja tidak langsung.

C. Komponen Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Selanjutnya:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Secara umum komponen pembiayaan difungsikan untuk tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah bila terjadi surplus atau defisit.

Selanjutnya, periode kinerja keuangan Kota Medan yang disajikan adalah untuk periode tahun 2013-2017, datanya diuraikan mulai tahun 2013 untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Data kinerja keuangan tahun 2017 disajikan adalah data yang belum diaudit, dan diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017.

Sesuai dengan prinsip “*Good Governance and Clean Government*”, sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan umum anggaran adalah tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui suatu sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian. Selanjutnya, untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya antara lain mengelola keuangan daerah mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua Peraturan Menteri ini mengubah secara signifikan berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan.

Dalam kurun waktu 2016 -2021 terus diupayakan peningkatan dan pemantapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut serta berbagai perubahannya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2016-2021 akan selalu melakukan penyesuaian dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan petunjuk teknisnya serta perkembangan dengan tetap mempertimbangkan berbagai kondisi. Sama halnya dalam periode Tahun 2013-2017, proses dan tahapan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2016-2021 diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) sebagai proses awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah selalu memperhatikan keterkaitan antara unsur perencanaan pembangunan daerah dan anggaran. Oleh karena itu, penyusunan KUA-APBD dan PPAS-APBD setiap tahun harus memedomani dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan anggaran pembiayaan daerah, Pemerintahan Kota Medan mengambil kebijakan anggaran

yang berimbang (*balance budget*). Walaupun kebijakan ini tidak diharuskan, langkah ini perlu dilakukan, artinya walaupun terjadi defisit atau surplus anggaran yaitu suatu kebijakan dalam mengatasi pembiayaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber penerimaan lain yang sah. Pinjaman daerah ataupun penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah tidak ada lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Walaupun Pemerintah Kota Medan diperbolehkan mengambil kebijakan anggaran yang defisit, namun dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah (Penyusunan APBD), selama belum ada kebutuhan daerah yang mendesak untuk melakukan kebijakan tersebut sebaiknya anggaran yang defisit tidak dilakukan. Demikian juga sebaliknya, Pemerintahan Kota Medan juga tidak perlu mengambil kebijakan anggaran yang surplus. Meskipun Pemerintah Kota Medan sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja, namun prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel masih perlu ditingkatkan. Karena itu, titik berat anggaran belanja daerah akan diarahkan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya dalam menangani berbagai permasalahan perkotaan metropolitan. Titik berat anggaran tersebut akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan program pendidikan, program kesehatan, program pengembangan fasilitas social, drainase, infrastruktur jalan, dan fasilitas umum serta utilitas lainnya yang memadai.

Selanjutnya, untuk anggaran belanja modal/belanja pembangunan diprioritaskan kepada kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Kebijakan penyusunan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur sebaiknya melibatkan peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat, sehingga program ini dapat mengurangi beban APBD dan menciptakan lapangan kerja baru, termasuk menurunkan angka kemiskinan serta untuk dapat menumbuhkan rasa memiliki bagi warga kota. Selanjutnya untuk mengoptimalkan pengimplementasian anggaran berbasis kinerja, maka anggaran belanja maupun pembangunan hendaklah benar-benar dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah disusun dan direncanakan. Untuk itu akan disusun standar pelayanan minimum serta standar analisa belanja oleh Pemerintah Kota Medan. Sehingga dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan kota, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, arah kebijakan keuangan daerah adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai

dari dan atas beban APBD. Pengalokasian Belanja Daerah ini didasarkan kepada anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian input dan hasil yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam masing-masing kelompok belanja tersebut

Tujuan utama dari pengelolaan belanja daerah adalah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran/belanja Pemda. Ada beberapa strategi kebijaksanaan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, adanya komitmen dan keinginan Pemda baik pihak eksekutif maupun pihak legislatif untuk benar-benar mengalokasikan dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, adanya desentralisasi manajemen belanja daerah kepada SKPD (Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendekatkan pengelolaan keuangan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi itu sendiri. Ketiga, perlu peningkatan peran swasta untuk turut berinvestasi menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang bersifat komersial, sehingga anggaran Pemda dapat diprioritaskan untuk peningkatan penyediaan jasa umum dan pemberdayaan masyarakat.

3.1.1. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

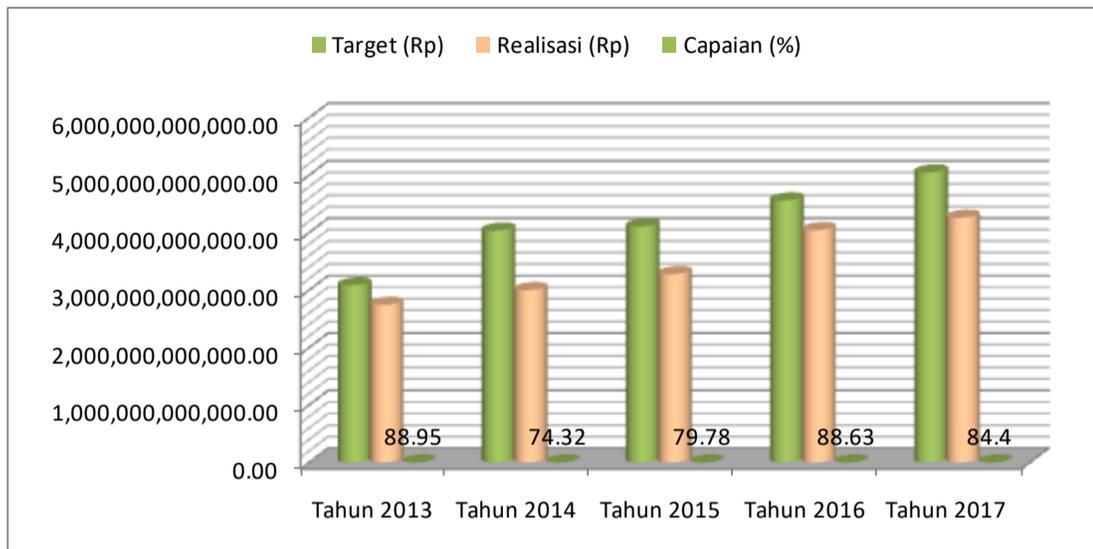
Perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Medan dari tahun ke tahun terus meningkat, tetapi Kota Medan rata-rata hanya mampu mencapai 83,14% (delapan tiga koma empat belas persen) dari target yang dianggarkan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Tabel 3.1 berikut ini menyajikan perkembangan target dan realisasi pendapatan Kota Medan Tahun Anggaran 2013 sampai 2017.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	3.083.140.290.623,00	2.742.586.961.423,98	88,95
2014	4.034.121.333.860,45	2.998.203.912.475,38	74,32
2015	4.106.900.462.377,32	3.276.344.285.159,73	79,78
2016	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62	88,63
2017	5.046.111.839.162,45	4.259.044.490.715,42	84,40

Rata-rata	4.166.137.291.113,42	3.463.659.095.601,23	83,14
-----------	----------------------	----------------------	-------

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Grafik 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, rata-rata target Pendapatan Daerah sebesar Rp4.166.137.291.113,42 dengan realisasi sebesar Rp3.463.659.095.601,23. Berdasarkan atas data dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sampai 2017, maka dapat diperoleh tingkat pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan Kota Medan.

Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah periode tahun anggaran 2013-2017 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

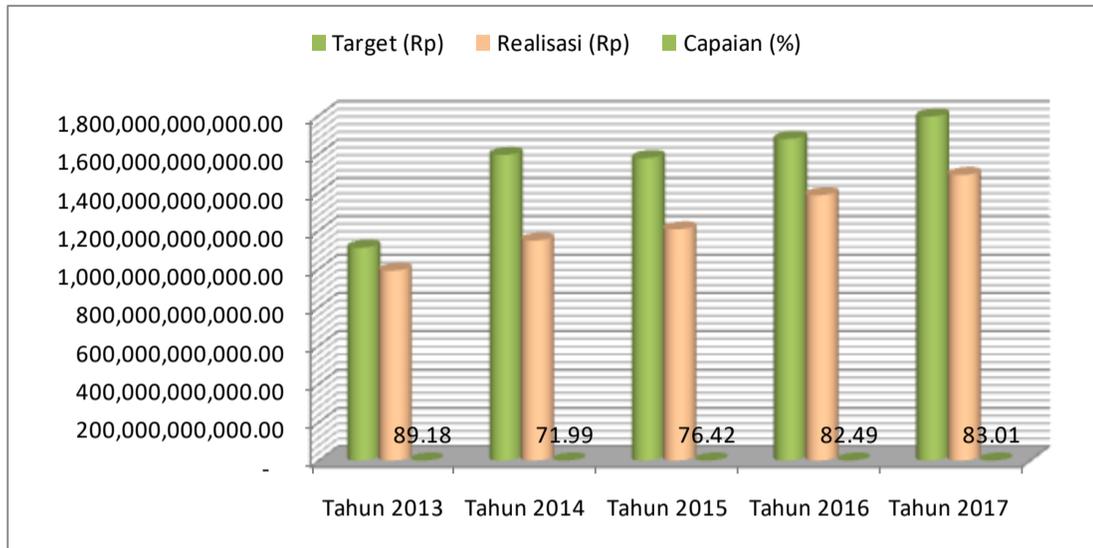
Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rata-rata target selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp1.551.198.729.308,24 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp1.243.668.194.743,46. Tingkat capaian realisasi pendapatan asli daerah hanya 80.17%. Ringkasan target dan realisasi pendapatan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	1,110,469,593,763.00	990,300,499,143.98	89.18
2014	1,594,454,835,916.45	1,147,901,461,607.38	71.99
2015	1,578,247,819,724.32	1,206,169,709,147.73	76.42
2016	1,678,116,623,125.00	1,384,246,114,729.62	82.49
2017	1,794,704,774,012.45	1,489,723,189,088.60	83.01

Rata-rata	1,551,198,729,308.24	1,243,668,194,743.46	80.17
-----------	----------------------	----------------------	-------

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

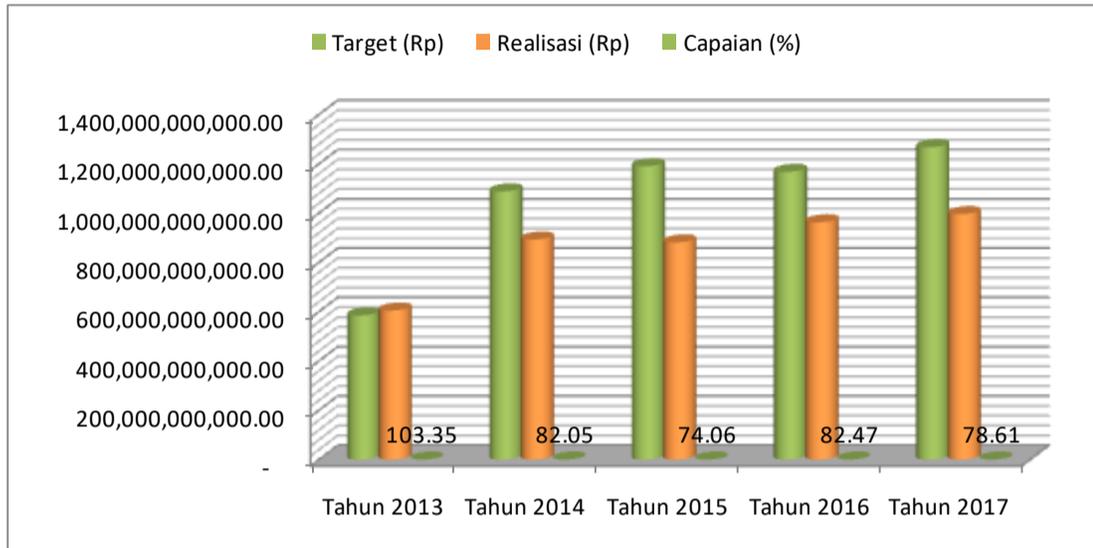
Perkembangan realisasi pajak daerah selama periode tahun anggaran 2013-2017 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Rata-rata target selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar Rp1.059.505,893,409,00 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp867.477.146.399,26. Tingkat capaian realisasi pajak daerah hanya 81.88% (delapan satu koma delapan puluh delapan persen). Ringkasan target dan realisasi pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	585,029,048,289.00	604,607,263,504.07	103.35
2014	1,087,999,279,770.00	892,674,245,233.74	82.05
2015	1,189,999,279,770.00	881,346,719,012.01	74.06
2016	1,167,399,279,770.00	962,728,267,172.53	82.47

2017	1,267,102,579,446.00	996,029,237,073.94	78.61
Rata-rata	1,059,505,893,409.00	867,477,146,399.26	81.88

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



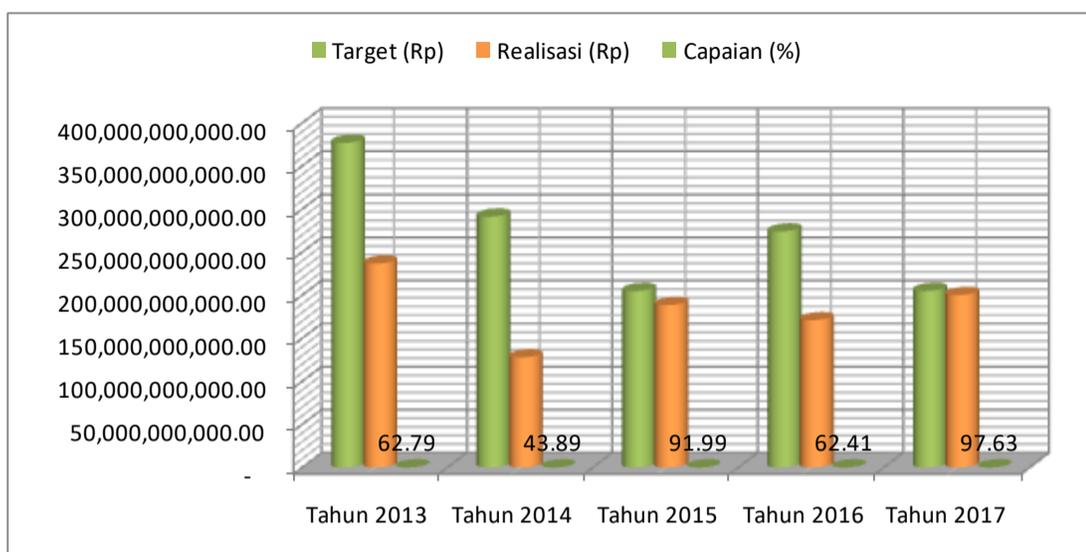
Grafik 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, rata-rata target retribusi daerah sebesar Rp270.421.260.778,80 dan realisasinya belum mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp184.831.421.619,32, dan rata-rata capaian selama lima tahun hanya 68,35% (enam puluh delapan koma tiga puluh lima persen). Berikut ini ringkasan target dan realisasi pendapatan retribusi daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	376,939,628,894.00	236,694,879,407.56	62.79
2014	291,291,500,000.00	127,839,652,517.53	43.89
2015	204,871,885,000.00	188,459,795,126.50	91.99
2016	273,992,900,000.00	171,006,302,216.00	62.41
2017	205,010,390,000.00	200,156,478,829.00	97.63
Rata-rata	270,421,260,778.80	184,831,421,619.32	68.35

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



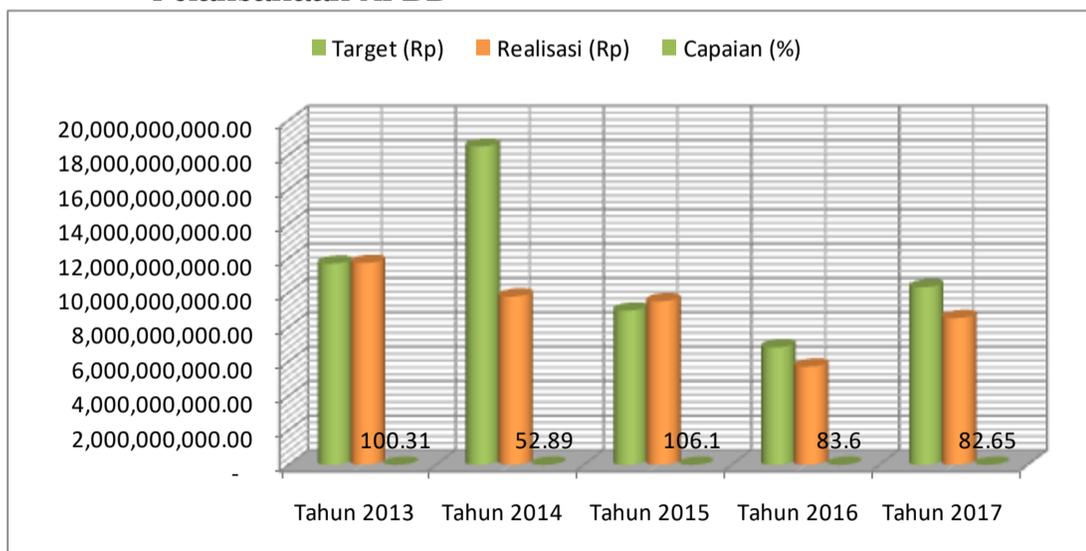
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah. Selama Tahun 2013-2017, rata-rata target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.255.305.380,00 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp9.048.003.502,11

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	11,691,162,561.00	11,727,355,511.57	100.31
2014	18,491,162,561.00	9,780,305,586.00	52.89
2015	8,957,540,954.00	9,503,605,764.00	106.10
2016	6,823,791,825.00	5,705,018,825.00	83.60
2017	10,312,868,999.00	8,523,731,824.00	82.65
Rata-rata	11,255,305,380.00	9,048,003,502.11	80.39

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



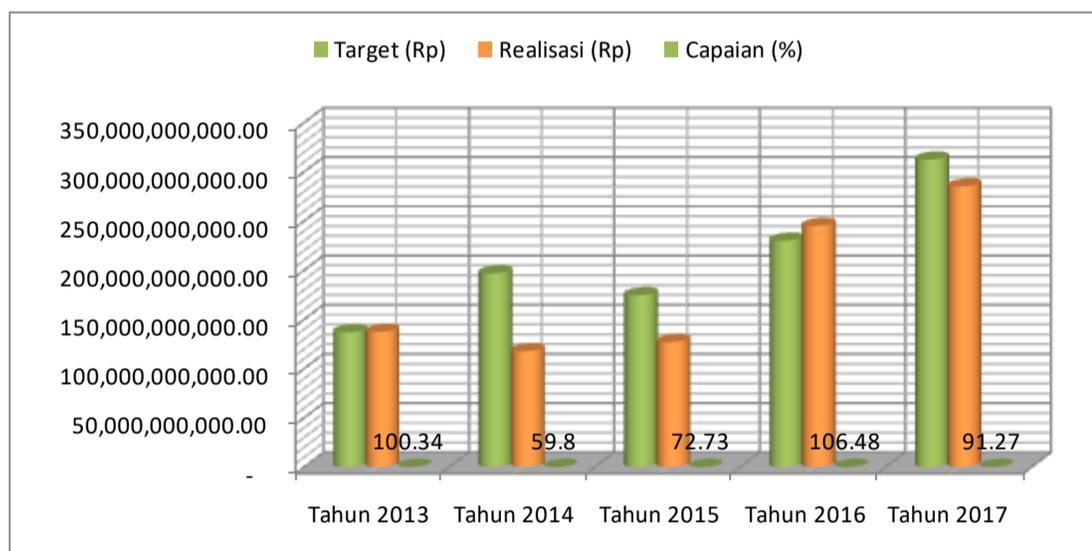
Grafik 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi; (f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h) Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, rata-rata target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp210.016.269.740,44 sedangkan realisasinya mencapai Rp182.311.623.222,77; disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	136,809,754,019.00	137,271,000,720.78	100.34
2014	196,672,893,585.45	117,607,258,270.11	59.80
2015	174,419,114,000.32	126,859,589,245.22	72.73
2016	229,900,651,530.00	244,806,526,516.09	106.48
2017	312,278,935,567.45	285,013,741,361.66	91.27
Rata-rata	210,016,269,740.44	182,311,623,222.77	86.81

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Grafik 3.6 Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

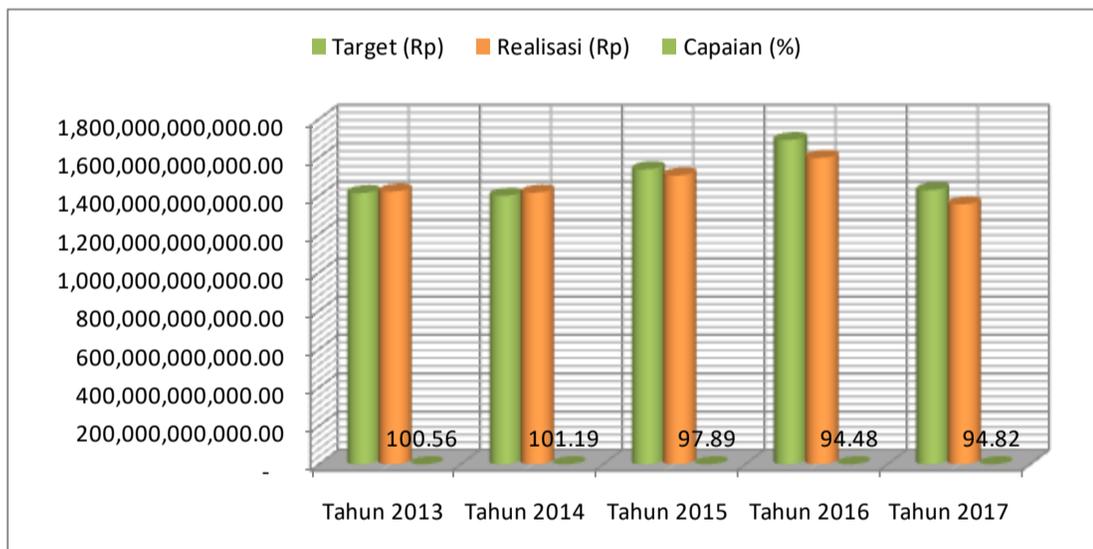
B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas : (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum (DAU) dan (c) Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara keseluruhan, rata-rata target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 sebesar Rp1.495.044.118.785,00. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, rata-rata Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.459.940.367.053,20; disajikan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	1,414,557,874,786.00	1,422,441,737,194.00	100.56
2014	1,400,538,492,223.00	1,417,185,769,192.00	101.19
2015	1,538,855,917,643.00	1,506,316,349,586.00	97.89
2016	1,691,495,158,660.00	1,598,113,512,931.00	94.48
2017	1,429,773,150,613.00	1,355,644,466,363.00	94.82
Rata-rata	1,495,044,118,785.00	1,459,940,367,053.20	97.65

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



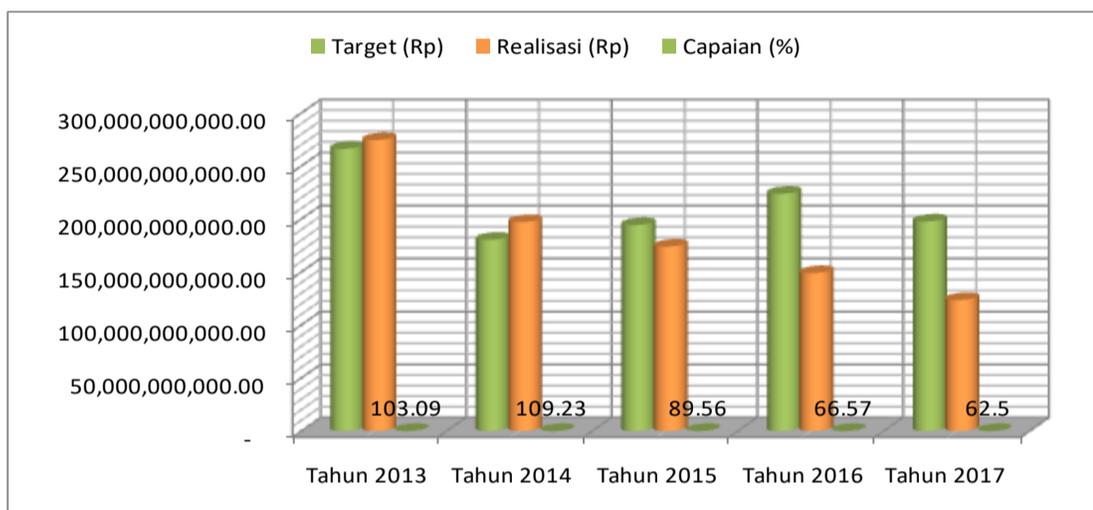
Grafik 3.7 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Secara keseluruhan, rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebesar Rp212.528.112.185,00 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp183.649.247.965.20; disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	266,272,270,786.00	274,493,581,754.00	103.09
2014	180,450,902,223.00	197,098,179,192.00	109.23
2015	194,334,613,643.00	174,054,637,586.00	89.56
2016	223,880,988,660.00	149,026,739,931.00	66.57
2017	197,701,785,613.00	123,573,101,363.00	62.50
Rata-rata	212,528,112,185.00	183,649,247,965.20	86.41

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



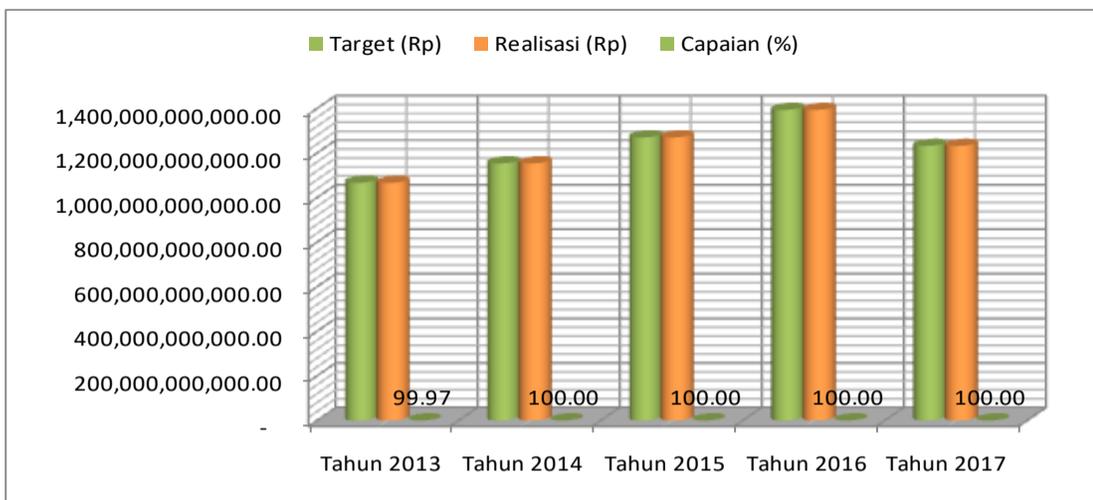
Grafik 3.8 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Secara keseluruhan, rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kota Medan selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebesar Rp1.223.260.232.600,00 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp1.223.192.722.888.00; disajikan pada Tabel 3.9

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	1,066,691,104,000.00	1,066,353,555,440.00	99.97
2014	1,153,789,320,000.00	1,153,789,320,000.00	100.00
2015	1,270,244,794,000.00	1,270,244,794,000.00	100.00
2016	1,393,504,580,000.00	1,393,504,580,000.00	100.00
2017	1,232,071,365,000.00	1,232,071,365,000.00	100.00
Rata-rata	1,223,260,232,600.00	1,223,192,722,888.00	99.99

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



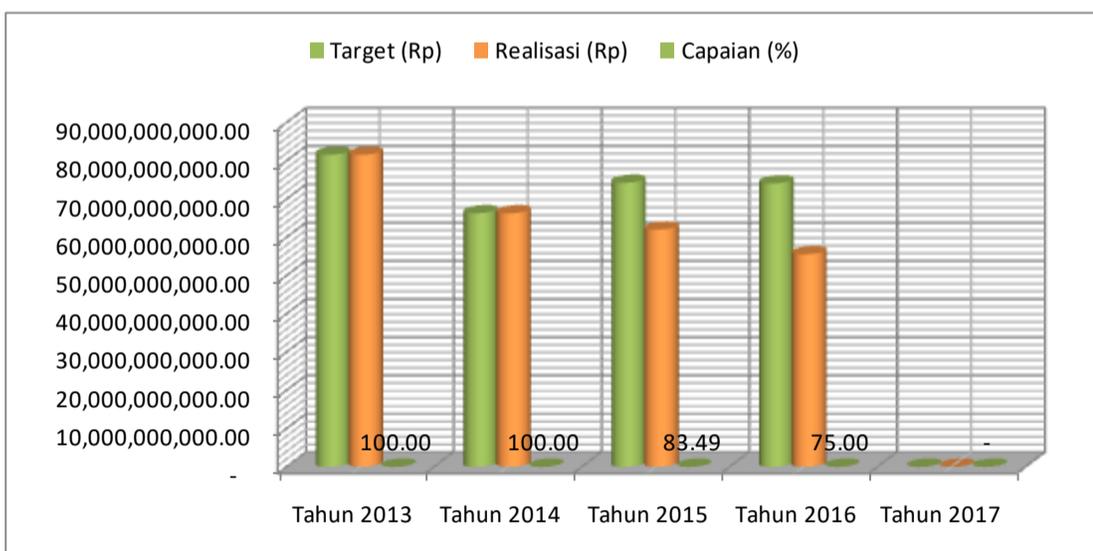
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Secara keseluruhan, rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kota Medan selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebesar Rp59.255.774.000,00 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp53.098.396.200,00; disajikan pada Tabel 3.10

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	81,594,500,000.00	81,594,600,000.00	100.00
2014	66,298,270,000.00	66,298,270,000.00	100.00
2015	74,276,510,000.00	62,016,918,000.00	83.49
2016	74,109,590,000.00	55,582,193,000.00	75.00
2017	-	-	0.00
Rata-rata	59,255,774,000.00	53,098,396,200.00	89.61

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Grafik 3.10 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2015 dan 2016 hanya mencapai 81,07% (delapan puluh satu koma nol tujuh persen) dan 75,00% (tujuh puluh lima persen) karena pada Tahun 2015 Anggaran Dana Alokasi Khusus untuk sektor Kesehatan, infrastruktur jalan dan Keluarga Berencana tidak direalisasikan semua. Sedangkan pada Tahun 2016 penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus yang tidak direalisasikan semua adalah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, keluarga berencana, dan transportasi.

Berdasarkan atas data di atas diketahui, realisasi untuk dana perimbangan tidak mencapai 100% (seratus persen), sebagaimana dianggarkan hal itu bukan disebabkan tingginya proyeksi yang dilakukan, tetapi semata-mata disebabkan hanya karena adanya efisiensi dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari DAK setiap tahunnya.

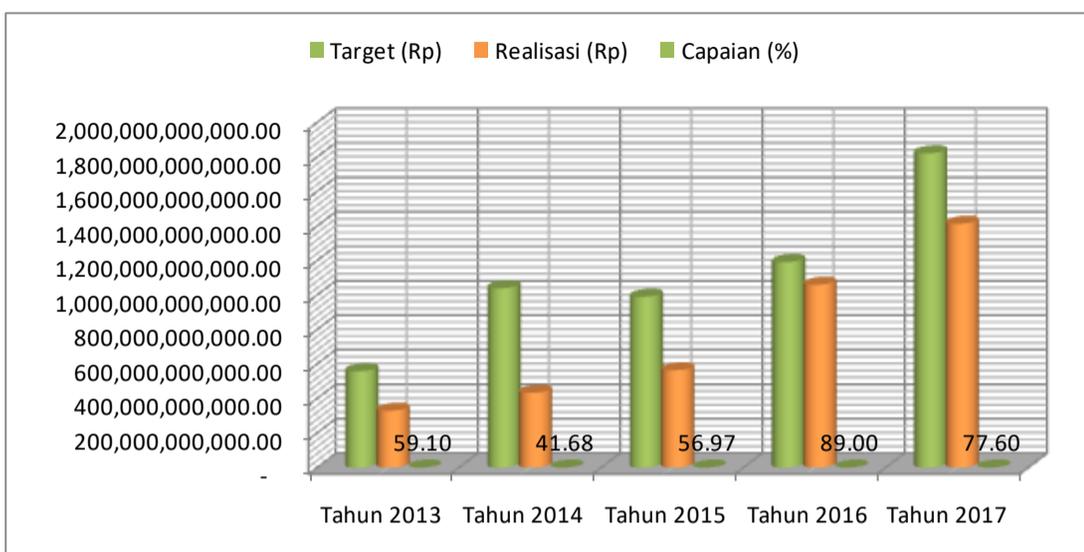
C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara akumulasi tidak terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, ditargetkan rata-rata sebesar Rp1.119.894.443.020,17 dengan realisasi sebesar Rp760.050.533.804,60, dapat dilihat pada tabel 3.11

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	558,112,822,074.00	329,844,725,086.00	59.10
2014	1,039,128,005,721.00	433,116,681,676.00	41.68
2015	989,796,725,010.00	563,858,226,426.00	56.97
2016	1,190,800,747,758.87	1,059,756,200,571.00	89.00
2017	1,821,633,914,537.00	1,413,676,835,264.00	77.60
Rata-rata	1,119,894,443,020.17	760,050,533,804.60	67.87

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



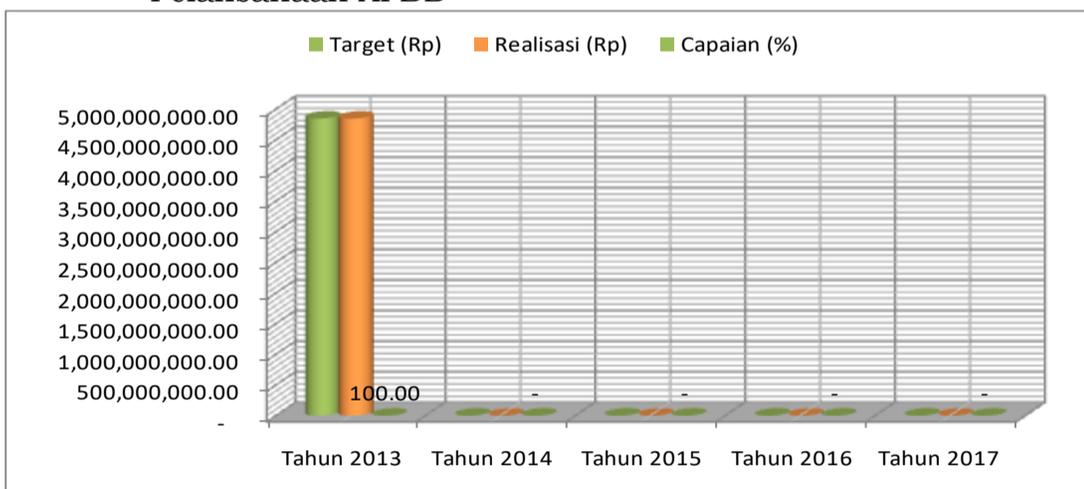
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp.4.850.000.000 pada tahun 20175 sedangkan realisasinya Rp4.850.000.000,00 Penerimaan tersebut hanya terjadi pada tahun 2013, pada tahun 2014 sampai tahun 2017 tidak ada pendapatan hibah Kota Medan. Pada Tabel 3.12 diketahui Sumber pendapatan hibah tersebut berasal dari Pemerintah.

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	100,00
2014	-	-	0,00
2015	-	-	0,00
2016	-	-	0,00
2017	-	-	0,00

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Grafik 3.12 Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Medan

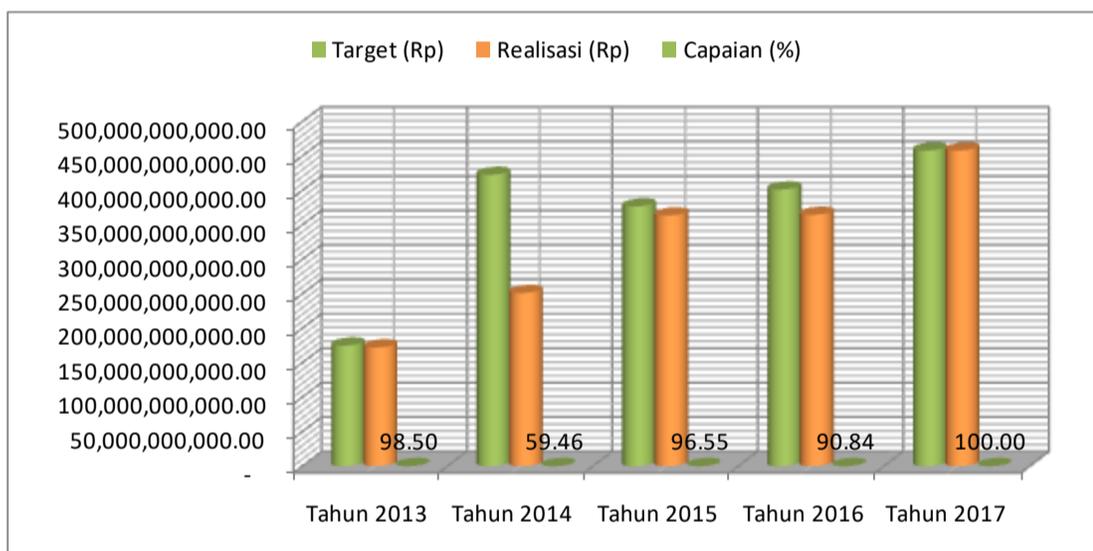
Tahun Anggaran 2013-2017

Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, rata-rata target lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp366.820.837.838,40 sedangkan realisasinya sebesar Rp322.053.927.300,00, disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	175,020,949,000.00	172,402,749,500.00	98.50
2014	422,826,430,000.00	251,397,130,000.00	59.46
2015	376,753,061,192.00	363,758,805,000.00	96.55
2016	401,536,937,000.00	364,744,140,000.00	90.84
2017	457,966,812,000.00	457,966,812,000.00	100.00
Rata-rata	366,820,837,838.40	322,053,927,300.00	87.80

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Grafik 3.13 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya rata-rata periode Tahun Anggaran 2013-2017, dari target sebesar Rp736.564.084.501,77 realisasinya mencapai Rp423.894.972.974,60, disajikan pada tabel 3.14.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	355,199,433,074.00	123,882,707,936.00	34.88

2014	581,636,475,721.00	154,099,451,676.00	26.49
2015	602,314,863,818.00	190,770,621,426.00	31.67
2016	788,153,451,758.87	695,012,060,571.00	88.18
2017	1,355,516,198,137.00	955,710,023,264.00	70.51
Rata-rata	736,564,084,501.77	423,894,972,974.60	57.55

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



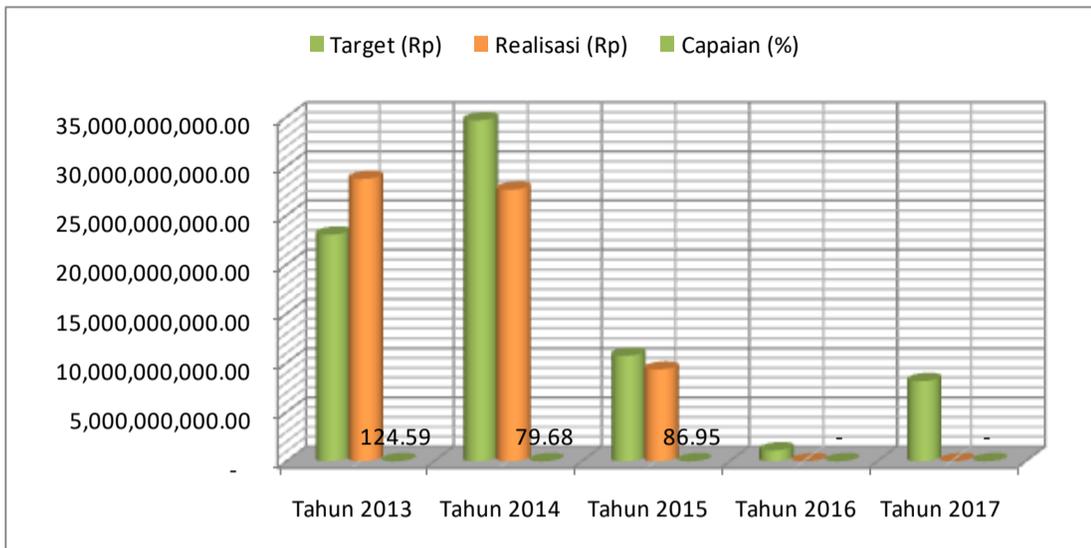
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya rata-rata periode Tahun Anggaran 2013-2017, dari target Rp15.539.520.680,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp13.131.633.530,00, disajikan pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Dari
Prov/Kab/Kota/Lainnya Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	23,042,440,000.00	28,709,267,650.00	124.59
2014	34,665,100,000.00	27,620,100,000.00	79.68
2015	10,728,800,000.00	9,328,800,000.00	86.95
2016	1,110,359,000.00	-	0.00
2017	8,150,904,400.00	-	0.00
Rata-rata	15,539,520,680.00	13,131,633,530.00	84.50

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Grafik 3.15 Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Dari Prov/Kab/Kota/Lainnya Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Berdasarkan atas gambar perkembangan pendapatan daerah selama Tahun 2013-2017 diketahui, realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2013 s/d 2017 telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 11% (sebelas persen). Peningkatan tersebut ditopang oleh adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang selama 5 (lima) tahun tumbuh sebesar 9% (sembilan persen), dana perimbangan menurun rata-rata sebesar 1% (satu persen) per tahun, dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar 46% (empat puluh enam persen). Secara lengkap gambaran perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2013 s/d Tahun 2017 Kota Medan

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	604,607,263,504.07	892,674,245,233.74	881,346,719,012.01	962,728,267,172.53	996,029,237,073.94	15%
Pajak Hotel	54,668,966,646.09	65,859,844,092.43	76,944,413,767.80	82,051,748,104.24	82,304,995,232.53	11%
Pajak Restoran	70,485,458,322.22	83,175,078,002.32	93,126,034,373.21	107,527,412,598.21	124,399,491,333.17	15%
Pajak Hiburan	15,612,200,659.93	21,586,854,878.77	27,159,428,408.27	30,117,801,025.90	31,162,476,865.14	20%
Pajak Reklame	28,005,529,193.00	26,976,951,857.70	23,348,045,567.70	17,708,742,784.00	12,834,133,038.25	-20%
Pajak penerangan Jalan	172,666,073,481.00	146,304,763,696.00	167,031,678,022.00	190,552,925,861.00	222,310,180,341.00	7%
Pajak Parkir	5,884,401,086.84	6,862,498,055.34	7,450,138,974.07	8,306,835,014.95	12,411,895,289.54	22%
BPHTB	3,067,489,752.28	259,114,429,583.50	243,748,816,689.00	228,392,967,245.00	201,806,504,023.00	2081%
PBB	-	274,853,657,632.00	234,325,129,214.00	289,000,081,972.00	298,008,837,235.00	3%
Pajak Air Tanah	254,217,144,362.71	7,940,167,435.68	8,213,033,995.96	9,069,752,567.23	10,790,723,716.31	-16%
Pajak Sarang Burung Walet		-	-			
Pendapatan Retribusi Daerah	236,694,879,407.56	127,839,652,517.53	188,459,795,126.50	171,006,302,216.00	200,156,478,829.00	2%
Jasa Retribusi Umum	114,358,586,390.00	33,332,919,450.00	39,694,058,957.00	40,934,916,337.00	49,097,779,493.00	-7%
Retribusi Jasa Usaha	19,609,029,014.56	14,933,645,411.16	12,515,813,122.00	12,180,322,779.00	7,448,652,959.00	-20%
Retribusi Perizinan Tertentu	102,727,264,003.00	79,573,087,656.37	136,249,923,047.50	117,891,063,100.00	142,385,800,383.00	14%
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	11,727,355,511.57	9,780,305,586.00	9,503,605,764.00	5,705,018,825.00	8,523,731,824.00	-2%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	151,890,800.00	183,319,415.00	561,243,000.00	0.00	-	32%

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	11,350,767,030.57	9,253,891,193.00	8,942,362,764.00	5,705,018,825.00	8,523,731,824.00	-2%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta	224,697,681.00	343,094,978.00		0.00		0%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	137,271,000,720.78	117,607,258,270.11	126,859,589,245.22	244,806,526,516.09	285,013,741,361.66	18%
Jasa Giro	15,772,480,352.93	7,152,735,788.04	4,182,777,194.00	9,217,254,680.00	16,958,489,044.00	26%
Denda Pajak	1,829,759,846.16	2,035,669,936.38	1,808,178,689.81	2,549,553,623.58	1,094,405,066.18	6%
Pendapatan dari Pengembalian	947,574,864.00	12,476,906,553.21	11,341,964,633.82	18,182,929,852.26	33,190,720,973.08	330%
Penerimaan Lain-lain	4,717,345,668.35					0%
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	15,303,840.00					0%
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3,152,251,178.34					0%
Fasos dan Fasum	22,800,000.00					
Pendapatan BLUD		95,941,945,992.48	109,526,668,727.59	172,317,532,360.25	157,710,936,278.00	16%
Pendapatan atas Kekurangan BHP Provinsi	110,813,484,971.00					-25%
Dana Kapitasi				42,539,256,000.00	-	-25%
Total Pendapatan Asli Daerah	990,300,499,143.98	1,147,901,461,607.38	1,206,169,709,147.73	1,384,246,114,729.62	1,489,723,189,088.00	9%
DANA PERIMBANGAN						
Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	274,493,581,754.00	197,098,179,192.00	174,054,637,586.00	149,026,739,931.00	123,573,101,363.00	-18%
Dana Alokasi Umum	1,066,353,555,440.00	1,153,789,320,000.00	1,270,244,794,000.00	1,393,504,580,000.00	1,232,071,365,000.00	4%
Dana Alokasi Khusus	81,594,600,000.00	66,298,270,000.00	62,016,918,000.00	55,582,193,000.00		-34%

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Total Dana Perimbangan	1,422,441,737,194.00	1,417,185,769,192.00	1,506,316,349,586.00	1,598,113,512,931.00	1,355,644,466,363.00	-1%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
Hibah	4,850,000,000.00					-25%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	123,882,707,936.00	154,099,451,676.00	190,770,621,426.00	695,012,060,571.00	955,710,023,264.00	88%
Dana Penyesuaian & Otonomi	172,402,749,500.00	251,397,130,000.00	363,758,805,000.00	364,744,140,000.00	457,966,812,000.00	29%
Bantuan Keuangan dari provinsi dan Pemerintah lainnya	28,709,267,650.00	27,620,100,000.00	9,328,800,000.00	0.00	-	
Total Lain-Lain Pendapatan yg sah	329,844,725,086.00	433,116,681,676.00	563,858,226,426.00	,059,756,200,571.00	1,413,676,835,264.00	46%
TOTAL PENDAPATAN	2,742,586,961,423.98	2,998,203,912,475.38	3,276,344,285,159.73	4,042,115,828,231.62	4,259,044,490,715.42	11%

Dari gambaran tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang pada tahun 2013 baru sebesar Rp2.742.586.961.423,98, dan selama periode 5 (lima) tahun telah mengalami peningkatan Pendapatan Daerah dengan rata-rata sebesar 11% (sebelas persen). Sehingga pada tahun 2017 Pendapatan Daerah menjadi Rp4.259.044.490.715,42. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang pada tahun 2013 sebesar Rp990.300.499.143,98. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar 9% (sembilan persen) sehingga pada tahun 2017 PAD Kota Medan mencapai Rp1.489.723.189.088,60. Pendapatan Asli Daerah ini ditopang oleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Selanjutnya untuk dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2013 sebesar Rp1.422.441.737.194,00. Selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1% (satu persen). Sehingga pada tahun 2017, Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan menjadi Rp1.355.644.466.363,00.

Dana perimbangan berasal dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Jumlah penerimaan dana perimbangan pada tahun 2013 mendapatkan proporsi sebesar 51,86% (lima puluh satu koma delapan puluh enam persen) dari total keseluruhan pendapatan, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan proporsi menjadi sebesar 32,43% (tiga puluh dua koma empat puluh tiga persen). Penurunan ini disebabkan adanya penurunan proporsi Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Demikian juga dengan penerimaan DAU yang mengalami penurunan proporsi dari 38,88% di tahun 2013 menjadi 29,48% (dua puluh sembilan koma empat puluh delapan persen) di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan sumber pendapatan Pemerintah Kota Medan terhadap dana perimbangan relatif semakin rendah. Menurunnya dana perimbangan menunjukkan bahwa semakin mandiriya Pemerintah Kota Medan dalam mengelola dan memaksimalkan pendapatan dari sektor- sektor lain.

Tingginya proporsi Dana Perimbangan dalam APBD suatu daerah, terjadi karena sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, membawa konsekuensi terhadap peningkatan pembiayaan penerimaan untuk keperluan belanja tidak langsung yang sebagian besar dibiayai dari DAU. Pada tahun 2013 jumlah realisasi penerimaan Pemerintah Kota Medan yang berasal dari DAU adalah sebanyak Rp1.066.353.555.440,00 atau mencapai proporsi 38,88% (tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan persen) dari struktur APBD. Jumlah penerimaan DAU setiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 4% (empat persen) per tahun

sampai tahun 2016, tetapi tahun 2017 jumlah realisasi penerimaan DAU turun menjadi Rp1.232.071.365.000,00 dan secara proporsi DAU dari tahun 2013 terus mengalami penurunan sampai tahun 2015. Namun ke depan, sejalan dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ruang untuk meningkatkan PAD Kota Medan masih terbuka, karena kedua komponen tersebut umumnya cukup potensial bagi daerah. Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintahan Daerah Kota Medan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan target penerimaan, diantaranya:

1. Terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tidak membebani masyarakat, misalnya dengan melakukan penggalian sumber-sumber PAD, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Beberapa pajak daerah yang menjadi primadona PAD Kota Medan, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame serta pajak lainnya yang perlu diupayakan terus untuk diintensifkan penerimaannya.
2. Melakukan upaya intensifikasi PBB dan BPHTB, bekerja sama dengan kantor Pelayanan Pajak PBB untuk selalu melakukan pembaharuan data objek pajak.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah terhadap penyimpangan prosedur sesuai dengan ketentuan yang dapat merugikan Pemerintahan Daerah, baik secara yuridis, teknis maupun penatausahaan.

Tabel 3.17
Proporsi Pendapatan Dalam Struktur APBD
Tahun 2013 s/d Tahun 2017 Kota Medan (%)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah	22.05%	29.77%	26.90%	23.82%	23.89%
Pajak Hotel	1.99%	2.20%	2.35%	2.03%	1.97%
Pajak Restoran	2.57%	2.77%	2.84%	2.66%	2.98%
Pajak Hiburan	0.57%	0.72%	0.83%	0.75%	0.75%
Pajak Reklame	1.02%	0.90%	0.71%	0.44%	0.27%
Pajak penerangan Jalan	6.30%	4.88%	5.10%	4.71%	5.32%
Pajak Parkir	0.21%	0.23%	0.23%	0.21%	0.30%
BPHTB	0.11%	8.64%	7.44%	5.65%	4.83%
PBB	0.00%	9.17%	7.15%	7.15%	7.23%
Pajak Air Tanah	9.27%	0.26%	0.25%	0.22%	0.26%
Pajak Sarang Burung Walet					
Pendapatan Retribusi Daerah	8.63%	4.26%	5.75%	4.23%	4.76%
Jasa Retribusi Umum	4.17%	1.11%	1.21%	1.01%	1.17%
Retribusi Jasa Usaha	0.71%	0.50%	0.38%	0.30%	0.18%
Retribusi Perizinan Tertentu	3.75%	2.65%	4.16%	2.92%	3.41%
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	0.43%	0.33%	0.29%	0.14%	0.20%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	0.41%	0.31%	0.27%	0.14%	0.20%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta			0.00%	0.00%	0.00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.01%	3.92%	3.87%	6.06%	4.89%
Jasa Giro	0.58%	0.24%	0.13%	0.23%	0.40%

URAIAN		2013	2014	2015	2016	2017
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Denda Pajak	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%
	Pendapatan dari Pengembalian	0.03%	0.42%	0.35%	0.45%	0.67%
	Penerimaan Lain-lain	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Fasos dan Fasum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Pendapatan BLUD	0.00%	3.20%	3.34%	4.26%	3.77%
	Pendapatan atas Kekurangan BHP Provinsi	4.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Dana Kapitasi	0.00%	0.00%	0.00%	1.05%	0.00%
	Total Pendapatan Asli Daerah	36.11%	38.29%	36.81%	34.25%	33.74%
	Dana Perimbangan					
	Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	10.01%	6.57%	5.31%	3.69%	2.96%
	Dana Alokasi Umum	38.88%	38.48%	38.77%	34.47%	29.48%
	Dana Alokasi Khusus	2.98%	2.21%	1.89%	1.38%	0.00%
	Total Dana Perimbangan	51.86%	47.27%	45.98%	39.54%	32.43%
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					
	Hibah	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	4.52%	5.14%	5.82%	17.19%	22.87%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6.29%	8.38%	11.10%	9.02%	10.96%
	Bantuan Keuangan dari provinsi dan Pemerintah lainnya	1.05%	0.92%	0.28%	0.00%	0.00%
	Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.03%	14.45%	17.21%	26.22%	33.82%
	TOTAL PENDAPATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Dalam kaitan kebijakan di atas maka beberapa langkah perlu diupayakan terkait dengan Pendapatan Daerah yaitu (a) Pendapatan Asli Daerah (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain Pendapatan yang sah. Dalam perencanaan pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan tersebut, objek penerimaan dan rincian objek penerimaan.

Dalam upaya peningkatan PAD tidak ditetapkan kebijakan pemerintah yang dapat memberatkan subjek pajak (masyarakat dan dunia usaha). Oleh karena itu dalam penetapan PAD upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyederhanaan prosedur dan sistem administrasi pemungutan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sejalan dengan perkembangan Kota ke depan maka dinamika Kota semakin meningkat. Mobilisasi penduduk Hinterland, antar daerah dalam provinsi maupun luar provinsi akan semakin meningkat. Fungsi Kota sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Pemerintahan dan Pusat perdagangan dan industri akan mengalami dinamika yang lebih tinggi, khususnya di wilayah-wilayah pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini akan membutuhkan sarana dan prasarana pelayanan dari pemerintah dan peluang usaha bagi masyarakat khususnya di bidang perdagangan, pariwisata, perindustrian, jasa dan lain sebagainya.

Meningkatnya pelayanan Pemerintah dan aktivitas dunia usaha akan berdampak pada peningkatan PAD baik melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah akan diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan dan keberhasilan pembangunan. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan kota sebagai pusat konsentrasi kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan akan dapat mendorong berkembangnya potensi Pajak Daerah terutama dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan, serta Pajak lainnya. Sejalan dengan efektivitas penggalan potensi daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan retribusi sejalan dengan peningkatan pelayanan, baik pelayanan jasa usaha maupun pelayanan perizinan. Diharapkan hubungan efektivitas pemanfaatan potensi daerah mempunyai hubungan linear dan proporsional. Sebaliknya hubungan linear dan proporsional ini dipertahankan dalam penerimaan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah bersumber dari penjualan aset daerah dan penerimaan jasa giro, sehingga terjadi peningkatan penerimaan daerah.

3.1.2. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah

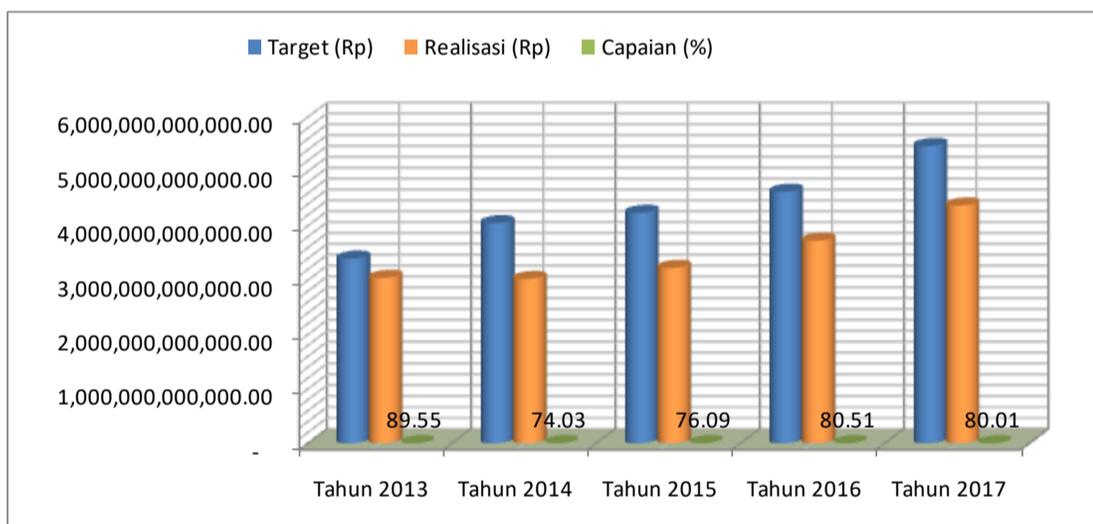
Tahun Anggaran 2013-2017, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, dari rata-rata target belanja daerah sebesar Rp4.361.165.002.310,80 terealisasi sebesar Rp3.476.808.161.480,30; secara lebih rinci disajikan pada Tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	3,395,728,853,449.00	3,041,037,853,628.40	89.55
2014	4,048,935,662,619.00	3,021,172,391,041.67	74.03
2015	4,237,560,638,891.00	3,224,449,048,408.88	76.09
2016	4,625,169,942,881.00	3,723,643,229,085.60	80.51
2017	5,466,429,913,714.00	4,373,738,285,236.94	80.01
Rata-rata	4,361,165,002,310.80	3,476,808,161,480.30	79.72

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

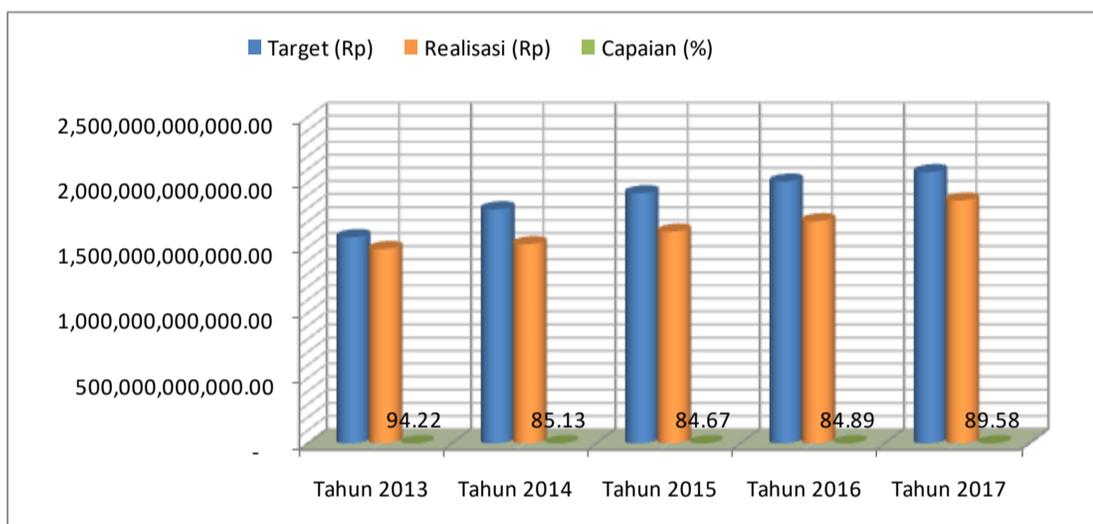
A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, dan (f) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 terealisasi rata-rata sebesar Rp1.342.264.915.537,17 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.558.256.169.921,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	1,579,922,453,242.00	1,488,658,005,443.43	94.22
2014	1,792,928,078,719.00	1,526,321,782,763.18	85.13
2015	1,915,705,847,991.00	1,621,950,920,456.55	84.67
2016	2,005,074,552,285.00	1,702,053,189,034.14	84.89
2017	2,077,572,370,612.00	1,860,998,685,432.00	89.58
Rata-rata	1,558,256,169,921.00	1,342,264,915,537.17	86.14

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Grafik 3.17 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

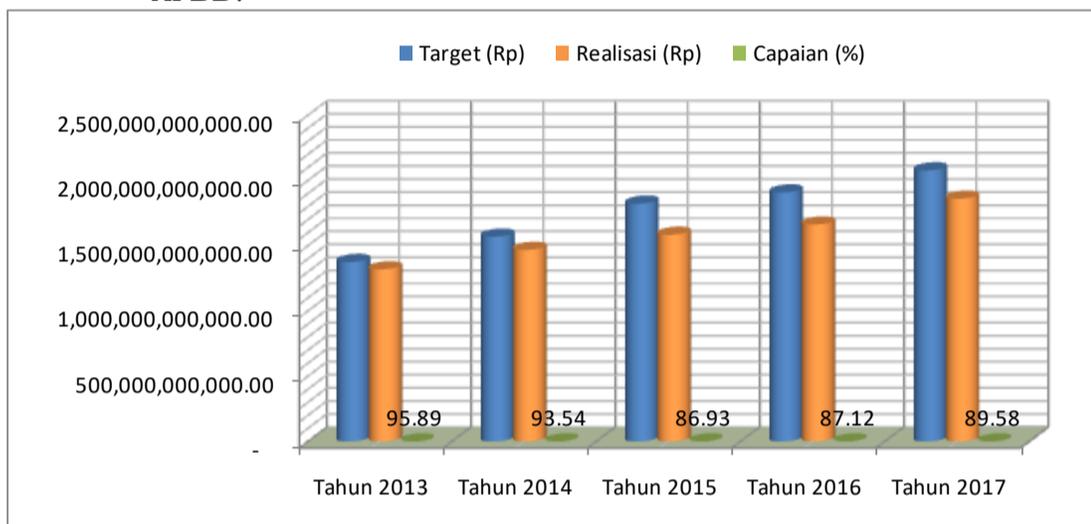
Target Belanja Pegawai Tidak Langsung Kota Medan selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 rata-rata sebesar Rp1,750,883,755,836.40 dengan realisasi sebesar Rp1,579,162,709,092.00; sebagaimana disajikan pada Tabel 3.20

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung

Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	1,375,869,937,225.00	1,319,315,775,270.00	95.89
2014	1,569,717,418,619.00	1,468,275,649,545.00	93.54
2015	1,822,866,087,891.00	1,584,552,300,468.00	86.93
2016	1,908,392,964,835.00	1,662,671,134,745.00	87.12
2017	2,077,572,370,612.00	1,860,998,685,432.00	89.58
Rata-rata	1,750,883,755,836.40	1,579,162,709,092.00	90.19

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



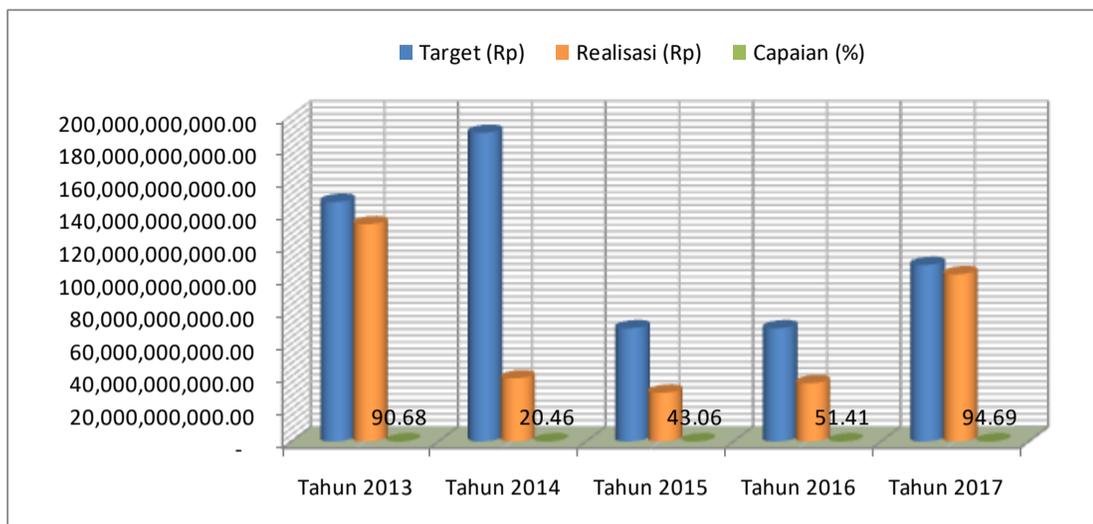
Grafik 3.18 Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Rata-rata target Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebesar Rp116.807.955.143,00 dengan realisasi sebesar Rp68.095.703.946,80; sebagaimana disajikan pada tabel 3.21.

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	147,083,875,000.00	133,372,516,187.00	90.68
2014	189,514,920,450.00	38,779,945,450.00	20.46
2015	69,514,920,450.00	29,935,455,125.00	43.06
2016	69,514,920,450.00	35,738,893,607.00	51.41
2017	108,411,139,365.00	102,651,709,365.00	94.69
Rata-rata	116,807,955,143.00	68,095,703,946.80	58.30

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Grafik 3.19 Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp9.644.866.400,00 dari target sebesar Rp18.844.056.043,40. Tahun Anggaran 2014, target dan realisasinya mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	46,433,034,917.00	31,836,796,000.00	68.56
2014	21,629,072,650.00	14,684,300,000.00	67.89
2015	6,158,172,650.00	742,500,000.00	12.06
2016	10,000,000,000.00	533,736,000.00	5.34
2017	10,000,000,000.00	427,000,000.00	4.27
Rata-rata	18,844,056,043.40	9,644,866,400.00	51.18

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



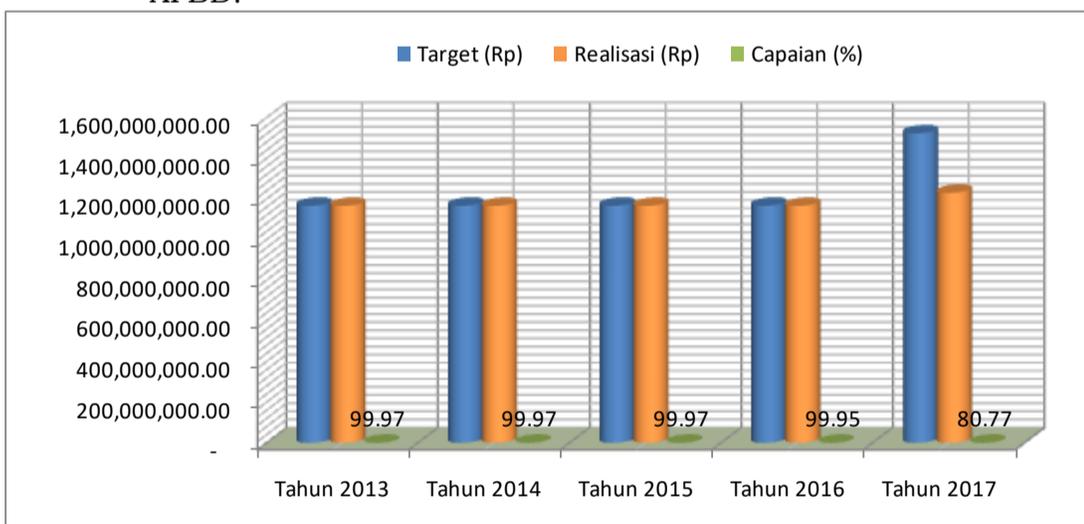
Grafik 3.20 Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Target Belanja Bantuan Keuangan Kota Medan selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 Rp1.237,902.280,00 dengan realisasi sebesar Rp1.178.984.316,40 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.23

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	1,166,667,000.00	1,166,264,900.00	99.97
2014	1,166,667,000.00	1,166,264,900.00	99.97
2015	1,166,667,000.00	1,166,264,900.00	99.97
2016	1,166,667,000.00	1,166,137,982.00	99.95
2017	1,522,843,400.00	1,229,988,900.00	80.77
Rata-rata	1,237,902,280.00	1,178,984,316.40	95.24

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



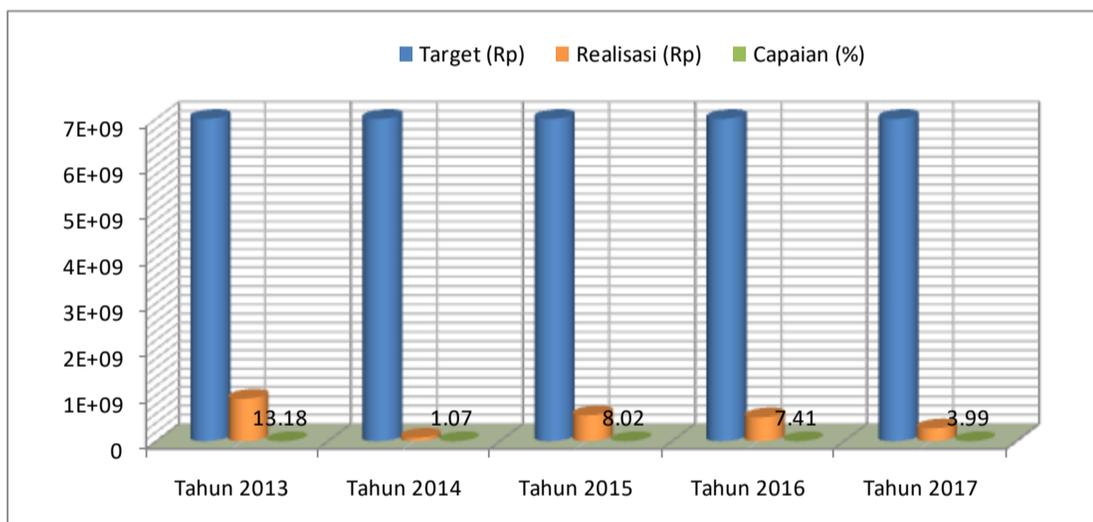
Grafik 3.21 Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Target Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp471.294.705,40. Penganggaran belanja tidak terduga tidak dapat diprediksi dan diluar kendali pemerintah daerah. Belanja ini merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa, bersifat berjaga-jaga. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 3.24 di bawah ini:

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	7,000,000,000.00	922,750,000.00	13.18
2014	7,000,000,000.00	75,000,000.00	1.07
2015	7,000,000,000.00	561,255,860.00	8.02
2016	7,000,000,000.00	518,506,250.00	7.41
2017)	7,000,000,000.00	278,961,417.00	3.99
Rata-rata	7,000,000,000.00	471,294,705.40	6.73

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

B. Belanja Langsung

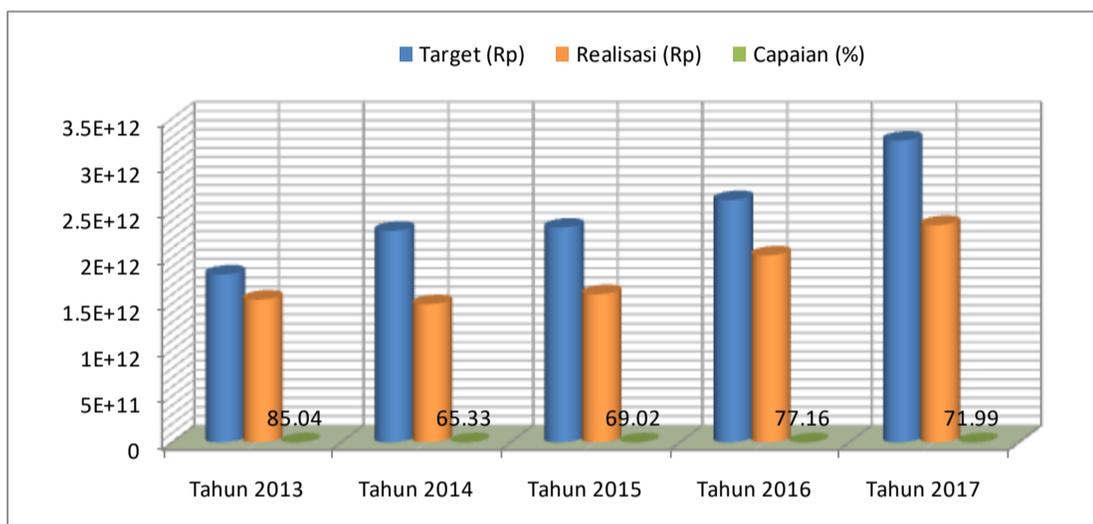
Belanja Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp1.802.541.950.291,11 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp2.461.940.618.668,00 disajikan tabel 3.25:

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Medan

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	1,815,806,400,207.00	1,544,141,971,290.45	85.04
2014	2,288,007,583,900.00	1,494,850,608,278.49	65.33
2015	2,321,854,790,900.00	1,602,498,127,952.33	69.02
2016	2,620,095,390,596.00	2,021,590,110,051.46	77.16
2017	3,263,938,927,737.00	2,349,628,933,882.83	71.99
Rata-rata	2,461,940,618,668.00	1,802,541,950,291.11	73.22

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



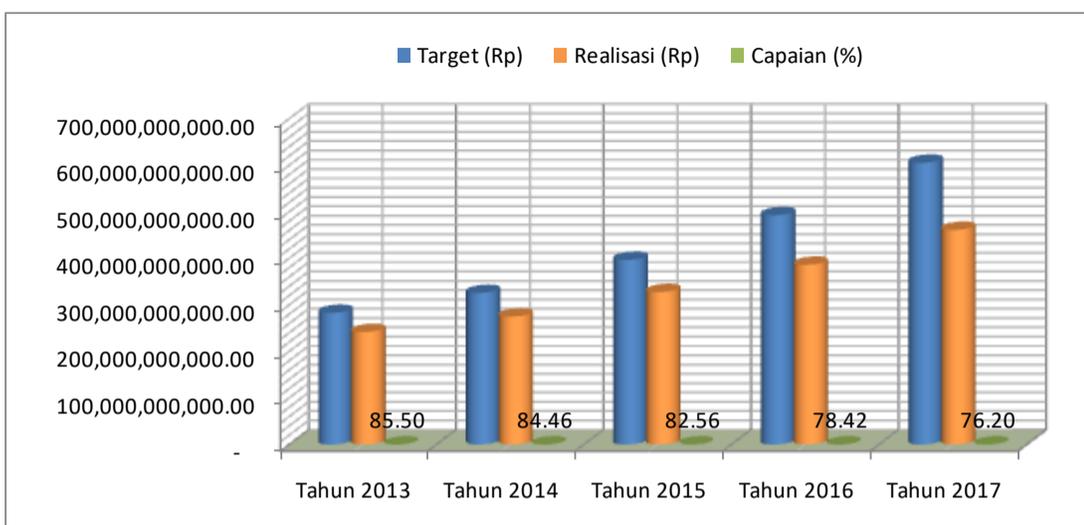
Grafik 3.23 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Rata-rata target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 sebesar Rp420.728.902.178,40 dengan realisasi sebesar Rp338.477.073.219,40, disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	282,947,392,500.00	241,930,366,491.00	85.50
2014	325,635,118,950.00	275,045,159,144.00	84.46
2015	396,863,887,488.00	327,669,227,681.00	82.56
2016	492,671,268,380.00	386,358,033,632.00	78.42
2017	605,526,843,574.00	461,382,579,149.00	76.20
Rata-rata	420,728,902,178.40	338,477,073,219.40	80.45

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



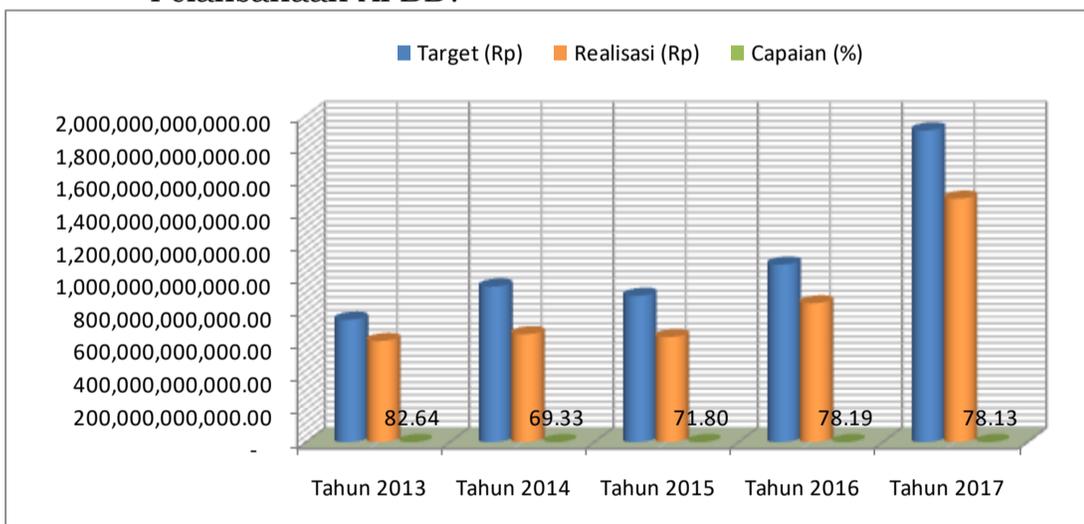
Grafik 3.24 Target dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Rata-rata target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 sebesar Rp999.832.497.575,20 sedangkan realisasinya sebesar Rp750.658.952.157,63, disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27 Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	750,595,742,263.00	620,327,563,596.45	82.64
2014	953,982,988,663.00	661,376,711,350.49	69.33
2015	896,976,406,462.00	644,025,941,486.33	71.80
2016	1,088,867,521,486.00	851,348,898,697.83	78.19
2017	1,910,774,148,576.00	1,492,863,724,592.05	78.13
Rata-rata	1,120,239,361,490.00	853,988,567,944.63	76.23

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



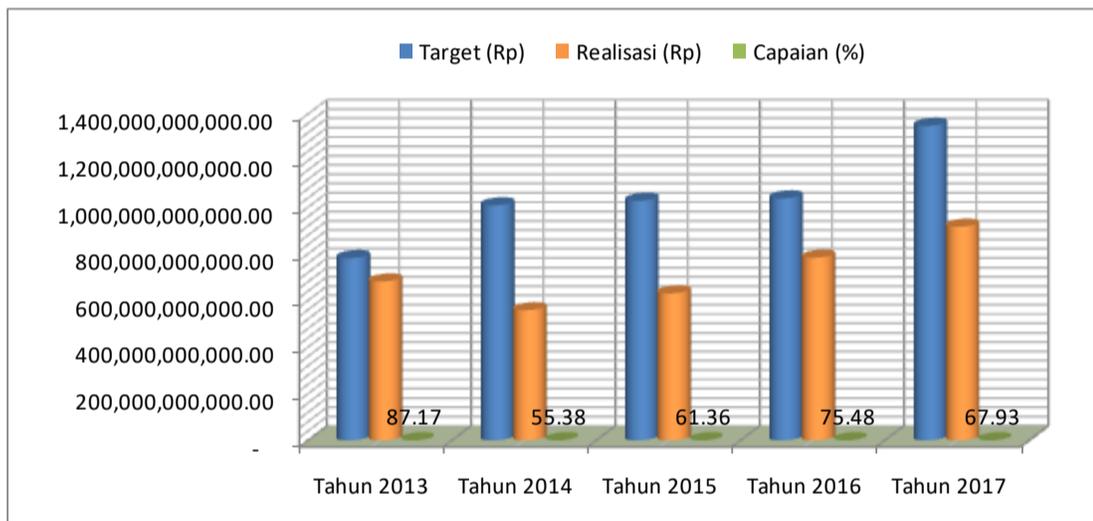
Grafik 3.25 Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017

Rata-rata target Belanja Modal pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 sebesar Rp1.041.379.218.914,40 sedangkan realisasinya sebesar Rp713.405.924.914,08; disajikan pada tabel 3.28.

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	782,263,265,444.00	681,884,041,203.00	87.17
2014	1,008,389,476,287.00	558,428,737,784.00	55.38
2015	1,028,014,496,950.00	630,802,958,785.00	61.36
2016	1,038,556,600,730.00	783,883,177,721.63	75.48
2017	1,349,672,255,161.00	916,888,037,907.78	67.93
Rata-rata	1,041,379,218,914.40	714,377,390,680.28	68.60

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Grafik 3.26 Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Perkembangan realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Medan selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2013 s/d tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 9% (sembilan persen). Pada tahun 2013 belanja daerah sebesar Rp3.041.037.853.628,40, selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar Rp1.837.329.372.874,89 atau meningkat 60,42% (enam puluh koma empat puluh dua persen), sehingga pada tahun 2017 jumlah realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Medan mencapai Rp4.878.364.104.988,94. Selanjutnya belanja daerah tersebut dialokasikan kepada belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Realisasi belanja tidak langsung Pemerintah Kota Medan dari tahun 2013 s/d tahun 2017 selalu mengalami peningkatan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 7% (tujuh persen). Pada tahun 2013 belanja tidak langsung sebesar Rp1.488.658.005.443,43. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar Rp476.558.506.193,68 atau 32% (tiga puluh persen) sehingga pada tahun 2017 belanja tidak langsung menjadi Rp1.965.216.511.637,11. Realisasi Belanja tidak langsung ini sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Sejalan dengan belanja tidak langsung, belanja langsung juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 12% (dua belas persen). Dilihat dari perkembangannya, tahun 2013 jumlah realisasi belanja langsung sebesar Rp1.552.376.726.670,62, dan pada tahun 2017 sebesar Rp2.913.147.593.351,83. Sehingga dapat dilihat bahwa belanja langsung selama periode tahun 2013-2017 telah mengalami peningkatan sebesar Rp1,360,770,866,681,21 atau 87,66% (delapan puluh tujuh persen). Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja
Tahun 2013 s/d Tahun 2017
Kota Medan

URAIAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Pertumbuhan
BELANJA						
Belanja tidak Langsung						
Belanja Pegawai	1.319.315.775.270,00	1.468.275.649.545,00	1.584.552.300.468,00	1.662.671.134.745,00	1.860.998.685.432,00	9%
Belanja Bunga	2.043.903.086,43	3.340.622.868,18	4.993.144.103,55	1.424.780.450,14	102.194.330,11	-13%
Belanja Hibah	133.372.516.187,00	38.779.945.450,00	29.935.455.125,00	35.738.893.607,00	102.651.709.365,00	28%
Bantuan Sosial	31.836.796.000,00	14.684.300.000,00	742.500.000,00	533.736.000,00	427.000.000,00	-49%
B. tidak Terduga	922.750.000,00	75.000.000,00	561.255.860,00	518.506.250,00	278.961.417,00	126%
Bantuan Keuangan	1.166.264.900,00	1.166.264.900,00	1.166.264.900,00	1.166.137.982,00	1.229.988.900,00	1%
Belanja tak Langsung	1.488.658.005.443,43	1.526.321.782.763,18	1.621.950.920.456,55	1.702.053.189.034,14	1.965.216.511.637,11	7%
Belanja Langsung						
B. Pegawai	241.930.366.491,00	275.045.159.144,00	327.669.227.681,00	386.358.033.632,00	503.395.830.852,00	18%
B. Barang dan Jasa	620.327.563.596,45	661.376.711.350,49	644.025.941.486,33	851.348.898.697,83	1.492.863.724.592,05	13%
B. Modal	681.884.041.203,00	558.428.737.784,00	630.802.958.785,00	783.883.177.721,63	916.888.037.907,78	9%
Total Belanja Langsung	1.544.141.971.290,45	1.494.850.608.278,49	1.602.498.127.952,33	2.021.590.110.051,46	2.913.147.593.351,83	12%
TOTAL BELANJA	3.032.799.976.733,88	3.021.172.391.041,67	3.224.449.048.408,88	3.723.643.299.085,60	4.878.367.104.988,94	9%

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir sebagian besar belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 7% (tujuh persen). Selanjutnya belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Selama tahun 2013 s/d 2017 terjadi beberapa kebijakan keuangan pada belanja tidak langsung. Diantaranya Belanja bunga yang setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 13% (tiga belas persen), belanja hibah dengan rata-rata peningkatan sebesar 28% (dua puluh delapan persen), belanja tak terduga sebesar 126% (seratus dua puluh enam persen). Sedangkan belanja bantuan sosial setiap tahunnya tetap dianggarkan, namun mengalami penurunan Alokasi anggaran setiap tahunnya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Pada belanja langsung untuk belanja pegawai mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 18% (delapan belas persen), Belanja barang dan jasa sebesar 13% (tiga belas persen), dan belanja modal sebesar 9% (sembilan persen).

Tabel 3.30
 Proporsi Belanja dalam Struktur APBD Kota Medan (%)
 Tahun 2013 s/d Tahun 2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
BELANJA					
Belanja tidak Langsung					
Belanja Pegawai	43.50%	48.60%	49.14%	44.65%	43.09%
Belanja Bunga	0.07%	0.11%	0.15%	0.04%	0.00%
Belanja Hibah	4.40%	1.28%	0.93%	0.96%	2.38%
Bantuan Sosial	1.05%	0.49%	0.02%	0.01%	0.01%
Belanja tidak Terduga	0.03%	0.00%	0.02%	0.01%	0.01%
Bantuan Keuangan	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%
Total Belanja tak Langsung	49.09%	50.52%	50.30%	45.71%	45.52%
Belanja Langsung					
Belanja Pegawai	7.98%	9.10%	10.16%	10.38%	10.70%
Belanja Barang dan Jasa	20.45%	21.89%	19.97%	22.86%	22.64%
Belanja Modal	22.48%	18.48%	19.56%	21.05%	21.15%
Total Belanja Langsung	50.91%	49.48%	49.70%	54.29%	54.48%
TOTAL BELANJA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

3.1.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

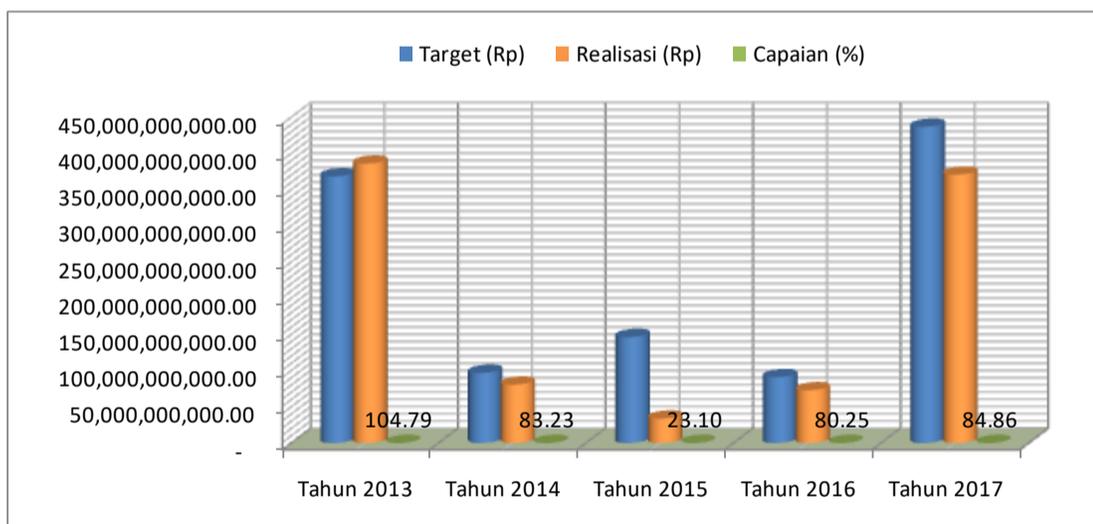
3.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), Koreksi (*contra post*), dan Pencairan Dana Cadangan. Rata-rata target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 sebesar Rp227.920.691.006,93 sedangkan realisasinya mencapai Rp188.846.637.594,28 seperti disajikan dalam Tabel 3.31 berikut ini:

Tabel 3.31
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	368,335,391,311.76	385,968,213,531.62	104.79
2014	96,922,296,499.55	80,672,196,504.32	83.23
2015	146,493,435,934.68	33,838,947,039.68	23.10
2016	91,011,413,337.13	73,033,060,944.24	80.25
2017	436,840,917,951.55	370,720,769,951.55	84.86
Rata-rata	227,920,691,006.93	188,846,637,594.28	82.86

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



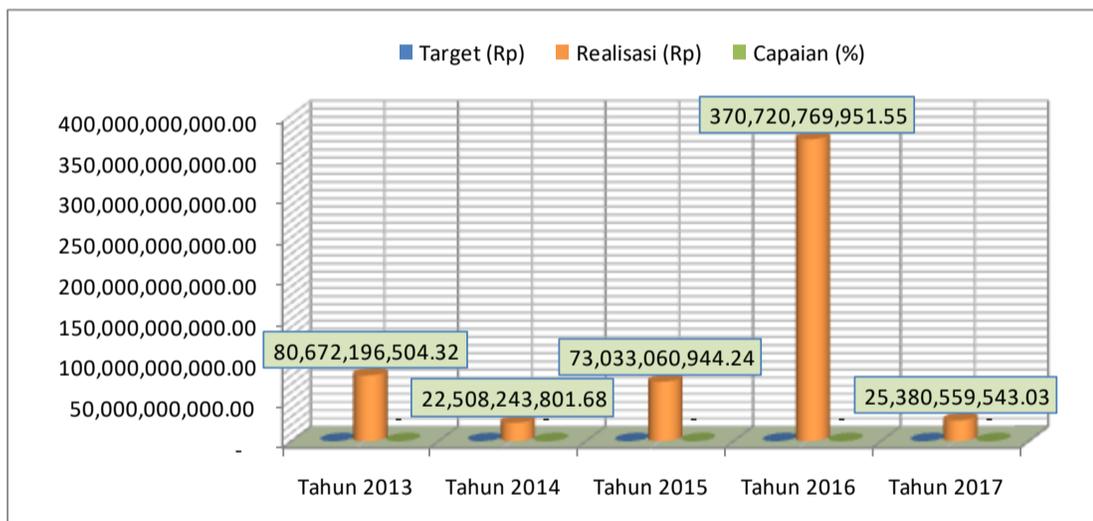
Grafik 3.27 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017
Realisasi SiLPA, selama periode Tahun Anggaran 2013-2017

rata-rata realisasinya adalah Rp156.487.504.498,55, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.32:

Tabel 3.32
Rincian Target dan Realisasi SILPA Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2013	-	80,672,196,504.32	0.00
2014	-	22,508,243,801.68	0.00
2015	-	73,033,060,944.24	0.00
2016	-	370,720,769,951.55	0.00
2017	-	253,805,595,43.03	0.00
Rata-rata	-	160,147,937,326.36	0.00

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Grafik 3.28 Rincian Target dan Realisasi SILPA Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

3.1.4. Neraca Daerah

Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset atau aktiva adalah harta atau sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset terdiri atas aset lancar, aset.

Sedangkan liabilitas merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ekuitas merupakan kekayaan bersih yang

dimiliki oleh suatu organisasi baik dalam bentuk ekuitas dana lancar, ekuitas yang diinvestasikan pada aset tetap maupun ekuitas dana cadangan.

Melihat kepada perkembangan Neraca Pemerintah Kota Medan selama 5 (tahun) tahun terakhir periode tahun 2012 s/d 2016 kenaikan rata-rata neraca (Aset, kewajiban dan ekuitas dana) daerah pertumbuhannya sekitar 66,4% (enam puluh enam koma empat persen) per tahunnya. Aset tetap lainnya dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 75% (tujuh puluh lima persen), Investasi jangka panjang dengan pertumbuhan 59% (lima puluh sembilan persen) per tahun, dan aset lancar mengalami pertumbuhan 49% (empat puluh sembilan persen) per tahun. Untuk lebih lengkapnya perkembangan tersebut selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Perkembangan Neraca Daerah Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016

URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas	389,467,899,460	80,688,630,665	25,062,069,653	3,288,995,019.72	370,773,265,390.45
Investasi jangka Pendek	0	0	0	0	-
Piutang	21,897,161,575	293,242,612,146	1,053,396,178,396	,269,306,847,919.77	113,612,494,552.28
Piutang Lain- lain	2,188,130,489	2,545,171,804	3,270,662,766	5,079,530,670.95	42,924,543,583.52
Persediaan	38,962,062,211	57,549,916,913	59,231,260,539	47,748,112,714.85	62,212,467,421.16
JUMLAH ASET LANCAR	452,515,253,735	434,026,331,528	1,140,960,171,354	1,395,423,486,325.29	1,589,522,770,947.41
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen	2,911,000,000	2,911,000,000	2,911,000,000	1,680,036,374.00	-
Investasi Permanen	84,597,005,001	84,925,656,365	279,505,914,131	273,559,929,086.00	322,422,696,455.53
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	87,508,005,001	87,836,656,365	282,416,914,131	275,239,965,460.00	322,422,696,455.53
ASET TETAP					
Tanah	1,932,759,029,784	18,770,419,585,391	18,661,444,455,037	18,587,731,635,649.00	18,362,283,469,592.00
Peralatan dan mesin	595,857,259,381	577,473,951,643	760,368,681,120	837,290,920,429.72	946,311,516,773.18
Gedung dan bangunan	709,246,701,358	748,091,809,035	911,949,523,803	1,037,594,572,181.05	1,150,384,039,491.63
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,565,539,636,878	2,070,623,574,708	2,429,960,639,975	2,712,983,043,505.37	3,098,232,614,691.09
Aset Tetap Lainnya	36,924,443,716	42,103,554,383	48,686,939,412	54,751,557,362.38	65,498,571,944.16
Konstruksi dalam pengerjaan	0	46,544,019,351	52,331,131,548	44,634,076,501.67	58,754,138,648.67
Akumulasi Penyusutan	0	0	-254,496,700,515	(279,870,841,917.74)	(328,093,840,161.43)
JUMLAH ASET TETAP	5,840,327,071,117	22,255,256,494,511	22,610,244,670,380	22,995,114,963,711.50	23,353,370,510,979.30

URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0			0	-
JUMLAH DANA CADANGAN	0			0	0
ASET LAINNYA					
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0.00	0.00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0	0.00	0.00
Kemitraan dengan pihak ke tiga	26,730,618,522	26,730,618,522	26,730,618,522	26,730,618,522.91	26,730,618,522.91
Aset tidak berwujud	83,500,000	0	0	0.00	0.00
Tagihan jangka panjang Angsuran BOT	18,160,349,432	17,388,809,859	17,029,826,846	20,260,110,901.50	19,446,556,942.00
Tagihan pinjaman kepada Perusahaan Daerah	13,463,242	0	0	0.00	0.00
Aset Lain- lain	18,265,428,840	36,564,598,433	54,856,373,305	80,557,231,943.46	103,911,956,927.17
Piutang Denda dan Kekurangan Pembayaran	390,000,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000.00	0.00
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA	63,643,360,036	81,074,026,814	99,006,818,673	127,937,961,367.87	150,089,132,392.08
JUMLAH ASET	6,443,993,689,889.00	22,858,193,509,218.00	24,132,628,574,538.00	24,793,716,376,864.60	25,415,405,110,774.30
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan pihak ketiga (PFK)	0	0	395,529,306	0.00	0.00
Utang Bunga	0	0	0	0.00	0.00

URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Utang Pajak	0	0	0	0.00	0.00
Bagian Lancar utang jangka panjang	132,283,154,539	106,597,150,919	19,834,606,628	22,531,284,350.15	3,243,483,068.86
pendapatan diterima di muka	147,166,666	108,500,000	80,833,333	2,385,490,735.87	2,287,157,402.50
utang jangka pendek lainnya	4,016,524,060	7,794,414,966	13,644,087,824	33,176,235,497.26	24,391,739,546.86
hutang perhitungan pihak ketiga belanja	1,597,438,000	953,967,741	292,547,885,793	171,838,796,786.00	44,578,912,953.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	138,044,283,265	115,454,033,626	326,502,942,884	229,931,807,369.28	74,501,292,971.22
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
utang dalam negeri	3,787,003,454	34,097,132,589	104,234,097,232	99,021,381,077.86	95,982,470,897.87
utang luar negeri	0	0	2,452,592,700	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3,787,003,454	34,097,132,589	106,686,689,932	99,021,381,077.86	95,982,470,897.87
JUMLAH KEWAJIBAN	141,831,286,719	149,551,166,215	433,189,632,816	328,953,188,447.14	170,483,763,869.09
EKUITAS DANA					
EKUITAS DANA LANCAR					
sisanya lebih pembiayaan anggaran (Silpa)	389,467,899,460	80,672,196,504	22,508,243,801	73,033,060,944.24	370,720,769,951.55
cadangan untuk piutang	24,085,292,065	295,787,783,952	1,056,666,841,162	1,274,386,378,590.72	1,156,537,038,135.80
cadangan untuk persediaan	38,962,062,211	57,549,916,913	59,231,260,539	47,748,112,714.85	62,212,467,421.16
dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-138,044,283,266	-115,454,033,626	-326,107,413,578	(229,931,807,369.28)	(74,501,292,971.22)

URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
jangka pendek					
pendapatan yang ditangguhkan	0	16,434,163	2,158,296,546	255,934,075.48	52,495,438.90
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	314,470,970,470	318,572,297,906	814,457,228,470	1,165,491,678,956.01	1,515,021,477,976.19
EKUITAS DANA INVESTASI					
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	87,508,005,001	87,836,656,365	282,416,914,131	275,239,965,460.00	322,422,696,455.53
Diinvestasikan dalam aset tetap	5,840,237,071,117	22,255,256,494,512	22,610,244,670,381	22,995,114,963,711.40	23,353,370,510,979.30
Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	63,643,360,036	81,074,026,816	99,006,818,674	127,937,961,367.87	150,089,132,392.08
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	-3,787,003,454	-34,097,132,589	-106,686,689,932	(99,021,381,077.86)	(95,982,470,897.87)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	5,987,601,432,700	22,390,070,045,104	22,884,981,713,254	23,299,271,509,461.50	23,729,899,868,929.00
EKUITAS DANA CADANGAN	0	0	0	0	0
JUMLAH EKUITAS DANA	6,302,072,403,170	22,708,642,343,010	23,699,438,941,724	24,464,763,188,417.50	25,244,921,346,905.20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6,443,903,689,889	22,858,193,509,225	24,132,628,574,540	24,793,716,376,864.60	25,415,405,110,774.30

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri atas: (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Tahun 2016, Kota Medan memiliki aset senilai Rp25.415.405.110.774,00 dengan tingkat pertumbuhan 66% (enam puluh enam persen) per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2016 mencapai Rp23.353.370.510.979,30 dan rata-rata tumbuh 71% (tujuh puluh satu persen) per tahun. Aset tetap tahun 2016 ini meliputi 92% (sembilan puluh dua persen) dari seluruh aset Pemerintah Kota Medan.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp170.483.763.869,09. Dari tahun 2012 hingga 2016, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2012 dan tertinggi tahun 2014. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Medan Tahun 2016 mencapai Rp25.244.921.346.905,20, dan mengalami pertumbuhan dari 2010-2014 dengan rata-rata 68% (enam puluh delapan persen).

Berdasarkan atas neraca tersebut ,kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban

dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan atas perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Medan mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1 (satu). Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Medan setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3.34
Analisis Rasio Keuangan Kota Medan

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
		%	%	%	%	%
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	7,105.8	1,143.3	1,989.7	1,696.11	2,133.55
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	6,221.2	1,018.3	1,837.9	1,623.50	2,050.04
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0.03	0.17	0.13	0.24	0,67

Sumber : data diolah DPKAD dan Bappeda Kota Medan.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Medan adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada table di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Medan relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik. Di antara penyebab dari kapabilitas keuangan tersebut adalah karena Kota Medan termasuk Pemerintah Daerah yang mampu mengumpulkan PAD dalam jumlah yang relatif cukup besar di Indonesia.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2012-2016

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

- a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggung jawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2012-2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2012-2016, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

- a. meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara *on-line* dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- b. meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- c. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- d. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- e. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
- f. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2012-2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan kota serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Ada pun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2012-2016 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial;
 - b. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
 - c. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
 - d. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
 - e. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
 - f. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Medan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- g. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/

- lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 3) mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; dan
 - 5) mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Perkembangan perbandingan anggaran belanja langsung dengan belanja tidak langsung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.35 berikut ini:

Tabel 3.35.
Perkembangan Perbandingan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tahun	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung		Total	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
2013	1.488.290.710.542	45,35	1.793.576.620.207	54,65	3.281.867.330.749	100,00
2014	1.800.164.666.975	43,85	2.304.784.129.900	56,15	4.104.948.796.875	100,00
2015	1.956.438.269.312	46,19	2.278.801.629.000	53,81	4.235.239.898.312	100,00
2016	2.005.574.552.285	43,51	2.603.667.238.596	56,49	4.609.241.790.881	100,00
2017	2.055.136.186.374	42,30	2.803.029.450.905	57,70	4.858.165.637.279	100,00

Anggaran Belanja tidak langsung Pemerintah Kota Medan dari tahun 2013 s/d 2017 selalu mengalami peningkatan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 8,65% (delapan koma enam puluh lima persen). Pada tahun 2013 anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp1.488.290.710.542 atau mencapai 45,35% (empat puluh lima koma tiga puluh lima persen). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar Rp566,845,475,832 atau 38,1% (tiga puluh delapan koma satu persen) sehingga pada tahun 2017 anggaran belanja tidak langsung menjadi Rp2.055.136.186.374. Anggaran Belanja tidak langsung ini sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Sejalan dengan belanja tidak langsung, belanja langsung juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhannya setiap tahunnya sebesar 12,32% (dua belas koma tiga puluh dua persen). Dilihat dari perkembangannya, tahun 2013 jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp1.793.576.620.207 dan pada tahun 2017

sebesar Rp2.803.029.450.905. Sehingga dapat dilihat bahwa anggaran belanja langsung selama periode tahun 2013 sampai 2017 telah mengalami peningkatan sebesar Rp1.009.452.830.698 atau 56,3% (lima puluh enam koma persen), sehingga pada tahun 2017 menjadi Rp2.803.029.450.905.

Tabel 3.36.
Perkembangan Perbandingan Anggaran Belanja Infrastruktur, Sosial Budaya dan Ekonomi

Thn	Infrastruktur		Sosial Budaya		Ekonomi		Total	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
2013	222,334,832,000	69.48	81,092,826,624	25.34	16,577,130,000	5.18	320,004,788,624	100
2014	157,987,259,250	73.01	54,606,740,500	25.23	3,801,626,150	1.76	216,395,625,900	100
2015	1,036,570,689,941	45.49	1,121,320,965,059	49.21	120,909,974,000	5.31	2,278,801,629,000	100
2016	1,127,947,012,000	47.92	1,097,696,941,900	46.64	128,124,777,000	5.44	2,353,768,730,900	100
2017	1,349,632,375,550	48.15	1,295,257,319,865	46.21	158,139,755,490	5.64	2,803,029,450,905	100

Perkembangan realisasi belanja infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi Pemerintah Kota Medan selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2013 s/d tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Komposisi belanja infrastruktur mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2013, komposisi belanja infrastruktur sebesar 69,48% (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan persen) dari total belanja infrastruktur, belanja sosial dan belanja ekonomi. Tahun 2014, fokus belanja pemerintah kota Medan di bidang infrastruktur yaitu sebesar 73,01% (tujuh puluh tiga koma nol satu persen). Pada tahun 2015, belanja infrastruktur mengalami penurunan sebesar 45,49% (empat puluh lima koma empat puluh sembilan persen) dari yang sebelumnya 73,01% (tujuh puluh tiga koma nol satu persen). Penurunan hanya dalam segi komposisi belanja, tetapi dari jumlah belanja, tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp157.987.259.250 menjadi Rp1.036.570.689.941 yaitu sebesar 55,6% (lima puluh lima koma enam persen). Pada tahun 2016 dan 2017, komposisi belanja infrastruktur kembali mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu tinggi yaitu dari 45,49% (empat puluh lima koma empat puluh sembilan persen) menjadi 47,92% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen), dan 48,15% (empat puluh delapan koma lima belas persen).

Komposisi belanja sosial budaya tahun 2013 dan 2014 relatif sama yaitu 25,34% (dua puluh lima koma tiga puluh empat persen) dan 25,23% (dua puluh lima koma dua puluh tiga persen). Pada tahun 2015 komposisi belanja sosial budaya mengalami peningkatan yang relatif besar seiring dengan penurunan komposisi belanja infrastruktur. Komposisi belanja 2015 menjadi 49,21% (empat puluh sembilan koma dua puluh satu persen). Pada tahun 2016, belanja komposisi infrastruktur mengalami penurunan kembali menjadi 46,64% (empat puluh enam koma enam puluh empat persen) dan tahun 2017 Kota Medan mengalokasikan belanja sosial budaya sebesar 46,21% (empat puluh enam koma dua puluh satu persen). Komposisi belanja ekonomi rata-rata di atas 5% (lima persen) dan di bawah 5% (lima persen) hanya pada tahun 2014 komposisi belanja ekonomi berada di bawah 2% (dua persen). Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Medan lebih fokus pada belanja infrastruktur.

3.3. Proyeksi Anggaran Daerah

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan atas data 5 (lima) tahun sebelumnya terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Medan terhadap dana perimbangan ke depan masih cukup tinggi rata-rata sekitar 43,42% (empat puluh tiga koma empat puluh dua persen). Tingginya ketergantungan ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan gaji Pegawai Negeri Sipil dan kebijakan pembangunan di Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah sumber utama penerimaannya berasal dari bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan lainnya berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan atas data pendapatan Daerah tahun 2013-2017, maka rencana Pendapatan Daerah periode 2016-2021 dapat diperkirakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.37
 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Medan 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Daerah						
Pendapatan Pajak Daerah	1,132,752,367,832.32	1,387,127,546,952.00	1,387,127,546,952.00	1,511,000,000,000.00	1,578,481,924,635.39	1,649,151,387,142.54
Pajak Hotel	95,822,427,293.65	94,980,801,593.00	117,000,000,000.00	120,978,000,000.00	125,091,252,000.00	129,344,354,568.00
Pajak Restoran	130,918,136,416.14	132,215,837,083.00	170,000,000,000.00	176,315,500,000.00	182,865,620,825.00	189,659,078,638.65
Pajak Hiburan	33,103,004,155.25	38,808,417,000.00	43,000,000,000.00	44,070,700,000.00	45,168,060,430.00	46,292,745,134.71
Pajak Reklame	17,508,256,230.32	94,352,375,000.00	107,229,883,724.00	113,883,498,009.07	120,949,969,060.54	128,454,914,640.74
Pajak Penerangan Jalan	228,208,022,998.00	239,755,254,753.00	244,755,254,753.00	259,844,416,208.52	275,863,824,467.78	292,870,829,246.22
Pajak Parkir	16,866,401,417.00	19,000,000,000.00	22,000,000,000.00	23,158,300,000.00	24,377,584,495.00	25,661,064,318.66
BPHTB	264,722,907,298.00	419,949,861,523.00	454,040,861,523.00	471,271,712,217.80	489,156,473,696.46	507,719,961,873.24
PBB	334,613,267,325.00	336,974,000,000.00	339,974,000,000.00	355,034,848,200.00	370,762,891,975.26	387,187,688,089.76
Pajak Air Tanah	10,989,944,698.96	12,000,000,000.00	13,000,000,000.00	13,924,950,000.00	14,915,710,192.50	15,976,962,972.70
Pendapatan Retribusi Daerah	115,597,958,126.00	113,245,961,244.00	211,137,191,460.00	225,916,794,862.20	241,730,970,502.55	258,652,138,437.73
Jasa Retribusi Umum	49,982,792,847.00	47,308,756,243.00	75,4910,813,340.00	80,775,170,273.80	86,429,432,192.97	92,479,492,446.47
Retribusi Jasa Usaha	3,276,078,025.00	2,998,377,230.00	15,027,270,460.00	16,079,179,392.20	17,204,721,949.65	18,409,052,486.13
Retribusi Perizinan Tertentu	62,339,087,254.00	62,938,827,771.00	120,619,107,660.00	129,062,445,196.20	138,096,816,359.93	147,763,593,505.13
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	8,948,679,468.00	6,095,561,295.00	11,807,203,716.96	12,633,77,977.14	13,518,067,535.54	14,464,332,263.03
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	766,611,703.00	135,295,070.00	1,946,330,00.00	2,082,573,100.00	2,228,353,217.00	2,384,337,942.19
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	8,182,067,765.00	5,960,266,225.00	9,860,873,716.96	10,551,134,877.14	11,289,714,318.54	12,079,994,320.84
Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta	0	0	0	0	0	0

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	278,422,167,959.00	206,811,047,571.64	362,178,825,140.27	387,531,342,900.09	414,658,536903.09	443,684,634,486.31
	Jasa Giro	17,473,131,733.00	12,123,131,801.00	11,449,000,000.00	12,250,430,000.00	13,107,960,100.00	14,025,517,307.00
	Denda Pajak	2,296,152,917.91	1,577,982,508.78	8,014,300,000.00	8,575,301,000.00	9,175,572,070.00	9,817,862,114.90
	Pendapatan dari Pengembalian	36,787,827,927.98	14,626,277,055.32	11,237,800,297.00	12,024,446,317.79	12,866,157,560.04	13,766,788,589.24
	Penerimaan Lain-lain	0	0	0	0	0	0
	Pendapatan BLUD	140,762,750,221.10	106,012,392,496.54	235,611,242,773.55	252,104,029,767.70	269,751,311,851.44	288,633,903,681.24
	Pendapatan atas Kekurangan BHP Provinsi	0	0	0	0	0	0
	Dana Kapitasi	81,102,305,160.00	72,471,263,710.00	95,866,482,069.72	102,577,135,814.60	109,757,535,321.62	117,440,562,794.13
	Total Pendapatan Asli Daerah	1,535,721,173,386.31	1,733,303,304,430.37	2,091,957,648,822.57	2,238,394,684,240.15	2,395,082,312,136.96	2,562,738,073,986.54
	Dana Perimbangan						
	Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	224,249,991,817.00	197,505,396,745.00	226,348,774,348.32	242,193,188,552.71	259,146,711,751.40	277,286,981,573.99
	Dana Alokasi Umum	1,611,940,995,000.00	1,458,734,817,000.00	1,845,511,245,175.50	1,974,697,032,337.78	2,112,925,824,601.43	2,260,830,632,323.53
	Dana Alokasi Khusus	64,640,564,000.00	228,288,135,000.00	70,303,912,584.00	75,225,186,464.88	80,490,949,517.42	86,125,315,983.64
	Total Dana Perimbangan	2,772,807,342,010.00	1,884,528,348,745.00	2,142,163,932,107.82	2,292,115,407,355.37	2,452,563,485,870.25	2,624,242,929,881.17
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
	Hibah	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	0	338,291,972,155.00	546,735,165,603.00	567,669,868,915.00	589,023,266,293.00	589,023,266,293.00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	496,238,633,953.20	506,163,406,632.26	516,286,674,764.91	516,286,674,764.91
	Bantuan Keuangan dari provinsi dan Pemerintah lainnya	0	0	150,000,000,000.00	0	0	0
	Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	338,291,972,155.00	1,192,973,799,556.20	1,073,833,275,547.26	1,105,309,941,057.91	1,105,309,941,057.91
	TOTAL PENDAPATAN	4,308,528,515,396.31	3,956,123,625,330.37	5,427,095,380,486.59	5,604,343,367,142.78	5,952,955,739,065.12	6,292,290,944,952.62

Sejalan dengan perkembangan kota ke depan diharapkan akan memberikan dampak kepada peningkatan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Diperkirakan selama periode 2016-2021 pendapatan daerah ditargetkan akan mengalami kenaikan signifikan setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan tersebut didorong oleh Pertumbuhan PAD sebesar 2%-5%, Kenaikan PAD dapat terlihat pada Dana Perimbangan yang disebabkan adanya rencana kenaikan penerimaan DAU untuk menutupi keperluan belanja pegawai yang diperkirakan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 6% (enam persen). Sedangkan untuk Penerimaan lain-lain, didasarkan kepada adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan dana bantuan dan lain sebagainya. Sumber pendapatan ini selama periode 2016-2021 masih optimis akan diterima khususnya dalam pembayaran tunjangan dan sertifikasi guru.

Khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah, peranan Pajak dan Retribusi akan terus diupayakan terjadi peningkatan. Rasa optimis peningkatan PAD didasarkan kepada kerja keras aparatur dan kondisi ekonomi yang semakin stabil, keyakinan tersebut didasari oleh penetapan kota Medan masuk ke dalam kawasan Metropolitan Mebidangro yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Kawasan Mebidangro, dan juga Kota Medan menjadi salah satu *pilot project* dalam kerja sama Sub-Regional IMT-GT (*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*).

Peningkatan Pajak Daerah akan sejalan dengan perkembangan fungsi kota ke depan khususnya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Aktivitas jasa perkotaan akan semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya dinamika usaha dan urbanisasi. Kondisi tersebut akan mendorong meningkatnya penerimaan Pemerintah Daerah dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan jenis pajak lainnya.

Selanjutnya Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan, baik melalui pelayanan jasa umum, jasa usaha maupun pelayanan perizinan. Retribusi pelayanan perizinan akan meningkat melalui penerimaan:

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 3. Retribusi Terminal;
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek; dan
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sedangkan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang sah bersumber dari penjualan aset daerah dan penerimaan jasa giro.

3.3.2. **Proyeksi Belanja Daerah**

Dalam 5 (lima) tahun ke depan meningkatnya fungsi Kota Medan akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Jumlah belanja daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri.

Penggunaan belanja langsung tersebut tercermin dalam RAPBD Pemerintah Kota Medan tahun bersangkutan yang penggunaannya diarahkan kepada lebih prioritas untuk membiayai berbagai urusan Pemerintah Daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dan menstimulus kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Fokus belanja daerah 2016-2021 diarahkan kepada program kebutuhan infrastruktur dasar, sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu anggaran belanja juga diarahkan penggunaannya untuk mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan di wilayah pusat pertumbuhan yang baru, sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang Dan Karo, bahwa Kota Medan diperuntukkan sebagai Kawasan Perkotaan inti yang terdiri dari pusat-pusat kegiatan utama dan sebagai pendorong pengembangan kawasan perkotaan sekitar. Sedangkan belanja tidak langsung penggunaannya lebih diarahkan untuk membiayai gaji pegawai, pemberian hibah, subsidi, dan bantuan serta pengalokasian pengeluaran belanja tak terduga. Untuk periode 2016-2021 rencana belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38
Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA						
Belanja tidak Langsung						
Belanja Pegawai	1.931.524.035.078,00	1,681,756,842,722.00	2.272.547.721.216,54	2.317.998.675.640,87	2.364.358.649.153,69	2.411.645.822.136,76
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	4.098.891.800,00	55,317,675,150.00	54.540.000.000,00	55.085.400.000,00	55.636.254.000,00	56.192.616.540,00
Bantuan Sosial	39.400.000,00	724,656,900.00	5.100.000.000,00	5.202.000.000,00	5.306.040.000,00	5.412.160.800,00
Belanja tidak Terduga	2.871.385.453,50	-	7.070.000.000,00	7.140.700.000,00	7.212.107.000,00	7.284.228.070,00
Bantuan Keuangan	-	1,779,344,960.00	1.538.071.834,00	1.553.452.552,34	1.568.987.077,86	1.584.676.948,64
Total Belanja tak Langsung	1.938.533.712.331,50	1,739,578,519,732.00	2.340.795.793.050,54	2.386.980.228.193,21	2.434.082.037.231,55	2.482.119.504.495,40
Belanja Langsung						
Belanja Pegawai	37.244.019.118,00	38133130446.98	666.937.116.914,80	689.450.488.083,95	743.624.992.964,79	771.861.242.894,44
Belanja Barang dan Jasa	1,611,295,271,244.59	1649761068275.32	1.667.342.792.287,00	1.723.626.220.209,87	1.859.062.482.411,97	1.929.653.107.236,09
Belanja Modal	936,599,131,961.06	958958182317.7	1.000.405.675.372,20	1.034.175.732.125,92	1.115.437.489.447,18	1.157.791.864.341,65
Total Belanja Langsung	2.585.138.422.323,65	2,646,852,381,040.00	3.334.685.584.574,00	3.447.252.440.419,74	3.718.124.964.823,94	3.859.306.214.472,18
TOTAL BELANJA	4.523.672.134.655,15	4,308,542,019,239.53	5.675.481.377.624,54	5.834.232.668.612,95	6,152,207,002,055,49	6.341.425.718.967,58

Pada tabel di atas terlihat bahwa perkiraan pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan akan lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah, sehingga diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami surplus.

Besarnya anggaran belanja Kota Medan untuk periode tahun 2016-2021 terjadi diakibatkan karena:

1. Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia sebagai *Pilot Project Indo-Sutri (Indonesia Sustainable Urban Transport Initiative)*, sehingga diperlukan anggaran yang cukup besar untuk mencapai target kinerja tersebut.
2. Penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan SPM (standard pelayanan minimum) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, tenaga kerja, ketahanan pangan, dan lain- lain yang sesuai.
3. Dalam kerjasama Sub-Bilateral IMT-GT, Kota Medan di persiapkan sebagai kota dengan konsep *Green City*.

Mengikuti perubahan klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 akan selalu melakukan penyesuaian dan mengacu kepada ketentuan tersebut, dimana belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung didasarkan kepada Satuan Anggaran Belanja (SAB) yang telah ditetapkan.

Adapun arah pengelolaan belanja Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: Belanja tidak langsung mengalami peningkatan, disebabkan peningkatan belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai untuk beberapa tahun ke depan diperkirakan mengalami peningkatan, dikarenakan kemungkinan adanya penambahan jumlah pegawai baru di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah dipublikasikan oleh Pemerintah Pusat pada beberapa saat lalu, sehingga menimbulkan inflasi di semua sektor. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai tersebut perlu dilakukan melalui rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi yang disesuaikan dengan kebijakan formasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diharapkan jumlah pegawai yang diterima tiap tahunnya akan lebih kecil dari jumlah pegawai yang pensiun. Sedangkan belanja tidak langsung lainnya akan diupayakan pemanfaatannya dalam menstimulus aktivitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya dan dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diupayakan seefisien mungkin disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja langsung mulai tahun anggaran 2016 diarahkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih serta berbagai urusan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya akan selalu diupayakan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan amanah. Untuk itu belanja barang dan jasa mulai tahun anggaran 2016 diperkirakan akan semakin meningkat.

Peningkatan pendapatan daerah tahun 2016-2021 diarahkan untuk dapat meningkatkan belanja langsung, terutama belanja modal untuk mendukung pembangunan perkotaan serta target pertumbuhan ekonomi kota. Dengan menekan peningkatan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, belanja modal diperkirakan dapat meningkat sejak tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan adanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat.

Selanjutnya apabila diperinci lebih jauh proyeksi belanja tersebut maka dari jumlah tersebut yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah :

1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai dan belanja pembayaran bunga atas pinjaman daerah.
2. Belanja Langsung terdiri dari Administrasi Umum terkait dengan belanja untuk membiayai aktivitas pemerintahan seperti halnya penyediaan alat tulis, sewa gedung, pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor dan lain sebagainya.

3.3.3. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah merupakan suatu analisa untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap surplus dan defisit belanja Daerah. Dari analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka menghitung sejauh mana kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Melihat pada perkembangan realisasi pembiayaan daerah maka semenjak tahun 2013 sampai dengan 2017 kondisi keuangan daerah mengalami defisit sebagaimana yang ditampilkan tabel berikut:

Tabel 3.39
 Penutup Defisit Riil Anggaran
 Kota Medan tahun 2013 s/d 2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	PENDAPATAN	2,742,586,961,424	2,998,203,912,475	3,276,344,285,159	4,308,528,515,396.31	3,956,123,625,330.37
2.	BELANJA	3,032,799,976,733	3,021,172,391,041	3,224,449,048,408	4.523.672.134.655,15	4,308,542,019,239.53
3.	SURPLUS/DEFISIT	(290,213,015,309.58)	(22,968,478,566.29)	51,895,236,750.85	-215.143.619.258,84	-352.418.393.909,16
4.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	385,968,213,531.62	80,672,196,504.32	33,838,947,039.68	73,033,060,944.24	370,720,769,951.55
5.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15,116,883,748.72	35,195,474,136.35	12,701,122,846.29	20,784,820,138.71	2,221,380,000.00
6.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	80,638,314,473.32	22,508,243,801.68	73,033,060,944.24	-162,895,378,453.31	16,080,996,042.39

Tabel 3.40
 Proyeksi Pembiayaan Daerah
 Kota Medan Tahun 2016 s/d 2021

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1.	PENDAPATAN	4.308.528.515.396,31	3,956,123,625,330.37	5.427.095.380.486,59	5.604.343.367.142,78	5.952.955.739.065,11	6,292,290,944,952.62
2.	BELANJA	4.523.672.134.655,15	4,308,542,019,239.53	5.675.481.377.624,54	5.834.232.668.612,95	6.152.207.002.055,49	6.341.425.718.967,58
3.	SURPLUS/DEFISIT	(215.143.619.258,84)	(352.418.393.909.16)	(248.385.997.137,95)	(229.889.301.470,17)	(199.251.262.990,38)	(49.134.774.014,96)
4.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	277.983.887.725,48	259.904.660.726,84	229.969.089.058,23	228.477.729.512,16
5.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	5.000.000.000,00	29.597.890.587,52	30.015.359.256,67	30.717.826.067,85	31.438.147.748,10
6.	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(5.000.000.000,00)	248.385.997.137,95	229.889.301.470,17	199.251.262.990,38	147.904.807.749,10

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat untuk mewujudkan Medan sebagai *World Class City* yakni melalui prinsip pembangunan kota berkelanjutan adalah: (a) Cakupan masalah yang luas, (b) Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif, dan (c) Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak. Adapun permasalahan pembangunan Kota Medan dewasa ini antara lain:

a. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur yang semakin berkualitas, handal dan memadai merupakan salah satu kriteria dalam menilai kemajuan suatu kota. Untuk mewujudkan visi pembangunan kota, maka terlebih dahulu permasalahan pembangunan infrastruktur yang menjadi kendala utama harus dapat diselesaikan. Agar mudah penyelesaian permasalahan yang dihadapi terlebih dahulu diidentifikasi beberapa aspek permasalahan utama infrastruktur Kota Medan yang dihadapi saat ini, antara lain:

1. Kondisi jalan mantap yang belum optimal

Secara umum jalan-jalan di Kota Medan dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 1.200 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm ukuran paling tinggi 3.500 mm dan muatan sumbu terberat 8 ton. Perkembangan panjang jalan menurut kondisinya pada tahun 2014 sepanjang 3,121.134 km (91,29%) dalam keadaan baik, sepanjang 23,93 km (0,73%) dalam kondisi sedang, sepanjang 113,47 km (3,46%) dalam kondisi rusak, sepanjang 148,23 km (11,19%) dalam kondisi rusak berat dan sepanjang 34,76 km (1,06%) tidak diperinci. Sementara panjang jalan berdasarkan jenis permukaan pada Tahun 2014 panjang jalan Kota Medan dengan kategori jalan beraspal adalah sepanjang 2.993,87 km (91,29%), kategori jalan tanah sepanjang 11,29 km (0,34%) dan tidak diperinci sepanjang 274,34 km (8,37%). Jika dilihat dari penambahan panjang jalan di Kota Medan, maka sepanjang Tahun 2010 sampai Tahun 2014 tercatat tidak ada penambahan panjang jalan secara berarti. Tentunya hal ini sangat riskan, mengingat pertumbuhan angkutan pribadi terutama sepeda motor relatif tinggi.

2. Kemacetan Lalu lintas

Bila dilihat kondisi lalu lintas di Kota Medan semakin hari semakin tersendat dan bahkan terhenti akibat volume kendaraan yang meningkat. Meningkatnya volume kendaraan tidak didukung dengan kapasitas jalan eksisting yang memadai. Kebutuhan jalan baik secara jumlah maupun lebar jalan di Kota Medan belum sanggup menghadapi peningkatan volume kendaraan yang terus-menerus bertambah (panjang jalan hanya bertambah 1% (satu persen) yaitu jalan lingkaran luar sedangkan penambahan kendaraan rata-rata 15% (lima belas persen) per tahun). Mahal dan kompleksnya permasalahan saat pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru dan pelebaran jalan juga merupakan kendala utama penyebab kemacetan lalu-lintas. Transportasi publik yang jumlahnya masih terbatas dan diharapkan dapat membantu mengatasi kemacetan di Kota Medan juga masih belum cukup layak dan nyaman sehingga masyarakat masih enggan menggunakan fasilitas yang ada saat ini (rasio jumlah kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum adalah 97,8% (sembilan puluh tujuh koma delapan persen dibanding 2,2% (dua koma dua persen) dan didominasi jumlah kendaraan roda dua sebanyak 75,95% (tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima persen)). Selain kurang nyaman dan layak transportasi publik belum memiliki rute/akses yang luas sehingga belum dapat menjangkau seluruh wilayah kota Medan yang akhirnya memaksa masyarakat memanfaatkan fasilitas kendaraan sendiri. Membangun budaya dan kedisiplinan warga agar tertib lalu-lintas perlu mendapat perhatian yang serius supaya tidak memperburuk kondisi yang ada saat ini. Bila pembiaran seperti ini terus terjadi maka roda perekonomian dan pelaku bisnis akan mengalami penurunan, dan jadwal aktivitas warga juga akan terganggu akibat ketidaktepatan waktu. Kemacetan lalu lintas juga disebabkan kurang berfungsinya terminal-terminal yang ada, sehingga penyerahan terminal tipe A kembali kepada pemerintah pusat perlu dipersiapkan secara baik.

3. Permasalahan Banjir

Banjir yang terjadi di Kota Medan umumnya terjadi pada titik/lokasi yang hampir sama setiap tahunnya. Rutinnya banjir yang muncul setiap tahun pada lokasi yang tidak berubah menjadi tanda bahwa rumitnya penanganan dan penyelesaian permasalahan banjir yang dihadapi oleh Pemerintah Kota. Sulitnya totalitas penanganan banjir oleh Pemerintah Kota disebabkan titik lokasi yang akan ditangani umumnya merupakan wilayah ekonomi yang memiliki aktivitas yang tinggi, sehingga bila dilakukan perbaikan akan memaksa Pemerintah mensterilkan lokasi untuk beberapa waktu guna perbaikan/pelebaran drainase. Tolakan dari masyarakat akibat terganggunya aktivitas perekonomian dan usaha menjadi salah satu faktor yang menyulitkan penanganan banjir saat ini. Bila hal ini tidak ditangani segera maka banjir yang rutin pada lokasi/titik yang terjadi akan meluap ke lokasi lain yang berada disekitarnya dan tanpa disadari akan menyebabkan terganggunya ekonomi dan usaha yang lebih luas dan besar di masa yang akan datang.

Beberapa drainase di kota yang tidak berfungsi dan tidak terintegrasi dengan baik satu dengan yang lain juga merupakan salah satu penyebab banjir Kota Medan. Selain sistem drainase, faktor manusia dan aktivitas masyarakat kota juga mendorong peningkatan dan pelebaran lokasi banjir saat ini. Aktivitas manusia seperti membuang sampah ke sungai/drainase, dan membangun pada Daerah Aliran Sungai (DAS) membuat terjadinya sedimentasi, penyempitan dan kinerja sungai dan drainase menjadi tidak maksimal bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi pendukung peningkatan banjir di Kota Medan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum berkualitas sesuai dengan perbandingan luas Kota Medan menyebabkan minimnya ruang serapan kota yang memadai semakin menambah dan memperburuk kondisi yang ada saat ini.

4. Masalah Persampahan Kota

Berdasarkan atas data pertumbuhan sampah tahun 2008 hingga tahun 2013 terjadi pertumbuhan sampah di Kota Medan. Pada tahun 2008 ke 2009 terjadi peningkatan produksi sampah sebesar 33,85 ton sedangkan dari tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 677,89 ton. Namun diantara tahun 2010 ke tahun 2011 malah terjadi penurunan produksi sebesar 22,65 ton dan meningkat kembali tahun 2011 ke tahun 2012 menjadi 270,33 ton. Untuk tahun 2013 volume yang dihasilkan masyarakat Kota Medan 1.700 ton/hari sehingga jika ditotal berkisar 44.000 ton/bulan sepanjang 2013 dan tahun 2015 mencapai 1.900 ton/hari. Jumlah tong sampah pada area publik yang terbuka dan umumnya tidak memisahkan tong sampah organik dan anorganik untuk mempermudah pengolahan saat berada di TPA menjadi penyebab memburuknya kondisi sampah kota. Kalaupun ada keberadaan sampah yang dipisah secara organik-anorganik sangat terbatas jumlahnya. Pembinaan dan sosialisasi kepada petugas sampah juga diperlukan agar tidak menyatukan sampah yang sudah terpisah pada tong sampah organik maupun anorganik saat diangkut ke dalam mobil sampah. Minimnya usaha pengelolaan persampahan yang menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan keberadaan Bank Sampah masih terbatas dibandingkan dengan persentase sampah yang dihasilkan ditambah lagi minimnya pengetahuan masyarakat (*reduce, reuse, recycle*) dalam memilah sampah rumah tangga yang menerapkan prinsip 3R. Penataan dan Pengelolaan TPA eksisting agar dapat lebih banyak mengolah kapasitas sampah yang ada agar dapat menghasilkan produk olahan sampah yang bermanfaat serta minimnya pengetahuan dan kemampuan mengolah persampahan menjadi sumber energi baru (WTE). Bahkan TPA sampah yang ada saat ini selain pola operasinya masih belum sesuai, juga pemanfaatannya sebagai TPA sampah yang layak hanya tinggal beberapa tahun lagi.

b. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Berdasarkan atas kondisi umum penyelenggaraan urusan pendidikan sampai tahun 2015, berbagai isu-isu strategis penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan dalam lima tahun yang akan datang antara lain:

1. Belum meratanya ketersediaan sarana pendidikan sekolah yang berkualitas, yang dapat membuat siswa sekolah betah dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran baik pada tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah terutama pada kawasan pinggir kota.
2. Masih adanya kesenjangan untuk mengakses sarana pendidikan yang berkualitas terutama bagi masyarakat pinggir kota dan masyarakat yang memiliki keterbatasan secara ekonomi.
3. Masih adanya bangunan sekolah yang berkualitas kurang baik karena sudah termakan usia maupun karena rancangan bangunan yang kurang tertata secara konstruksi terutama pada jenjang pendidikan dasar.
5. Masih terbatasnya penduduk usia sekolah, khususnya usia 4-6 tahun yang mengenyam pendidikan anak usia dini (PAUD), hal ini dikarenakan keterbatasan PAUD dan sejenis terutama di wilayah pinggiran kota.
6. Belum optimalnya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Hal ini diperlukan guna mendorong lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi dan kecakapan, sehingga memudahkan siswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau siap bersaing di pasar kerja. Relatif masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan disebabkan beberapa faktor pokok, seperti:
 - a) Ketersediaan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - b) Fasilitas belajar belum tersedia sepenuhnya secara memadai.
 - c) Biaya operasional pendidikan yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya memadai untuk membebaskan siswa dari biaya-biaya komplementer operasional sekolah.
 - d) Kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri yang belum sepenuhnya optimal.
7. Permasalahan manajemen pelayanan pendidikan yang terkait dengan kewenangan daerah adalah perlunya menyelenggarakan standar pelayanan minimal (SPM) secara konsisten, termasuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan merevitalisasi peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah. Untuk itu, perlu peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, di samping mendorong peran serta masyarakat khususnya dalam pembiayaan pendidikan yang diwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk Pemerintah Kota Medan dan siswa pendidikan menengah di

Kota Medan tentunya, sehingga perlu direncanakan dan dialihkan secara baik, tanpa mengganggu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

9. Masih adanya siswa putus sekolah di semua tingkatan. Penanganan anak-anak putus sekolah yang didominasi oleh kelompok umur 16-18 tahun, terutama dalam hal peningkatan kemampuan dan kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja. Hal ini menjadi isu penting karena dengan berkembangnya Kota Medan menjadi kota metropolitan yang mengandalkan daya saing, tuntutan terhadap ketrampilan kerja menjadi sangat krusial.
10. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus.
11. Belum bersinerginya pelaku pendidikan, guna mewujudkan Medan sebagai pusat pendidikan regional.

Sedangkan di bidang kesehatan, peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola yang meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana/sarana kesehatan, kuantitas, dan kualitas tenaga medis dan para medis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Medan termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Berdasarkan atas kondisi umum penyelenggaraan urusan kesehatan sampai tahun 2015, berbagai isu-isu pokok penyelenggaraan kesehatan dalam lima tahun yang akan datang di Kota Medan antara lain:

- a. Masyarakat belum sepenuhnya sadar untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- b. Masyarakat belum sepenuhnya yakin dan percaya bahwa pelayanan kesehatan sudah relatif baik, khususnya pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, sehingga pemanfaatan pelayanan kesehatan belum terealisasi secara menyeluruh dan optimal.
- c. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat di kawasan pinggir kota.
- d. Kualitas tenaga kesehatan belum seluruhnya memadai dalam merespons kebutuhan masyarakat.
- e. Pengetahuan sebagian masyarakat terhadap aturan dan tata cara untuk memperoleh pengobatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih relatif rendah.
- f. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar Kota Medan bahkan sampai ke luar negeri.
- g. Munculnya penyakit atau virus-virus baru yang mengancam kesehatan manusia, tidak hanya di Kota Medan tetapi juga di seluruh dunia.
- h. Penanganan terhadap penyakit menular tertentu seperti HIV/AIDS belum optimal.

- i. Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan.
 - j. Belum adanya satu misi bersama dari seluruh pelaku pembangunan kesehatan untuk menjadikan Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional.
- c. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Salah satu penggerak ekonomi kerakyatan adalah UKM, yaitu usaha yang dilakukan oleh rakyat yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat dikuasainya. Selama lima tahun terakhir, jumlah UKM di Kota Medan mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh usaha yang ada, sedangkan usaha dengan skala besar hanya 2% (dua persen). Hal ini menunjukkan, besarnya pengaruh UKM dalam menyerap tenaga kerja serta menjadi motor penggerak ekonomi. Saat ini, Era globalisasi menuntut para pelaku UKM untuk dapat bersaing dengan produk-produk luar, khususnya dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Akan tetapi, para pelaku tidak terlepas dari permasalahan UKM, yaitu kurangnya permodalan, teknologi hingga pemasaran. Untuk itu, perlu dicermati bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigm lokomotif, melainkan pada paradigma pondasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mendukung pemberdayaan UKM dan mendorong timbulnya para pelaku ekonomi kreatif baru, sebagai salah satu peluang dalam bersaing di era saat ini.

Dalam pemasaran produk, para pelaku UKM dan ekonomi kreatif tentunya memerlukan sarana untuk menjual produknya, salah satunya dengan adanya pasar tradisional. Akan tetapi, perkembangan hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail menyebabkan terdesaknya pasar tradisional. Menjamurnya pasar modern tersebut telah menyebabkan omzet pedagang tradisional relatif menurun. Kerugian yang terus menerus dapat menyebabkan ribuan pedagang gulung tikar. Penataan pasar tradisional yang selama ini dilakukan seperti memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, justru menimbulkan permasalahan baru, yaitu naiknya biaya sewa lapak yang tidak terjangkau. Akhirnya, sebagian pedagang terpaksa gulung tikar dan sisanya beralih menjadi PKL.

Permasalahan pasar tradisional juga bukan hanya berhadapan dengan pasar modern, akan tetapi datang dari dalam pasar tradisional itu sendiri. Salah satunya adalah jumlah pedagang yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat yang juga semakin meningkat. Jika tempat tidak tersedia, maka timbul pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar. Permasalahan berikutnya adalah masih rendahnya kesadaran terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban para pedagang. Hal ini menjadi salah satu faktor utama mengapa konsumen lebih memilih berbelanja di pasar modern mengingat rendahnya standar kebersihan yang

diterapkan oleh para pedagang pasar tradisional. Kondisi seperti ini, hingga saat sekarang masih belum menjadi perhatian sepenuhnya pengelola pasar sehingga belum ada edukasi atau pelatihan secara berkala terhadap para pedagang.

Permasalahan pasar tradisional menjadi hal yang sangat penting, mengingat fungsi pasar tradisional yang strategis dalam rangka peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Modernisasi bukan satu-satunya solusi, tetapi bisa dilakukan peningkatan fungsi dan daya tarik pasar tradisional dalam bentuk lain dengan menciptakan sesuatu yang khas keunikan namun tingkat kenyamanan, keamanan, kebersihan, ketertiban menjadi terpelihara dengan baik dan tidak kalah dengan apa yang terdapat di pasar modern. Upaya-upaya yang ditempuh juga harus dapat merubah image pasar tradisional adalah tempat yang kumuh, becek, tidak aman/tertib dan banyaknya pungutan liar, menumbuhkan budaya kepada para pedagang, pengelola pasar dan pembeli untuk dapat menciptakan suasana pasar yang bersih, nyaman dan tertib serta lebih menarik serta membangun manajemen pasar yang professional, termasuk tentunya membangun pasar induk baru sesuai tata ruang pasar-pasar tradisional baru serta yang bersifat pasar-pasar khusus.

d. Meningkatkan dan Menjaga Toleransi Beragama

Penduduk Kota Medan terdiri atas berbagai macam agama. Tradisi toleransi mengakar kuat dalam sikap dan perilaku saling menghormati dan bekerja sama di antara pemeluk agama yang berbeda. Namun akhir-akhir ini di daerah lain, terdapat gejala melemahnya budaya toleransi yang ditandai oleh menguatnya ekstrimisme di hampir semua kelompok seperti tindakan penyerangan tempat ibadah dan kekerasan antar agama yang seringkali terjadi di sejumlah tempat. Selain karena faktor penegakan hukum yang lemah dan kondisi sosial yang rawan, tumbuhnya ekstrimisme keagamaan juga disebabkan oleh semakin mudarnya budaya toleransi. Oleh karena itu, forum antar agama perlu diperkuat guna menyelenggarakan fungsi-fungsinya yang kompleks.

e. Kemudahan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam bidang pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan guna meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Pernikahan dan dokumen lainnya sepenuhnya tanpa biaya atau gratis. Namun demikian, masih adanya beberapa keluhan masyarakat terhadap tingginya biaya pengurusan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan ini belum sepenuhnya optimal.

Jika dilihat dari kepemilikan KTP, hingga tahun 2015 kepemilikan KTP-elektronik (KTP-el) sebesar 77,09% (tujuh puluh

tujuh persen). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa KTP elektronik dan KTP konvensional memiliki fungsi dan manfaat yang sama, sehingga masyarakat tidak segera mengganti KTP konvensional mereka dengan KTP-elektronik. Selain itu sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa untuk mengganti KTP mereka dengan KTP-elektronik harus mengeluarkan biaya alias tidak gratis.

Dari sisi kepemilikan akte kelahiran, bahwa di tahun 2015 capaian kepemilikan akte kelahiran sebesar 606 (enam ratus enam) per seribu penduduk. Tentunya angka tersebut harus ditingkatkan dalam lima tahun mendatang. Permasalahan yang sering terjadi adalah masyarakat cenderung beranggapan bahwa akte kelahiran bukanlah dokumen yang penting. Selain itu, masyarakat juga menganggap kepengurusan akte kelahiran cukup sulit dan rumit serta membutuhkan biaya.

Pandangan sebagian masyarakat bahwa pengurusan berbagai dokumen kependudukan merupakan sesuatu hal yang rumit dan membutuhkan biaya tinggi masih terjadi. Tentunya hal ini menjadi tugas utama untuk mendekatkan pelayanan tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk segera mengurus atau melaporkan jika ada perubahan data kependudukan juga masih relatif rendah.

f. Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan

Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat. Keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya visi pembangunan kota yaitu “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”. Keberagaman suku, etnis, agama dan budaya di Kota Medan selain merupakan kekayaan juga menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Potensi konflik SARA, maraknya aksi demo dan tindak kriminalitas perlu diantisipasi secara dini guna mencegah terjadinya kerusuhan dan tindakan anarkis yang tidak diinginkan. Aspek Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan menjunjung tinggi HAM.

Permasalahan kondisi masyarakat yang aman dan nyaman akan berdampak kepada masuknya arus investasi yang pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian masyarakat Kota Medan.

g. Meningkatkan Iklim Investasi

Guna meningkatkan Iklim Investasi di Kota Medan, beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Medan, antara lain:

1. Pembenahan kebijakan, dan implementasi investasi
2. Masalah dan hambatan birokrasi

3. Ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah
4. Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan
5. Kurangnya insentif bidang pajak maupun non pajak
6. Rendahnya jaminan dan perlindungan investasi
7. Lemahnya koordinasi antar kelembagaan
8. Kesiapan menghadapi pemberlakuan liberalisasi perdagangan regional, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

h. Penambahan Fasilitas Publik

Permasalahan dalam penambahan fasilitas public, meliputi:

1. Penambahan Taman-Taman Kota (Ruang Terbuka Publik Kota)

Ketersediaan ruang terbuka kota mempunyai peranan yang penting pada sebuah kota. Hutan kota dan RTH berperan sebagai penyedia jasa lingkungan yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, menyediakan berbagai jasa lingkungan kepada individu dan masyarakat dan menghasilkan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi warganya. Penduduk Kota Medan yang terus bertambah dan terbatasnya ketersediaan lahan menjadi salah satu penyebab ketersediaan ruang terbuka hijau kota terabaikan. Lahan dipenuhi dengan permukiman padat menurunkan keberadaan luas dan kualitas ruang terbuka. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap pengelolaan dan penataan ruang terbuka hijau yang banyak mendirikan bangunan pada kawasan penghijauan belum mendapatkan sanksi yang tegas. Pengelolaan tata ruang dan tertib tata ruang yang kurang disiplin menyebabkan banyaknya jalur hijau beralih fungsi, sehingga keseimbangan luas kota dengan ketersediaan RTH terganggu. Kurangnya identifikasi kawasan yang memiliki persentase RTH yang rendah menjadikan perencanaan Ruang Terbuka Hijau cenderung stagnan dan sama setiap tahunnya dan rendahnya konsistensi dan kesadaran semua pihak dalam menjalankan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang juga menjadi salah satu faktor rendahnya keberadaan RTH di Kota Medan.

2. Pembangunan Terminal

Kota Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia. Sebagai kota ketiga terbesar Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga pintu gerbang bagi wisatawan untuk menuju berbagai objek wisata yang ada di Sumatera Utara. Saat ini Medan memiliki 2 (dua) terminal yakni Terminal Pinang Baris dan Terminal Amplas. Terminal Pinang Baris dan Terminal Amplas merupakan terminal terpadu perhubungan darat di Kota Medan yang khusus menampung bus-bus antar provinsi dan dalam provinsi yang masuk ke Kota Medan. Terminal Pinang Baris dalam hal ini melayani dari sebelah barat khususnya rute bus dari NAD yang terletak di Kecamatan Sunggal. Terminal Amplas melayani rute yang

datang dari arah selatan Kota Medan dari Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jakarta. Namun kondisi terminal yang ada saat ini belum memadai dan representatif sehingga belum cukup nyaman dan manusiawi bagi penggunanya. Jadwal keberangkatan yang belum tetap, pola rute yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan sehingga terjadi transfer beberapa kali, kondisi penumpang yang bersesakan dan tempat menunggu penumpang yang kurang nyaman terutama pada jam sibuk (*peak season dan peak hour*), banyaknya pungli dan preman pada kawasan terminal menimbulkan suasana yang kurang kondusif dan nyaman. Kondisi perpustakaan dan penataan terhadap lokasi kendaraan bus yang berada di terminal saat ini serta perputaran ram yang masih belum sesuai dan sempit sehingga rawan kecelakaan memotivasi Pemerintah Kota Medan dalam merencanakan revitalisasi terhadap kedua terminal ini (apabila terminal tersebut masih kewenangan Kota Medan) agar sesuai visi pembangunan transportasi Kota Medan yang Handal, Nyaman, dan Manusiawi.

4.2. Isu-Isu Strategis

Mengenali dengan baik, isu-isu strategis merupakan bagian penting dan cukup menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, terutama dalam rangka untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi masyarakat internal dan lingkungan eksternalnya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak dapat dipisahkan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan kota sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, sehingga dapat digambarkan beberapa isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

1. Lingkup Internasional

Dalam lingkup internasional, beberapa isu strategis yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan kota meliputi:

- a. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang telah dimulai sejak tanggal 31 Desember 2015. Melalui MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja daerah akan menjadi aset berharga untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan kota.
- b. Pengaruh eksternal bagi perekonomian daerah antara lain berasal dari : (1) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, (2) perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek untuk Kota Medan.
- c. Perkembangan global yang perlu dicermati untuk masa lima tahun mendatang, yaitu : (1) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya masih belum pulih atau masih dalam posisi *mild recovery* sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, karenanya mungkin dapat akan menyulitkan ekspor Indonesia/daerah tumbuh lebih cepat; (2) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun *flat* dan adanya indikasi berakhirnya era *supercycle* juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (3) proses normalisasi kebijakan moneter AS dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya, sehingga baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian Kota Medan.
- d. Tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi *regional* dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti : jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan, yang juga menjadi bagian ciri pokok perekonomian Kota Medan.
- e. Perubahan iklim (*climate change*) yang akan berpengaruh kepada pembangunan sektor ketahanan pangan/kemandirian pangan, sehingga cukup berpengaruh bagi upaya mewujudkan kedaulatan pangan Kota Medan.
- f. Komitmen pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah ditetapkan pada bulan September 2015. Kita telah belajar banyak dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Lebih

dari 15 (lima belas) tahun terakhir, delapan tujuan dan 60 target MDGs telah melahirkan perbaikan yang signifikan dalam pembangunan di tingkat nasional, regional dan global. MDGs telah mengajarkan kita untuk memahami dan mengakomodasi multi dimensi yang melekat pada pembangunan. MDGs membantu membangun momentum gerakan anti-kemiskinan, yang merupakan salah satu gerakan global sepanjang sejarah. MDGs juga sukses dalam membangun momentum untuk peningkatan kepedulian dan gerakan kesehatan balita, anak, remaja dan perempuan, membuat lebih banyak anak perempuan dapat bersekolah, mengentaskan kemiskinan lebih dari satu milyar orang di dunia dan mencegah kematian. Namun demikian, disamping tonggak keberhasilan tersebut, di beberapa daerah, ketidaksetaraan dan penghambat pembangunan masih ada. Sebagai perluasan dari MDGs, SDGs akan diarahkan pada kewajiban-kewajiban untuk melanjutkan dan memperluas keberhasilan MDGs. Mengamati inklusifitas dalam proses penyusunannya, SDGs diharapkan mampu membangun di atas pondasi yang sudah dibuat MDGs. Integrasi antar dimensi yang berbeda dari pembangunan berkelanjutan, tidak hanya terkait pencapaian target, namun juga penting dipastikan upaya bersama di tingkat nasional dan daerah untuk memasukkan SDGs dalam agenda pembangunan nasional dan daerah dari perencanaan sampai pelaksanaan. Implementasi SDGs harus dilaksanakan secara inklusif, sama seperti proses penyusunannya. Ada tiga elemen penting dalam pengarusutamaan pelaksanaannya yaitu kerangka kebijakan, struktur institusi dan keterlibatan masyarakat. Tiga hal tersebut harus senantiasa disinkronkan satu sama lain. Untuk itu, Kota Medan juga harus mampu mengintegrasikan tujuan, target dan kerangka kebijakan yang diperlukan dalam manajemen pembangunan kota.

2. Isu-Isu Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Sementara secara khusus dalam konteks pembangunan daerah, visi pembangunan daerah jangka panjang secara nasional yang telah ditetapkan untuk periode 2005-2025 adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan pembangunan secara optimal, sinergis, berkelanjutan, sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arah pembangunan jangka panjang pembangunan daerah yang telah dirumuskan antara lain adalah :

- a. Peningkatan pembangunan daerah diprioritaskan pada daerah-daerah yang belum berkembang. Pengelolaan pembangunan daerah ini didasarkan pada dua strategi pengembangan wilayah, yaitu (1) pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, yaitu wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya tinggi dan atau lokasi strategis; dan (2) pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, yaitu wilayah-wilayah yang miskin

sumber daya dan atau memiliki wilayah geografis yang terisolir dan perbatasan.

- b. Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan pada pemanfaatan potensi sumber daya melalui (1) peningkatan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah, termasuk potensi maritim dan kelautan; (2) peningkatan sistem perdagangan antar daerah; (3) peningkatan kota-kota menengah dan kota-kota kecil; (4) mensinergikan pembangunan kota dan desa; (5) peningkatan sarana dan prasarana ekonomi regional; (6) penciptaan iklim yang kondusif bagi investor; (7) peningkatan kerja sama antar daerah; (8) peningkatan kerja sama ekonomi sub regional antar negara; dan (9) peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat.
- c. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerja sama antar negara.
- d. Peningkatan sistem perdagangan antar daerah dilakukan melalui (1) pengembangan jaringan koleksi dan distribusi yang efisien untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa antar daerah, (2) peninjauan kembali peraturan perpajakan dan retribusi yang menghambat dan mempertinggi biaya transaksi antar daerah, (3) mendukung pengembangan potensi perdagangan lintas negara dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional dalam konteks perdagangan regional maupun global. Peningkatan sistem perdagangan ini diterapkan melalui basis-basis wilayah pengembangan yang mempunyai sumber daya unggulan yang dapat dikembangkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi nasional dan regional, memiliki agglomerasi kegiatan ekonomi antara produksi, pasar dan jasa pendukungnya yang cukup luas dan saling terkait erat, memiliki posisi yang strategis dalam kaitannya dengan pertumbuhan nasional dan regional, serta memiliki dampak perkembangan terhadap wilayah sekitarnya.
- e. Peningkatan kota-kota menengah dan kota-kota kecil diarahkan dengan mengembangkan kota-kota menengah dan kecil di luar Jawa agar dapat berfungsi sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah, sekaligus sebagai penahan laju migrasi penduduk ke kota-kota metropolitan dan besar, terutama ke kota-kota di Jawa, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai kota penyangga dan *counter magnet* bagi kawasan metropolitan serta mencegah terjadinya proses konurbasi yang tidak terkendali. Pengembangan kota-kota menengah dan kecil dilakukan melalui:

- (1) pengembangan industri pengolahan dan jasa penunjangnya; (2) peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial budaya perkotaan; (3) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia dan kelembagaan di daerah perkotaan; (4) penguatan kapasitas pengelolaan dan pembiayaan pembangunan perkotaan; (5) pemberlakuan regulasi yang kondusif bagi investasi di daerah perkotaan (6) pengendalian pemanfaatan kawasan perkotaan melalui upaya penegakan hukum yang tegas dan adil.
- f. Sementara itu, pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar, terutama di Pulau Jawa, akan dikendalikan melalui: (1) penerapan manajemen perkotaan (*urban - sprawl management*) yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga (*buffer zone*) di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota menengah dan kecil di sekitar kota inti agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai *dormitory town* tetapi dapat menjadi kota mandiri; (2) pengembangan kegiatan ekonomi kota (*urban economic development*) yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dll; (3) revitalisasi kawasan kota (*urban revitalization*) meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui *redevelopment* kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda; (4) reformasi keuangan daerah perkotaan (*urban fiscal reforms*) seperti perluasan basis perpajakan termasuk kemungkinan penerapan *road pricing*, menaikkan tarif parkir, penerapan PBB secara progresif, serta pinjaman daerah termasuk penerbitan obligasi (*municipal bonds*) yang manfaatnya dikembalikan ke publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan.
- g. Sinergi antara kota dan desa dikembangkan untuk mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara desa dan kota melalui: (1) pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian yang mampu melayani dan mendorong kegiatan agrobisnis/agroindustri di kawasan tersebut; (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; (3) pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan disertai peningkatan mobilitas produk maupun penduduk antara desa dan kota; (4) peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; (5) pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; (f) intervensi harga dan kebijakan perdagangan (*price and trade intervention*) yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah; (g) formulasi strategi perkotaan dan perdesaan secara menyeluruh dalam suatu kerangka pembangunan wilayah yang

terpadu dan dalam suatu *regional network* yang saling menguntungkan.

- h. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi regional pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh dilakukan melalui pengembangan sistem jaringan transportasi (darat, laut, sungai, dan udara), telematika, dan energi secara lebih efektif dan efisien untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi strategis dan cepat tumbuh dengan wilayah-wilayah pertumbuhan lain secara nasional dan internasional. Pembangunan prasarana dan sarana dapat dibiayai dengan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta, dunia usaha, serta masyarakat. Peningkatan pelayanan transportasi masal terutama untuk kota-kota metropolitan di Pulau Jawa.
- i. Peningkatan kerja sama antar daerah akan terus ditingkatkan. Kerja sama antar pemerintah daerah maupun dengan pihak lain menjadi sangat penting dalam rangka (1) memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; (2) menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jejaring (*networking*) antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (*sharing of experiences*), saling berbagi keuntungan dari kerja sama (*sharing of benefits*), maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional (*sharing of burdens*), baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk kegiatan pembangunan lainnya. Kerja sama antar daerah yang bersifat jejaring itulah yang akan dapat memperkuat eksistensinya dan dapat survive dalam iklim kompetitif, terutama dalam menghadapi globalisasi.
- j. Penciptaan iklim yang kondusif bagi investor termasuk peningkatan kerja sama antar negara melalui kerja sama ekonomi sub regional (SIJORI, IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA) terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi *foreign direct investment*: antara lain melalui (1) pengembangan sarana dan prasarana, terutama transportasi, energi, telematika, dan air bersih; (2) kebijakan ketenagakerjaan; (3) kebijakan tarif; (4) kebijakan pertanahan untuk pengembangan *real estate/property*; (5) penyederhanaan prosedur perizinan; (6) kepemilikan saham; (7) penerapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*free port and free trade zone*), termasuk kemungkinan penerapan FTZ di beberapa wilayah lain di luar Sabang dan Batam; dan (8) peningkatan *good governance*.
- k. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah (*local governance*) terus ditingkatkan melalui (1) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah (2) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; (3) peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah ditingkatkan; (4) penguatan lembaga legislatif; (5) pengembangan masyarakat madani.
- l. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memperluas akses pada modal

usaha dan sumber daya alam, memberikan kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka, meningkatkan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan yang berkelanjutan.

- m. Pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, yaitu wilayah-wilayah yang miskin sumber daya dan atau memiliki wilayah geografis terisolir dan perbatasan termasuk kawasan di pulau-pulau terpencil dilakukan melalui: (1) penyediaan sarana dan prasarana, terutama perhubungan dan telematika, melalui penyediaan angkutan perintis, pelayanan *universal service obligation* bagi pembangunan telematika; (2) penciptaan insentif usaha untuk pemanfaatan sumber daya alam; dan (3) pengembangan sumber daya manusia. Kawasan perbatasan dikembangkan sebagai serambi depan negara untuk memudahkan masyarakat setempat memanfaatkan peluang yang ada di perbatasan dan untuk mencegah aktivitas illegal antar negara. Selain itu dilakukan pula penanggulangan masyarakat miskin melalui: (1) peningkatan pendapatan melalui perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan produktivitas penduduk miskin; dan (2) pengurangan pengeluaran keluarga miskin di bidang pangan, pendidikan, kesehatan.
- n. Peningkatan fungsi penataan ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan untuk mengurangi konflik kepentingan, baik antar sektor, antar daerah maupun antar kelompok melalui pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang yang belum efektif menjadi salah satu penyebab masih tingginya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian, khususnya di Pulau Jawa. Dalam rangka menjaga daya dukung wilayah (*carrying capacity*) Pulau Jawa, maka proses konversi lahan pertanian ke non-pertanian (industri dan perumahan, dan infrastruktur), harus diminimumkan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya: (1) kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir; (2) kelangkaan sumber air bersih; dan (3) aglomerasi perkotaan yang tidak terkendal (*unmanageable urban agglomerations*). Selain itu proses konversi tersebut akan mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Oleh karena itu, proses konversi lahan pertanian ke non-pertanian harus dikendalikan melalui: (1) pengawasan dan penerapan *law enforcement* tata ruang yang efektif; (2) penyeimbangan *land-rent* antara Jawa dan Luar Jawa dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah di Luar Jawa; (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, termasuk kawasan industri di Luar Jawa; dan (4) pengaturan insentif/disinsentif pemanfaatan lahan pertanian dan non-pertanian.
- o. Dalam rangka penataan pertanahan perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform*, serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan

melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*; selain itu akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJM Nasional 2015-2019 tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan penting, bahkan harus terintegrasi dengan RPJMD Tahun 2016-2021.

3. Isu Strategis Dalam Lingkup Nasional

Dalam lingkup nasional, isu strategis yang akan mempengaruhi pembangunan Kota Medan dalam lima tahun kedepan, meliputi:

- a. Menciptakan pertumbuhan inklusif. Pola pertumbuhan inklusif akan mengoptimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (*Decent Work*) dan ramah keluarga miskin sehingga dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.
- b. Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP termasuk pendidikan tinggi dimana di Kota Medan jumlahnya cukup besar.
- c. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro. Usaha mikro perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar yang bagus. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usaha mikro tidak memiliki lokasi permanen dan tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang.
- d. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk ini umumnya memiliki kesempatan terbatas dalam sektor formal dan tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diakses kelompok penduduk ini kurang dapat memenuhi standar hidup

yang layak dan tidak berkesinambungan. Keterpaduan berbagai asistensi sosial untuk mendukung penduduk kurang mampu agar dapat mengelola berbagai risiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak, dan jaminan sosial yang memadai.

- e. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pemenuhan hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan identitas/legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum. Tantangan dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ini menyangkut ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik;
- f. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Kelompok masyarakat kurang mampu, rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Selain itu, perlu untuk memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar. Perlunya membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar.
- g. Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan. Hal ini juga mencakup pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan.
- h. Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya.
- i. Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumber daya dan teknologi bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan.
- j. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan,

termasuk mengurangi minat masyarakat berobat ke luar negeri, dengan kepercayaan yang semakin meningkat terhadap pelayanan kesehatan lokal/domestik sekaligus guna menciptakan Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional.

- k. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk menjadikan medan menjadi pusat pendidikan regional, dengan keberadaan pusat-pusat pendidikan unggulan.
- l. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki Nawa Cita atau 9 (sembilan) agenda prioritas. Seperti SDGs, Nawa Cita juga diprioritaskan kepada yang berisiko tinggi. Nawa Cita bisa berfungsi sebagai kendaraan untuk membawa SDGs menjadi nyata. Perencanaan yang terintegrasi di tingkat nasional dan daerah, tidak hanya melibatkan kementerian teknis, tapi juga melibatkan lembaga perencanaan tingkat daerah nasional sebagai penghubung perencanaan pembangunan nasional.

Untuk itu, isu-isu strategis nasional tersebut di atas harus juga terintegrasi dengan RPJMD Tahun 2016-2021.

4. Lingkup Provinsi Sumatera Utara

Beberapa isu strategis dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan Kota Medan, meliputi:

- a. Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan.
- b. Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.
- c. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya.
- d. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran.
- e. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal.
- f. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan.

- g. Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial.
- h. Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.
- i. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana).
- j. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia serta ketentraman dan ketertiban.
- k. Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan.
- l. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah.
- m. Belum berperan lembaga penggerak inti dan lembaga pelayanan dalam mendukung Pokja sebagaimana amanat Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

Sebagai koridor inti pembangunan Sumatera Utara, Kota Medan tentunya harus merespon isu-isu regional/provinsi ini sebagai bagian integral pembangunan Kota Medan.

5. Lingkup Kota Medan

Secara umum, pembangunan kota difokuskan pada 3 (tiga) dimensi pembangunan yakni dimensi pembangunan fisik/tata ruang, dimensi pembangunan sektor ekonomi unggulan dan dimensi sosial budaya. Tercakup dalam dimensi sosial budaya adalah pendidikan dan kesehatan. Ketiga aspek pokok tersebut tentunya menjadi satu kesatuan dalam agenda prioritas pembangunan kota yang tertuang dalam program prioritas pembangunan kota sampai tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam visi/misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kota Medan dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Medan. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 8 (delapan) isu strategis Kota Medan, sebagai berikut:

- a. Pembangunan Infrastruktur
- b. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan
- c. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
- d. Meningkatkan dan Menjaga Toleransi Beragama
- e. Kemudahan Pelayanan Administrasi Kependudukan

- f. Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan
- g. Meningkatkan Iklim Investasi
- h. Penambahan Fasilitas Publik

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota tentunya memiliki harapan-harapan, gambaran dan keinginan yang seringkali diwujudkan serta diekspresikan dalam bentuk tuntunan, kebutuhan dan kepentingan kota pada masa yang akan datang. Kesemua itulah yang dibayangkan oleh segenap *stakeholder*, sebagai Kota Masa Depan yang diharapkan dapat diwujudkan secara bersama-sama, dengan kata lain seluruh warga kota tentunya memiliki bayangan tentang Kota Medan Masa Depan yang ingin diwujudkan sebagai cita-cita bersama.

Kota Masa Depan yang dibayangkan tersebut juga mengakar kepada nilai-nilai luhur (*local wisdom*) yang bisa diterima dalam sifat pluralisme, kemajemukan dan kebhinekaan yang dimiliki. Oleh karena itu, Kota Medan masa depan yang dicita-citakan tersebut harus memiliki sifat multikultural yang hakiki. Di sisi lain, Kota Medan Masa Depan adalah kota yang berinteraksi secara regional dan internasional sesuai dengan kecenderungan globalisasi dan regionalisasi dunia saat ini.

Kota Medan Masa Depan adalah kota yang harus membangun dan menjalin kerja sama, persahabatan dengan kota-kota regional dan internasional dengan prinsip saling menghargai, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Untuk itulah, Kota Medan harus meningkatkan daya saingnya guna meraih manfaat yang sebesar-besarnya dari kecenderungan global pada masa yang akan datang.

Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan bernilai ekonomi guna mengejar kemajuan ekonomi daerah seringkali berdampak negatif, sehingga berakibat hilangnya nilai-nilai hakiki dari tujuan hidup setiap insan manusia, baik secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Oleh karena itu, Kota Medan Masa Depan yang diidamkan oleh segenap warganya tetaplah kota yang bersifat humanis, sehingga menjadi kota yang layak huni bagi seluruh warganya, sesuai dengan esensi kemanusiaan.

Di samping berbagai dimensi pembangunan kota sebagaimana yang disebutkan di atas, maka fokus akhir dari seluruh harapan proses pembangunan kota yang diselenggarakan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan (*sustainability*). Kata kunci dari kesejahteraan itu sendiri tentunya bermakna pertumbuhan, perubahan dan pemerataan, serta stabilitas. Selanjutnya, sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka norma dan sistem nilai yang paling hakiki yang mencerminkan kota Medan Masa Depan adalah Kota Medan dengan citra religius, yaitu Kota yang masyarakatnya memiliki

ketaatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dengan rasa aman, nyaman, tertib, dan sikap toleransi yang tinggi.

Untuk itulah, visi bersama pembangunan kota 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) dirumuskan:

“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”

Adapun modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota dimaksud adalah dukungan:

- a. *Social Capital*: modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong-royong, saling membantu dan lain-lain)
- b. *Natural Capital*: modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang baik)
- c. *Human-made Capital*: modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar budaya dan lain-lain) maupun yang non-fisik (lembaga, manajemen, dan lain-lain)
- d. *Economic/Financial Capital*: modal untuk pembangunan yang berbentuk finansial)
- e. *Human Capital*: modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja)

Pokok-Pokok Visi:

A. Kota Masa Depan

Kota Masa Depan yang dimaksudkan adalah gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota secara berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan kota secara fisik dan tata ruang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti kebinamargaan, perumahan, permukiman dan lingkungan hidup. Selanjutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi kota 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) diwujudkan melalui peningkatan pencapaian PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kota bidang sosial dan budaya, diwujudkan dalam bentuk peningkatan capaian derajat pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat, serta terbinanya rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya.

B. Kota Multikultural

Kota Multikultural yang dimaksudkan adalah kota yang menjadikan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kota Multikultural juga dicerminkan dari terpeliharanya sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif. Kota Multikultural juga ditunjukkan dari wujud fisik arsitektural kota yang cukup beragam, ditandai dengan perlindungan serta pelestarian cagar budaya yang dimiliki.

C. Kota Berdaya Saing

Kota Berdaya Saing dimaksudkan adalah sebagai kota yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat dengan kota-kota regional dan internasional, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang.

Untuk itu, perlu terus meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan sumber daya manusia unggul, guna meningkatkan terus menerus pendapatan riil masyarakat.

D. Kota Humanis

Kota Humanis dimaksudkan adalah sebagai kota dimana masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan kota harus konsisten dengan tata ruang kota, menselaraskan pendekatan kewilayahan dengan pengembangan kota yang dinamis berdasarkan potensi yang dimiliki serta dinamikanya pada masa yang akan datang.

Kota Humanis juga harus mencerminkan kota yang mengutamakan kenyamanan serta BERHIAS (Bersih, Hijau, Asri, dan Sehat), sekaligus bermartabat.

E. Kota Sejahtera

Kota Sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu, proses pembangunan kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas.

F. Kota Religius

Kota Religius dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya ta'at menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itu, proses pembangunan kota harus mendorong ketersediaan prasarana dan sarana ibadah yang semakin representatif bagi masing-masing pemeluknya, termasuk di

ruang-ruang publik dimana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan cukup menonjol.

Kota Religius termasuk didalamnya kota yang menyelenggarakan berbagai *event* sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan baik, untuk mengambil spirit dan makna yang terkandung di dalamnya guna menjadi inspirasi dan mengilhami proses pembangunan kota.

5.2. Misi Pembangunan Kota 2016-2021:

Berdasarkan atas gambaran dan harapan terwujudnya Medan, “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
- b. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
- c. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
- d. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
- e. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
- f. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Pokok-Pokok Misi

A. Misi Kesatu:

Tujuan pembangunan kota pada hakekatnya merupakan tujuan bersama, oleh karena itu harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan secara bersama-sama oleh seluruh *stakeholder* kota. Sebagai prakondisi untuk mewujudkan kota masa depan sekaligus sebagai prasyaratnya, harus lah di tumbuh kembangkan stabilitas daerah yang terkait dengan IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS. Disamping itu harus dibina kerja sama kemitraan, peran aktif yang bersifat partisipatif, advokasi, dan pemberdayaan dari segenap *stakeholder* kota. Di sisi lain pembangunan kota juga membutuhkan kebersamaan yang kokoh untuk menghadapi semua ancaman dan tantangan sehingga dapat diantisipasi secara bersama-sama.

B. Misi Kedua:

Walaupun catatan sejarah menunjukkan, Kota Medan mampu memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan, namun tetap merupakan tugas pembangunan pada masa yang akan datang untuk terus memelihara dan meningkatkan kehidupan keberagaman

budaya dalam keselarasan, guna mewujudkan harmonisasi sosial sebagai ciri pokok kota multikultural. Di samping itu, perlu secara berkelanjutan membina persatuan dan kesatuan antar kultur sosial budaya yang berbeda, guna memelihara kerukunan. Selanjutnya, keragaman budaya daerah juga harus dijadikan asset pembangunan melalui pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan keberagaman budaya daerah. Sebagai kota multikultural, Kota Medan juga harus memiliki ikon daerah yang mencerminkan keberagaman (kebhinekaan).

C. Misi Ketiga:

Sesuai dengan kecenderungan global dan regional saat ini dan pada masa yang akan datang, perlu terus meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa guna menghilangkan bentuk-bentuk ekonomi biaya tinggi. Meningkatkan daya saing juga harus ditempuh melalui langkah-langkah *good governance* dan potensi wilayah, guna menciptakan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi daerah terutama di bidang perizinan/non perizinan termasuk penyelenggaraan pelayanan umum yang semakin berkualitas. Meningkatkan daya saing juga harus ditempuh dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui kreatifitas dan inovasi daerah. Kesemuanya itu akan meningkatkan kemampuan kompetitif dan komparatif daerah, sehingga Kota Medan mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kecenderungan global, regional seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis.

D. Misi Keempat:

Pada prinsipnya kota humanis adalah kota yang berkelanjutan, yang selaras dengan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu pengembangan kota harus mempedomani dengan baik struktur dan pola ruang kota sebagaimana yang ditetapkan dalam PERDA RTRW dan RDTR serta perencanaan kewilayahan lainnya. Di sisi lain, untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat sehingga dapat berjalan produktif perlu menyediakan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin terintegrasi, modern, handal dan ramah lingkungan seperti jaringan jalan, sistem sungai/drainase, transportasi publik, ketersediaan kawasan lindung/RTH dan struktur serta arsitektur bangunan-bangunan yang semakin modern berkembang sesuai dengan potensi dan dinamika pada masa yang akan datang.

E. Misi Kelima:

Dengan struktur demografi dimana tersedia hampir 1 (satu) juta angkatan kerja, maka dimensi kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat hanya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja secara massif sesuai dengan struktur ekonomi dan divesifikasi aktivitas ekonomi wilayah. Di sisi lain, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat perlu secara berkelanjutan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga membentuk masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman,

bertaqwa dan mandiri. Oleh karena itu pula, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat harus dicapai melalui peningkatan produktivitas masyarakat itu sendiri. Untuk itu, perlu tetap memperhatikan penciptaan keadilan ekonomi dan keadilan sosial guna mewujudkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat, melalui pembangunan kota yang berkeadilan.

F. Misi Keenam:

Kota religius merupakan keniscayaan dari ciri masyarakat beragama, oleh karena itu harus didorong terwujudnya sistem sosial yang mencerminkan perilaku taat beragama dari seluruh warga kota. Untuk itu juga, harus didorong ketersediaan prasarana dan sarana peribadatan bagi seluruh agama secara representatif, dimana seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadahnya masing-masing termasuk di ruang-ruang publik. Di sisi lain, kerja sama antar pemeluk agama harus menjadi bagian dari ikon kota religius.

5.3. Keterkaitan Visi Misi RPJMD 2016-2021 dengan Visi Misi RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dan RPJPD Kota Medan 2006-2025

<p>VISI MISI RPJMN 2015-2019</p>	<p>Visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan <p>PROGRAM NAWACITA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
----------------------------------	--

	<p>rasa aman kepada seluruh warga negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
<p>VISI MISI RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018</p>	<p>Visi: MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA YANG SEJAHTERA</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan SUMUT yang maju, aman, bersatu, rukun, dan damai dalam kesetaraan 2. Mewujudkan masyarakat SUMUT yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan 3. Mewujudkan SUMUT yang berbudaya, religious dalam keberagaman 4. Mewujudkan masyarakat SUMUT yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan
<p>RPJPD Kota Medan 2006-2025</p>	<p>Visi: KOTA MEDAN YANG MAJU, SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis 2. Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri 3. Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan 4. Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan,

<p>RPJMD Kota Medan 2016-2021</p>	<p>Visi: MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA DAN RELIGIOUS</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota 2. Menumbuh kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme 3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah 4. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan 5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan 6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan atas etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan
-----------------------------------	--

5.4. Keselarasan Misi RPJPD Kota Medan 2005-2025 dengan Misi RPJMD Tahun 2016-2021

Misi RPJPD Kota Medan Tahun 2005-2025	Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021
<p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis 	<p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah
<ol style="list-style-type: none"> 2. Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat

pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri	melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan 3. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan
3. Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan	4. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan
4. Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan,	5. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota 6. Menumbuh kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

5.5. Tujuan Umum Pembangunan Kota 2016-2021:

Sebagai bentuk kinerja pembangunan kota untuk 5 (lima) tahun ke depan, dirumuskan tujuan umum pembangunan kota jangka menengah (2016-2021) sebagai berikut:

Misi 1	Tujuan Umum
Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman serta tertib sosial dalam masyarakat 2. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan stakeholder dalam pembangunan kota di berbagai bidang 3. Meningkatkan bentuk-bentuk kegotongroyongan dan tanggung jawab sosial perusahaan 4. Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan pemuda serta perempuan dalam pembangunan kota 5. Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit Berprestasi.

Misi 2	Tujuan Umum
Menumbuh kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai 2. Membangun koordinasi, komunikasi dan interaksi sosial yang efektif dalam kedudukan sederajat 3. Melindungi, memelihara, melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya dengan ciri khas masing-masing
Misi 3	Tujuan Umum
Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing dan perekonomian kota 2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal 3. Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja 4. Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UMKM dan Koperasi dalam perekonomian kota 5. Mewujudkan Medan Kota kreatif
Misi 4	Tujuan Umum
Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang dinamis dan produktif 2. Menyediakan berbagai fasilitas, utilitas kota seperti sistem informasi manajemen, telekomunikasi, kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin handal, berkecukupan serta ramah lingkungan 3. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan jalan dan transportasi perkotaan terutama di wilayah lingkaran luar yang semakin terpadu, efisien, efektif dan ramah lingkungan (Medan dengan infrastruktur terbaik) 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan lindung dan ruang terbuka hijau 5. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
Misi 5	Tujuan Umum
Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Medan sebagai pusat pendidikan regional 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mewujudkan Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional

secara merata dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, balita dan lansia 5. Memerangi HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular 6. Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) 7. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
Misi 6	Tujuan Umum
Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Medan sebagai Kota religius 2. Menyelenggarakan berbagai program kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan bagi seluruh agama 3. Mewujudkan sikap-sikap adat sopan santun dan perilaku masyarakat yang selaras dengan etika serta moral agama

5.6. Tujuan dan Sasaran

Kinerja pembangunan kota untuk 5 (lima) tahun ke depan, diuraikan melalui Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Target pembangunan kota jangka menengah (2016-2021) sebagai berikut:

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Target

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target
1	2	3	4	5
1	Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku, kepentingan pembangunan kota	Menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman serta tertib sosial dalam masyarakat	Meningkatnya suasana keamanan dan ketertiban kota yang kondusif	Persentase penanganan terhadap pelanggaran Perda Kota Medan
			Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana	Rata-rata waktu respon kejadian tanggap darurat
		Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan stakeholder dalam pembangunan kota di berbagai bidang	Meningkatnya Perencanaan Partisipatif	Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (<i>response time rate</i>)
				Persentase program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPd
				Persentase peningkatan PAD Kota Medan
		Meningkatkan bentuk-bentuk kegotongroyongan dan tanggung jawab sosial perusahaan	Meningkatnya jumlah partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan kota	Opini atas laporan keuangan daerah
				Persentase peningkatan penyaluran dana CSR ke Pemerintah Kota Medan
		Meningkatkan kedudukan, fungsi, dan peranan pemuda serta perempuan dalam pembangunan kota	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota	Persentase peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
				Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan
		Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan	Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan	Persentase menurunnya konflik antar pelajar dan pemuda
Persentase meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi				
Menciptakan Medan sebagai Kota Atlet Berprestasi	Meningkatnya prestasi Atlet Kota Medan dalam penyelenggaraan even-even olahraga Nasional dan Internasional			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target	
1	2	3	4	5	
2	Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme	Mewujudkan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai	Meningkatnya keamanan wilayah melalui penguatan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai	Persentase menurunnya konflik antar OKP	
		Melindungi, memelihara, melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya dengan ciri khas masing-masing	Meningkatnya jumlah wisatawan melalui pengembangan wisata berbasis kearifan lokal	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	
3	Meningkatkan efisien melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah	Meningkatkan daya saing perekonomian kota	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro	Pertumbuhan ekonomi	
			Meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan	PDRB	
			Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan	Laju inflasi	
			Meningkatnya PAD melalui Penataan dan Pembinaan Perusahaan Daerah	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	
		Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Medan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	
			Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja	Meningkatnya lapangan kerja yang masif dan <i>skilled labor</i>	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
					Dana Penyertaan Modal Pemko kepada Perusahaan Daerah
		Realisasi Investasi PMDN			
		Realisasi Investasi PMA			
		Angka partisipasi kerja			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target
1	2	3	4	5
		Meningkatkan kedudukan, fungsi & peran UMKM dan Koperasi dalam perekonomian kota	Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM dalam perekonomian kota	Persentase meningkatnya usaha UMKM
		Mewujudkan Medan Kota Kreatif	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mewujudkan Medan Kota Kreatif	Menurunnya angka pengangguran kota
4	Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan	Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang dinamis dan produktif	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan tata ruang kota secara memadai	Usaha ekonomi kreatif
			Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang kota	Persentase pembangunan fisik bangunan yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan sehat	Persentase bangunan yang memiliki IMB di Kota Medan
		Menyediakan berbagai fasilitas utilitas kota seperti sistem informasi manajemen telekomunikasi, kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin handal, berkecukupan serta ramah lingkungan	Meningkatnya akses pelayanan air limbah	Luas kawasan permukiman kumuh
			Meningkatnya akses pelayanan air minum	Persentase rasio rumah layak huni
			Tersedianya sistem jaringan drainase perkotaan secara terpadu dan berfungsi baik	Persentase akses pelayanan air limbah
			Meningkatkan ketersediaan	Persentase pelayanan air minum layak perkotaan
	Terwujudnya infrastruktur	Persentase menurunnya lokasi rawan genangan/ banjir		
		Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target	
1	2	3	4	5	
		sistem jaringan jalan dan transportasi perkotaan terutama di wilayah lingkaran luar yang semakin terpadu, efisien, efektif, dan ramah lingkungan (Medan dengan infrastruktur terbaik)	jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas dan nyaman		
			Terwujudnya sarana dan prasarana dan sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	Persentase menurunnya titik kemacetan Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase peningkatan luasan RTH dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan
			Memastikan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan pengangkutan sampah	Persentase peningkatan volume penanganan sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
		Mewujudkan Medan sebagai Kota Smart City	Terwujudnya Medan sebagai Kota Smart city	Persentase peningkatan penggunaan aplikasi smart city yang dibangun oleh Pemko Medan.	
5	Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan	Mewujudkan Medan sebagai pusat pendidikan regional	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Persentase kondisi sekolah SD dalam keadaan baik Persentase kondisi sekolah SMP dalam keadaan baik	
			Meningkatnya mutu dan kualitas tenaga pendidik	Persentase guru tersertifikasi SD/MI Persentase guru tersertifikasi SMP/MTs	
			Meningkatnya minat baca masyarakat	Pencanangan Medan kota literasi	
		Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Persentase menurunnya angka putus sekolah SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B Persentase angka melanjut sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	
				Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya usia harapan hidup
		Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan balita	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, balita dan anak	Persentase menurunnya angka kematian ibu, anak dan balita	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target
1	2	3	4	5
		Memerangi HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular	Menurunnya jlh penderita HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lain dan penyakit tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular dan tidak menular
		Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase menurunnya angka kemiskinan
			Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
			Meningkatnya jumlah sarana sosial	Persentase penurunan jumlah PMKS
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Rasio kepemilikan KTP-el	
			Rasio kepemilikan akta kelahiran	
6	Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan	Mewujudkan Medan sebagai Kota Religius	Meningkatnya ketersediaan tempat ibadah bagi seluruh pemeluk agama	Rasio rumah ibadah
		Menyelenggarakan berbagai program kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan bagi seluruh agama	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama	Menurunnya konflik dan potensi SARA

CAPAIAN TERHADAP INDIKATOR TARGET

Misi 1 : Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku, kepentingan pembangunan kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman serta tertib sosial dalam masyarakat											
1	Meningkatnya suasana keamanan dan ketertiban kota yang kondusif	Persentase penanganan terhadap pelanggaran Perda Kota Medan	Persen	95	96	97	98	98	99	100	100
2	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana	Rata-rata waktu respon kejadian tanggap darurat	Menit-	15	14,50	14	13,50	13	11	10	10
		Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (<i>response time rate</i>)	Menit-	18	17,50	17	16,50	16	15	15	15
Tujuan 2 : Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan stakeholder dalam pembangunan kota di berbagai bidang											
1	Meningkatnya Perencanaan Partisipatif	Persentase program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD	Persen	80	82	84	86	87	89	90	90
		Persentase peningkatan PAD Kota Medan	Persen	2	4	6	8	10	12	15	15
		Opini atas laporan keuangan daerah	WTP/WDP/Adversed/Disclaimer	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tujuan 3 : Meningkatkan bentuk-bentuk kegotongroyongan dan tanggungjawab sosial perusahaan											

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya jumlah partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan kota	Persentase peningkatan penyaluran dana CSR ke Pemerintah Kota Medan	Persen-	20	26,7	33,3	49,3	56	61,3	66,7	66,7
Tujuan 4 : Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan pemuda serta perempuan dalam pembangunan kota											
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota	Persentase peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.	Persen-	3,91	4,07	4,23	4,39	4,56	4,72	4,89	4,89
		Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan.	Persen-	88,22	88,22	88,81	89,13	89,74	89,99	89,99	89,99
2	Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan	Persentase menurunnya konflik antar pelajar dan pemuda	Persen-	4,22	3,81	3,20	3,04	2,66	2,39	2,08	2,08
Tujuan 5 : Menciptakan Medan sebagai Kota Atlet Berprestasi											
1	Meningkatnya prestasi Atlet Kota Medan dalam penyelenggaraan even-even olahraga Nasional dan Internasional	Persentase meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi	Persen-	13,8	23,1	32,2	41,4	50,8	60,0	61,4	61,4

Misi 2 : Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai											
1	Meningkatnya keamanan wilayah melalui penguatan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai	Persentase menurunnya konflik antar OKP	Persen-	5,22	4,81	4,20	3,94	3,66	3,09	2,88	2,88
Tujuan 2 : Melindungi, memelihara, melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya dengan ciri khas masing-masing											
1	Meningkatnya Jumlah wisatawan melalui pengembangan wisata berbasis kearifan lokal	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	3	3	3	4	4	4	5	5

Misi 3 : Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Meningkatkan daya saing dan perekonomian kota											
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro	Pertumbuhan ekonomi	Persen.	6,67	7,09	7,34	7,54	7,75	7,9	9,02	9,02
		PDRB ADHB	Milyar Rp	160.446,38	179.699,52	201.263,46	225.415,07	252.415,07	282.123,52	282.123,52	282.123,52
		PDRB ADHK	Milyar Rp	49.471,08	51.674,83	55.085,38	58.721,77	61.721,77	66.729,00	66.729,00	66.729,00
		Laju Inflasi.	Persen	3,32	3,81	3,36	5,04	5,80	5,01	5,01	5,01
2	Meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	11,86	12,00	12,14	12,28	12,43	12,57	12,57	12,57
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.	Persen	26,94	26,95	26,95	26,98	26,99	27,00	27,00	27,00
3.	Meningkatnya Produktivitas pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.	Persen	1,06	0,64	0,38	0,23	0,14	0,08	0,08	0,08
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Penataan dan Pembinaan Perusahaan Daerah	Dana Penyertaan Modal Pemko kepada Perusahaan Daerah	Milyar Rp	3	3	4	4	5	5	6	6
Tujuan 2 : Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal											
1	Meningkatnya	Realisasi Investasi PMDN	Milyar Rp	3.203,45	4.257,75	5.237,67	6.203,55	7.243,77	8.203,45	9.253,55	9.253,55

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	realisasi investasi di Kota Medan	Realisasi Investasi PMA	US \$	599.929,25	650.929,25	680.929,25	726.456,67	765.754,21	780.321,52	780.321,52	780.321,52
Tujuan 3 : Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja											
1	Meningkatnya lapangan kerja yang masif dan <i>skilled labor</i>	Angka Partisipasi Kerja.	Persen	69,92	71,82	73,61	74,40	77,29	80,00	80,00	80,00
Tujuan 4 : Meningkatkan kedudukan, fungsi, dan peranan UMKM dan Koperasi dalam perekonomian kota											
1	Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM dalam perekonomian kota	Persentase meningkatnya usaha UMKM	Persen-	28,03	30	40	50	60	70	80	80
		Menurunnya angka pengangguran kota	Persen-	6,04	5,72	5,01	4,65	4,08	3,64	3,06	3,06
Tujuan 5 : Mewujudkan Medan kota kreatif dan inovatif											
1	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mewujudkan Medan Kota Kreatif	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB	Persen-	N/A	4,82	5,01	5,32	5,46	5,63	5,88	5,88

Misi 4 : Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang dinamis dan produktif											
1.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan tata ruang kota secara memadai	Persentase pembangunan fisik bangunan yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Persen-	25,07	26,60	27,80	29,10	30,50	34,10	36,98	36,98
2	Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang kota	Persentase bangunan yang memiliki IMB di Kota Medan	Persen	52,07	52,60	52,80	53,10	53,50	54,10	54,98	54,98
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan sehat	Luas kawasan permukiman kumuh	Ha	200	150	130,3	100,3	85	65	50.3	50.3
		Persentase rasio rumah layak huni	Persen	97,29	98	98,3	98.6	99	99.2	99.5	99.5
Tujuan 2 : Menyediakan berbagai fasilitas, utilitas kota seperti sistim informasi manajemen, telekomunikasi, kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin berkecukupan serta ramah lingkungan											
1	Meningkatnya akses pelayanan air limbah	Persentase akses pelayanan air limbah	Persen	91	91	92	93	94	95	96	96
2	Meningkatnya akses pelayanan air minum	Persentase pelayanan air minum layak perkotaan	Persen	70	72	74	76	78	80	82	82

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Tersedianya sistem jaringan drainase perkotaan secara terpadu dan berfungsi baik	Persentase menurunnya lokasi rawan genangan/ banjir	Persen-	39,21	36,27	31,37	27,45	25,49	21,56	19,61	19,61
Tujuan 3 : Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan jalan dan transportasi perkotaan terutama di wilayah lingkaran luar yang semakin terpadu, efisien, efektif dan ramah lingkungan (Medan dengan infrastruktur terbaik)											
1	Terwujudnya infrastruktur jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas dan nyaman	Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	93,5	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	99,5	99,5
2	Terwujudnya sarana dan prasarana dan sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	Persentase menurunnya titik kemacetan	Persen-	34,18	32,27	30,26	28,44	26,29	24,52	19,81	19,81
		Persentase menurunnya titik kecelakaan	Persen-	29,31	26,28	24,35	22,40	20,48	18,55	17,66	19,66
Tujuan 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase peningkatan luasan RTH dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	Persen	12	12,5	13	14	15	16	17	17
Tujuan 5 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup											
1	Meningkatnya pengelolaan	Persentase peningkatan volume penanganan	Persen-	82,5	87	91	95	98	100	100	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pengangkutan sampah	sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)									

Misi 5 : Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan Medan sebagai pusat pendidikan regional											
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Persentase kondisi sekolah SD dalam keadaan baik	Persen-	90	91	92	93	94	94	95	95
		Persentase kondisi sekolah SMP dalam keadaan baik	Persen-	90	91	92	93	94	94	95	95
2	Meningkatnya mutu dan kualitas tenaga pendidik	Persentase guru tersertifikasi SD/MI	Persen	48,81	50	52	54	56	58	60	60
		Persentase guru tersertifikasi SMP/MTs	Persen	49,43	51	53	56	58	62	65	65
3	Meningkatnya minat baca masyarakat	Pencanangan Medan kota literasi	Ya/Tidak	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 2 : Mencapai pendidikan dasar untuk semua											
1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Persentase menurunnya angka putus sekolah SD/MI/Paket A	Persen-	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
		Persentase menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen-	0,20	0,12	0,09	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06
		Persentase angka melanjut sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen-	110,65	112,00	114,00	116,00	118,00	120,00	123,87	123,87
Tujuan 3 : Mewujudkan Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional											
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen-	68,36	72	76	81	85	89	92	92
		Meningkatnya usia harapan hidup	Tahun	72,18	72,48	72,78	73,08	73,38	73,78	74,18	74,18
Tujuan 4 : Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan balita											
1	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, balita dan anak	Persentase menurunnya angka kematian ibu, anak dan balita	Persen-	3,4	2,6	1,9	1,2	0,5	0,02	0,00	0,00
Tujuan 5 : Memerangi HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular											

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunnya jumlah penderita HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular dan tidak menular	Persen-	0	15	30	45	60	80	100	100
Tujuan 6 : Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)											
1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase menurunnya angka kemiskinan.	Persen-	1,25	1,64	1,82	2,03	2,12	2,24	2,32	2,32
2	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen-	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89
3	Meningkatnya jumlah sarana sosial	Persentase penurunan jumlah PMKS	Persen-	0,028	0,021	0,019	0,017	0,014	0,010	0,008	0,008
Tujuan 7 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan											
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Rasio kepemilikan KTP-el	Persen	77,09	86,65	88,73	97,47	99,35	100	100	100
		Rasio kepemilikan akta kelahiran	Persen-	60,62	61,43	62,51	62,98	63,75	65,08	65,32	65,32

Misi 6 : Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan Medan sebagai Kota Religius											
1	Meningkatnya ketersediaan tempat ibadah bagi seluruh pemeluk agama	Rasio rumah ibadah	Persen-	10,7	10,7	10,8	10,9	11,2	11,5	11,7	11,7
Tujuan 2 : Menyelenggarakan berbagai program kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan bagi seluruh agama											
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama	Menurunnya konflik dan potensi SARA	Persen-	5,08	4,82	4,01	3,62	2,24	1,86	0,84	0,84

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategik dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2016-2021 tersebut. Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kota tahun 2016-2021, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur. Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu pada misi pembangunan kota tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Medan.

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Adapun strategi pada tiap misi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk tiap tahun perencanaan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kota Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut:

Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Medan Tahun 2016-2021

Visi: Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius				
Misi 1: Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman serta tertib sosial dalam masyarakat	Meningkatnya suasana keamanan dan ketertiban kota yang kondusif	Mengefektifkan pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Penegakan dan pembinaan hukum daerah
			Mengefektifkan Komunikasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Meningkatkan koordinasi dan upaya kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
			Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan koordinasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana	Mengefektifkan penanganan penanggulangan bencana	Peningkatan kewaspadaan dan tanggap darurat bencana
2	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan stakeholder dalam pembangunan kota di berbagai bidang	Meningkatnya Perencanaan Partisipatif	Mengefektifkan media komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan praktek-praktek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Mendorong komunikasi pembangunan yang konstruktif antar stakeholder	Penerapan e-government
			Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas pengendalian dan

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat	evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota Penyelenggaraan siklus anggaran secara tepat waktu Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual
3	Meningkatkan bentuk-bentuk kegotongroyongan dan tanggung jawab sosial perusahaan	Meningkatnya jumlah partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan kota	Mengembang-kan Kerja Sama dengan Perusahaan swasta dalam bentuk penyaluran dana CSR	Mendorong Partisipasi Perusahaan Swasta agar menyalurkan Dana CSRnya Ke Pemko Medan
4	Meningkatkan kedudukan, fungsi, dan peranan pemuda serta perempuan dalam pembangunan kota	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota	Mendorong pembangunan yang berperspektif gender	Melibatkan dan meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan kota
		Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan	Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda
5	Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit Berprestasi	Meningkatnya prestasi Atlit Kota Medan dalam penyelenggaraan even-even olahraga Nasional dan Internasional	Meningkatkan pembinaan atlit usia dini Mendorong peran serta yang lebih luas sektor swasta dalam pembinaan olahraga	Pembibitan atlit-atlit usia dini di lingkungan sekolah Melibatkan sektor swasta dalam event-event olahraga

Misi 2 : Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan atas budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh, dan saling menghargai	Meningkatnya keamanan wilayah melalui penguatan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai	Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan	Penguatan pendidikan karakter, budi pekerti bangsa dan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal
2	Membangun koordinasi, komunikasi, dan interaksi sosial yang efektif dalam kedudukan sederajat	Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan interaksi sosial yang efektif	Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa	<p>Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya</p> <p>Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa</p> <p>Pengembangan kepedulian sosial melalui pengaktifan kembali siskamling dan mengembangkan sikap gotong royong</p>
3	Melindungi, memelihara, melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya dengan ciri khas masing-masing	Meningkatnya pelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan bersejarah	Pembangunan Destinasi Pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga dapat bersaing di dalam negeri dan di luar negeri	<p>Melindungi dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya (mewujudkan Medan sebagai Kota Sejarah)</p> <p>Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata kota yang menjadi fokus wisata heritage</p> <p>Melindungi dokumen bersejarah</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya jumlah wisatawan melalui pengembangan wisata berbasis kearifan lokal	Pemasaran pariwisata kota diarahkan untuk meningkatkan kerja sama regional dan internasional kepariwisataan dan mendatangkan sebanyak mungkin kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, mencakup pasar wisata Nasional dan Asia Tenggara	Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata
				Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal dan fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata
			Meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata kota serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata kota di setiap destinasi pariwisata	Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan
				Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata
				Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan
			Pengembangan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan kota	Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata kota

Misi 3 : Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif

termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan daya saing perekonomian kota	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro	Memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat ekonomi, pemerintahan dan fungsi-fungsi regional nasional	Mendorong peningkatan investasi, pengeluaran pemerintah daerah dan konsumsi masyarakat serta ekspor perdagangan
				Mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh
				Mengembangkan potensi dan kawasan ekonomi kota
				Pengendalian laju inflasi
		Meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan	Mendorong peningkatan ekspor bersih/ perdagangan kota	Meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perindustrian kota
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor sektor prioritas
				Meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan	Peningkatan kapasitas produktivitas pertanian	Menerapkan SNI secara konsisten
Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian				
			Penciptaan inovasi teknologi tepat guna untuk optimalisasi lahan pertanian	
			Pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal dan lahan pekarangan rumah	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan produksi perikanan	Ekstensifikasi dan intensifikasi produksi perikanan
			Meningkatkan harkat dan taraf hidup petani, nelayan dan masyarakat pesisir	Peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, pembudidaya ikan tradisional dan petambak
				Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta mengembangkan sentra produksi
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Penataan dan Pembinaan Perusahaan Daerah	Meningkatkan kinerja dan memacu daya saing perusahaan daerah	Pembenahan Manajemen Perusahaan Daerah
2	Meningkatkan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Medan	Peningkatan iklim investasi dan usaha di Kota Medan	Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
			Mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha sektor produktif yang mengutamakan sumber daya	Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
				Pemberian insentif dan fasilitasi investasi
				Peningkatan efektivitas investasi pada sektor yang menyerap tenaga kerja

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			lokal	lokal
				Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik
				Peningkatan koordinasi dan kerja sama investasi antara pemerintah dan dunia usaha
3	Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja	Meningkatnya lapangan kerja yang masif dan skilled labor	Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja	Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat karya
			Meningkatkan iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial	Memperkuat kapasitas dan peranan organisasi pekerja dan asosiasi pengusaha
				Meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja
			Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor
4	Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian kota	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dalam perekonomian kota	Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
				Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
				Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Penguatan kelembagaan usaha
5	Mewujudkan Medan Kota Kreatif	Berkembang-nya ekonomi kreatif untuk mewujudkan-nya Medan Kota Kreatif	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi Kreatif	Memperluas pasar produk kreatif baik di pasar domestik maupun internasional Memfasilitasi kreativitas pelaku kreatif kota Menumbuhkan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula

Misi 4 : Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ruang kota yang dinamis dan produktif	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan tata ruang kota secara memadai)	Meningkatkan kelengkapan dokumen perencanaan tata ruang kota sesuai ketentuan dan kebutuhan perkembangan kota Meningkatkan kebutuhan database yang lengkap berupa peta bidang untuk kepentingan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota	Peningkatan kelengkapan dokumen perencanaan tata ruang kota sesuai ketentuan dan kebutuhan perkembangan kota Menyediakan database yang lengkap berupa peta bidang untuk kepentingan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kinerja pelayanan dalam rangka keterbukaan informasi publik tentang rencana tata ruang kota
		Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang kota	Meningkatkan bangunan IMB di Kota Medan	Peningkatan rasio bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Medan
		Meningkatnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang	Menyediakan Pedoman terkait ketentuan teknis tentang penataan ruang dan penataan reklame	Peningkatan kelengkapan peraturan dan ketentuan teknis tentang penataan ruang dan penataan reklame
			Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang kota
			Meningkatkan jumlah penertiban reklame	Menertibkan reklame (Baliho/Billboard/Videotron/Megatron) yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan reklame
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan sehat	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan layak huni	Meningkatnya Jumlah unit rumah yang disediakan dan kapasitas pengelolaan program MBR oleh Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan Kesiap Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan pelayanan terhadap bahaya kebakaran
2	Menyediakan berbagai fasilitas, utilitas kota seperti sistem informasi manajemen, telekomunikasi, kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin handal, berkecukupan serta ramah lingkungan	Meningkatnya akses pelayanan air limbah	Peningkatan perencanaan kualitas air limbah dan pengembangan skala penangan	Peningkatan akses pelayanan air limbah dan utilitas sanitasi yang baik
			Peingkatan perencanaan kualitas air limbah dan pengembangan skala penangan	Peningkatan akses pelayanan air limbah dan utilitas sanitasi yang baik
		Meningkatnya akses pelayanan air minum	Peningkatan penyediaan air baku	Pemanfaatan dan peningkatan kualitas air minum secara berkelanjutan
		Tersedianya sistem jaringan drainase perkotaan secara terpadu dan berfungsi baik	Terwujudnya infrastruktur kelistrikan/ telekomunikasi/sistem informasi/gas, sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Mengembangkan normalisasi dan pembangunan saluran/ drainase dan gorong-orong
		Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan penyediaan infrastruktur perkotaan	Meningkatkan sarana dan prasarana dengan pemanfaatan <i>Geographic Information Sistem</i> (GIS)	Peningkatan Data/Informasi terkait sarana dan prasarana taman melalui pemanfaatan <i>Geographic Information Sistem</i> (GIS)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sistem informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung terwujudnya Medan Smart City	Menyediakan infrastruktur TIK yang berkualitas dan sistem informasi terkait pelayanan publik.
3	Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan jalan dan transportasi perkotaan terutama di wilayah lingkaran luar yang semakin terpadu, efisien, efektif, dan ramah lingkungan (Medan dengan infrastruktur terbaik)	Terwujudnya Infrastruktur jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas dan nyaman	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas dan nyaman	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas -kualitas jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas dan nyaman
		Terwujudnya sarana dan prasarana dan sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang nyaman dan memadai melalui sistem transportasi publik yang nyaman, ramah lingkungan dan bebas hambatan	Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan
			Meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas di Kota Medan	Penurunan angka resiko kecelakaan di Kota Medan
			Meningkatkan pelayanan angkutan umum yang layak operasi dan memadai	Peningkatan pelayanan angkutan umum yang layak operasi dan memadai

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau	Mengendalikan penataan RTH Kota Medan	Menyediakan pedoman penataan RTH Kota Medan
			Meningkatkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Peningkatan lahan pemakaman umum di Kota Medan
5	Memastikan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan pemilahan dan pengumpulan sampah	Meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap daur ulang sampah	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Misi 5: Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
----	--------	---------	----------	----------------

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Medan sebagai pusat pendidikan regional	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan dan memperluas pemerataan pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
		Meningkatnya mutu dan kualitas tenaga pendidik	Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan	Pengembangan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan
		Meningkatnya minat baca masyarakat	Meningkatkan budaya gemar membaca	Peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan perpustakaan daerah
				Peningkatan budaya baca di lingkungan satuan pendidikan
2	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
			Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan angka partisipasi sekolah	Peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan dasar dan menengah
			Meningkatkan peran keluarga dalam pendidikan	Pembentukan paguyuban kelas
3	Mewujudkan Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	<p>Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Penguatan akses dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
4	Meningkatkan kesehatan ibu, anak, balita.	Meningkatnya kesehatan bayi, balita dan anak	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap neonatal, balita dan anak usia sekolah Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi
		Meningkatnya kesehatan ibu	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil
5	Memerangi HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular	Menurunnya jumlah penderita HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular	Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian HIV/Aids, Malaria dan penyakit menular lainnya Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk pengendalian penyakit menular
6	Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)	Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatkan peran kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan	Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan
		Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan sistem dan tata kelola penanganan masalah kesejahteraan sosial	Pengembangan fasilitas, mekanisme serta sarana prasarana dalam penanganan PMKS dan penyandang disabilitas

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya jumlah sarana sosial	Meningkatkan sistem dan tata kelola penanganan masalah kesejahteraan sosial	Pengembangan fasilitas, mekanisme serta sarana prasarana dalam penanganan PMKS dan penyandang disabilitas
7	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan	Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan

Misi 6: Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan atas etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Medan sebagai Kota religius	Meningkatnya ketersediaan tempat ibadah bagi seluruh pemeluk agama	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah yang semakin	Peningkatan akses dan kualitas tempat-tempat ibadah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			representative	
2	Menyelenggarakan berbagai program kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan bagi seluruh agama	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama	Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama	Pengembangan inovasi potensi dan keragaman agama
3	Mewujudkan sikap-sikap adat sopan santun dan perilaku masyarakat yang selaras dengan etika serta moral agama	Meningkatnya jumlah organisasi keagamaan yang menjadi pusat pembinaan sosial keagamaan	Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan tokoh-tokoh agama dalam pembangunan kota	Peningkatan peranan tokoh-tokoh agama dalam pembangunan kota

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan								
1	Meningkatnya suasana	Penegakan dan pembinaan hukum daerah						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	keamanan dan ketertiban kota yang kondusif	• Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan koordinasi dan upaya kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah						
		• Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan koordinasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak						
		• Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	√	√	√	√	√	√
2	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana	Peningkatan kewaspadaan dan tanggap darurat bencana						
		• Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	√	√
3	Meningkatnya Perencanaan Partisipatif	Meningkatkan praktek-praktek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah						
		• Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	√
		• Kerja Sama Informasi dengan Mas Media	√	√	√	√	√	√
		Penerapan e-government						
		• Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		• Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	√
		Penyelenggaraan siklus anggaran secara tepat waktu						
		• Peningkatan Pengembangan Keuangan Daerah	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual						
		• Peningkatan Sistim Pengendalian Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan dan pengembangan aparatur	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan dan pengembangan aparatur	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	√

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan informasi • Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 	√	√	√	√	√	√
4	Meningkatnya kerja sama antar daerah	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar pemerintah daerah, dan kepada pemerintah propinsi serta pemerintah pusat <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 	√	√	√	√	√	√
5	Meningkatnya jumlah partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan kota	Mendorong Partisipasi Perusahaan Swasta agar menyalurkan Dana CSRnya Ke Pemko Medan Kerja Sama Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> • Kerja Sama Pembangunan 	√	√	√	√	√	√
6	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota	Melibatkan dan meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan kota <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 	√	√	√	√	√	√
7	Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 	√	√	√	√	√	√
8	Meningkatnya prestasi Atlit Kota Medan dalam penyelenggaraan even-even olahraga Nasional dan Internasional	Pembibitan atlit-atlit usia dini di lingkungan sekolah <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Melibatkan sektor swasta dalam event-event olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 	√	√	√	√	√	√

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 2 :Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan atas budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme.								
9	Meningkatnya keamanan wilayah melalui penguatan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai	Penguatan pendidikan karakter, budi pekerti bangsa dan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal						
		• Pengembangan Wawasan Kebangsaan	√	√	√	√	√	√
		• Pendidikan Politik Masyarakat	√	√	√	√	√	√
10	Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan interaksi sosial yang efektif	Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya						
		• Pembinaan Anak dan Remaja	√	√	√	√	√	√
		Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa						
		• Pengembangan Wawasan Kebangsaan	√	√	√	√	√	√
		• Pendidikan Politik Masyarakat	√	√	√	√	√	√
		Pengembangan kepedulian sosial melalui pengaktifan kembali siskamling dan mengembangkan sikap gotong royong						
• Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	√	√	√	√	√	√		
11	Meningkatnya pelestarian bangunan cagar budaya dan	Melindungi dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	bangunan bersejarah	• Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√
		• Pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√	√	√	√	√
		Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata kota yang menjadi fokus wisata heritage						
		• Pengembangan Kemitraan	√	√	√	√	√	√
		• Perencanaan Pembangunan ekonomi	√	√	√	√	√	√
		• Penataan Perundang-undangan	√	√	√	√	√	√
		Melindungi dokumen bersejarah						
		• Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	√	√	√	√	√	√
		Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata						
		• Pengembangan Pemasaran Pariwisata	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√	√	√	√	√

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		• Pengembangan Kemitraan	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Nilai Budaya	√	√	√	√	√	√
		• Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√	√	√	√	√
		• Pengelolaan Keragaman Budaya	√	√	√	√	√	√
		Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal dan fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata						
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan						
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata						
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kebijakan						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		kepariwisataan						
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata kota						
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
12	Meningkatnya jumlah wisatawan melalui pengembangan wisata berbasis kearifan lokal	Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata						
		• Pengembangan Pemasaran Pariwisata	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Kemitraan	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Nilai Budaya	√	√	√	√	√	√
		• Pengelolaan Kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		• Pengelolaan Keragaman Budaya	√	√	√	√	√	√
		Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal dan fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan						
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata						
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan						
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata kota						
		• Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
Misi 3 :Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif								

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
daerah								
12	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro	Mendorong peningkatan investasi, pengeluaran pemerintah daerah dan konsumsi masyarakat serta ekspor perdagangan						
		• Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	√	√	√	√	√	√
		• Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	√	√	√	√	√	√
		Mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh						
		• Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan sentra-sentra pemasaran UMKM	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	√	√	√	√	√	√
		Mengembangkan potensi dan kawasan ekonomi kota						
		• Pengembangan Pemasaran Wisata	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Budidaya Perikanan	√	√	√	√	√	√
		• Perencanaan Pembangunan Ekonomi	√	√	√	√	√	√
• Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	√	√	√	√	√	√		

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pengendalian laju inflasi						
		• Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	√	√	√	√	√	√
		• Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	√	√	√	√	√	√
13	Meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan	Meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perindustrian kota						
		• Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi						
		• Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Industri Kecil Menengah	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor sektor prioritas						
		• Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	√	√	√	√	√	√
		• Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional						
		• Penataan Struktur Industri	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Kerja Sama Perdagangan	√	√	√	√	√	√

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Internasional						
		• Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	√	√	√	√	√	√
		Menerapkan SNI secara konsisten						
		• Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi	√	√	√	√	√	√
14	Meningkatnya produktivitas dan perikanan pertanian	Penciptaan inovasi teknologi tepat guna untuk optimalisasi lahan pertanian						
		• Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Penerapan Teknologi Produksi Pertanian/ Perkebunan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan produksi peternakan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan teknologi produksi peternakan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Penerapan Teknologi Produksi Peternakan	√	√	√	√	√	√
		Pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal dan lahan pekarangan rumah						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		• Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	√	√	√	√	√	√
		• Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	√	√	√	√	√	√
		Ekstensifikasi dan intensifikasi produksi perikanan						
		• Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	√	√	√	√	√	√
		• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/ Air Payau Dan Air Tawar	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan perikanan tangkap	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, pembudidaya ikan tradisional dan petambak						
		• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Kesejahteraan Petani	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Perikanan Tangkap	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan hasil pemasaran pertanian/ perkebunan						
		Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta mengembangkan sentra produksi						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		• Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Budidaya Perikanan	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan IKM	√	√	√	√	√	√
15	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Penataan dan Pembinaan Perusahaan Daerah	Pembenahan Manajemen Perusahaan Daerah						
		• Peningkatan Sarana dan Prasarana PD Pasar	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Sarana dan Prasarana PD Pembangunan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Sarana dan Prasarana PD Rumah Potong Hewan	√	√	√	√	√	√
16	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Medan	Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha						
		• Peningkatan pelayanan perijinan	√	√	√	√	√	√
		• Penataan perundang-undangan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha						
		• Penataan perundang-undangan	√	√	√	√	√	√
		• Pemberian insentif dan fasilitasi investasi						
		• Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan efektivitas investasi pada sektor yang menyerap tenaga kerja lokal						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		• Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik						
		• Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan koordinasi dan kerja sama investasi antara pemerintah dan dunia usaha						
		• Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	√	√	√	√	√	√
17	Meningkatnya lapangan kerja yang masif dan skilled labor	Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat karya						
		• Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan hubungan industrial yang standar dan ideal	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan dan penempatan tenaga kerja	√	√	√	√	√	√
		Memperkuat kapasitas dan peranan organisasi pekerja dan asosiasi pengusaha						
		• Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan hubungan industrial yang standar dan ideal	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja						
		• Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	√	√	√	√	√	√
		Standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		• Peningkatan kesempatan kerja	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan dan Penempatan tenaga kerja	√	√	√	√	√	√
18	Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dalam perekonomian kota	Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
		• Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha						
		• Penciptaan Iklim UsahaUKM yang kondusif	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran						
		• Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	√	√	√	√	√	√
		• Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	√	√	√	√	√	√
		• Penataan Pedagang Kaki Lima	√	√	√	√	√	√
		Penguatan kelembagaan usaha						
		• Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	√	√	√	√	√	√
19	Berkembang-nya ekonomi kreatif untuk mewujudkan-nya Medan Kota Kreatif	Memperluas pasar produk kreatif baik di pasar domestik maupun internasional						
		• Pengembangan ekonomi kreatif	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan peran serta kepemudaan	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Kemitraan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Kerja Sama	√	√	√	√	√	√
		• Perdagangan Internasional	√	√	√	√	√	√
	• Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	√	√	√	√	√	√	

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Memfasilitasi kreativitas pelaku kreatif kota						
		• Pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Nilai Budaya	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Pemasaran Pariwisata	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan pertan serta kepemudaan	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan ekonomi kreatif	√	√	√	√	√	√
		Menumbuhkan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula						
		• Pengembangan ekonomi kreatif	√	√	√	√	√	√
		• Penelitian dan Pengembangan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Pemasaran Pariwisata	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Nilai Budaya	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	√	√	√	√	√	√
Misi 4 : Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan								
20	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan tata ruang kota secara memadai)	Peningkatan kelengkapan dokumen perencanaan tata ruang kota sesuai ketentuan dan kebutuhan perkembangan kota						
		• Perencanaan Tata Ruang	√	√	√	√	√	√
		Menyediakan database yang lengkap berupa peta bidang uantuk kepentingan perencanaan,						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota						
		• Perencanaan Tata Ruang	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan kinerja pelayanan dalam rangka keterbukaan informasi publik tentang rencana tata ruang kota						
		• Perencanaan Tata Ruang	√	√	√	√	√	√
21	Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang kota	Peningkatan rasio bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Medan						
		• Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√
22	Meningkatnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kelengkapan peraturan dan ketentuan teknis tentang penataan ruang dan penataan reklame						
		• Perencanaan Tata Ruang	√	√	√	√	√	√
		Menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang kota						
		• Pengendalian Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√
		Menertibkan reklame (Baliho/Billboard/Videotron/ Megatron) yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan reklame						
		• Pengendalian Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√
23	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	√	√	√	√	√	√
		• Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√	√	√

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	huni, aman dan sehat							
		Meningkatnya Jumlah unit rumah yang disediakan dan kapasitas pengelolaan program MBR oleh Masyarakat						
		• Pengembangan Perumahan	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan pelayanan terhadap bahaya kebakaran						
		• peningkatan Kesiap Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	√	√	√	√	√	√
24	Meningkatnya akses pelayanan air limbah	Peningkatan akses pelayanan air limbah dan utilitas sanitasi yang baik						
		• Lingkungan Sehat Perumahan	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan akses pelayanan air limbah dan utilitas sanitasi yang baik						
		• Lingkungan Sehat Perumahan	√	√	√	√	√	√
25	Meningkatnya akses pelayanan air minum	Pemanfaatan dan peningkatan kualitas air minum secara berkelanjutan						
		• Lingkungan Sehat Permukiman	√	√	√	√	√	√
26	Tersedianya sistem jaringan drainase perkotaan secara terpadu dan berfungsi baik	Mengembangkan normalisasi dan pembangunan saluran/ drainase dan gorong-orong						
		• pembangunan saluran/ drainase dan gorong-gorong	√	√	√	√	√	√
		• Pembangunan Utilitas	√	√	√	√	√	√
31	Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan penyediaan infrastruktur	Peningkatan Data/Informasi terkait sarana dan prasarana taman melalui pemanfaatan Geographic Information Sistem (GIS)						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Data/Informasi 	√	√	√	√	√	√
		Menyediakan infrastruktur TIK yang berkualitas dan sistem informasi terkait pelayanan publik						
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 						
32	Terwujudnya Infrastruktur jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas dan nyaman	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas - kualitas jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas dan nyaman						
		<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan 	√	√	√	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan dan Jembatan 	√	√	√	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Jalan Baru 	√	√	√	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi laik fungsi jalan 	√	√	√	√	√	√
35	Terwujudnya sarana dan prasarana dan sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan						
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 	√	√	√	√	√	√
		Penurunan angka resiko kecelakaan di Kota Medan						
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengamanan lalu lintas 	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan pelayanan angkutan umum yang layak operasi dan memadai						
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan angkutan 	√	√	√	√	√	√
36	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau	Menyediakan pedoman penataan RTH Kota Medan						
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Master Plan RTH 	√	√	√	√	√	√
		Pengadaan lahan taman Pemakaman Umum di						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Kota Medan						
		• Pengadaan lahan taman Pemakaman Umum di Kota Medan	√	√	√	√	√	√
38	Meningkatnya pengelolaan pengangkutan sampah	Peningkatan kinerja penanganan sampah						
		• Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√	√	√	√	√
Misi 5: Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan								
44	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan						
		• Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	√	√	√	√	√	√
45	Meningkatnya mutu dan kualitas tenaga pendidik	Pengembangan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan						
		• Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	√	√	√	√	√	√
		• Manajemen Pelayanan Pendidikan	√	√	√	√	√	√
46	Meningkatnya minat baca masyarakat	Peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan perpustakaan daerah						
		• Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan budaya baca di lingkungan satuan pendidikan						
		• Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	√	√	√	√	√	√
47	Meningkatnya tingkat	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pendidikan masyarakat	anak usia dini						
		• Pendidikan Anak Usia Dini	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan dasar dan menengah						
		• Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	√	√	√	√	√	√
		• Pendidikan Non Formal	√	√	√	√	√	√
		Pembentukan paguyuban kelas						
		• Manajemen Pelayanan Pendidikan	√	√	√	√	√	√
48	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan						
		• Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Program Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	√	√	√	√	√	√
		• Standarisasi Pelayanan Kesehatan	√	√	√	√	√	√
		• Obat dan Perbekalan Kesehatan	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	√	√	√	√	√	√
		• Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif						
		• Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	√	√	√	√	√	√

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Masyarakat						
		• Pengawasan Obat dan Makanan	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Obat Asli Indonesia	√	√	√	√	√	√
		Penguatan akses dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi						
		• Keluarga Berencana	√	√	√	√	√	√
		• Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	√	√	√	√	√	√
		• Pelayanan Kontrasepsi	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	√	√	√	√	√	√
		• Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE Penggerakan	√	√	√	√	√	√
49	Meningkatnya kesehatan bayi, balita dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap neonatal, balita dan anak usia sekolah						
		• Upaya Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	√	√	√	√	√	√
		• Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi						
		• Perbaikan Gizi Masyarakat	√	√	√	√	√	√
		• Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina	√	√	√	√	√	√

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Keluarga						
50	Meningkatnya kesehatan ibu	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil						
		• Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	√	√	√	√	√	√
52	Menurunnya jumlah penderita HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular	Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian HIV/Aids, Malaria dan penyakit menular lainnya Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk pengendalian penyakit menular	√	√	√	√	√	√
		• Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	√	√	√	√	√	√
		• Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	√	√	√	√	√	√
		• Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/ AIDS	√	√	√	√	√	√
53	Menurunnya tingkat kemiskinan	Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan						
		• Penanggulangan Kemiskinan	√	√	√	√	√	√
		• Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√	√	√
54	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pengembangan fasilitas, mekanisme serta sarana prasarana dalam penanganan PMKS dan penyandang disabilitas						
		• Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat	√	√	√	√	√	√

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		terpencil (KAT) dan PMKS lainnya						
		• Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH	√	√	√	√	√	√
		• Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√	√	√
		• Fasilitasi Tenaga Kerja PSKS	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan Anak Terlantar	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	√	√	√	√	√	√
		• Perlindungan dan Jaminan Sosial	√	√	√	√	√	√
55	Meningkatnya jumlah sarana sosial	Pengembangan fasilitas, mekanisme serta sarana prasarana dalam penanganan PMKS dan penyandang disabilitas						
		• Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	√	√	√	√	√	√
		• Pembinaan Panti Asuhan / Pani Jompo	√	√	√	√	√	√
57	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan						
		• Penataan administrasi kependudukan	√	√	√	√	√	√
Misi 6: Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan atas etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan								
58	Meningkatnya ketersediaan tempat ibadah bagi seluruh	Peningkatan akses dan kualitas tempat-tempat ibadah						

No	Sasaran	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pemeluk agama	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 	√	√	√	√	√	√
59	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama	Pengembangan inovasi potensi dan keragaman agama <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 	√	√	√	√	√	√
60	Meningkatnya jumlah organisasi keagamaan yang menjadi pusat pembinaan sosial keagamaan	Peningkatan peranan tokoh-tokoh agama dalam pembangunan kota <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Wawasan Kebangsaan 	√	√	√	√	√	√

Perumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran

yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Kota Medan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota menetapkan program sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Adapun program yang dijalankan oleh per urusan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan adalah:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.1. Pendidikan

Adapun program pokok bidang pendidikan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- h. Program Pendidikan Non Formal.
- i. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- j. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- k. Program lainnya yang relevan.

1.2. Kesehatan

Adapun program pokok bidang kesehatan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- h. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- i. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- j. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- k. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- n. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- o. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Program Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- q. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- r. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- t. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- u. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- v. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
- w. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
- x. Program lainnya yang relevan.

1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun program pokok bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- g. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
- h. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- i. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong.
- j. Program Perencanaan Tata Ruang
- k. Program Pemanfaatan Ruang
- l. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
- m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
- n. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
- o. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- p. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- q. Program lainnya yang relevan.

1.4. Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

Adapun program pokok bidang perumahan rakyat dan kawasan permukimann yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Pengembangan Perumahan.
- g. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
- h. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- i. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- j. Peningkatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
- k. Program lainnya yang relevan.

1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Adapun program pokok bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- i. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- j. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- k. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
- l. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- m. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- n. Program lainnya yang relevan.

1.6. Sosial

Adapun program pokok bidang sosial yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- h. Program Pembinaan Anak Terlantar
- i. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- j. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- k. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- l. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- m. Program Penanggulangan Kemiskinan
- n. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial.
- o. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- p. Program lainnya yang relevan.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1. Tenaga Kerja

Adapun program pokok bidang tenaga kerja yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- g. Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal.
- h. Program Pengawasan dan Perlindungan tenaga kerja.
- i. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- j. Program lainnya yang relevan.

2.2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Adapun program pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
- g. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
- h. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- i. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
- j. Program lainnya yang relevan.

2.3. Pangan

Adapun program pokok bidang pangan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan.
- g. Program lainnya yang relevan.

2.4. Lingkungan Hidup

Adapun program pokok bidang lingkungan hidup yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- g. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.
- h. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

- i. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- j. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- l. Program Lampu Penerangan Jalan Umum
- m. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- n. Program lainnya yang relevan.

2.5. Administrasi Kependudukan Dan Capil

Adapun program pokok bidang administrasi kependudukan dan Capil yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- g. Program Lainnya yang relevan.

2.6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun program pokok bidang pemberdayaan masyarakat desa yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program TP PKK Kota Medan
- b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
- c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
- d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
- e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Kelurahan
- f. Program lainnya yang relevan.

2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun program pokok bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Keluarga Berencana.
- g. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- h. Program Pelayanan Kontrasepsi.
- i. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.
- j. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja).
- k. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ Aids
- l. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- m. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
- n. Program Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE Penggerakan
- o. Program lainnya yang relevan.

2.8. Perhubungan

Adapun program pokok bidang perhubungan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- j. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
- k. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- l. Program lainnya yang relevan.

2.9. Komunikasi Dan Informatika

Adapun program pokok bidang komunikasi dan informatika yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa.
- g. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika
- h. Program Pengembangan Analisa Media dan Informasi
- i. Program lainnya yang relevan.

2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Adapun program pokok bidang koperasi dan UKM yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- h. Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- i. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- j. Program lainnya yang relevan.

2.11. Penanaman Modal

Adapun program pokok bidang penanaman modal yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi.
- g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- h. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
- i. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan.
- j. Program lainnya yang relevan.

2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

Adapun program pokok bidang kepemudaan dan olahraga yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
- g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- h. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- i. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- j. Program Pengembangan Kebijakan, dan Manajemen Olah Raga.
- k. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
- m. Program Pembinaan Generasi Muda.
- n. Program lainnya yang relevan.

2.13. Persandian

Adapun program pokok bidang persandian yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan dan Pengamanan Persandian
- b. Program lainnya yang relevan.

2.14. Kebudayaan

Adapun program pokok bidang kebudayaan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- g. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
- h. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- i. Program lainnya yang relevan.

2.15. Perpustakaan

Adapun program pokok bidang perpustakaan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
- g. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- h. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
- i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- j. Program lainnya yang relevan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

3.1. Kelautan dan Perikanan

Adapun program pokok bidang kelautan dan perikanan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- b. Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
- d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
- e. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
- f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- g. Program Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
- h. Program lainnya yang relevan.

3.2. Pariwisata

Adapun program pokok bidang pariwisata yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- h. Program Pengembangan Kemitraan
- i. Program lainnya yang relevan.

3.3. Pertanian

Adapun program pokok bidang pertanian yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
- i. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- j. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
- k. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.
- l. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- n. Program lainnya yang relevan.

3.4. Perdagangan

Adapun program pokok bidang perdagangan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- g. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- h. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
- i. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- j. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
- k. Program lainnya yang relevan.

3.5. Perindustrian

Adapun program pokok bidang perindustrian yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
- g. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
- h. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
- i. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- j. Program lainnya yang relevan.

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Adapun program pokok bidang pemerintahan fungsi penunjang yang akan diselenggarakan adalah:

4.1. Administrasi Pemerintahan

Adapun program pokok bidang administrasi pemerintahan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
- g. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- h. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan
- i. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- j. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- k. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- l. Program Pelestarian dan Pemeliharaan Wilayah
- m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- n. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Dan Hari-hari Besar
- o. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- p. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- q. Program Kerjasama Dengan Mass Media
- r. Program Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan
- s. Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga
- t. Program Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi
- u. Program Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia
- v. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- w. Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City
- x. Program lainnya yang relevan.

4.2. Pengawasan

Adapun program pokok bidang pengawasan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Peningkatan sarana dan prasana aparatur
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- g. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- h. Program lainnya yang relevan.

4.3. Perencanaan

Adapun program pokok bidang perencanaan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- f. Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- h. Pengembangan Data/Informasi
- i. Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial Budaya
- j. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- k. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- l. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- m. Program Kerjasama Pembangunan
- n. Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan
- o. Program lainnya yang relevan.

4.4. Keuangan

Adapun program pokok bidang keuangan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Kantor
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Program lainnya yang relevan.

4.5. Kepegawaian

Adapun program pokok bidang kepegawaian yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
- h. Program lainnya yang relevan.

4.6. Penelitian Dan Pengembangan

Adapun program pokok bidang penelitian dan pengembangan yang akan diselenggarakan adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program lainnya yang relevan.

Rumusan program pembangunan daerah Kota Medan yang disertai target kinerja dituangkan dalam tabel berikut ini:

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI TARGET KINERJA

Misi 1 : Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku, kepentingan pembangunan kota

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan 1 : Menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman serta tertib sosial dalam masyarakat												
Sasaran 1.1: Meningkatkan suasana keamanan dan ketertiban kota yang kondusif												
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penanganan terhadap pelanggaran Perda Kota Medan	Persen	95	96	97	98	98	99	100	100	- Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Kesatuan Bangsa Politik
		Rasio Polisi Pamong Praja per penduduk	Per 10.000 penduduk	2,26	2,26	2,29	2,32	2,35	2,38	2,40	2,40	
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan aksi demo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	- Satuan Polisi Pamong Praja - Kecamatan - FKPD, dan - Kelembagaan koordinatif lainnya seperti Polresta - Kodim - Denpom dan lain-lain
		Rasio pos siskamling per jumlah Kelurahan	Per jumlah kelurahan	0	1	1	1	1	2	2	2	
3	Program Peningkatan	Rasio kekerasan dalam	Persen	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	- Dinas

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	rumah tangga Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyakit masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol
Sasaran 1.2: Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana												
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pelatihan dan sosialisasi kebencanaan Posko Siaga Bencana	Kegiatan Unit	3 1	7 1	11 2	15 3	20 4	25 5	29 5	29 5	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 2 : Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan stakeholder dalam pembangunan kota di berbagai bidang												
Sasaran 2.1: Meningkatnya Perencanaan Partisipatif												
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan Persentase program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD	Persen Persen	20 80	25 82	30 84	35 86	40 87	45 89	50 90	50 90	- Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Kerja Sama dengan Mass Media	Jumlah Lembaga dan Mass Media yang terlibat dalam	Media	25	28	32	35	38	42	45	45	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		perencanaan										Kota Medan
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Pembuatan Aplikasi untuk Pelayanan/ Transaksi online, database dan e-mobile dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota Medan	Aplikasi	15	20	21	18	20	20	20	20	
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja Dewan Smart City Kota Medan	Kegiatan	NA	NA	1	3	3	3	3	3	
		Jumlah Dokumen Penyusunan Master Plan Smart City Kota Medan	Dokumen	NA	NA	1	1	1	1	1	1	
		Kapasitas Bandwith Internet untuk Keperluan Pemko Medan	Mbps	950	1.000	1.088	1.463	2.500	2.750	3.000	3.000	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan APBD dan Pengesahan APBD Tepat Waktu	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Meningkatnya jumlah PAD Pemerintah Kota Medan	Persen	2	4	6	8	10	12	15	15	
5	Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh	Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ) Tepat Waktu	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Penyampaian Laporan Realisasi APBD	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Opini atas laporan keuangan daerah	WTP/WDP/ Adversed/	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	- Inspektorat, - B PKAD

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Disclaimer									
		Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	78,07	79,03	80,04	82,06	83,07	84,08	85	85	- Inspektorat - Seluruh OPD
6	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik	Persen	50	55	65	75	85	95	100	100	- Seluruh OPD - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rata-rata peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah mengikuti diklat	Persen	80	82	84	86	88	89	100	100	
		Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis/ Fungsional	Persen	7.5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	20	
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase SKPD yang telah memiliki Nilai dan Kelas Jabatan	Persen	50	55	65	75	85	95	100	100	
		Rasio ASN terhadap penduduk	Persen	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,8	0,8	
		Persentase SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	Persen	94	94	95	96	97	98	99	99	
		Persentase Jabatan Struktural <i>eselonering</i> yang terisi	Persen	65	65	70	75	80	85	90	90	
8	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Road map reformasi birokrasi	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1	
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun	Jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan	Orang	2.100	2.150	2.250	2.300	2.350	2.450	2.500	2.500	- Dinas Pemberdayaan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kelurahan	Jumlah LPM Aktif	Lembaga	453	453	453	453	453	453	453	453	Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
		Jumlah Karang Taruna Aktif	Lembaga	453	453	453	453	453	453	453	453	
10	Program Peningkatan Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat	Jumlah hasil kajian untuk pengambil keputusan dan stakeholders	Dokumen	5	5	6	6	7	7	8	8	- Badan Penelitian dan Pengembangan
11	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	2	2	3	3	- Inpektorat
		Tingkat kapabilitas APIP	Level	2	2	2	2	2	2	3	3	
12	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	93,24	94,08	96,02	97,03	98,05	99,08	100	100	
13	Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City	Jumlah MOU Kerja Sama dengan SISTER CITY	MoU	5	5	5	5	5	5	6	6	Sekretariat Daerah
14	Program Kerja sama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah MoU kerja sama antar daerah	MoU	2	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
15	Program Kerja sama Pembangunan	Jumlah MoU kerja sama dengan pihak ketiga	MoU	NA	1	1	1	1	1	1	1	- Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat Daerah
Tujuan 3 : Meningkatkan bentuk-bentuk kegotongroyongan dan tanggungjawab sosial perusahaan												
Sasaran 3.1: Meningkatnya jumlah partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan kota												

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Kerja Sama Pembangunan	Jumlah Perusahaan yang menyalurkan dana CSR	Perusahaan	15	20	25	37	42	46	50	50	Badan Perencanaan dan Pembangunan
Tujuan 4 : Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan pemuda serta perempuan dalam pembangunan kota												
Sasaran 4.1: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota												
1	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.	Persen	3,91	4,07	4,23	4,39	4,56	4,72	4,89	4,89	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	96,09	96,00	95,70	95,40	95,30	95,20	95,11	95,11	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan.	Persen	88,22	88,22	88,81	89,13	89,74	89,99	89,99	89,99	
		Jumlah Posyandu Aktif	Unit	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	
2	Program TP. PKK	Jumlah PKK aktif	Lembaga	173	173	173	173	173	173	173	173	
Sasaran 4.2: Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan												
1	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah organisasi kepemudaan	Organisasi	57	57	57	57	57	57	57	57	- Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	114	200	280	360	440	540	600	600	
Tujuan 5 : Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit Berprestasi												
Sasaran 5.1: Meningkatnya prestasi Atlit Kota Medan dalam penyelenggaraan even-even olahraga Nasional dan Internasional												

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	Atlet	250	415	580	745	915	1080	1250	1250	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	37	37	37	37	37	37	37	37	
		Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	191	320	450	580	715	845	955	955	
		Jumlah klub olahraga	Per 10000 penduduk	639	639	639	639	639	639	639	639	
		Jumlah gedung olahraga	Per 10000 penduduk	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Jumlah lapangan olahraga.	Per 10.000 penduduk	125	126	127	129	132	134	135	135	

Misi 2 : Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Sasaran	Target	Perangkat Daerah
----	---------	-------------------	--------	---------	------------------------	--------	------------------

				Kinerja pada Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kinerja pada Akhir RPJMD	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan 1 : Mewujudkan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai												
Sasaran 1.1: Meningkatkan keamanan wilayah melalui penguatan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai												
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan politik daerah	Kegiatan	8	8	8	8	8	8	8	8	
Tujuan 2 : Membangun koordinasi, komunikasi dan interaksi sosial yang efektif dalam kedudukan sederajat												
Sasaran 2.1: Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan interaksi sosial yang efektif												
1	Program Pembinaan Anak dan Remaja	Jumlah Karang Taruna Aktif	Lembaga	453	453	453	453	453	453	453	453	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan politik daerah	Kegiatan	8	8	8	8	8	8	8	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio pos siskamling per jumlah Kelurahan	Per jumlah kelurahan	0	0	1	1	1	1	2	2	
Tujuan 3 : Melindungi, memelihara, melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya dengan ciri khas masing-masing												

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sasaran 3.1: Meningkatnya pelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan bersejarah												
1	Program Pengelolaan kekayaan budaya	Persentase Bangunan cagar budaya yang dilestarikan	persen	60	100	100	100	100	100	100	100	- Dinas Kebudayaan - Dinas Pariwisata
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan pariwisata yang dikembangkan	Buah	4	5	5	5	5	5	5	5	
3	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip statis dan vital yang diselamatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 3.2: Meningkatnya Jumlah wisatawan melalui pengembangan wisata berbasis kearifan lokal												
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisatawan	orang	205.926	215.300	227.400	232.200	255.600	287.700	331.646	331.646	- Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama dengan mitra pariwisata dalam pembangunan pariwisata	MOU	5	5	10	10	10	10	10	10	
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dukungan penghargaan kebijakan dalam pelestarian budaya	Persen	NA	NA	NA	NA	50	60	70	70	
4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rasio Sanggar Budaya Multi Etnis	Rasio	NA	NA	1/3	1/5	1/9	3/6	3/6	3/6	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Program Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerja sama kemitraan	Persen	NA	NA	NA	NA	50	60	70	70	

Misi 3 :Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan 1 : Meningkatkan daya saing dan perekonomian kota												
Sasaran 1.1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro												
1	Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan ekonomi	Persen.	6,67	7,09	7,34	7,54	7,62	7,63	7,65	7,65	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kebudayaan - Dinas Perindustrian - Dinas Perdagangan
		Peningkatan Nilai Ekspor Kota Medan	USD Milyar	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.100	4.284	4.284	
		PDRB ADHB	Milyar Rp	160.446,38	179.699,52	201.263,46	225.415,07	252.415,07	252.746,32	254.340,99	254.340,99	
2	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial	Unit	5	6	7	8	9	9	10	10	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Daerah										
Sasaran 1.2: Meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan												
1	Program Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	11,86	12,00	12,14	12,28	12,43	12,57	12,57	12,57	- Dinas Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah - Badan Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian dan Perikanan - Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pertumbuhan industri	Persen	9,99	13,50	16,50	20,50	23,00	25,50	27,2	27,2	
3	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pertumbuhan industri	Persen	9,99	13,50	16,50	20,50	23,00	25,50	27,2	27,2	
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan industri	Persen	NA	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
5	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya sistem Teknologi Manufaktur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Penguasaan Teknologi Industri	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.	Persen	26,94	26,95	26,95	26,98	26,99	27,00	27,00	27,00	
8	Program Peningkatan Kerja Sama	Ekspor bersih perdagangan	US	4.032	4.051	4.093	4.124	4.178	4.202	4.284	4.284	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perdagangan Internasional		Milyar									
9	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Persentase Sengketa Konsumen yang ditangani	Persen	90	90	90	90	90	100	100	100	
Sasaran 1.3: Meningkatnya Produktivitas masyarakat pesisir dan petani												
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	NA	2	2	2	2	2	2	10	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Perikanan - Badan Ketahanan Pangan - Sekretariat Daerah - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Produksi Unggulan Hasil Pertanian	Persen	NA	1	1	1	1	1	1	5	
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Pengetahuan dan Mutu Pertanian	Persen	NA	2	2	2	2	2	2	10	
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian	Persen	NA	1	1	1	1	1	1	5	
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produktivitas Hasil Peternakan	Persen	NA	1	1	1	1	1	1	5	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengembangan Budidaya Perikanan	Perikanan Budidaya										
Sasaran 1.4: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Penataan dan Pembinaan Perusahaan Daerah												
1	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dana Penyertaan Modal Pemko kepada Perusahaan Daerah	Milyar Rp	3	3	4	4	5	5	6	6	BPKAD
Tujuan 2 : Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal												
Sasaran 2.1: Meningkatnya realisasi investasi di Kota Medan												
1	Program Peningkatan pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	NA	81,38	84,36	85,31	85,31	85,31	85,31	85,31	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Jumlah event/pameran yang diselenggarakan	kali	1	1	1	2	2	2	2	10	
3	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data/Informasi yang Akurat	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
Tujuan 3 : Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja												
Sasaran 3.1: Meningkatnya lapangan kerja yang masif dan <i>skilled labor</i>												
1	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Angka Partisipasi Kerja	Persen	69,92	71,82	73,61	74,40	77,29	80,00	80,00	80,00	- Dinas Ketenagakerjaan - Dinas

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program Pembinaan dan penempatan tenaga kerja	Angka Partisipasi Kerja	Persen	69,92	71,82	73,61	74,40	77,29	80,00	80,00	80,00	Perindustrian - Dinas Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat Daerah
3	Program Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja	Persen	(22,63)	21	19	18	17	16	15	15	
		Pelayanan Kepesertaan jaminan sosial bagi peserta	Persen	55,14	60,15	65,26	75,48	85,01	95	100	100	
4	Program Pembinaan hubungan industrial yang standar ideal	Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja	Persen	(22,63)	21	19	18	17	16	15	15	
5	Program Pembinaan dan Penempatan tenaga kerja	Pencari pekerja yang ditempatkan	Persen	27,75	30,03	33,14	38,91	42,10	45,00	45,00	45,00	
Tujuan 4 : Meningkatkan kedudukan, fungsi, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian kota												
Sasaran 4.1: Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dalam perekonomian kota												- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Perdagangan - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Dinas Pemberdayaan Perempuan,
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan UKM yang Dibina	persen	40	40	43	45	47	49	53	53	
2	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Kluster UMKM	Kluster	6	6	7	7	8	9	10	10	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	persen	32	32	34	36	38	40	41	41	Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pertumbuhan Koperasi	persen	30	60	60	60	60	60	60	60	
6	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase PKL yang Ditata	persen	NA	NA	NA	NA	NA	70	70	70	
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Jumlah Kelompok UMKM yang Dibina	Kelompok	453	453	453	453	453	453	453	453	
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah kelompok UMKM yang dibina	Kelompok	453	453	453	453	453	453	453	453	Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan pemberdayaan Masyarakat
Tujuan 5 : Mewujudkan Medan kota kreatif dan inovatif												
Sasaran 5.1: Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mewujudkan Medan Kota Kreatif												
1	Program Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dibina	Persen	N/A	N/A	N/A	35	65	100	100	100	- Dinas Pariwisata
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kelompok binaan Warung Teknologi Kelurahan	Kelompok	151	151	151	151	151	151	151	151	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Misi 4 : Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang dinamis dan produktif												
Sasaran 1.1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perencanaan tata ruang kota secara memadai												
1	Program Perencanaan Tata	Dokumen RDTR dan RTBL yang tersedia sesuai amanah Perda RDTR	Dokumen	1	2	4	6	8	10	13	13	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ruang	Peta bidang yang sudah memuat persil tanah per kecamatan di kota Medan	Peta	0	3	7	10	15	18	21	21	Penataan Ruang (PKP2R)
		Aplikasi untuk kepentingan sosialisasi RDTR dan peraturan zonasi dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat	Aplikasi	0	1	1	2	2	2	2	2	
Sasaran 1.2: Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang kota												
1	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang memiliki IMB di Kota Medan	Persen	52,07	52,60	52,80	53,10	53,50	54,10	54,98	54,98	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R)
2	Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan	Meningkatnya pengendalian Terhadap Rencana Tata Ruang dan Bangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
Sasaran 1.3: Meningkatnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang												
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen Perda dan Perwal tentang penataan ruang dan reklame	Dokumen	6	8	10	12	16	19	21	21	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Lokasi Bangunan yang ditertibkan/ dibongkar setiap tahun	Lokasi	40	37	32	28	26	22	20	20	Penataan Ruang (PKP2R)
		Unit Reklame (Billboard/ Baliho/ Videotron/ Megatron) yang dibongkar setiap tahun	Unit	97	105	115	120	130	138	144	144	
Sasaran 1.4: Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan sehat												
1	Pemanfaatan Ruang	Luas kawasan permukiman kumuh	Ha	200	150	130,3	100,3	85	65	50.3	50.3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R)
2	Pengembangan Perumahan	Persentase rasio rumah layak huni	Persen	97,29	98	98.3	98.6	99	99.2	99.5	99.5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R)
3	Program peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (response time rate)	Menit	18	17,50	17	16,50	16	15	15	15	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
Tujuan 2 : Menyediakan berbagai fasilitas, utilitas kota seperti sistim informasi manajemen, telekomunikasi, kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin berkecukupan serta ramah lingkungan												
Sasaran 2.1: Meningkatnya akses pelayanan air limbah												
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air	Persentase akses pelayanan air limbah melalui sistem pengolahan air limbah setempat (<i>on site</i>)	Persen	91	91	92	93	94	95	96	96	Dinas Pekerjaan Umum

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Limbah											
Sasaran 2.2: Meningkatnya akses pelayanan air minum												
1	Program Lingkungan Sehat Permukiman	Persentase pelayanan air minum kebutuhan minimal 60 liter/ orang/ hari (mandi, minum dan cuci)	Persen	70	72	74	76	78	80	82	82	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R)
Sasaran 2.3: Tersedianya sistem jaringan drainase perkotaan secara terpadu dan berfungsi baik												
1	Program pembangunan saluran drainase/ gorong – gorong	Jumlah lokasi rawan genangan/banjir	Lokasi	40	37	32	28	26	22	20	20	Dinas Pekerjaan Umum
Sasaran 2.4: Terwujudnya sistem jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang handal												
1	Program LPJU Medan	Persentase ketersediaan jaringan LPJU dalam kondisi baik	Persen	95	96	97	97	98	99	100	100	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Sasaran 2.5: Tersedianya sistem jaringan penempatan utilitas bawah tanah di kawasan utama perkotaan												
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang saluran penempatan jaringan utilitas bawah tanah yang terbangun	Km	0	3	5	8	10	12	15	15	Dinas Pekerjaan Umum
Sasaran 2.6: Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah untuk mendukung kelancaran pelayanan publik												

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		angka kecelakaan lalu-lintas										
		Persentase tingkat kelancaran arus lalu lintas pada koridor sistem jaringan jalan kolektor sekunder minimal 20 km/jam	Persen	25,25	26	26,50	27,50	28	29	30	30	
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase kelayakan kendaraan angkutan umum	Persen	60	62	64	66	68	70	72	72	
		Persentase okupansi penumpang angkutan umum	Persen	42	44	46	49	52	54	57	57	
		Rasio satuan mobil penumpang antara angkutan umum dan angkutan pribadi	Persen	20	17	14	11	7	4	2	2	
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pemenuhan dasar Payung Hukum Dalam Melaksanakan Kebijakan	Persen	100	2	3	25	25	25	30	100	Dinas Perhubungan
5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persen	100	8	10	20	20	21	21	100	Dinas Perhubungan
6	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terkendalinya Peningkatan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persen	15	15	15	15	15	15	25	100	Dinas Perhubungan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
Sasaran 4.1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase luasan RTH dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	Persen	12	12,5	13	14	15	16	17	17	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Luas lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) di Kota Medan yang berwawasan lingkungan	Ha	32	35	38	41	44	47	47	47	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Tujuan 5 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup												
Sasaran 5.1: Meningkatnya pengelolaan, pemilahan dan pengumpulan sampah												
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dibuang sembarangan (sungai, selokan, tanah kosong)	Persen	3,7	3,5	3,2	2	1,5	1	0	0	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Persentase sampah yang dibakar oleh masyarakat	Persen	23,4	20	17	15	12	9	6	6	
Sasaran 5.2: Meningkatnya pengelolaan pengangkutan sampah												
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan pengangkutan sampah	Persen	82,5	87	91	95	98	100	100	100	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Sasaran 5.3: Meningkatnya pengelolaan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA												
1	Program	Jumlah TPA secara <i>controlled landfill</i>	Lokasi	1	1	1	2	2	2	2	2	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengolahan sampah di TPA menjadi energi	Persen	0	1	4	5	7	10	12	12	
Sasaran 5.4: Menurunnya Volume sampah yang terangkut ke TPA												
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah terangkut ke TPA	Persen	3	4	5	6	7	8	10	10	
Sasaran 5.5: Menurunnya tingkat konsumsi energi pada fasilitas publik												
1	Program Lampu Penerangan Jalan Umum	Persentase LPJU dengan lampu hemat energi	Persen	10	20	30	40	45	55	60	60	Dinas Perhubungan
2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah lampu lalu lintas yang hemat energy	Simpang	15	23	31	40	52	60	66	66	
Sasaran 5.6: Meningkatkan kesadaran masyarakat atas perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)												
1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase masyarakat yang buang air besar sembarangan (BABS)	Persen	4,31	4	3	2,5	1,7	1	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R)
Sasaran 5.7: Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup												
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Tingkat kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV Gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	Persen	7	12	13	14	15	16	17	17	- Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rasio guru-siswa SD/MI	Guru-siswa	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	
		Rasio guru-siswa SMP/MTs	Guru-Siswa	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 14	
		Persentase ruang kelas baik SD/MI	Persen	90	91	92	93	94	94	95	95	
		Persentase ruang kelas baik SMP/MTs	Persen	90	91	92	93	94	94	95	95	
		Jumlah kelas inklusi SD/MI	Kelas	0	1	2	3	4	4	5	5	
		Jumlah kelas inklusi SMP/MTs	Kelas	0	1	2	3	4	4	5	5	
Sasaran 1.2: Meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidik												
1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru tersertifikasi SD/MI	Persen	48,81	50	52	54	56	58	60	60	
		Persentase guru tersertifikasi SMP/MTs	Persen	49,43	51	53	56	58	62	65	65	
		Guru memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	Persen	91,56	93	95	96	97	98	100	100	
		Jumlah guru PNS yang diusulkan untuk pemerataan	Orang	0	50	100	200	300	400	500	500	
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pemetaan kompetensi guru	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	
Sasaran 1.3: Meningkatkan minat baca masyarakat												

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	Orang	112.000	112.520	112.940	113.078	113.135	113.286	113.421	113.421	Dinas Perpustakaan dan Kearsipam
		Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exemplar	83.078	94.349	105.651	117.037	128.442	139.864	151.300	151.300	
		Jumlah perpustakaan cabang	Unit	8	10	12	14	16	18	21	21	
		Pencanangan Medan kota literasi	Ya/Tidak	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tujuan 2 : Mencapai pendidikan dasar untuk semua												
Sasaran 2.1: Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat												
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi TK/PAUD.	Persen	74,83	78,10	82,77	85,08	88,79	92,67	92,67	92,67	Dinas Pendidikan
		Persentase ruang kelas TK baik	Persen	60	65	70	75	80	85	90	90	
		Rasio TK/PAUD – siswa	TK/PAUD – Siswa	N/A	1 : 30	1 :35	1 : 40	1 : 40	1 : 40	1 : 50	1 : 50	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI/Paket A	Persen	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	
		APK SMP/MTs/ Paket B	Persen	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	
		APM SD/MI/Paket A	Persen	109,4	109.5	109.6	109.7	109.8	109.9	110	110	
		APM SMP/MTs/ Paket B	Persen	88,23	90	92	94	96	98	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Angka putus sekolah SD/MI.	Persen	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
		Angka putus sekolah SMP/MTs.	Persen	0,20	0,12	0,09	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	
		Angka kelulusan SD/MI	Persen	99,99	99,99	99,99	100	100	100	100	100	
		Angka kelulusan SMP/MTs	Persen	99,96	99,97	99,97	99,98	99,98	99,99	100	100	
		Angka melanjutkan dari SD sederajat ke SMP	Persen	110,65	112,00	114,00	116,00	118,00	120,00	123,87	123,87	
		Angka mengulang SD/MI	Persen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	
		Angka mengulang SMP/MTs	Persen	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0	0	
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,94	99,94	99,95	99,95	99,96	99,97	99,98	99,98	
3	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah tutor yang dilatih	Orang	400	800	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.000	
		Jumlah lembaga PKPM yang dilatih	Lembaga	35	55	75	100	125	150	175	175	
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase paguyuban kelas yang terbentuk	Persen	0	5	10	15	20	25	30	30	
Tujuan 3 : Mewujudkan Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional												
Sasaran 3.1: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan												
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per penduduk	Per 30.000 penduduk	0,53	0,53	0,54	0,55	0,57	0,59	0,60	0,60	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rasio rumah sakit per penduduk	Per 100.000 penduduk	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	
		Rasio dokter umum per penduduk	Per 100.000 penduduk	36,96	37,50	38,10	38,75	38,95	39,55	40	40	
		Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	224,96	225	226	227	228	229	230	230	
		Persentase puskesmas yang terakreditasi	Persen	0	10	35	55	70	85	100	100	
		Persentase rumah sakit yang terakreditasi	Persen	8,3	20	35	55	75	90	100	100	
		BOR	Persen	40,10	45	50	55	60	65	70	70	
		Cakupan Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas dan Rumah Sakit	Persen	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80	
		Cakupan Kunjungan Rawat Inap Puskesmas dan Rumah Sakit	Persen	19,51	25	30	35	40	45	50	50	
		Cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	68,36	72	76	81	85	89	92	92	
		Persentase Calon Jemaah Haji yang dilakukan pembinaan	Persen	2,5	20	38	56	74	82	100	100	
		Cakupan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih	Persen	66,2	69	72	74	75	78	80	80	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(Ber-PHBS)										
		Persentase Faskes Tingkat Pertama yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan kunjungan ke pelayanan kesehatan tingkat pertama	Persen	73,8	78	83	88	93	97	100	100	
		Usia harapan hidup	Tahun	72,18	72,48	72,78	73,08	73,38	73,78	74,18	74,18	
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit umum daerah	Persen	70	72	74	76	77	78	80	80	Dinas Kesehatan
		Cakupan ketersediaan jenis alat kesehatan pada rumah sakit umum daerah	Persen	70	72	74	76	78	82	85	85	
		Akreditasi rumah sakit umum daerah	Ya/Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
3	Program Keluarga	Cakupan peserta KB aktif	Persen	74,29	74,36	74,42	74,49	74,56	74,61	74,67	74,67	Dinas

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Berencana	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/ kelurahan	Persen	96,68	97	97,50	98	98,5	99	100	100	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
		Rasio akseptor KB	Per seribu	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,6	2,57	2,52	2,48	2,43	2,40	2,37	2,37	
Tujuan 4 : Meningkatkan kesehatan ibu, anak, balita dan lansia												
Sasaran 4.1: Meningkatkan kesehatan bayi, balita dan anak												
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	99,0	99,2	99,4	99,6	99,8	100	100	100	
		Cakupan kunjungan bayi	Persen	99,9	99,92	99,94	99,96	99,97	99,98	100	100	
		Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita	Persen	70,7	74	77	80	83	87	90	90	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	Persen	0	15	30	45	65	80	100	100	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI	Persen	40,09	42	44	45	47	48	50	50	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Eksklusif										
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	90,95	92	93	95	96	98	100	100	
		Cakupan pemberian vitamin A pada bayi	Persen	86,6	89	91	93	95	97	100	100	
		Cakupan pemberian vitamin A pada balita	Persen	85,9	88	90	93	95	97	100	100	
		Jumlah kematian bayi	Jiwa	14	11	8	5	2	1	0	0	
2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan Balita yang ditimbang (D/S)	Persen	79,83	81	83	84	86	88	90	90	
		Persentase Balita Stunting	Persen	36	33	30	27	24	22	20	20	
		Persentase Balita Kurus ditangani	Persen	66,6	73	78	83	88	94	100	100	
		Persentase Balita Berat Badan sangat kurang ditangani	Persen	0	15	30	45	60	80	100	100	
		Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah	Persen	0	5	10	15	20	25	30	30	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sasaran 4.2: Meningkatnya kesehatan ibu													
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kematian ibu	Jiwa	6	5	4	3	2	1	0	0	Dinas Kesehatan	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	90,68	92	93	95	97	98	100	100		100
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	90,88	91	92	93	93	94	95	95		95
		Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	Persen	89,91	89,92	89,93	89,95	89,97	89,99	90	90		90
		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Persen	0	15	30	45	60	75	95	95		95
2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Posyandu lansia	Unit	21	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Kesehatan	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (USILA)	Persen	77,78	77,80	77,82	77,84	77,86	77,88	80	80		80
Tujuan 5 : Memerangi HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular													
Sasaran 5.1: Menurunnya jumlah penderita HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular													
1	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah layanan VCT HIV/AIDS	Unit	24	26	29	32	34	37	40	40	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS	Persen	0	15	30	45	60	80	100	100	
		Persentasi remaja yang memahami tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Persen	45	55	65	75	85	95	100	100	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular	Persen	0	15	30	45	60	80	100	100	
Tujuan 6 : Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)												
Sasaran 6.1: Menurunnya tingkat kemiskinan												
1	Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin.	Persen	9,64	9,64	8,65	7,76	6,96	6,24	5,59	5,59	Seluruh SKPD
2	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I	Persen	21,15	20,90	20,75	20,50	20,30	20,00	19,81	19,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (maskin)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Presentase Fakir Miskin Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Sosial yang Meningkatkan Kesejahteraannya	Persen	NA	NA	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
Sasaran 6.2: Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)												
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	NA	NA	75	80	85	90	95	95	Dinas Sosial
2	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Penanganan Anak Terlantar	Persen	NA	NA	1	1	1	2	3	3	
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat Yang Diberikan Bantuan	Persen	NA	NA	50	55	60	65	70	70	
4	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo yang Dibina	Persentase Panti Asuhan/Panti Jompo yang Dibina	Persen	NA	NA	65	70	75	80	85	85	
5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang penyakit Sosial yang Dibina	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	
6	Program Perlindungan	Persentase PMKS yang	Persen	NA	NA	50	60	70	80	90	90	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan jaminan Sosial	Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial										
Sasaran 6.3: Meningkatnya jumlah sarana sosial												
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Ketersediaan Fasilitas Tenaga PSKS	Persen	NA	NA	60	65	70	75	80	80	Dinas Sosial
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial	Persen	NA	NA	70	75	80	85	90	90	
Sasaran 6.4: Meningkatnya ketahanan pangan												
1	Program Diversifikasi dan peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama	Kg	110,42	115,22	120,43	125,32	130,54	135,56	140	140	Badan Ketahanan Pangan
Tujuan 7 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan												
Sasaran 7.1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan												
1	Program Penataan administrasi kependudukan	Kepemilikan e-KTP-	Persen	77,09	86,65	88,73	97,47	99,35	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		akta kelahiran-	Per 1000 penduduk	606	614	625	629	637	650	650	650	
2	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terpeliharanya server kecamatan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	- Sekretariat Daerah - Kecamatan

Misi 6 : Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan 1 : Mewujudkan Medan sebagai Kota Religius												
Sasaran 1.1: Meningkatnya ketersediaan tempat ibadah bagi seluruh pemeluk agama												
1	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Jumlah tempat ibadah	Unit	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	Sekretariat Daerah
		Rasio rumah ibadah	Per 100 penduduk	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	
Tujuan 2 : Menyelenggarakan berbagai program kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan bagi seluruh agama												
Sasaran 2.1: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama												
1	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan keagamaan	Kegiatan	27	29	31	31	33	33	35	35	- Sekretariat Daerah
		Jumlah guru maghrib mengaji	Orang	1.083	1.160	1.240	1.320	1.400	1.480	1.583	1.583	
		Jumlah guru sekolah minggu	Orang	3.000	3.080	3.160	3.250	3.330	3.410	3.500	3.500	
		Persentase anak mengikuti maghrib mengaji	Persen	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3	6,6	7	7	
		Persentase anak mengikuti sekolah minggu	Persen	42,7	43,9	45,1	46,3	47,5	48,7	49,8	49,8	
Tujuan 3 : Mewujudkan sikap-sikap adat sopan santun dan perilaku masyarakat yang selaras dengan etika serta moral agama												
Sasaran 3.1: Meningkatnya jumlah organisasi keagamaan yang menjadi pusat pembinaan sosial keagamaan												

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah organisasi keagamaan	Organisasi	209	209	209	209	209	209	209	209	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Secara operasional, arah kebijakan pembangunan kota dijabarkan ke dalam berbagai indikasi program prioritas yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sampai tahun 2021. Selanjutnya untuk menjamin implementasinya juga diformulasikan ke dalam kerangka pendanaan, sebagai bentuk pengukuran besaran alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Indikasi kerangka pendanaan juga dikelompokkan per-urusan pemerintahan dan per-OPD untuk dapat menetapkan besaran anggaran secara kumulatif yang diperlukan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan sampai tahun 2021. Oleh karena, sumber-sumber pendapatan daerah bersifat terbatas, maka diproyeksikan kebutuhan belanja langsung per-urusan pemerintahan dan per-OPD tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Alokasi belanja langsung yang diperkirakan untuk tahun 2016-2021 di atas, tentunya harus dapat diperinci menjadi alokasi belanja langsung per-OPD dan per-program untuk setiap tahun dalam 5 (lima) tahun ke depan sampai tahun 2021, sehingga selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Untuk itu, disajikan proyeksi belanja langsung per-OPD dan per-program prioritas dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN

No	Program	Indikator Kinerja	TARGET BELANJA PER PROGRAM					
			2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN								
1	Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu	1,913,000,000	1,913,000,000	1,932,130,000	1,951,451,300	1,970,965,813	2,562,255,557
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi	433,000,000	433,000,000	437,330,000	441,703,300	446,120,333	579,956,433
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapat peningkatan kapasitas	4,885,000,000	4,885,000,000	4,933,850,000	4,983,188,500	5,033,020,385	5,033,020,385
4	Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan peningkatan kompetensi guru, persentase guru tersertifikasi, jumlah guru yang memperoleh dana kesejahteraan	67,709,000,000	54,650,026,332	68,386,090,000	69,069,950,900	69,760,650,409	83,712,780,491
5	Peningkatan Sarana Pendidikan	Persentase sarana pendidikan dalam kondisi baik	24,420,970,000	26,863,067,000	32,665,179,700	32,991,831,497	33,321,749,812	39,986,099,774
6	Pembiayaan Belanja Pendidikan	Angka partisipasi PAUD, angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan	20,360,000,000	20,563,600,000	20,563,600,000	20,769,236,000	20,976,928,360	21,186,697,644
7	Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	1,508,000,000	1,523,080,000	1,523,080,000	1,538,310,800	1,553,693,908	1,864,432,690
8	Peningkatan Kualitas Lulusan	Jumlah alat peraga, IPS , IPA dan Matematika Sekolah	37,100,000,000	37,471,000,000	37,471,000,000	37,845,710,000	38,346,579,099	47,933,223,874
9	Penguatan pelestarian budaya lokal.	Jumlah kurikulum muatan lokal berbasis budaya lokal	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0
10	Pelaksanaan Pengembangan nilai sopan santun yang religius	Persentase Sekolah pelaksana program pendidikan karakter.	1,550,000,000	1,565,500,000	1,565,500,000	1,581,155,000	1,596,966,550	1,878,274,569
Jumlah			159,878,970,000	149,987,273,332	169,597,759,700	171,292,537,297	173,006,674,669	204,736,741,416
DINAS KESEHATAN								

1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Faskes Tk. Pertama dan jaringannya yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dengan kondisi baik	15,789,804,000	15,805,593,804	15,947,702,040	16,107,179,060	16,268,250,851	16,430,933,360
2	Program pelayanan kesehatan kepesertaan Program JKN PBI	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta program JKN PBI	141,230,873,182	117,213,090,469	142,643,181,914	144,069,613,733	145,510,309,870	166,965,412,968
3	Program obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan obat esensial generik dan obat program dan BMHP Puskesmas	8,118,792,000	8,126,910,792	8,199,979,920	8,281,979,719	8,364,799,516	8,448,447,512
4	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah Kecamatan yang terawasi kualitas obat dan makanan	205,180,000	205,385,180	207,231,800	209,304,118	211,397,159	213,511,131
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase faskes yang tanggap darurat penanggulangan masalah kesehatan di masyarakat	2,523,358,001	2,525,881,359	2,548,591,581	2,574,077,497	2,599,818,272	2,625,816,455
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Gizi Buruk mendapat perawatan	1,864,360,000	1,866,224,360	1,883,003,600	1,901,833,636	1,920,851,972	1,940,060,492
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	10,909,925,000	9,818,932,500	11,019,024,250	11,129,214,493	11,240,506,637	11,352,911,704
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	cakupan kunjungan bayi	6,009,538,000	5,408,584,200	6,069,633,380	6,130,329,714	6,191,633,011	6,253,549,341
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi	445,900,000	446,345,900	450,359,000	454,862,590	459,411,216	464,005,328
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	cakupan pelayanan kesehatan balita	73,790,000	73,863,790	74,527,900	75,273,179	76,025,911	76,786,170
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA	cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (USILA)	388,830,000	389,218,830	392,718,300	396,645,483	400,611,938	404,618,057
12	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Jumlah kematian ibu	118,425,000	118,543,425	119,609,250	120,805,343	122,013,396	123,233,530
13	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	103,740,000	103,843,740	104,777,400	105,825,174	106,883,426	107,952,260
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas melayani tenaga kesehatan dan masyarakat	8,606,029,000	8,614,635,029	8,692,089,290	8,779,010,183	8,866,800,285	8,955,468,288

16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas melayani tenaga kesehatan dan masyarakat	1,519,149,000	1,520,668,149	1,534,340,490	1,549,683,895	1,565,180,734	1,580,832,541
17	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas melayani tenaga kesehatan dan masyarakat	1,657,500,000	1,659,157,500	1,674,075,000	1,690,815,750	1,707,723,908	1,724,801,147
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas melayani tenaga kesehatan dan masyarakat	380,835,000	381,215,835	384,643,350	388,489,784	392,374,681	396,298,428
19	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas	321,000,000	321,321,000	324,210,000	327,452,100	330,726,621	334,033,887
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Puskesmas peduli kesehatan lingkungan	387470000	387,857,470	391,344,700	395,258,147	399,210,728	403,202,836
Jumlah			200,654,498,183	174,987,273,332	202,661,043,165	204,687,653,596	206,734,530,132	228,801,875,433
RSUD PIRNGADI								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas melayani tenaga kesehatan dan masyarakat	250,000,000	250,000,000	252,500,000	255,025,000	257,575,250	260,151,003
2	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas melayani tenaga kesehatan dan masyarakat	1,604,200,000	1,604,200,000	1,620,242,000	1,636,444,420	1,652,808,864	1,669,336,953
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat esensial dll	20,000,000,000	22,000,000,000	20,200,000,000	20,402,000,000	20,606,020,000	20,812,080,200
4	Upaya Kesehatan Masyarakat	cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	32,059,536,624	35,265,490,286	32,380,131,990	32,703,933,310	33,030,972,643	33,361,282,370
5	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah Sarana dan prasarana Rumah sakit yang semakin membaik	2,275,000,000	3,185,000,000	2,297,750,000	2,320,727,500	2,343,934,775	2,367,374,123
6	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	2,000,000,000	2,800,000,000	2,020,000,000	2,040,200,000	2,060,602,000	2,081,208,020

7	Ekspansi Rumah Sakit	Cakupan jumlah pasien yang ditampung rumah sakit semakin membaik	0	70,000,000,000	30,000,000,000	0	0	0
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	174,584,247,631	102,042,672,394	217,740,117,108	267,417,518,278	267,091,693,462	296,762,610,397
Jumlah			232,772,984,255	237,147,362,680	306,510,741,098	326,775,848,508	327,043,606,994	357,314,043,065
DINAS BINA MARGA								
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan	84,679,045,400	118,550,663,560	110,082,759,020	111,183,586,610	122,301,945,271	123,524,964,724
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase penurunan kawasan rawan banjir/genangan	277,731,860,000	388,824,604,000	327,012,857,983	339,185,386,562	389,017,804,612	392,907,982,658
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi jalan dan jembatan dalam keadaan baik	204,944,197,110	407,360,166,630	245,933,036,532	248,392,366,897	273,231,603,587	284,160,867,731
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	Persentase drainase dan street inlet dalam keadaan baik	26,814,498,490	29,781,301,690	27,082,643,475	27,353,469,910	27,627,004,609	27,903,274,655
5	Program Evaluasi Laik Fungsi Jalan	Tersedianya Dokumen Laik Fungsi Jalan	-	-	600,000,000	606,000,000	612,060,000	618,180,600
6	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Terbangunnya Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan	1,200,000,000	-	-	-	-	-
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi laik pakai	30,352,788,000	36,041,139,120	30,656,315,880	30,962,879,039	31,272,507,829	31,585,232,907
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas masyarakat	1,486,400,000	1,545,375,000	1,501,264,000	1,516,276,640	1,531,439,406	1,546,753,800
9	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas melayani	36,000,000	156,000,000	36,360,000	36,723,600	37,090,836	37,461,744
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas	675,850,000	1,512,250,000	682,608,500	689,434,585	696,328,931	703,292,220
12	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas	50,000,000	45,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201

13	Program Pemutakhiran Database	Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Database	-	2,510,000,000	2,535,100,000	2,560,451,000	2,586,055,510	2,611,916,065	
14	Program Penanggulangan Kemiskinan	Terbantunya lingkungan masyarakat miskin	-	13,433,500,000	13,567,835,000	13,703,513,350	13,840,548,484	14,784,405,862	
Jumlah				628,210,639,000	1,000,000,000,000	759,981,280,390	776,481,093,193	863,045,904,125	880,676,363,167
DINAS PERKIM									
1	Program Data dan Informasi	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan	-	400,000,000	424,000,000	428,240,000	471,064,000	475,774,640	
2	Perencanaan pembangunan fisik berdasarkan daya dukung lingkungan	Jumlah ketersediaan bangunan fisik berdasarkan daya dukung lingkungan	-	5,500,000,000	6,050,000,000	6,352,500,000	6,987,750,000	7,057,627,500	
3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Konsolidasi, Sosialisasi dan Pemeliharaan Perumahan	118,786,390,000	72,471,351,713	65,332,514,500	70,343,305,551	92,824,826,753	94,353,075,020	
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Sehat Perumahan	126,697,811,935	76,018,687,161	68,899,258,975	72,344,221,924	94,047,488,501	94,987,963,386	
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana	95,162,468,670	96,114,093,357	96,114,093,357	100,919,798,025	100,919,798,025	101,928,996,005	
6	Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan	Persentase revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana	33,158,904,731	33,490,493,778	29,843,014,258	30,141,444,400	39,183,877,721	39,575,716,498	
7	Pembuatan IPAL Fasilitas Umum	Terbangunnya Fasilitas IPAL di Kota Medan	-	8,817,500,000	7,054,000,000	7,124,540,000	7,195,785,400	7,267,743,254	
8	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat	650,000,000	715,000,000	656,500,000	663,065,000	669,695,650	676,392,607	
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas masyarakat	7,685,828,645	7,685,828,645	7,762,686,931	7,840,313,801	7,918,716,939	7,997,904,108	
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas melayani	200,000,000	200,000,000	202,000,000	204,020,000	206,060,200	208,120,802	
11	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas	220,000,000	220,000,000	222,200,000	224,422,000	226,666,220	228,932,882	

12	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas	130,000,000	130,000,000	131,300,000	132,613,000	133,939,130	135,278,521
Jumlah			382,691,403,981	301,762,954,654	282,691,568,021	296,718,483,701	350,785,668,538	354,893,525,223
DINAS P2K								
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu	1,187,345,000	1,187,345,000	1,199,218,450	1,211,210,635	1,223,322,741	1,235,555,968
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	1,287,100,000	1,287,100,000	1,299,971,000	1,312,970,710	1,326,100,417	1,339,361,421
3	Program peningkatan disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	552,470,000	552,470,000	557,994,700	563,574,647	569,210,393	574,902,497
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	382,550,000	382,550,000	386,375,500	390,239,255	394,141,648	398,083,064
5	Program peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	90,000,000	90,000,000	90,900,000	91,809,000	92,727,090	93,654,361
6	Program peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tercapainya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	8,297,505,000	8,267,532,970	8,380,480,050	8,464,284,851	8,548,927,699	8,634,416,976
Jumlah			11,796,970,000	11,766,997,970	11,914,939,700	12,034,089,097	12,154,429,988	12,275,974,288
DINAS TRTB								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	2,785,752,280	2,785,752,280	2,813,609,803	2,841,745,901	2,870,163,360	2,898,864,993
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara / diperbaiki/ direhabilitasi	106,481,040,000	63,497,901,452	160,545,850,400	178,621,308,903	209,707,521,992	210,804,597,212
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	190,800,000	190,800,000	192,708,000	194,635,080	196,581,431	198,547,245
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kompetensi aparatur	689,000,000	689,000,000	695,890,000	702,848,900	709,877,389	716,976,163
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	145,000,000	146,450,000	146,450,000	147,914,500	149,393,645	150,887,581

6	Program Perencanaan Tata Ruang	Tercapainya kualitas program perencanaan dan penataan Tata Ruang	5,120,000,000	4,200,000,000	5,171,200,000	5,222,912,000	5,275,141,120	5,327,892,531
7	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang	6,480,003,750	5,600,000,000	6,544,803,788	6,610,251,825	6,676,354,344	6,743,117,887
8	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau	4,171,800,000	2,715,925,000	4,213,518,000	4,255,653,180	4,298,209,712	4,341,191,809
Jumlah			126,063,396,030	79,825,828,732	180,324,029,990	198,597,270,289	229,883,242,992	231,182,075,422
BAPPEDA								
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RPJMD, Renstra Bappeda, RKPD, KUA/PPAS, Renja Bappeda dan rencana pembangunan kota	5,480,000,000	5,725,000,000	5,534,800,000	5,590,148,000	5,646,049,480	5,702,509,975
2	Pengembangan Data dan Informasi	Ketersediaan data dan informasi pembangunan kota	6,925,000,000	6,340,000,000	6,994,250,000	7,064,192,500	7,134,834,425	7,206,182,769
3	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi yang disusun/dikaji	6,985,000,000	5,915,000,000	7,054,850,000	7,125,398,500	7,196,652,485	7,268,619,010
4	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya yang disusun/dikaji	2,370,000,000	675,000,000	2,393,700,000	2,417,637,000	2,441,813,370	2,466,231,504
5	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya persentase angka kemiskinan kota	1,730,000,000	1,830,000,000	1,747,300,000	1,764,773,000	1,782,420,730	1,800,244,937
6	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA yang disusun/dikaji	1,950,000,000	1,850,000,000	1,969,500,000	1,989,195,000	2,009,086,950	2,029,177,820
7	Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan	Dokumen perencanaan bidang tata ruang dan bangunan	3,950,000,000	2,450,000,000	3,989,500,000	4,029,395,000	4,069,688,950	4,110,385,840
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu	1,095,000,000	1,077,000,000	1,105,950,000	1,117,009,500	1,128,179,595	1,139,461,391
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi	1,050,000,000	1,010,000,000	1,060,500,000	1,071,105,000	1,081,816,050	1,092,634,211

10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Sarana Peningkatan Disiplin PNS dan Pegawai honor	175,000,000	100,000,000	176,750,000	178,517,500	180,302,675	182,105,702
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Buku Laporan Capaian Kinerja	95,000,000	105,000,000	95,950,000	96,909,500	97,878,595	98,857,381
12	Program Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH	Konsep Pidato/ Ekspose KDH/Wakil KDH	140,000,000	150,000,000	141,400,000	142,814,000	144,242,140	145,684,561
Jumlah			31,945,000,000	27,227,000,000	32,264,450,000	32,587,094,500	32,912,965,445	33,242,095,099
DINAS PERHUBUNGAN								
1	Penyusunan Norma, Standar di Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Norma, Standar di Bidang Perhubungan	789,112,320	797,003,443	797,003,443	804,973,478	813,023,212	821,153,445
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3,148,000,000	2,576,893,627	3,179,480,000	3,211,274,800	3,243,387,548	3,275,821,423
3	Terpenuhinya fasilitas lalu lintas	Terbangunnya fasilitas lalu lintas dan pendukungnya	48,597,316,960	26,728,524,328	49,083,290,130	49,574,123,031	50,069,864,261	50,570,562,904
4	Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas	Persentase pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana lalu lintas	15,045,000,000	9,027,000,000	15,195,450,000	15,347,404,500	15,500,878,545	15,655,887,330
5	Terpenuhinya persyaratan laik jalan dan teknis kendaraan wajib uji	Jumlah persyaratan laik jalan dan teknis kendaraan wajib uji	1,600,000,000	1,616,000,000	1,616,000,000	1,632,160,000	1,648,481,600	1,664,966,416
6	Meningkatnya SDM aparatur dan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur	2,300,000,000	2,323,000,000	2,323,000,000	2,346,230,000	2,369,692,300	2,393,389,223
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu	6,238,470,720	6,300,855,427	6,300,855,427	6,363,863,981	6,427,502,621	6,491,777,647
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi	5,844,000,000	4,675,200,000	5,902,440,000	5,961,464,400	6,021,079,044	6,081,289,834
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Sarana Peningkatan Disiplin PNS dan Pegawai honor	1,500,000,000	1,515,000,000	1,515,000,000	1,530,150,000	1,545,451,500	1,560,906,015
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kompetensi aparatur	300,000,000	303,000,000	303,000,000	306,030,000	309,090,300	312,181,203

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Buku Laporan Capaian Kinerja	145,000,000	146,450,000	146,450,000	147,914,500	149,393,645	150,887,581
	Jumlah		85,506,900,000	56,008,926,825	86,361,969,000	87,225,588,690	88,097,844,577	88,978,823,023
BADAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	790,200,000	798,102,000	798,102,000	806,083,020	814,143,850	822,285,289
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi	1,020,950,000	1,031,159,500	1,031,159,500	1,041,471,095	1,051,885,806	1,062,404,664
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	102,000,000	103,020,000	103,020,000	104,050,200	105,090,702	106,141,609
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kompetensi aparatur	210,000,000	212,100,000	212,100,000	214,221,000	216,363,210	218,526,842
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja badan lingkungan hidup	130,000,000	131,300,000	131,300,000	132,613,000	133,939,130	135,278,521
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	6,346,208,250	2,775,099,496	6,409,670,333	6,473,767,036	6,538,504,706	6,603,889,753
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1,355,000,000	1,368,550,000	1,368,550,000	1,382,235,500	1,396,057,855	1,410,018,434
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	377,350,000	381,123,500	381,123,500	384,934,735	388,784,082	392,671,923
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase pengendalian polusi dan lingkungan	125,000,000	126,250,000	126,250,000	127,512,500	128,787,625	130,075,501
	Jumlah		10,456,708,250	6,926,704,496	10,561,275,333	10,666,888,086	10,773,556,967	10,881,292,536
DINAS PERTAMANAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	18,640,590,440	18,826,996,344	18,826,996,344	19,015,266,308	19,205,418,971	19,397,473,161

2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi	17,960,258,650	18,139,861,237	18,139,861,237	18,321,259,849	18,504,472,447	18,689,517,172
3	Program Pengembangan Data/ Informasi	Jumlah aplikasi Pengembangan Data/ Informasi	0	0	1,790,000,000	1,807,900,000	1,825,979,000	1,844,238,790
4	Program Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian	0	1,500,000,000	2,100,000,000	2,121,000,000	2,142,210,000	2,163,632,100
5	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	399,764,000	403,761,640	403,761,640	407,799,256	411,877,249	415,996,021
6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur	400,000,000	404,000,000	404,000,000	408,040,000	412,120,400	416,241,604
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat akuntabilitas kinerja dinas pertamanan	305,000,000	308,050,000	308,050,000	311,130,500	314,241,805	317,384,223
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan pembangunan dengan baik	0	0	130,000,000	131,300,000	132,613,000	133,939,130
9	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pengelolaan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH)	23,200,350,000	11,600,175,000	13,920,210,000	18,046,716,631	27,070,074,947	27,340,775,696
10	Lampu Penerangan Jalan Umum	Persentase ketersediaan LPJU Kota Medan	39,857,199,910	21,093,158,759	21,767,915,409	28,298,290,032	39,024,270,173	39,414,512,875
11	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	3,090,000,000	3,399,000,000	3,120,900,000	3,152,109,000	4,097,741,700	4,138,719,117
Jumlah			103,853,163,000	75,675,002,980	80,911,694,630	92,020,811,576	113,141,019,692	114,272,429,889
DINAS KEBERSIHAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1,397,250,000	1,397,250,000	1,411,222,500	1,425,334,725	1,439,588,072	1,453,983,953
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana/prasarana yang dibeli/dipelihara	7,635,000,000	7,635,000,000	7,711,350,000	7,788,463,500	7,866,348,135	7,945,011,616
3	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	15,000,000	15,000,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (dlm 4 prog)	Persentase pengolahan, pengelolaan, pengurangan persampahan dan peningkatan fasilitas/perlengkapan persampahan	142,686,795,334	152,459,448,718	129,113,663,287	130,404,799,920	131,708,847,919	133,025,936,398

5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas PHL dan PNS	1,696,464,000	2,867,024,160	1,713,428,640	1,730,562,926	1,747,868,556	1,765,347,241
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Adanya Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan	-	300,000,000	310,000,000	313,100,000	316,231,000	319,393,310
7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tercapainya Perbaikan sistem administrasi kearsipan	150,000,000	-	151,500,000	153,015,000	-	-
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Buku laporan capaian kinerja	20,000,000	20,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
Jumlah			153,600,509,334	164,693,722,878	140,446,514,427	141,850,979,571	143,114,944,217	144,546,093,659
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu	5,144,501,710	5,195,946,727	5,195,946,727	5,247,906,194	5,300,385,256	5,353,389,109
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi	4,509,850,000	4,554,948,500	4,554,948,500	4,600,497,985	4,646,502,965	4,692,967,994
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah sarana peningkatan Disiplin PNS dan Pegawai honor	437,800,000	481,580,000	442,178,000	446,599,780	451,065,778	455,576,436
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/	402,162,500	406,184,125	406,184,125	410,245,966	414,348,426	418,491,910
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Buku Laporan Capaian Kinerja	95,000,000	95,950,000	95,950,000	96,909,500	97,878,595	98,857,381
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kepemilikan KTP, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya	2,630,060,000	1,372,453,558	2,656,360,600	2,682,924,206	2,709,753,448	2,736,850,983
7	Program Pengembangan Data / Informasi	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan dan catatan sipil	2,176,915,000	1,088,457,500	2,198,684,150	2,220,670,992	2,242,877,701	2,265,306,478
Jumlah			15,396,289,210	13,195,520,410	15,550,252,102	15,705,754,623	15,862,812,169	16,021,440,291
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB								

1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan	0	0	200,000,000	202,000,000	204,020,000	206,060,200
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan PUG dan PUHA	1,060,000,000	424,000,000	1,070,600,000	1,081,306,000	1,092,119,060	1,103,040,251
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kompetensi dan keterampilan perempuan	380,000,000	266,000,000	383,800,000	387,638,000	391,514,380	395,429,524
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	140,000,000	141,400,000	142,814,000	144,242,140
5	Program Keluarga Berencana	Prevalensi peserta KB aktif	2,474,165,200	514,546,943	2,498,906,852	2,523,895,921	2,549,134,880	2,574,626,229
6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	200,000,000	140,000,000	202,000,000	204,020,000	206,060,200	208,120,802
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah alat dan pelayanan kontrasepsi	1,292,500,000	537,500,000	1,305,425,000	1,318,479,250	1,331,664,043	1,344,980,683
8	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	Meningkatnya pelayanan informasi dan kualitas konseling KRR	260,000,000	234,431,860	262,600,000	265,226,000	267,878,260	270,557,043
9	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Meningkatkan penyampaian informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	50,000,000	45,083,050	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
10	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga	50,000,000	45,083,050	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201

11	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB	1,949,190,000	405,200,000	1,968,681,900	1,988,368,719	2,008,252,406	2,028,334,930
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu	625,675,200	625,675,200	631,931,952	638,251,272	644,633,784	651,080,122
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi	796,169,600	796,169,600	804,131,296	812,172,609	820,294,335	828,497,278
14	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/	80,000,000	-	80,800,000	81,608,000	82,424,080	83,248,321
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/	295,000,000	295,000,000	297,950,000	300,929,500	303,938,795	306,978,183
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Buku laporan capaian kinerja	30,000,000	30,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
17	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya persentase angka kemiskinan kota	-	2,570,000,000	2,595,700,000	2,621,657,000	2,647,873,570	2,674,352,306
Jumlah			9,542,700,000	6,928,689,703	12,573,827,000	12,699,565,270	12,826,560,923	12,954,826,532
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah penanganan dan bantuan bencana	3,375,000,000	1,230,188,240	3,408,750,000	3,442,837,500	3,477,265,875	3,512,038,534
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu	2,091,358,600	2,091,358,600	2,112,272,186	2,133,394,908	2,154,728,857	2,176,276,146
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi	1,078,095,000	1,078,095,000	1,088,875,950	1,099,764,710	1,110,762,357	1,121,869,980
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah sarana peningkatan disiplin PNS dan Pegawai honor	276,450,000	276,450,000	279,214,500	282,006,645	284,826,711	287,674,979

5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/	36,000,000	36,000,000	36,360,000	36,723,600	37,090,836	37,461,744
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Buku laporan capaian kinerja	53,750,000	53,750,000	54,287,500	54,830,375	55,378,679	55,932,466
7	Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan dan Hari-Hari Besar	78,880,000	78,880,000	79,668,800	80,465,488	81,270,143	82,082,844
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	16,000,000	16,000,000	16,160,000	16,321,600	16,484,816	16,649,664
Jumlah			7,005,533,600	4,860,721,840	7,075,588,936	7,146,344,825	7,217,808,274	7,289,986,356
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA								
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,390,000,000	1,912,000,000	2,413,900,000	2,438,039,000	2,462,419,390	2,487,043,584
2	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pembinaan dan penempatan tenaga kerja yang meningkat	2,490,000,000	1,245,000,000	2,514,900,000	2,540,049,000	2,565,449,490	2,591,103,985
3	Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal	Terjalin hubungan industrial yang ideal	3,460,000,000	1,384,000,000	3,494,600,000	3,529,546,000	3,564,841,460	3,600,489,875
4	Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Terjaminnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	1,746,945,000	1,142,584,010	1,764,414,450	1,782,058,595	1,799,879,180	1,817,877,972
5	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya kualitas data dan informasi	350,000,000	374,500,000	353,500,000	357,035,000	360,605,350	364,211,404
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Menurunnya persentase angka kemiskinan kota	2,058,400,000	1,440,880,000	2,078,984,000	2,099,773,840	2,120,771,578	2,141,979,294
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang meningkat	1,004,160,000	1,074,451,200	1,014,201,600	1,024,343,616	1,034,587,052	1,044,932,923

8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang meningkat	334,720,000	358,150,400	338,067,200	341,447,872	344,862,351	348,310,974
9	Program Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH	Cakupan Fasilitas Tenaga pendamping PKH yang meningkat	871,200,000	932,184,000	879,912,000	888,711,120	897,598,231	906,574,214
10	Program Fasilitasi Tenaga Kerja PSKS	Cakupan Fasilitas Tenaga Kerja PSKS yang meningkat	629,200,000	673,244,000	635,492,000	641,846,920	648,265,389	654,748,043
11	Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan dan Kepedulian /Kesetiakawanan Sosial	Terjaganya pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepedulian/kesetiakawanan sosial	286,490,000	306,544,300	289,354,900	292,248,449	295,170,933	298,122,643
12	Program Undian dan Pengumpulan Uang	Tercapainya nilai undian dan pengumpulan uang yang diharapkan	58,605,000	62,707,350	59,191,050	59,782,961	60,380,790	60,984,598
Jumlah			15,679,720,000	10,906,245,260	15,836,517,200	15,994,882,372	16,154,831,196	16,316,379,508
DINAS KOPERASI DAN UKM								
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	- Jumlah usaha mikro dan kecil; Jumlah UMKM binaan	2,914,800,000	1,924,386,900	2,943,948,000	2,973,387,480	3,003,121,355	3,033,152,568
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	- Jumlah usaha mikro dan kecil; Jumlah UMKM binaan	4,355,000,000	2,177,500,000	4,398,550,000	4,442,535,500	4,486,960,855	4,531,830,464
3	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif	- Jumlah usaha mikro dan kecil; Jumlah UMKM binaan	900,000,000	909,000,000	909,000,000	918,090,000	927,270,900	936,543,609
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Persentase Koperasi Aktif; - Pertumbuhan Koperasi di Kota Medan	2,965,000,000	2,075,500,000	2,994,650,000	3,024,596,500	3,054,842,465	3,085,390,890
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	940,200,000	949,602,000	949,602,000	959,098,020	968,689,000	978,375,890
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	600,000,000	708,000,000	606,000,000	612,060,000	618,180,600	624,362,406
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	125,000,000	147,500,000	126,250,000	127,512,500	128,787,625	130,075,501

8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/	170,000,000	200,600,000	171,700,000	173,417,000	175,151,170	176,902,682
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	30,000,000	35,400,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
10	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya persentase angka kemiskinan kota	-	2,005,000,000	2,025,050,000	2,045,300,500	2,065,753,505	2,086,411,040
Jumlah			13,000,000,000	11,132,488,900	15,155,050,000	15,306,600,500	15,459,666,505	15,614,263,170
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggara Kegiatan Administrasi Kantor	1,392,850,000	974,995,000	1,406,778,500	1,420,846,285	1,435,054,748	1,449,405,295
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang baik	879,350,000	615,545,000	888,143,500	897,024,935	905,995,184	915,055,136
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Pegawai	218,250,000	152,775,000	220,432,500	222,636,825	224,863,193	227,111,825
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Dokumen Laporan Akuntabilitas	167,450,000	117,215,000	169,124,500	170,815,745	172,523,902	174,249,141
5	Peningkatan Pelayanan Perijinan	Menurunnya lama rata-rata hari pengurusan ijin	566,200,000	130,351,750	571,862,000	577,580,620	583,356,426	589,189,990
Jumlah			3,224,100,000	1,990,881,750	3,256,341,000	3,288,904,410	3,321,793,454	3,355,011,389
BADAN PENANAMAN MODAL								
1	Program: pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	610,000,000	610,000,000	616,100,000	622,261,000	628,483,610	634,768,446
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	501,500,000	501,500,000	506,515,000	511,580,150	516,695,952	521,862,911
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	137,000,000	137,000,000	138,370,000	139,753,700	141,151,237	142,562,749
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	38,500,000	38,500,000	38,885,000	39,273,850	39,666,589	40,063,254
5	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	1,565,450,000	939,270,000	1,581,104,500	1,596,915,545	1,612,884,700	1,629,013,547

6	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	1,310,000,000	900,250,250	1,323,100,000	1,336,331,000	1,349,694,310	1,363,191,253
7	Program kerja sama Informasi dengan mass media	Meningkatnya pengetahuan stakeholder akan tugas dan fungsi BPM dan pentingnya investasi	300,000,000	303,000,000	303,000,000	306,030,000	309,090,300	312,181,203
Jumlah			4,462,450,000	3,429,520,250	4,507,074,500	4,552,145,245	4,597,666,697	4,643,643,364
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,069,245,000	4,069,245,000	4,109,937,450	4,151,036,825	4,192,547,193	4,234,472,665
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang baik	770,900,000	770,900,000	778,609,000	786,395,090	794,259,041	802,201,631
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	425,000,000	425,000,000	429,250,000	433,542,500	437,877,925	442,256,704
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	113,500,000	113,500,000	114,635,000	115,781,350	116,939,164	118,108,555
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Pegawai	220,000,000	220,000,000	222,200,000	224,422,000	226,666,220	228,932,882
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya	2,535,550,000	2,560,905,500	2,560,905,500	2,586,514,555	2,612,379,701	2,638,503,498
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	7,543,180,000	4,926,009,862	7,618,611,800	7,694,797,918	7,771,745,897	7,849,463,356
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	7,785,045,000	6,228,036,000	7,862,895,450	7,941,524,405	8,020,939,649	8,101,149,045
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,754,750,000	1,772,297,500	1,772,297,500	1,790,020,475	1,807,920,680	1,825,999,887
10	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kunjungan wisatawan	3,200,000,000	2,560,000,000	3,232,000,000	3,264,320,000	3,296,963,200	3,329,932,832
Jumlah			28,417,170,000	23,645,893,862	28,701,341,700	28,988,355,117	29,278,238,668	29,571,021,055
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA								

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu	938,872,800	938,872,800	948,261,528	957,744,143	967,321,585	976,994,801
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi	395,000,000	395,000,000	398,950,000	402,939,500	406,968,895	411,038,584
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah sarana peningkatan disiplin aparatur	146,000,000	146,000,000	147,460,000	148,934,600	150,423,946	151,928,185
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Buku laporan capaian kinerja	50,000,000	50,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
5	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	150,000,000	165,000,000	151,500,000	153,015,000	154,545,150	156,090,602
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	2,330,000,000	2,796,000,000	2,353,300,000	2,376,833,000	2,400,601,330	2,424,607,343
7	Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat peningkatan kemampuan dan kecakapan hidup	800,000,000	880,000,000	808,000,000	816,080,000	824,240,800	832,483,208
8	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatnya pengelolaan dan manajemen keolahragaan	160,000,000	176,000,000	161,600,000	163,216,000	164,848,160	166,496,642
9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga di berbagai cabang	8,555,000,000	4,231,246,336	8,640,550,000	8,726,955,500	8,814,225,055	8,902,367,306
10	Program Peningkatan Sarana & Prasarana OR	Jumlah lapangan dan sarana prasarana olahraga	1,502,068,200	1,351,861,380	1,517,088,882	1,532,259,771	1,547,582,369	1,563,058,192
11	Program Pembinaan Generasi Muda	Meningkatnya Nasionalisme Pemuda	1,500,000,000	1,350,000,000	1,515,000,000	1,530,150,000	1,545,451,500	1,560,906,015
12	Program Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya kualitas dan dan informasi olahraga	0	400,000,000	0	0	0	0
Jumlah			16,526,941,000	12,879,980,516	16,692,210,410	16,859,132,514	17,027,723,839	17,198,001,078
BADAN KESBANG POL LINMAS								

1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah data wilayah rawan konflik, peningkatan kemampuan tentang ketahanan nasional di daerah, peningkatan kemampuan ke intelegenan, koordinasi penanganan konflik serta data pemantauan orang asing, TKA dan Ormas Asing, yang memiliki tujuan dan sasaran yang dapat terukur	2,549,200,000	1,274,600,000	2,574,692,000	2,600,438,920	2,626,443,309	2,652,707,742
2	Program Pemeliharaan Kantrantiipnas dan Pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya koordinasi antar unsur intelijen di daerah dalam mendeteksi dini guna menciptakan kondusifitas daerah	761,340,000	456,804,000	768,953,400	776,642,934	784,409,363	792,253,457
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kemampuan cara pandang tentang wawasan kebangsaan	3,228,400,000	1,119,859,128	3,260,684,000	3,293,290,840	3,326,223,748	3,359,485,986
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan melalui karya tulis ilmiah	225,000,000	180,373,725	227,250,000	229,522,500	231,817,725	234,135,902
5	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahayanya penyakit masyarakat	880,000,000	528,000,000	888,800,000	897,688,000	906,664,880	915,731,529
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pemahaman tentang politik di daerah	655,000,000	327,500,000	661,550,000	668,165,500	674,847,155	681,595,627
7	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana	220,000,000	176,365,420	222,200,000	224,422,000	226,666,220	228,932,882
Jumlah			8,518,940,000	4,063,502,273	8,604,129,400	8,690,170,694	8,777,072,401	8,864,843,125
SAT POL PP								
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengamanan pejabat, pengamanan kantor/rumah dinas/asset daerah	3,548,100,000	6,386,580,000	3,583,581,000	3,619,416,810	3,655,610,978	3,692,167,088

2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	16,497,212,000	14,871,910,800	16,662,184,120	16,828,805,961	16,997,094,021	17,167,064,961
3	Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	4,274,000,000	7,151,153,060	4,316,740,000	4,359,907,400	4,403,506,474	4,447,541,539
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu selama 1 tahun	608,200,000	669,020,000	614,282,000	620,424,820	626,629,068	632,895,359
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan/dipelihara/diperbaiki/direhabilitasi selama 1 tahun	1,670,000,000	1,837,000,000	1,686,700,000	1,703,567,000	1,720,602,670	1,737,808,697
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Sarana Peningkatan Disiplin PNS dan Pegawai honor	623,380,000	685,718,000	629,613,800	635,909,938	642,269,037	648,691,728
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sarana Peningkatan kapasitas SDA	240,316,000	264,347,600	242,719,160	245,146,352	247,597,815	250,073,793
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Sarana Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	90,000,000	153,000,000	90,900,000	91,809,000	92,727,090	93,654,361
9	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	170,000,000	289,000,000	171,700,000	173,417,000	175,151,170	176,902,682
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Buku Laporan Capaian Kinerja	50,000,000	85,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
Jumlah			27,771,208,000	32,392,729,460	28,048,920,080	28,329,409,281	28,612,703,374	28,898,830,407
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Terselenggaranya fungsi-fungsi penatausahaan kantor secara lebih efektif.	243,688,560	246,125,446	246,125,446	248,586,700	251,072,567	253,583,293
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatnya rasio antara sarana dan pra sarana kantor dengan jumlah pegawai dan beban kerja.	443,350,000	447,783,500	447,783,500	452,261,335	456,783,948	461,351,788

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin pegawai dalam bekerja.	48,850,000	49,338,500	49,338,500	49,831,885	50,330,204	50,833,506
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.	821,225,000	829,437,250	829,437,250	837,731,623	846,108,939	854,570,028
5	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat.	Meningkatnya Kehidupan Sosial Masyarakat.	1,045,116,000	495,565,627	1,055,567,160	1,066,122,832	1,076,784,060	1,087,551,901
6	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	682,585,440	546,068,352	689,411,294	696,305,407	703,268,461	710,301,146
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Terencananya pembangunan Daerah	20,000,000	22,000,000	0	0	100,000,000	110,000,000
8	Program Kerjasama informasi dengan Mass Media	Tercapainya kerjasama informasi dengan Mass Media.	100,000,000	80,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100	104,060,401
9	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertatanya Daerah Otonomi Baru	600,000,000	480,000,000	606,000,000	612,060,000	618,180,600	624,362,406
10	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tertatanya Peraturan Perundang-undangan	550,000,000	495,000,000	555,500,000	561,055,000	566,665,550	572,332,206
11	Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kep. Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kep. Daerah	-	200,000,000	200,000,000	202,000,000	204,020,000	206,060,200
12	Program Hubungan Kerkasama antar Daerah	Terlaksananya Hubungan Kerjasama antar Daerah	-	250,000,000	250,000,000	252,500,000	255,025,000	257,575,250
Jumlah			4,554,815,000	4,141,318,675	5,030,163,150	5,080,464,782	5,231,269,429	5,292,582,124
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Surat-Menyurat, barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan gedung kantor,	35,694,048,720	36,050,989,207	36,050,989,207	36,411,499,099	36,775,614,090	37,143,370,231
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	10,101,506,850	10,202,521,919	10,202,521,919	10,304,547,138	10,407,592,609	10,511,668,535
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin pegawai dalam bekerja.	1,109,605,000	1,120,701,050	1,120,701,050	1,131,908,061	1,143,227,141	1,154,659,413
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.	1,362,000,000	1,375,620,000	1,375,620,000	1,389,376,200	1,403,269,962	1,417,302,662

5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	89,600,000	90,496,000	90,496,000	91,400,960	92,314,970	93,238,119
6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	35,706,211,500	13,012,432,106	36,063,273,615	36,423,906,351	36,788,145,415	37,156,026,869
7	Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	Terlaksananya kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	905,300,000	995,830,000	914,353,000	923,496,530	932,731,495	942,058,810
8	program kerjasama dengan mass media	Meningkatnya kerjasama dengan mass media	3,410,500,000	2,728,400,000	3,444,605,000	3,479,051,050	3,513,841,561	3,548,979,976
Jumlah			88,378,772,070	65,576,990,282	89,262,559,791	90,155,185,389	91,056,737,242	91,967,304,615
SEKRETARIAT DAERAH								
BAGIAN UMUM								
1	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	17,736,000,000	17,913,360,000	17,913,360,000	18,092,493,600	18,273,418,536	18,456,152,721
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	304,353,686,000	231,054,317,830	307,397,222,860	310,471,195,089	313,575,907,039	316,711,666,110
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	13,845,000,000	13,983,450,000	13,983,450,000	14,123,284,500	14,264,517,345	14,407,162,518
4	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dengan adanya fasilitas yang diberikan berupa pakaian dinas beserta perlengkapannya	1,265,000,000	1,277,650,000	1,277,650,000	1,290,426,500	1,303,330,765	1,316,364,073
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	727,025,000	734,295,250	734,295,250	741,638,203	749,054,585	756,545,130
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,500,000	32,825,000	32,825,000	33,153,250	33,484,783	33,819,630
7	Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas media informasi Pemerintah Kota Medan yang dapat di akses oleh masyarakat	449,500,000	453,995,000	453,995,000	458,534,950	463,120,300	467,751,502

8	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD	457,500,000	462,075,000	462,075,000	466,695,750	471,362,708	476,076,335
9	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan efektifitas kerjasama antar daerah terutama di bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan bidang ekonomi	5,248,000,000	3,148,800,000	5,300,480,000	5,353,484,800	5,407,019,648	5,461,089,844
10	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah	4,891,900,000	2,445,950,000	4,940,819,000	4,990,227,190	5,040,129,462	5,090,530,757
Jumlah			349,006,111,000	271,506,718,080	352,496,172,110	356,021,133,831	359,581,345,169	363,177,158,621
BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembayaran honor tim pengadaan barang jasa dan pembantu pengelola barang milik daerah	7,371,750,000	7,445,467,500	7,445,467,500	7,519,922,175	7,595,121,397	7,671,072,611
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang/ Jasa pendukung sarana dan prasarana	29,651,560,000	20,990,439,450	29,948,075,600	30,247,556,356	30,550,031,920	30,855,532,239
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin Waktu PNS	2,548,000,000	2,573,480,000	2,573,480,000	2,599,214,800	2,625,206,948	2,651,459,017
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi peraturan dan bintek pekerjaan yang relevan	796,130,000	636,904,000	804,091,300	812,132,213	820,253,535	828,456,070
5	Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Perencanaan Sampai Dengan Evaluasi Pekerjaan	476,980,000	481,749,800	481,749,800	486,567,298	491,432,971	496,347,301
6	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Barang Inventaris dan Barang Habis Pakai Pemerintah Kota Medan	4,149,420,000	4,190,914,200	4,190,914,200	4,232,823,342	4,275,151,575	4,317,903,091
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tanah dan Aset Daerah Yang Bermasalah	1,168,410,000	1,180,094,100	1,180,094,100	1,191,895,041	1,203,813,991	1,215,852,131
8	Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Paket-Paket Pekerjaan Yang Dilelangkan Secara Elektronik	4,662,400,000	4,709,024,000	4,709,024,000	4,756,114,240	4,803,675,382	4,851,712,136

	Jumlah		50,824,650,000	42,208,073,050	51,332,896,500	51,846,225,465	52,364,687,720	52,888,334,597
BAGIAN ADM PEREKONOMIAN								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	76,900,000	76,900,000	77,669,000	78,445,690	79,230,147	80,022,448
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran	56,000,000	56,000,000	56,560,000	57,125,600	57,696,856	58,273,825
3	Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan	Terlaksananya Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan	520,150,000	166,184,329	525,351,500	530,605,015	535,911,065	541,270,176
4	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	95,500,000	47,750,000	96,455,000	97,419,550	98,393,746	99,377,683
5	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya realisasi PMDN dan PMA	105,000,000	52,500,000	106,050,000	107,110,500	108,181,605	109,263,421
6	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	94,550,000	47,275,000	95,495,500	96,450,455	97,414,960	98,389,109
7	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	325,000,000	325,000,000	328,250,000	331,532,500	334,847,825	338,196,303
8	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,450,000	6,450,000	6,514,500	6,579,645	6,645,441	6,711,896
9	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	350,000,000	0	0	0	0	0
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	75,000,000	75,000,000	75,750,000	76,507,500	77,272,575
	Jumlah		1,629,550,000	853,059,329	1,367,345,500	1,381,018,955	1,394,829,145	1,408,777,436
BAGIAN AGAMA DAN PENDIDIKAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	160,000,000	161,600,000	161,600,000	163,216,000	164,848,160	166,496,642
2	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Terlaksananya kegiatan keagamaan dan perayaan hari-hari besar	60,967,811,000	39,841,877,150	61,577,489,110	62,193,264,001	62,815,196,641	65,443,348,608
	Jumlah		61,127,811,000	40,003,477,150	61,739,089,110	62,356,480,001	62,980,044,801	65,609,845,250
BAGIAN ADM KESRA								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	46,000,000	50,600,000	46,460,000	46,924,600	47,393,846	47,867,784

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	26,400,000	24,240,000	24,482,400	24,727,224	24,974,496
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	9,450,000	10,395,000	9,544,500	9,639,945	9,736,344	9,833,708
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	Meningkatkan kelancaran sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	22,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga dan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Perlindungan bagi tenaga kerja khususnya di lingkungan pemerintah Kota Medan	240,000,000	0	0	0	0	0
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	meningkatnya keterampilan para penyandang cacat sehingga meningkat pula taraf kehidupannya	169,190,000	186,109,000	170,881,900	172,590,719	174,316,626	176,059,792
7	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Meningkatnya Upaya Kesejahteraan Sosial bagi Panti Asuhan dan Panti Jompo	80,300,000	88,330,000	81,103,000	81,914,030	82,733,170	83,560,502
8	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Meningkatnya Pengetahuan Berbagai Lapisn Masyarakat tentang narkoba, HIV dan AIDS Termasukcara Pencegahan dan penyebarannya	2,076,210,000	1,212,033,375	2,096,972,100	2,117,941,821	2,139,121,239	2,160,512,452
9	Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Kota Medan	169,350,000	186,285,000	171,043,500	172,753,935	174,481,474	176,226,289
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Kepedulian dan pelayanan Kesehatan kepada Para Lanjut Usia	745,760,000	596,608,000	753,217,600	760,749,776	768,357,274	776,040,846
11	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Perempuan	Terlaksannya Penyuluhan Trafficking kepada masyarakat di kecamatan	112,065,000	89,652,000	113,185,650	114,317,507	115,460,682	116,615,288
Jumlah			3,692,325,000	2,468,412,375	3,486,848,250	3,521,716,733	3,556,933,900	3,592,503,239
BAGIAN ADM PEMERINTAHAN UMUM								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	490,000,000	490,000,000	494,900,000	499,849,000	504,847,490	509,895,965

2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,350,000,000	3,480,000,000	4,393,500,000	4,437,435,000	4,481,809,350	4,526,627,444
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	10,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,550,000,000	1,007,500,000	1,565,500,000	1,581,155,000	1,596,966,550	1,612,936,216
5	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	7,325,000,000	3,077,515,843	7,398,250,000	7,472,232,500	7,546,954,825	7,622,424,373
Jumlah			13,725,000,000	8,065,015,843	13,862,250,000	14,000,872,500	14,140,881,225	14,282,290,037
BAGIAN ADM PEMBANGUNAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	323,740,330	326,977,733	326,977,733	330,247,511	333,549,986	336,885,486
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	280,962,370	295,010,489	283,771,994	286,609,714	289,475,811	292,370,569
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	53,295,000	55,959,750	53,827,950	54,366,230	54,909,892	55,458,991
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	363,850,000	291,080,000	367,488,500	371,163,385	374,875,019	378,623,769
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	15,750,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,229,849,000	712,574,599	1,242,147,490	1,254,568,965	1,267,114,655	1,279,785,801
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,141,047,300	570,523,650	1,152,457,773	1,163,982,351	1,175,622,174	1,187,378,396
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan dan Perundang-Undangan	592,256,000	414,579,200	598,178,560	604,160,346	610,201,949	616,303,969

Jumlah		4,000,000,000	2,682,455,421	4,040,000,000	4,080,400,000	4,121,204,000	4,162,416,040	
BAGIAN ADM KEMASYARAKATAN								
1	Program pelayanan adm. Perkantoran	Terlaksananya pelayanan adm. Perkantoran	119,000,000	130,900,000	120,190,000	121,391,900	122,605,819	123,831,877
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	20,000,000	22,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
3	Program peningkatan Disiplin dan Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	26,000,000	28,600,000	26,260,000	26,522,600	26,787,826	27,055,704
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	370,000,000	222,000,000	373,700,000	377,437,000	381,211,370	385,023,484
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	280,000,000	252,000,000	282,800,000	285,628,000	288,484,280	291,369,123
6	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	370,000,000	481,000,000	373,700,000	377,437,000	381,211,370	385,023,484
7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	980,000,000	784,000,000	989,800,000	999,698,000	1,009,694,980	1,019,791,930
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,225,000,000	735,000,000	1,237,250,000	1,249,622,500	1,262,118,725	1,274,739,912
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	740,000,000	592,000,000	747,400,000	754,874,000	762,422,740	770,046,967
10	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga dan Kepemudaan	Terlaksananya Kebijakan dan Manajemen Olah Raga dan Kepemudaan	0	170,000,000	187,000,000	188,870,000	190,758,700	192,666,287
11	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	0	150,000,000	814,000,000	822,140,000	830,361,400	838,665,014
12	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	370,000,000	421,550,000	373,700,000	377,437,000	381,211,370	385,023,484

Jumlah		4,500,000,000	3,989,050,000	5,546,000,000	5,601,460,000	5,657,474,600	5,714,049,346	
BAGIAN HUMASY								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	1,932,000,000	1,932,000,000	1,951,320,000	1,970,833,200	1,990,541,532	2,010,446,947
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Peningkatan jumlah Sarana Dan Prasarana Aparatur	30,000,000	33,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	0	95,000,000	104,500,000	105,545,000	106,600,450	107,666,455
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000	100,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100	104,060,401
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	15,000,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
6	Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media	Optimalisasi peningkatan pelaksanaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media	3,873,000,000	2,596,680,000	3,911,730,000	3,950,847,300	3,990,355,773	4,030,259,331
7	Program Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	Optimalisasi peningkatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	2,200,000,000	1,760,000,000	2,222,000,000	2,244,220,000	2,266,662,200	2,289,328,822
8	Program Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan	Optimalisasi peningkatan Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan	100,000,000	100,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100	104,060,401
9	Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga	Optimalisasi peningkatan Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga	950,000,000	570,000,000	959,500,000	969,095,000	978,785,950	988,573,810
10	Program Pengembangan Analisa Media dan Informasi	Optimalisasi peningkatan Pengembangan Analisa Media dan Informasi	50,000,000	50,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
11	Program Konsultasi Publik	Optimalisasi peningkatan Konsultasi Publik	50,000,000	50,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
Jumlah			9,300,000,000	7,301,680,000	9,497,500,000	9,592,475,000	9,688,399,750	9,785,283,748
BAGIAN ADM SUMBER DAYA ALAM								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks persepsi kenyamanan kerja	85,000,000	85,000,000	85,850,000	86,708,500	87,575,585	88,451,341
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	indeks persepsi kemudahan mendapatkan fasilitas kerja	10,000,000	10,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jml personil yg memiliki sertifikat keahlian	0	52,196,000	35,266,000	35,618,660	35,974,847	36,334,595
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen SAKIP yang tepat waktu dan akuntabel	10,000,000	10,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	persentase RTH yang terkelola	48,500,000	48,500,000	48,985,000	49,474,850	49,969,599	50,469,294
6	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	jml keg yang menghasilkan solusi/resolusi	154,000,000	154,000,000	155,540,000	157,095,400	158,666,354	160,253,018
7	program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	jml keg kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup yang menghasilkan solusi	48,500,000	48,500,000	48,985,000	49,474,850	49,969,599	50,469,294
8	program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	jml perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang baik	50,000,000	50,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
9	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	jml keg perencanaan yang menghasilkan solusi/resolusi	-	122,685,021	24,736,354	24,983,718	25,233,555	25,485,890
10	program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	jml keg pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menghasilkan solusi	128,000,000	132,546,642	129,280,000	130,572,800	131,878,528	133,197,313
Jumlah			534,000,000	713,427,663	599,342,354	605,335,778	611,389,135	617,503,027
BAGIAN HUKUM								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	199,000,000	199,000,000	200,990,000	202,999,900	205,029,899	207,080,198
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65,000,000	65,000,000	65,650,000	66,306,500	66,969,565	67,639,261
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	20,000,000	20,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Bagian Hukum	20,000,000	20,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080

5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Penataan Produk-Produk Hukum Pemerintah Kota Medan	1,142,210,000	1,000,377,650	1,153,632,100	1,165,168,421	1,176,820,105	1,188,588,306
6	Program Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	1,500,000,000	750,000,000	1,515,000,000	1,530,150,000	1,545,451,500	1,560,906,015
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	192,000,000	0	0	0	0	0
Jumlah			3,138,210,000	2,054,377,650	2,975,672,100	3,005,428,821	3,035,483,109	3,065,837,940
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA								
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	167,750,000	167,750,000	169,427,500	171,121,775	172,832,993	174,561,323
2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Lainnya yang memenuhi azas Hukum	135,100,000	0	0	0	0	0
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	219,000,000	350,900,000	354,409,000	357,953,090	361,532,621
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	370,500,000	296,400,000	374,205,000	377,947,050	381,726,521	385,543,786
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan aparatur	80,000,000	80,000,000	80,800,000	81,608,000	82,424,080	83,248,321
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120,000,000	120,000,000	121,200,000	122,412,000	123,636,120	124,872,481
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250,000,000	250,000,000	252,500,000	255,025,000	257,575,250	260,151,003
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan aparatur	471,610,000	327,862,875	476,326,100	481,089,361	485,900,255	490,759,257
9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Lainnya yang memenuhi azas Hukum	150,000,000	120,000,000	151,500,000	153,015,000	154,545,150	156,090,602
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan Kantor	85,000,000	85,000,000	85,850,000	86,708,500	87,575,585	88,451,341

11	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	246,400,000	246,400,000	248,864,000	251,352,640	253,866,166	256,404,828
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165,700,000	132,560,000	167,357,000	169,030,570	170,720,876	172,428,084
13	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Lainnya yang memenuhi azas Hukum	482,850,000	282,850,000	487,678,500	492,555,285	497,480,838	502,455,646
14	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	359,650,000	287,720,000	0	0	0	0
15	Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tersedianya Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	0	250,000,000	0	0	0	0
Jumlah			3,084,560,000	2,865,542,875	2,966,608,100	2,996,274,181	3,026,236,923	3,056,499,292
BAGIAN HUB KERJASAMA								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	521,360,000	521,360,000	526,573,600	531,839,336	537,157,729	542,529,307
2	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	600,000,000	200,000,000	606,000,000	612,060,000	618,180,600	624,362,406
3	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1,050,000,000	450,000,000	1,060,500,000	1,071,105,000	1,081,816,050	1,092,634,211
4	Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City	Meningkatnya nya Kerjasama Hubungan Luar Negeri dan Sister City	1,661,056,000	621,935,400	1,677,666,560	1,694,443,226	1,711,387,658	1,728,501,534
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Alat/ Perlengkapan Aparatur	60,000,000	60,000,000	60,600,000	61,206,000	61,818,060	62,436,241
6	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	15,000,000	15,000,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61,500,000	61,500,000	62,115,000	62,736,150	63,363,512	63,997,147
Jumlah			3,968,916,000	1,929,795,400	4,008,605,160	4,048,691,212	4,089,178,124	4,130,069,905
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan publik	1,070,000,000	1,075,350,000	1,080,700,000	1,091,507,000	1,102,422,070	1,113,446,291

2	Program peningkatan dalam sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya efesiensi dan efektivitas operasional kantor	580,250,000	583,151,250	586,052,500	591,913,025	597,832,155	603,810,477
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam hal penggunaan pakaian dinas	297,000,000	298,485,000	299,970,000	302,969,700	305,999,397	309,059,391
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	1,110,620,000	1,116,173,100	1,121,726,200	1,132,943,462	1,144,272,897	1,155,715,626
5	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan	85,000,000	85,425,000	85,850,000	86,708,500	87,575,585	88,451,341
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	1,125,000,000	1,130,625,000	1,136,250,000	1,147,612,500	1,159,088,625	1,170,679,511
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	7,085,680,000	3,102,874,687	7,156,536,800	7,228,102,168	7,300,383,190	7,373,387,022
8	Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	Terlaksananya kegiatan keagamaan dan perayaan hari-hari besar	70,000,000	70,350,000	70,700,000	71,407,000	72,121,070	72,842,281
Jumlah			11,423,550,000	7,462,434,037	11,537,785,500	11,653,163,355	11,769,694,989	11,887,391,938
SEKRETARIAT KORPRI								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan publik	341,549,120	344,964,611	344,964,611	348,414,257	351,898,400	355,417,384
2	Program peningkatan dalam sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya efesiensi dan efektivitas operasional kantor	130,000,000	131,300,000	131,300,000	132,613,000	133,939,130	135,278,521
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam hal penggunaan pakaian dinas	65,000,000	65,650,000	65,650,000	66,306,500	66,969,565	67,639,261
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	300,000,000	303,000,000	303,000,000	306,030,000	309,090,300	312,181,203
5	Program pelayanan penyebaran informasi dan publik	Meningkatnya pelayanan penyebaran informasi dan publik	180,000,000	216,000,000	181,800,000	183,618,000	185,454,180	187,308,722
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	50,000,000	60,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
7	Program perlindungan hukum dan penegakan HAM	Terlaksananya perlindungan hukum dan penegakan HAM	0	350,000,000	0	0	0	0

8	Program pengembangan data dan informasi	Terlaksananya pengembangan data dan informasi	150,000,000	500,000,000	0	0	0	0
9	Program pembinaan Olahraga seni dan budaya anggota KORPRI dan keluarga	Terlaksananya pembinaan Olahraga seni dan budaya anggota KORPRI dan keluarga	600,000,000	900,000,000	606,000,000	612,060,000	618,180,600	624,362,406
10	Program pembinaan mental dan rohani anggota KORPRI dan keluarga	Terlaksananya pembinaan mental dan rohani anggota KORPRI dan keluarga	300,000,000	600,000,000	303,000,000	306,030,000	309,090,300	312,181,203
11	Program pembinaan pengembangan aparatur	Terlaksananya pembinaan pengembangan aparatur	500,000,000	900,000,000	505,000,000	510,050,000	515,150,500	520,302,005
12	Program pembinaan usaha keterampilan dan bantuan sosial anggota Korpri dan keluarga	Terlaksananya pembinaan usaha keterampilan dan bantuan sosial anggota Korpri dan keluarga	383,400,000	870,333,702	387,234,000	391,106,340	395,017,403	398,967,577
Jumlah			2,999,949,120	5,241,248,313	2,878,448,611	2,907,233,097	2,936,305,428	2,965,668,483
KANTOR SANDI								
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	204,640,000	306,960,000	206,686,400	208,753,264	210,840,797	212,949,205
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur	808,500,000	2,425,500,000	816,585,000	839,750,850	863,148,358	871,779,842
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	48,200,000	144,600,000	48,682,000	49,168,820	49,660,508	50,157,113
4	Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bertambahnya kapasitas sumber daya aparatur	250,000,000	750,000,000	252,500,000	255,025,000	257,575,250	275,151,003
5	Program pengembangan data dan informasi	Terlaksananya pengembangan data dan informasi	1,500,000,000	3,598,424,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	60,000,000	240,000,000	60,600,000	61,206,000	61,818,060	62,436,241
Jumlah			2,871,340,000	7,465,484,000	2,885,053,400	2,913,903,934	2,943,042,973	2,972,473,403
DINAS PENDAPATAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	5,411,708,160	5,465,825,242	5,465,825,242	5,520,483,494	5,575,688,329	5,631,445,212

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur	4,272,500,000	4,315,225,000	4,315,225,000	4,358,377,250	4,401,961,023	4,445,980,633
3	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Pakaian Dinas	918,800,000	927,988,000	927,988,000	937,267,880	946,640,559	956,106,964
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja yang valid dan terpercaya	121,000,000	122,815,000	122,210,000	123,432,100	124,666,421	125,913,085
5	Program peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	36,030,769,839	23,399,883,042	36,391,077,537	36,754,988,313	37,122,538,196	37,493,763,578
6	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Tersedianya fasilitas kegiatan olahraga	85,000,000	97,750,000	85,850,000	86,708,500	87,575,585	88,451,341
7	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terciptanya keindahan halaman kantor	90,000,000	91,350,000	90,900,000	91,809,000	92,727,090	93,654,361
8	Program penataan peraturan per-UU	Tersedianya peraturan Daerah yang mendorong peningkatan realisasi pajak daerah	150,000,000	152,250,000	151,500,000	153,015,000	154,545,150	156,090,602
9	Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	Terlaksananya kegiatan keagamaan dan perayaan hari-hari besar	100,000,000	115,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100	104,060,401
Jumlah			47,179,777,999	34,688,086,284	47,651,575,779	48,128,091,537	48,609,372,452	49,095,466,177
INSPEKTORAT								
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	570,440,640	598,962,672	576,145,046	581,906,497	587,725,562	593,602,817
2	Peningkatan sarana dan prasana aparatur	Meningkatnya rasio sarana / prasarana aparatur dengan jumlah pegawai dan beban kerja	552,863,200	580,506,360	558,391,832	563,975,750	569,615,508	575,311,663
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	219,650,000	230,632,500	221,846,500	224,064,965	226,305,615	228,568,671
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	171,000,000	180,405,000	172,710,000	174,437,100	176,181,471	177,943,286

5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	12,423,950,000	6,791,272,600	12,548,189,500	12,673,671,395	12,800,408,109	12,928,412,190
6	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	3,484,925,440	3,694,020,966	3,519,774,694	3,554,972,441	3,590,522,166	3,626,427,387
Jumlah			17,422,829,280	12,075,800,098	17,597,057,573	17,773,028,149	17,950,758,430	18,130,266,014
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Fungsi-fungsi penatausahaan kantor yang lebih efektif	695,000,000	639,400,000	701,950,000	708,969,500	716,059,195	723,219,787
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur	361,800,000	332,856,000	365,418,000	369,072,180	372,762,902	376,490,531
3	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Terlaksananya penyimpanan dokumen / arsip Kepegawaian	695,000,000	639,400,000	701,950,000	708,969,500	716,059,195	723,219,787
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin PNS BKD Kota Medan	170,000,000	156,400,000	171,700,000	173,417,000	175,151,170	176,902,682
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya implementasi pengelolaan keuangan daerah	85,000,000	78,200,000	85,850,000	86,708,500	87,575,585	88,451,341
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya standar Diklat SDM Aparatur	2,209,650,000	2,032,878,000	2,231,746,500	2,254,063,965	2,276,604,605	2,299,370,651
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	4,236,330,000	1,189,396,512	4,278,693,300	4,321,480,233	4,364,695,035	4,408,341,986
Jumlah			8,452,780,000	5,068,530,512	8,537,307,800	8,622,680,878	8,708,907,687	8,795,996,764
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran semakin baik dan tepat waktu	318,640,000	318,640,000	321,826,400	325,044,664	328,295,111	331,578,062
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan/ direhabilitasi	372,500,000	372,500,000	376,225,000	379,987,250	383,787,123	387,624,994

3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Diklat	Jumlah kebutuhan diklat	574,808,000	574,808,000	100,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100
4	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah sarana peningkatan disiplin aparatur	37,500,000	37,500,000	37,875,000	38,253,750	38,636,288	39,022,650
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	200,000,000	200,000,000	202,000,000	204,020,000	206,060,200	208,120,802
6	Program Perencanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai standar	-	50,000,000	50,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti program peningkatan kapasitas dan kualitas	7,172,552,000	4,976,452,000	7,244,277,520	7,316,720,295	7,389,887,498	7,463,786,373
Jumlah			8,676,000,000	6,529,900,000	8,332,203,920	8,415,525,959	8,499,681,219	8,584,678,031
KECAMATAN			96,242,976,109	64,621,504,478	98,246,488,503	99,240,174,488	100,232,576,232	151,234,901,995
MEDAN BELAWAN								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Administrasi Kantor Yang Efektif	301,756,440	301,756,440	304,774,004	307,821,744	310,899,962	314,008,962
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	174,681,000	174,681,000	176,427,810	178,192,088	179,974,009	181,773,749
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	23,925,000	23,925,000	24,164,250	24,405,893	24,649,951	24,896,451
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Medan Belawan	15,000,000	15,000,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
5	Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	3,888,387,360	3,888,387,360	3,927,271,234	3,966,543,946	4,006,209,385	4,046,271,479
6	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	57,200,000	57,200,000	57,772,000	58,349,720	58,933,217	59,522,549
7	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar	193,000,000	93,000,000	194,930,000	196,879,300	198,848,093	200,836,574
8	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Koordinasi dan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan	0	27,000,000	30,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030

9	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	142,575,000	142,575,000	144,000,750	145,440,758	146,895,165	148,364,117
10	Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	12,000,000	12,000,000	12,120,000	12,241,200	12,363,612	12,487,248
11	Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	15,000,000	15,000,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
12	Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya data dan informasi di Kecamatan	0	20,000,000	40,000,000	40,400,000	40,804,000	41,212,040
13	Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya Administrasi kependudukan.	0	16,000,000	18,000,000	18,180,000	18,361,800	18,545,418
14	Pembinaan Pramuka Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan Pramuka Kecamatan	25,000,000	15,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
15	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Meningkatnya Mutu Infrastruktur	271,915,200	0	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
Jumlah			5,120,440,000	4,801,524,800	5,259,644,400	5,312,240,844	5,365,363,252	5,419,016,885
MEDAN LABUHAN								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Administrasi Kantor Yang Efektif	708,459,800	708,459,800	715,544,398	722,699,842	729,926,840	737,226,109
2	Pogram peningkatan dan pemberdayaan kecamatan/ kelurahan	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat	2,691,960,480	2,691,960,480	2,718,880,085	2,746,068,886	2,773,529,575	2,801,264,870
3	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Koordinasi dan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan	15,000,000	15,000,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
4	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	50,000,000	55,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
5	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar	182,519,520	109,511,712	184,344,715	186,188,162	188,050,044	189,930,544
6	Pembinaan Pramuka Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan Pramuka Kecamatan	25,000,000	27,500,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
7	Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	66,700,000	73,370,000	67,367,000	68,040,670	68,721,077	69,408,287
8	Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	40,000,000	44,000,000	40,400,000	40,804,000	41,212,040	41,624,160

9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	810,100,000	405,050,000	818,201,000	826,383,010	834,646,840	842,993,309
10	Program penataan administrasi kependudukan	Terlaksananya kegiatan pembuatan papan data kecamatan	15,000,000	16,500,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
11	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Medan Belawan	10,000,000	11,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
12	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	230,450,000	253,495,000	232,754,500	235,082,045	237,432,865	239,807,194
13	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Meningkatnya Mutu Infrastruktur	271,915,200	-	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
14	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya disiplin aparatur	90,100,000	99,110,000	91,001,000	91,911,010	92,830,120	93,758,421
Jumlah			5,207,205,000	4,509,956,992	5,259,277,050	5,311,869,821	5,364,988,519	5,418,638,404
MEDAN KOTA								
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Terselenggaranya sistem Pelayanan Administrasi Kantor yang efektif	465,840,009	465,840,009	470,498,409	475,203,393	479,955,427	484,754,981
2	Pogram peningkatan dan pemberdayaan kecamatan/ kelurahan	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat	3,969,961,920	3,969,961,920	4,009,661,539	4,049,758,155	4,090,255,736	4,131,158,293
3	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	210,000,000	210,000,000	212,100,000	214,221,000	216,363,210	218,526,842
4	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	0	103,400,000	157,740,000	159,317,400	160,910,574	162,519,680
5	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Medan kota	10,000,000	10,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	0	25,000,000	27,500,000	27,775,000	28,052,750	28,333,278
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	80,000,000	80,000,000	80,800,000	81,608,000	82,424,080	83,248,321
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat	0	42,000,000	46,200,000	46,662,000	47,128,620	47,599,906
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	284,628,880	284,628,880	287,475,169	290,349,920	293,253,420	296,185,954

10	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan hari-hari besar	230,000,000	130,000,000	232,300,000	234,623,000	236,969,230	239,338,922
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya koordinasi dan efektifitas penanggulangan kemiskinan	0	59,920,000	65,912,000	66,571,120	67,236,831	67,909,200
12	Program Pemeliharaan Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur Kecamatan	289,739,200	-	292,636,592	295,562,958	298,518,587	301,503,773
13	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pramuka Kecamatan	25,000,000	15,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
Jumlah			5,565,170,009	5,395,750,809	5,918,173,709	5,977,355,446	6,037,129,001	6,097,500,291
MEDAN TIMUR								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran di Kec.Medan Timur	375,400,000	375,400,000	379,154,000	382,945,540	386,774,995	390,642,745
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tersedianya sarana dan prasarana aparatur di Kec.Medan Timur	247,731,240	247,731,240	250,208,552	252,710,638	255,237,744	257,790,122
3	Program peningkatan disiplin aparatur	terciptanya disiplin aparatur di Kec.Medan Timur	70,000,000	70,000,000	70,700,000	71,407,000	72,121,070	72,842,281
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tercapainya peningkatan dan pengembangan dalam sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	15,000,000	15,000,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
5	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	terselenggaranya kegiatan keagamaan dan hari-hari besar di Kec.Medan Timur	145,000,000	145,000,000	146,450,000	147,914,500	149,393,645	150,887,581
6	Pemberdayaan Kepramukaan Kecamatan	terselenggaranya kegiatan keparamukaan di Kec.Medan Timur	25,000,000	15,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
7	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	terpeliharanya sarana infrastruktur di Kec.Medan Timur	271,915,200	-	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
8	Program Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	terselenggaranya pemberdayaan kelurahan dan kecamatan di Kec.Medan Timur	3,480,514,560	3,480,514,560	3,515,319,706	3,550,472,903	3,585,977,632	3,621,837,408
9	Revitalisasi Karang Taruna	terselenggaranya kegiatan Karang Taruna di Kec.Medan Timur	10,000,000	10,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040

10	Perencanaan Pembangunan Daerah	tercapainya perencanaan pembangunan daerah di Kec.Medan Timur	82,500,000	92,500,000	83,325,000	84,158,250	84,999,833	85,849,831
11	Penanggulangan Kemiskinan	terselenggaranya kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kec.Medan Timur	40,000,000	36,066,440	40,400,000	40,804,000	41,212,040	41,624,160
12	Pengembangan Lingkungan Sehat	terciptanya pengembangan lingkungan sehat di Kec.Medan Timur	15,000,000	25,000,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
13	Penataan Administrasi Kependudukan	tertatanya administrasi perkantoran yang aktual di Kec.Medan Timur	10,000,000	10,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
14	Program pendidikan anak usia Dini	terselenggaranya pendidikan anak usia dini di Kec.Medan Timur	27,000,000	27,000,000	27,270,000	27,542,700	27,818,127	28,096,308
15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	meningkatnya keamanan dan kenyamanan di Kec.Medan Timur	67,200,000	67,200,000	67,872,000	68,550,720	69,236,227	69,928,589
16	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV dan AIDS	terselenggaranya kegiatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV dan AIDS	0	20,000,000	20,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020
17	Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia	meningkatnya pelayanan terhadap Lanjut Usia di Kec.Medan Timur	0	20,000,000	20,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020
Jumlah			4,882,261,000	4,656,412,240	4,971,083,610	5,020,794,446	5,071,002,391	5,121,712,414
MEDAN HELVETIA								
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Terselenggaranya sistem Pelayanan Administrasi Kantor yang efektif	748,571,040	748,571,040	756,056,750	763,617,318	771,253,491	778,966,026
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	494,900,000	494,900,000	499,849,000	504,847,490	509,895,965	514,994,925
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	79,200,000	79,200,000	79,992,000	80,791,920	81,599,839	82,415,838
4	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Medan Helvetia	5,000,000	5,000,000	5,050,000	5,100,500	5,151,505	5,203,020
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	0	32,500,000	33,375,000	33,708,750	34,045,838	34,386,296

6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	54,600,000	54,600,000	55,146,000	55,697,460	56,254,435	56,816,979
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat	100,000,000	100,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100	104,060,401
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan	103,400,000	103,400,000	104,434,000	105,478,340	106,533,123	107,598,455
9	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan hari-hari besar	222,350,000	222,350,000	224,573,500	226,819,235	229,087,427	231,378,302
10	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	Meningkatnya pelayanan masyarakat	2,392,853,760	2,392,853,760	2,392,853,760	2,392,853,760	2,392,853,760	2,392,853,760
11	Program Pemeliharaan Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur Kecamatan	271,915,200	-	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
12	Program Penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya Program Penanggulangan kemiskinan	-	10,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
13	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pramuka Kecamatan	50,000,000	25,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
Jumlah			4,522,790,000	4,268,374,800	4,587,564,362	4,609,511,468	4,631,678,046	4,654,066,288
MEDAN MARELAN								
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan	24,000,000	24,000,000	24,240,000	24,482,400	24,727,224	24,974,496
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	662,987,640	662,987,640	669,617,516	676,313,692	683,076,828	689,907,597
3	Program Pengembangan Data/Informasi	Berkembangnya Data/Informasi	0	135,000,000	0	0	75,000,000	82,500,000
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	402,850,000	402,850,000	406,878,500	410,947,285	415,056,758	419,207,325
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	124,500,000	124,500,000	125,745,000	127,002,450	128,272,475	129,555,199
6	Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	276,000,000	276,000,000	278,760,000	281,547,600	284,363,076	287,206,707
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	70,000,000	70,000,000	70,700,000	71,407,000	72,121,070	72,842,281

8	Program peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	2,392,853,760	2,392,853,760	2,392,853,760	2,392,853,760	2,392,853,760	2,392,853,760
9	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Terpeliharanya Infrastruktur Kecamatan	271,915,200	-	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Berkembangnya Lingkungan Sehat	40,000,000	40,000,000	40,400,000	40,804,000	41,212,040	41,624,160
11	Program Penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya Program Penanggulangan kemiskinan	234,750,000	211,664,920	237,097,500	239,468,475	241,863,160	244,281,791
12	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini	85,600,000	68,622,182	86,456,000	87,320,560	88,193,766	89,075,703
13	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Medan Helvetia	15,000,000	15,000,000	15,150,000	15,150,000	15,301,500	15,301,500
14	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	412,206,200	288,544,340	416,328,262	420,491,545	424,696,460	428,943,425
Jumlah			5,012,662,800	4,712,022,841	5,038,860,890	5,065,169,462	5,166,892,619	5,201,229,992
MEDAN DENAI								
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	tersedianya pelayanan kepada masyarakat	921,766,080	831,120,525	930,983,741	940,293,578	949,696,514	959,193,479
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	505,000,000	455,338,805	510,050,000	515,150,500	520,302,005	525,505,025
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	terlaksananya peningkatan disiplin Aparatur	210,000,000	189,348,810	212,100,000	214,221,000	216,363,210	218,526,842
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terlaksananya laporan kinerja	40,000,000	36,066,440	40,400,000	40,804,000	41,212,040	41,624,160
5	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	terlaksananya peningkatan dan pemberdayaan kecamatan/kelurahan	2,229,704,640	2,229,704,640	2,229,704,640	2,229,704,640	2,229,704,640	2,229,704,640
6	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	terlaksananya program kegiatan hari- hari besar	375,000,000	338,122,875	378,750,000	382,537,500	386,362,875	390,226,504
7	Program Penanggulangan Kemiskinan	terselenggaranya program penanggulangan kemiskinan	60,000,000	67,000,000	60,600,000	61,206,000	61,818,060	62,436,241
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	300,000,000	270,498,300	303,000,000	306,030,000	309,090,300	312,181,203

9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terselaksananya Keamanan dan kenyamanan	100,000,000	90,166,100	101,000,000	115,000,000		0
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	terlaksananya pengembangan lingkungan sehat	150,000,000	135,249,150	151,500,000	153,015,000	154,545,150	156,090,602
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini	terselenggaranya Program PAUD	880,000,000	793,461,680	888,800,000	897,688,000	906,664,880	915,731,529
12	Program Pengembangan Data/Informasi	tersedianya data informasi	20,000,000	18,033,220	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
13	Program Penataan Administrasi Kependudukan	tersedianya data administrasi kepend.	55,000,000	49,591,355	55,550,000	56,105,500	56,666,555	57,233,221
14	Program pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	terpeliharanya infrastruktur Kec.	271,915,200	-	271,915,200	271,915,200	271,915,200	271,915,200
15	Program pemberdayaan Pramuka Kecamatan	terlaksananya pemberdayaan Pramuka	60,000,000	36,000,000	60,600,000	61,206,000	61,818,060	62,436,241
Jumlah			6,178,385,920	5,539,701,900	6,215,153,581	6,265,278,918	6,186,765,509	6,223,616,966
MEDAN AREA								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sistem pelayanan administrasi kelembagaan efektif	355,118,720	355,118,720	358,669,907	362,256,606	365,879,172	369,537,964
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Kecamatan/Kelurahan	176,000,000	176,000,000	177,760,000	179,537,600	181,332,976	183,146,306
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	58,800,000	53,017,667	59,388,000	59,981,880	60,581,699	61,187,516
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	10,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dokumen data/informasi Kependudukan di Kecamatan	0	10,000,000	11,000,000	11,110,000	11,221,100	11,333,311
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Dokumen Pengembangan data/informasi	0	36,000,000	36,360,000	36,723,600	37,090,836	37,461,744
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah	138,000,000	138,000,000	139,380,000	140,773,800	142,181,538	143,603,353

8	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Nasional	Dokumen Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Nasional	255,000,000	178,923,555	257,550,000	260,125,500	262,726,755	265,354,023
9	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	Adanya pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	4,676,941,440	4,676,941,440	4,676,941,440	4,676,941,440	4,676,941,440	4,676,941,440
10	Program Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan	0	62,100,000	68,000,000	68,680,000	69,366,800	70,060,468
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini	0	57,600,000	68,000,000	68,680,000	69,366,800	70,060,468
12	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	271,915,200	-	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
13	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Adanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan	80,000,000	72,132,880	80,800,000	81,608,000	82,424,080	83,248,321
14	Program Pembinaan Pramuka Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pramuka Kecamatan	25,000,000	20,041,525	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
Jumlah			6,046,775,360	5,845,875,787	6,243,833,699	6,259,502,622	6,275,328,234	6,291,312,102
MEDAN BARU								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	316,852,320	316,852,320	320,020,843	323,221,052	326,453,262	329,717,795
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya Aparatur Yang Disiplin	70,000,000	70,000,000	70,700,000	71,407,000	72,121,070	72,842,281
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Adanya senam untuk kesehatan PNS dan Kepala Lingkungan	95,000,000	95,000,000	95,950,000	96,909,500	97,878,595	98,857,381
4	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang akurat	14,000,000	14,000,000	14,140,000	14,281,400	14,424,214	14,568,456
5	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Adanya perlengkapan gedung kantor yang membantu kegiatan kantor	240,000,000	240,000,000	242,400,000	244,824,000	247,272,240	249,744,962
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Adanya pengembangan lingkungan sehat dan tertata rapi di Kecamatan	25,000,000	25,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
7	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Terpeliharanya infrastruktur kecamatan	217,915,200	-	220,094,352	222,295,296	224,518,248	226,763,431
8	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Adanya pendidikan anak usia dini di kecamatan	25,000,000	22,541,525	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100

9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Adanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan	50,000,000	50,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
10	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	Adanya peningkatan peran serta kegiatan Kepramukaan di Kecamatan	50,000,000	45,083,050	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
11	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar di Kecamatan	210,000,000	178,534,881	212,100,000	214,221,000	216,363,210	218,526,842
12	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	Adanya pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	1,740,257,280	1,740,257,280	1,757,659,853	1,775,236,451	1,792,988,816	1,810,918,704
13	Program Penanggulangan Kemiskinan	Adanya Program Penanggulangan Kemiskinan	50,000,000	50,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah	155,000,000	139,757,455	156,550,000	158,115,500	159,696,655	161,293,622
15	Program Pengembangan Data/Informasi	Adanya Profil Kecamatan yang terbaru	0	25,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
16	Program Penata Administrasi Kependudukan	Tertatanya administrasi kependudukan dengan baik	0	20,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
Jumlah			3,259,024,800	3,032,026,511	3,337,065,048	3,370,435,698	3,404,140,055	3,438,181,456
MEDAN POLONIA								
1	Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	254,797,000	280,276,700	257,344,970	259,918,420	262,517,604	265,142,780
2	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	Adanya pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	1,250,809,920	1,313,350,416	1,263,318,019	1,275,951,199	1,288,710,711	1,301,597,818
3	Program Pengembangan Data / Informasi	Adanya Profil Kecamatan yang terbaru	20,000,000	21,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Adanya pendidikan anak usia dini di kecamatan	20,000,000	21,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Adanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan	37,000,000	38,850,000	37,370,000	37,743,700	38,121,137	38,502,348
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Adanya pengembangan lingkungan sehat dan tertata rapi di Kecamatan	30,000,000	31,500,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120

7	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan hari - hari besar dan keagamaan	200,000,000	140,000,000	202,000,000	204,020,000	206,060,200	208,120,802
8	Program Pembinaan Pramuka Kecamatan	Adanya peningkatan peran serta kegiatan Kepramukaan di Kecamatan	30,000,000	31,500,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
9	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang akurat	10,000,000	10,500,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah	172,000,000	180,600,000	173,720,000	175,457,200	177,211,772	178,983,890
11	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Terpeliharanya infrastruktur kecamatan	271,915,200	0	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
12	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya Aparatur Yang Disiplin	85,200,000	89,460,000	86,052,000	86,912,520	87,781,645	88,659,462
13	Program penanggulangan kemiskinan	Adanya Program Penanggulangan Kemiskinan	0	100,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100	104,060,401
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Adanya perlengkapan gedung kantor yang membantu kegiatan kantor	224,800,000	230,040,000	227,048,000	229,318,480	231,611,665	233,927,781
Jumlah			2,606,522,120	2,488,077,116	2,733,587,341	2,760,923,215	2,788,532,447	2,816,417,771
MEDAN POLONIA								
MEDAN TEMBUNG								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	745,550,400	745,550,400	753,005,904	760,535,963	768,141,323	775,822,736
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Adanya perlengkapan gedung kantor yang membantu kegiatan kantor	821,000,000	821,000,000	829,210,000	837,502,100	845,877,121	854,335,892
3	program Peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya Aparatur Yang Disiplin	442,540,000	442,540,000	446,965,400	451,435,054	455,949,405	460,508,899
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Terciptanya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang akurat	61,000,000	61,000,000	61,610,000	62,226,100	62,848,361	63,476,845
5	Program pendidikan anak usia dini	Adanya pendidikan anak usia dini di kecamatan	200,000,000	200,000,000	202,000,000	204,020,000	206,060,200	208,120,802

6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan	160,000,000	160,000,000	161,600,000	163,216,000	164,848,160	166,496,642
7	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Adanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan	174,000,000	174,000,000	175,740,000	177,497,400	179,272,374	181,065,098
8	Program perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah	161,500,000	161,500,000	163,115,000	164,746,150	166,393,612	168,057,548
9	Program Pengembangan data/informasi	Adanya Profil Kecamatan yang terbaru	30,000,000	30,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
10	Program penanggulangan kemiskinan	Adanya Program Penanggulangan Kemiskinan	100,000,000	100,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100	104,060,401
11	Program pengembangan lingkungan sehat	Adanya pengembangan lingkungan sehat dan tertata rapi di Kecamatan	70,000,000	70,000,000	70,700,000	71,407,000	72,121,070	72,842,281
12	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari - hari Besar	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan hari - hari besar dan keagamaan	280,000,000	180,000,000	282,800,000	285,628,000	288,484,280	291,369,123
13	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan	Adanya pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	2,583,194,400	2,583,194,400	2,583,194,400	2,583,194,400	2,583,194,400	2,583,194,400
14	Program Pemeliharaan Infrastruktur	Terpeliharanya infrastruktur kecamatan	271,915,200	-	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
15	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	Adanya peningkatan peran serta kegiatan Kepramukaan di Kecamatan	30,000,000	20,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
Jumlah			6,130,700,000	5,748,784,800	6,166,175,056	6,202,004,863	6,238,192,967	6,274,742,953
MEDAN PERJUANGAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Upah honorer, ATK,Cetakkan, bulanan air telepone dan listrik,komponen listrik dan alat kebersihan	261,645,480	261,645,480	264,261,935	266,904,554	269,573,600	272,269,336
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	mebeleur,pemeliha raan gedung kantor dan peralatan kantor, perlengkapan dan peralatan kantor dan peralatan listrik dan elektronik	253,025,000	253,025,000	255,555,250	258,110,803	260,691,911	263,298,830

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian PDH dan pakaian Hari-hari tertentu	40,500,000	40,500,000	40,905,000	41,314,050	41,727,191	42,144,462
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Rencana Kinerja dan Dokumen AKIP Kecamatan	12,000,000	12,000,000	12,120,000	12,241,200	12,363,612	12,487,248
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Dokumen koordinasi Ketertiban dan ketentraman lingkungan	30,000,000	30,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Renstra, dokumen koordinasi Pembangunan , Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakan	78,450,000	78,450,000	79,234,500	80,026,845	80,827,113	81,635,385
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Adanya pengembangan lingkungan sehat dan tertata rapi di Kecamatan	23,000,000	23,000,000	23,230,000	23,462,300	23,696,923	23,933,892
8	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari Hari Besar	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar di Kecamatan	207,490,000	157,490,000	209,564,900	211,660,549	213,777,154	215,914,926
9	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan	Adanya pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	3,480,514,560	3,480,514,560	3,480,514,560	3,480,514,560	3,480,514,560	3,480,514,560
10	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Terpeliharanya infrastruktur kecamatan	371,915,200	-	375,634,352	379,390,696	383,184,602	387,016,448
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Meningkatnya pemberdayaan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya	-	20,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
12	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	Gladian , kursus , jambore ranting dan persami	35,000,000	25,000,000	35,350,000	35,703,500	36,060,535	36,421,140
Jumlah			4,793,540,240	4,381,625,040	4,826,870,497	4,840,334,056	4,853,932,251	4,867,666,428
MEDAN BARAT								
1	Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase tersedianya akses data yang akurat	65,000,000	71,500,000	65,650,000	66,306,500	66,969,565	67,639,261
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Meningkatnya Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	2,664,769,000	2,764,769,000	2,664,769,000	2,664,769,000	2,664,769,000	2,664,769,000

3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase meningkatnya kemampuan aparatur memberikan pelayanan terbaik melalui motivasi	100,000,000	110,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100	104,060,401
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	35,000,000	38,500,000	35,350,000	35,703,500	36,060,535	36,421,140
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur pemerintah kecamatan	150,698,000	165,767,800	152,204,980	153,727,030	155,264,300	156,816,943
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	157,000,000	172,700,000	158,570,000	160,155,700	161,757,257	163,374,830
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase meningkatnya koordinasi dan partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	75,000,000	82,500,000	75,750,000	76,507,500	77,272,575	78,045,301
8	Program Pemberdayaan Kepramukaan Kecamatan	Persentase meningkatnya peran Pramuka di Kecamatan Medan Barat	30,000,000	33,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
9	Program Pembinaan Pramuka Kecamatan	Persentase meningkatnya keaktifan organisasi Pramuka di Kecamatan	20,000,000	20,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
10	Program Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	75,000,000	82,500,000	75,750,000	76,507,500	77,272,575	78,045,301
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Meningkatnya pemberdayaan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya	124,000,000	184,000,000	125,240,000	126,492,400	127,757,324	129,034,897
12	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan hari - hari besar	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan hari - hari besar dan keagamaan	285,000,000	228,000,000	287,850,000	290,728,500	293,635,785	296,572,143
13	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Persentase meningkatnya infrastruktur wilayah yang terpelihara	271,915,000	-	274,634,150	277,380,492	280,154,296	282,955,839

14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana yang menunjang pelayanan publik	400,000,000	440,000,000	404,000,000	408,040,000	412,120,400	416,241,604
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya Pelaporan Keuangan dan Aset yang semakin akuntabel	30,000,000	33,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan internal maupun pelayanan publik yang profesional	730,800,000	738,108,000	738,108,000	745,489,080	752,943,971	760,473,411
Jumlah			5,214,182,000	5,164,344,800	5,239,676,130	5,265,425,201	5,291,431,763	5,317,698,391
MEDAN TUNTUNGAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan internal maupun pelayanan publik yang profesional	324,783,040	324,783,040	328,030,870	331,311,179	334,624,291	337,970,534
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana yang menunjang pelayanan publik	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian PDH dan pakaian Hari-hari tertentu	95,000,000	104,500,000	95,950,000	96,909,500	97,878,595	98,857,381
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya Pelaporan Keuangan dan Aset yang semakin akuntabel	20,000,000	22,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
5	Program Perencana Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	183,777,760	202,155,536	185,615,538	187,471,693	189,346,410	191,239,874
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat mengenai pengembangan lingkungan sehat	200,000,000	220,000,000	202,000,000	204,020,000	206,060,200	208,120,802
7	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari Hari Besar	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan hari - hari besar dan keagamaan	639,000,000	319,500,000	645,390,000	651,843,900	658,362,339	664,945,962
8	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Tuntungan	2,148,364,000	2,363,200,400	2,148,364,000	2,148,364,000	2,148,364,000	2,148,364,000

9	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Terpeliharanya infrastruktur kecamatan	322,315,200	-	325,538,352	328,793,736	332,081,673	335,402,490
10	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	Pemberdayaan pramuka tingkat kecamatan yang semakin baik	25,000,000	25,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Akses Kualitas Pendidikan Masyarakat	297,000,000	147,000,000	299,970,000	302,969,700	305,999,397	309,059,391
12	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase meningkatnya kemampuan aparatur memberikan pelayanan terbaik melalui motivasi	25,000,000	25,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
13	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang baik	48,000,000	48,000,000	48,480,000	48,964,800	49,454,448	49,948,992
14	Program Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya penanggulangan kemiskinan masyarakat kecamatan	0	85,000,000	85,850,000	86,708,500	87,575,585	88,451,341
15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Semakin membaiknya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat kecamatan	70,000,000	70,000,000	70,700,000	71,407,000	72,121,070	72,842,281
Jumlah			4,713,240,000	4,271,138,976	4,821,588,760	4,845,171,008	4,868,989,078	4,893,045,328
MEDAN SELAYANG								
1	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari - hari Besar	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan hari - hari besar dan keagamaan	155,000,000	124,000,000	156,550,000	158,115,500	159,696,655	161,293,622
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	53,800,000	69,940,000	54,338,000	54,881,380	55,430,194	55,984,496
3	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Persentase meningkatnya infrastruktur wilayah Kecamatan yang terpelihara	301,915,200	-	304,934,352	307,983,696	311,063,532	314,174,168
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya pelaporan keuangan dan aset yang semakin akuntabel	10,200,000	13,260,000	10,302,000	10,405,020	10,509,070	10,614,161

5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan internal maupun pelayanan publik yang profesional	393,998,720	512,198,336	397,938,707	401,918,094	405,937,275	409,996,648
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik	310,876,320	404,139,216	313,985,083	317,124,934	320,296,183	323,499,145
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat mengenai pengembangan lingkungan sehat	12,000,000	15,600,000	12,120,000	12,241,200	12,363,612	12,487,248
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	57,600,000	74,880,000	58,176,000	58,757,760	59,345,338	59,938,791
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	123,810,000	136,191,000	125,048,100	126,298,581	127,561,567	128,837,182
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur pemerintah Kecamatan	82,500,000	82,500,000	83,325,000	84,158,250	84,999,833	85,849,831
11	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase meningkatnya pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	1,713,065,760	1,884,372,336	1,713,065,760	1,713,065,760	1,713,065,760	1,713,065,760
12	Program Penanggulangan Kemiskinan	Adanya Program Penanggulangan Kemiskinan	-	155,000,000	156,550,000	158,115,500	159,696,655	161,293,622
Jumlah			3,214,766,000	3,472,080,888	3,386,333,002	3,403,065,675	3,419,965,674	3,437,034,673
MEDAN PETISAH								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	639,719,520	639,719,520	646,116,715	652,577,882	659,103,661	665,694,698
2	Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome : Terciptanya Aparatur Yang Disiplin	92,500,000	92,500,000	93,425,000	94,359,250	95,302,843	96,255,871
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Outcome : Adanya senam untuk kesehatan PNS dan Kepala Lingkungan	72,000,000	72,000,000	72,720,000	73,447,200	74,181,672	74,923,489
4	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Outcome : Terciptanya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang akurat	25,000,000	25,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100

5	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Outcome : Adanya perlengkapan gedung kantor yang membantu kegiatan kantor	306,550,000	306,550,000	309,615,500	312,711,655	315,838,772	318,997,159
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Outcome : Adanya pengembangan lingkungan sehat dan tertata rapi di Kecamatan	36,400,000	36,400,000	36,764,000	37,131,640	37,502,956	37,877,986
7	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Outcome : Terpeliharanya infrastruktur kecamatan	287,916,000	-	290,795,160	293,703,112	296,640,143	299,606,544
8	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Outcome : Adanya pendidikan anak usia dini di kecamatan	30,000,000	30,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Outcome : Adanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan	112,000,000	112,000,000	113,120,000	114,251,200	115,393,712	116,547,649
10	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Outcome : Adanya peningkatan peran serta kepemudaan di Kecamatan	30,000,000	30,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
11	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Outcome : Terwujudnya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar di Kecamatan	245,500,000	196,400,000	247,955,000	250,434,550	252,938,896	255,468,284
12	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	Outcome : Adanya pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	1,876,215,000	1,876,215,000	1,894,977,150	1,913,926,922	1,933,066,191	1,952,396,853
13	Program Penanggulangan Kemiskinan	Outcome : Adanya Program Penanggulangan Kemiskinan	19,500,000	19,500,000	19,695,000	19,891,950	20,090,870	20,291,778
14	Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : Terlaksananya Koordinasi di bidang Pembangunan	205,700,000	205,700,000	207,757,000	209,834,570	211,932,916	214,052,245
15	Program Pengembangan Data/Informasi	Outcome : Adanya Profil Kecamatan yang terbaru	0	10,000,000	0	0	0	0
16	Program Penata Administrasi Kependudukan	Outcome : Tertatanya administrasi kependudukan dengan baik	0	0	10,000,000	0	0	0
Jumlah			3,979,000,520	3,651,984,520	4,028,790,525	4,058,978,430	4,099,568,215	4,140,563,897
MEDAN JOHOR								
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Terselenggaranya sistem Pelayanan Administrasi Kantor yang efektif	297,822,231	300,800,453	300,800,453	303,808,458	306,846,542	309,915,008

2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	316,620,409	319,786,613	319,786,613	322,984,479	326,214,324	329,476,467
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	142,939,040	144,368,430	144,368,430	145,812,115	147,270,236	148,742,938
4	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Medan kota	15,000,000	15,150,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	15,000,000	15,150,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	50,000,000	50,500,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat	0	-	46,200,000	46,662,000	47,128,620	47,599,906
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	173,300,000	175,033,000	175,033,000	176,783,330	178,551,163	180,336,675
9	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan hari-hari besar	175,000,000	176,750,000	176,750,000	178,517,500	180,302,675	182,105,702
10	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/ Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2,202,513,120	2,224,538,251	2,202,513,120	2,202,513,120	2,202,513,120	2,202,513,120
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya koordinasi dan efektifitas penanggulangan kemiskinan	35,000,000	55,000,000	35,350,000	35,703,500	36,060,535	36,421,140
12	Program Pemeliharaan Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur Kecamatan	271,915,200	-	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
13	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pramuka Kecamatan	25,000,000	25,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
Jumlah			3,720,110,000	3,502,076,748	3,781,485,969	3,797,275,697	3,813,223,323	3,829,330,425
MEDAN MAIMUN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Upah honorer, ATK,Cetakkan, bulanan air telepone dan listrik,komponen listrik dan alat kebersihan	314,034,280	345,437,708	317,174,623	320,346,369	323,549,833	326,785,331

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	mebeleur,pemeliha raan gedung kantor dan peralatan kantor, perlengkapan dan peralatan kantor dan peralatan listrik dan elektronik	485,463,160	534,009,476	490,317,792	495,220,970	500,173,179	505,174,911
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian PDH dan pakaian Hari-hari tertentu	129,200,000	142,120,000	130,492,000	131,796,920	133,114,889	134,446,038
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Rencana Kinerja dan Dokumen LAKIP Kecamatan	10,000,000	11,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini	45,000,000	49,500,000	45,450,000	45,904,500	46,363,545	46,827,180
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyelenggaraan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	64,497,040	70,946,744	65,142,010	65,793,431	66,451,365	67,115,878
7	Program Perencana Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan Daerah	229,000,000	251,900,000	231,290,000	233,602,900	235,938,929	238,298,318
8	Program Penanggulangan Kemiskinan	terselenggaranya penanggulangan Kemiskinan	41,250,000	41,250,000	41,662,500	42,079,125	42,499,916	42,924,915
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	terselenggaranya Pengembangan Lingkungan Sehat	15,000,000	16,500,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
10	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	terselenggaranya Penanggulangan Narkoba	15,000,000	16,500,000	15,150,000	15,301,500	15,454,515	15,609,060
11	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari Hari Besar	Terselenggaranya kegiatan Keagamaan dan hari-hari besar	205,000,000	164,000,000	207,050,000	209,120,500	211,211,705	213,323,822
12	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/ Kelurahan	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	1,794,640,320	1,794,640,320	1,812,586,723	1,830,712,590	1,849,019,716	1,867,509,913
13	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	terselenggaranya Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	321,915,200	-	325,134,352	328,385,696	331,669,552	334,986,248
Jumlah			3,670,000,000	3,437,804,248	3,706,700,000	3,743,767,000	3,781,204,670	3,819,016,717
MEDAN DELI								

1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	316,791,520	316,791,520	319,959,435	323,159,030	326,390,620	329,654,526
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	222,919,680	222,919,680	225,148,877	227,400,366	229,674,369	231,971,113
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur di Kecamatan Medan Deli	132,114,000	132,114,000	133,435,140	134,769,491	136,117,186	137,478,358
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22,000,000	22,000,000	22,220,000	22,442,200	22,666,622	22,893,288
5	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	50,000,000	50,000,000	50,500,000	51,005,000	51,515,050	52,030,201
6	Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Deli	2,855,109,600	2,855,109,600	2,883,660,696	2,912,497,303	2,941,622,276	2,971,038,499
7	Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kondisi lingkungan seat di Kecamatan Medan Deli	32,950,000	32,950,000	33,279,500	33,612,295	33,948,418	34,287,902
8	Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas pendidikan anak	30,000,000	30,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
9	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan di Kecamatan Medan Deli	12,000,000	12,000,000	12,120,000	12,241,200	12,363,612	12,487,248
10	Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Data/Informasi	49,000,000	49,000,000	49,490,000	49,984,900	50,484,749	50,989,596
11	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya data pembangunan daerah	85,000,000	85,000,000	85,850,000	86,708,500	87,575,585	88,451,341
12	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Terpeliharanya Infrastruktur Kecamatan	271,915,200	-	274,634,352	277,380,696	280,154,502	282,956,047
13	Penataan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Penataan Administrasi Kependudukan	0	15,000,000	22,000,000	22,220,000	22,442,200	22,666,622
14	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Terselenggaranya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	20,000,000	20,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	48,720,000	48,720,000	49,207,200	49,699,272	50,196,265	50,698,227

16	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	Terlaksananya kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	240,000,000	192,000,000	242,400,000	244,824,000	247,272,240	249,744,962
Jumlah			4,388,520,000	4,083,604,800	4,454,405,200	4,498,949,252	4,543,938,745	4,589,378,132
MEDAN AMPLAS								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Administrasi Kantor Yang Efektif	364,438,300	364,438,300	368,082,683	371,763,510	375,481,145	379,235,956
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	221,000,000	221,000,000	223,210,000	225,442,100	227,696,521	229,973,486
3	Peningkatan Disiplin dan Kesehatan Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kesehatan Aparatur	40,000,000	40,000,000	40,400,000	40,804,000	41,212,040	41,624,160
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Medan Amplas	10,000,000	12,000,000	10,100,000	10,201,000	10,303,010	10,406,040
5	Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Derajat Pendidikan Bagi anak-anak usia dini terutama dari masyarakat kurang mampu	21,050,000	25,260,000	21,260,500	21,473,105	21,687,836	21,904,714
6	Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya Administrasi kependudukan.	20,569,800	20,569,800	20,775,498	20,983,253	21,193,086	21,405,016
7	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	55,500,000	66,600,000	56,055,000	56,615,550	57,181,706	57,753,523
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	169,250,000	203,100,000	170,942,500	172,651,925	174,378,444	176,122,229
9	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	0	143,000,000	102,300,000	103,323,000	104,356,230	105,399,792
10	Pengembangan Data/ Informasi	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi di Kecamatan	15,250,000	18,300,000	15,402,500	15,556,525	15,712,090	15,869,211
11	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan Hari - Hari Besar	191,900,000	191,900,000	193,819,000	195,757,190	197,714,762	199,691,910
12	Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	2,103,747,040	2,103,747,040	2,103,747,040	2,103,747,040	2,103,747,040	2,103,747,040
13	Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	300,415,200	-	303,419,352	306,453,546	309,518,081	312,613,262

14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kondisi lingkungan sehat di Kecamatan	10,000,000	12,000,000	101,200,000	102,212,000	103,234,120	104,266,461
15	Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	Meningkatnya Kegiatan Kepramukaan di Kecamatan	25,000,000	25,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
Jumlah			3,548,120,340	3,446,915,140	3,755,964,073	3,772,486,243	3,789,173,635	3,806,027,901
MEDAN SUNGGAL								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perbaiki penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	507,800,000	507,800,000	512,878,000	518,006,780	523,186,848	528,418,716
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	522,831,040	522,831,040	528,059,350	533,339,944	538,673,343	544,060,077
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kesehatan Aparatur	139,660,000	139,660,000	141,056,600	142,467,166	143,891,838	145,330,756
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya Administrasi kependudukan.	30,000,000	30,000,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Derajat Pendidikan Bagi anak-anak usia dini terutama dari masyarakat kurang mampu	40,000,000	40,000,000	40,400,000	40,804,000	41,212,040	41,624,160
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	80,000,000	80,000,000	80,800,000	81,608,000	82,424,080	83,248,321
7	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	95,000,000	95,000,000	95,950,000	96,909,500	97,878,595	98,857,381
8	Program Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	74,500,000	74,500,000	75,245,000	75,997,450	76,757,425	77,524,999
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kondisi lingkungan sehat di Kecamatan	25,000,000	25,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
10	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Terlaksananya kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	240,000,000	240,000,000	242,400,000	244,824,000	247,272,240	249,744,962
11	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	2,392,853,760	2,392,853,760	2,416,782,298	2,440,950,121	2,465,359,622	2,490,013,218
12	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	296,915,200	0	299,884,352	302,883,196	305,912,027	308,971,148

13	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	Meningkatnya Kegiatan Kepramukaan di Kecamatan	25,000,000	25,000,000	25,250,000	25,502,500	25,757,525	26,015,100
Jumlah			4,469,560,000	4,172,644,800	4,514,255,600	4,559,398,156	4,604,992,138	4,651,042,059
BADAN KETAHANAN PANGAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Persentase penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	598,353,080	658,188,388	604,336,611	610,379,977	616,483,777	622,648,614
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	716,520,000	788,172,000	723,685,200	730,922,052	738,231,273	745,613,585
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kesehatan Aparatur	270,000,000	297,000,000	272,700,000	275,427,000	278,181,270	280,963,083
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Ketahanan Pangan	20,000,000	22,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
5	Program Disverifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan bahan pangan utama	18,395,126,920	12,773,776,261	18,579,078,189	18,764,868,971	18,952,517,661	19,142,042,837
Jumlah			20,000,000,000	14,539,136,649	20,200,000,000	20,402,000,000	20,606,020,000	20,812,080,200
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang semakin efektif dan tepat waktu	450,000,000	495,000,000	454,500,000	459,045,000	463,635,450	468,271,805
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana dan prasarana yang disediakan / dipelihara/ diperbaiki / direhabilitasi	150,000,000	165,000,000	151,500,000	153,015,000	154,545,150	156,090,602
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah sarana Peningkatan disiplin aparatur	110,000,000	121,000,000	111,100,000	112,211,000	113,333,110	114,466,441
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Buku laporan capaian kinerja	20,000,000	22,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat	1,325,000,000	1,457,500,000	1,338,250,000	1,351,632,500	1,365,148,825	1,378,800,313
6	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan	525,000,000	577,500,000	530,250,000	535,552,500	540,908,025	546,317,105

7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1,821,500,000	2,003,650,000	1,839,715,000	1,858,112,150	1,876,693,272	1,895,460,204
8	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah PKK dan posyandu aktif, cakupan peranan perempuan	3,794,500,000	2,489,410,000	3,832,445,000	3,870,769,450	3,909,477,145	3,948,571,916
9	Program pembinaan anak dan remaja	Jumlah anak dan remaja yang mendapatkan pembinaan	300,000,000	330,000,000	303,000,000	306,030,000	309,090,300	312,181,203
10	Program Dharma Wanita Persatuan Kota Medan	Jumlah kegiatan dharma wanita persatuan kota Medan	370,000,000	407,000,000	373,700,000	377,437,000	381,211,370	385,023,484
Jumlah			8,866,000,000	8,068,060,000	8,954,660,000	9,044,206,600	9,134,648,666	9,225,995,153
KANTOR ARSIP								
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penyelenggara pelayanan jasa administrasi perkantoran yang semakin berkualitas dan tepat waktu selama 1 tahun	428,574,560	432,860,306	432,860,306	437,188,909	441,560,798	445,976,406
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Jenis sarana dan prasarana yang disediakan / dipelihara/diperbaiki / direhabilitasi selama 1 tahun	812,625,440	820,751,694	820,751,694	828,959,211	837,248,803	845,621,291
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah sarana Peningkatan disiplin PNS dan Pegawai Honorer / Outsourcing	40,000,000	40,400,000	40,400,000	40,804,000	41,212,040	41,624,160
4	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti diklat kearsipan pada pusklat ANRI dll	247,000,000	249,470,000	249,470,000	251,964,700	254,484,347	257,029,190
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Kinerja Kantor Arsip	30,000,000	30,300,000	30,300,000	30,603,000	30,909,030	31,218,120
6	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tersedianya jasa tenaga perbaikan jaringan informasi kearsipan	100,000,000	101,000,000	101,000,000	102,010,000	103,030,100	104,060,401
7	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah Dokumen yang di selamatkan dari SKPD	1,134,820,000	304,402,953	1,146,168,200	1,157,629,882	1,169,206,181	1,180,898,243

8	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Dokumen arsip yang dipelihara secara rutin dalam 1 tahun	125,000,000	126,250,000	126,250,000	127,512,500	128,787,625	130,075,501
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi'	Jumlah SKPD yang mendapat pelayanan informasi	300,000,000	303,000,000	303,000,000	306,030,000	309,090,300	312,181,203
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	30,000,000	0	0	0	0	0
Jumlah			3,248,020,000	2,408,434,953	3,250,200,200	3,282,702,202	3,315,529,224	3,348,684,516
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Pelayanan administrasi kantor	Pelayanan administrasi perkantoran yang semakin efektif dan tepat waktu	3,647,758,800	3,684,236,388	3,684,236,388	3,721,078,752	3,758,289,539	3,795,872,435
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	2,031,286,800	2,051,599,668	2,051,599,668	2,072,115,665	2,092,836,821	3,113,765,190
3	Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah sarana peningkatan disiplin aparatur	329,600,000	332,896,000	332,896,000	336,224,960	339,587,210	342,983,082
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	9,100,000	9,191,000	9,191,000	9,282,910	9,375,739	9,469,496
5	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah media dan sarana pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	7,596,561,900	6,077,249,520	7,672,527,519	7,749,252,794	7,826,745,322	11,905,012,775
6	Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika	Kualitas bidang komunikasi dan informasi semakin meningkat	180,000,000	181,800,000	181,800,000	183,618,000	185,454,180	187,308,722
7	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Informati dan komunikasi	Jumlah kegiatan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi	500,255,000	505,257,550	505,257,550	510,310,126	515,413,227	520,567,359
8	Kerjasama informasi dengan media massa	Jumlah media informasi dalam bentuk media cetak, elektronik dan lainnya	7,235,757,500	3,347,119,391	7,308,115,075	7,381,196,226	7,455,008,188	7,529,558,270
Jumlah			21,530,320,000	16,189,349,517	21,745,623,200	21,963,079,432	22,182,710,226	27,404,537,329
KANTOR PERPUSTAKAAN								
1	Pelayanan Administrsi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang semakin efektif dan tepat waktu	501,633,040	601,959,648	506,649,370	511,715,864	516,833,023	522,001,353

2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	546,750,000	656,100,000	552,217,500	557,739,675	563,317,072	568,950,242
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	49,975,000	59,970,000	50,474,750	50,979,498	51,489,292	52,004,185
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Buku laporan capaian kinerja dan keuangan	35,000,000	42,000,000	35,350,000	35,703,500	36,060,535	36,421,140
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	4,349,380,175	3,107,025,871	4,392,873,977	4,436,802,717	4,481,170,744	4,525,982,451
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah sarana peningkatan disiplin aparatur	49,500,000	59,400,000	49,995,000	50,494,950	50,999,900	51,509,898
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik	20,000,000	24,000,000	20,200,000	20,402,000	20,606,020	20,812,080
8	Peningkatan Rapat-rapat/Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan kerjasama antar instansi semakin baik	150,000,000	180,000,000	151,500,000	153,015,000	154,545,150	156,090,602
Jumlah			5,702,238,215	4,730,455,519	5,759,260,597	5,816,853,203	5,875,021,735	5,933,771,953
DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan administrasi kedinasan	844,000,000	844,000,000	852,440,000	860,964,400	869,574,044	878,269,784
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur dan kenyamanan dalam bekerja	2,354,029,000	2,354,029,000	2,377,569,290	2,401,344,983	2,425,358,433	2,449,612,017
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas	210,000,000	210,000,000	212,100,000	214,221,000	216,363,210	218,526,842
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas	125,000,000	125,000,000	126,250,000	127,512,500	128,787,625	130,075,501
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja SKPD	190,000,000	190,000,000	191,900,000	193,819,000	195,757,190	197,714,762
6	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama	1,360,000,000	680,000,000	1,373,600,000	1,387,336,000	1,401,209,360	1,415,221,454
7	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produktivitas hasil peternakan	1,150,000,000	575,000,000	1,161,500,000	1,173,115,000	1,184,846,150	1,196,694,612

8	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	800,000,000	400,000,000	808,000,000	816,080,000	824,240,800	832,483,208
9	Peningkatan Promosi dan Investasi	Jumlah keikutsertaan pameran produk pertanian, peternakan dan perikanan baik domestik maupun nasional	800,000,000	400,000,000	808,000,000	816,080,000	824,240,800	832,483,208
10	Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pendayagunaan sumberdaya kelautan	400,000,000	200,000,000	404,000,000	408,040,000	412,120,400	416,241,604
11	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	790,000,000	395,000,000	797,900,000	805,879,000	813,937,790	822,077,168
12	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Peningkatan kualitas usaha produk pangan asal hewan dalam menghasilkan BAH dan Hasil BAH yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dan produk pangan lainnya, Jumlah konsumsi ikan	1,375,000,000	687,500,000	1,388,750,000	1,402,637,500	1,416,663,875	1,430,830,514
13	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka prevalensi/insiden melalui Surveilans PHMSZE	1,095,000,000	547,500,000	1,105,950,000	1,117,009,500	1,128,179,595	1,139,461,391
14	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Peningkatan kualitas produk hasil perikanan budidaya	280,000,000	140,000,000	282,800,000	285,628,000	288,484,280	291,369,123
15	Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	6,359,180,000	2,154,955,448	6,422,771,800	6,486,999,518	6,551,869,513	6,617,388,208
16	Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	2,010,820,000	1,005,410,000	2,030,928,200	2,051,237,482	2,071,749,857	2,092,467,355
17	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir	635,000,000	317,500,000	641,350,000	647,763,500	654,241,135	660,783,546
18	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah rata-rata pendapatan masyarakat petani	859,560,000	429,780,000	868,155,600	876,837,156	885,605,528	894,461,583
19	Bantuan Bibit Tanaman TOGA untuk Kelurahan Perlombaan Pemanfaatan Hasil TOGA	Nilai Tumbuh Hasil Olahan Toga dalam rangka penanggulangan kesehatan keluarga	0	50,000,000	55,000,000	55,550,000	56,105,500	56,666,555

20	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh Perikanan dan pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan	140,000,000	70,000,000	141,400,000	142,814,000	144,242,140	145,684,561
21	Program Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya penyuluhan dan pengembangan budidaya ternak ayam buras	0	1,730,000,000	1,747,300,000	1,764,773,000	1,782,420,730	1,800,244,937
Jumlah			21,777,589,000	13,505,674,448	23,797,664,890	24,035,641,539	24,275,997,954	24,518,757,934
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah SOP (Sistem Operasional Prosedur) yang diterapkan	1,073,750,000	1,181,125,000	1,084,487,500	1,095,332,375	1,106,285,699	1,117,348,556
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana aparatur	430,000,000	473,000,000	434,300,000	438,643,000	443,029,430	447,459,724
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	75,000,000	82,500,000	75,750,000	76,507,500	77,272,575	78,045,301
4	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	Persentase terjaminnya hak hak konsumen untuk memperoleh barang yang legal dan layak konsumsi	2,765,110,000	1,935,577,000	2,792,761,100	2,820,688,711	2,848,895,598	2,877,384,554
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ekspor bersih perdagangan	274,000,000	301,400,000	276,740,000	279,507,400	282,302,474	285,125,499
6	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan PDRB Kota Medan dari sektor Perdagangan	9,543,989,400	6,680,792,580	9,639,429,294	9,735,823,587	9,833,181,823	9,931,513,641
7	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah IKM yang distandarisasi produknya	175,000,000	192,500,000	176,750,000	178,517,500	180,302,675	182,105,702
8	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM pelaku usaha yang menguasai teknologi industri	120,000,000	132,000,000	121,200,000	122,412,000	123,636,120	124,872,481
9	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	jumlah kelompok usaha industri kecil yang bertambah	8,010,900,000	6,086,096,202	8,091,009,000	8,171,919,090	8,253,638,281	8,336,174,664
10	Pegembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra sentra industri yang tangguh dan mandiri	0	500,000,000	1,750,000,000	1,767,500,000	1,785,175,000	1,803,026,750
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi IK/ IRT bagi warga masyarakat	0	415,000,000	419,150,000	423,341,500	427,574,915	431,850,664
Jumlah			22,467,749,400	17,979,990,782	24,861,576,894	25,110,192,663	25,361,294,590	25,614,907,535

PROYEKSI BELANJA LANGSUNG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN 2016-2021

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	PROYEKSI					
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	DINAS PENDIDIKAN	180,640,600,000	205,335,829,000	197,182,900,000	212,182,900,000	211,974,900,000	211,974,900,000
2	DINAS KESEHATAN	899,613,799,868	526,140,443,942	1,571,087,870,383	1,562,720,343,816	1,164,706,783,204	1,238,324,657,661
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	628,210,639,000	1,040,899,738,500	866,585,579,015	892,840,085,600	907,744,605,500	995,557,451,050
4	DINAS PERKIM DAN TARU	391,091,488,112	416,135,433,392	536,808,121,069	589,301,509,128	618,720,584,584	649,610,613,813
5	DINAS P2K	11,796,970,000	16,102,651,000	17,785,022,700	19,309,124,970	20,792,987,467	31,696,786,214
6	BADAN KESBANG POL LINMAS	8,392,940,000	6,211,250,000	7,485,500,000	9,776,000,000	9,487,000,000	10,140,408,000
7	SAT POL PP	33,012,872,000	45,570,832,000	49,971,561,685	54,705,901,850	60,854,371,395	67,299,347,745
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,312,926,600	6,719,881,140	6,850,499,404	6,919,004,398	6,988,194,442	7,058,076,386
9	DINAS SOSIAL	5,996,000,000	7,007,115,000	16,399,145,000	16,771,145,000	17,984,592,500	23,861,010,000
10	DINAS Ketenagakerjaan	9,075,725,099	7,771,203,940	9,699,398,820	10,094,014,077	10,422,437,613	10,776,983,724
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7,315,760,000	11,402,227,000	11,899,999,935	12,969,000,000	7,947,185,000	8,026,656,850
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	20,000,000,000	23,475,577,035	27,155,135,855	32,343,635,723	37,964,275,600	40,545,000,000
13	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	8,815,900,000	10,645,000,000	10,800,001,462	12,978,203,100	14,555,246,741	16,198,234,416
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	250,327,278,714	231,125,018,311	309,466,525,941	326,793,152,470	348,535,631,041	352,020,987,351
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14,893,354,710	15,298,128,840	15,533,445,498	18,432,341,943	20,175,584,747	20,458,137,312
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9,550,055,000	10,585,230,000	10,800,000,075	11,961,252,452	14,353,502,942	16,858,803,531
17	DINAS PERHUBUNGAN	73,577,921,920	61,189,127,060	86,084,970,720	86,945,820,427	87,815,278,631	88,693,431,418
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17,207,206,000	44,439,419,100	46,821,156,092	48,449,998,034	50,032,052,756	51,676,401,310
19	DINAS KOPERASI DAN UKM	10,828,246,500	6,735,415,180	15,000,000,000	16,500,000,000	18,150,000,000	19,965,000,000
20	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,556,732,500	6,251,025,000	7,299,999,701	8,879,999,672	9,767,999,638	10,744,799,601
21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	18,066,941,000	20,830,103,720	28,178,519,278	30,557,400,295	33,573,667,433	36,438,065,051
22	DINAS KEBUDAYAAN	30,968,425,360	9,002,700,000	9,100,000,000	9,456,000,000	9,550,560,000	9,646,065,600
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8,617,463,215	10,311,099,000	10,500,000,163	12,566,621,563	13,823,283,719	15,205,612,091
24	DINAS PARIWISATA	19,324,695,360	30,308,000,000	30,899,954,849	33,975,030,000	37,938,283,000	43,176,500,000
25	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	21,847,589,000	27,339,335,000	20,191,670,000	21,783,346,000	25,729,546,000	26,293,250,000
26	DINAS PERDAGANGAN	16,906,682,400	22,495,187,560	23,236,190,642	25,559,809,706	28,115,790,677	30,927,369,745
27	DINAS PERINDUSTRIAN	1,279,563,320	8,923,311,240	12,630,305,955	16,131,356,528	15,275,446,470	16,008,843,916
28	BAGIAN ADM PEMBANGUNAN	4,000,000,000	5,085,000,000	5,112,412,905	4,905,911,777	5,352,775,130	6,168,073,202
29	BAGIAN ADM PEREKONOMIAN	1,524,550,000	1,251,300,000	1,299,372,008	2,281,691,472	1,913,691,472	2,313,757,472
30	BAGIAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTAR KOTA, DAERAH, LEMBAGA	3,852,916,000	3,335,416,000	5,606,048,740	4,343,292,000	7,350,991,360	5,609,549,632

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	PROYEKSI					
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
31	BAGIAN KEAGAMAAN	53,860,171,000	20,093,186,030	20,605,199,894	21,635,459,889	22,717,232,883	23,853,094,527
32	BAGIAN ADM PEMERINTAHAN	13,725,000,000	15,096,500,000	16,605,150,000	18,264,665,000	20,090,131,500	22,098,144,650
33	BAGIAN UMUM	278,058,521,000	342,976,111,000	355,784,521,007	391,474,028,228	430,621,431,050	473,683,574,156
34	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9,300,000,000	13,130,800,000	13,399,598,905	15,201,148,756	16,556,763,631	18,149,039,994
35	BAGIAN HUKUM	3,138,210,000	3,130,000,000	2,967,073,686	3,143,500,000	3,126,000,000	3,186,000,000
36	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	3,084,560,000	5,893,800,000	6,349,999,687	5,932,701,197	4,701,282,750	7,324,202,667
37	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN	51,424,650,000	55,239,685,000	56,299,765,632	55,732,600,000	59,039,900,000	60,505,300,000
38	BAGIAN SOSIAL, PENDIDIKAN	2,703,025,000	46,997,131,355	51,153,138,460	52,404,154,405	53,338,810,526	55,275,948,096
39	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,390,000,000	6,735,160,000	7,408,676,000	8,149,543,600	8,964,497,960	9,860,947,756
40	SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN	95,417,487,070	108,613,256,500	111,435,906,159	117,390,436,100	118,564,340,461	119,749,983,866
41	KECAMATAN	99,689,372,967	126,008,447,930	174,276,148,054	200,394,945,722	221,353,560,273	244,487,281,419
42	INSPEKTORAT	17,422,829,280	18,200,000,000	18,500,000,000	22,200,000,000	26,640,000,000	26,640,000,000
43	BAPPEDA	31,945,000,000	26,748,000,000	9,998,637,786	8,613,166,910	41,423,272,900	44,979,750,190
44	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	11,253,550,000	42,200,252,000	40,466,786,837	58,763,254,375	59,350,886,919	59,944,395,788
45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10,623,550,000	10,701,748,000	10,793,247,980	10,885,662,960	10,979,002,091	11,088,792,112
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8,157,520,000	19,210,984,000	18,014,656,522	18,310,000,000	19,130,000,000	19,975,000,000
47	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5,873,579,560	10,744,524,560	11,917,174,560	12,456,600,000	11,911,000,000	22,102,100,000
	TOTAL	3,416,672,267,555	3,709,641,584,335	4,893,446,989,064	5,133,385,759,142	4,946,105,362,006	5,286,178,328,310

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagai upaya untuk menciptakan dan mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*) yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) secara periodik, maka prioritas utama yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah:

- a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas manajerial OPD;
- b. akuntabilitas pemerintah daerah;
- c. manajemen kinerja pemerintah kota/OPD; dan
- d. tersedianya pelayanan publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Khusus dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah, salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan penetapan indikator kinerja di lingkungan OPD Pemerintah Kota. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang

Indikator Kinerja ini diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pengukuran, perbaikan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang secara berkesinambungan.

Pentahapan Pembangunan Kota

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan kota 2016-2021 maka perlu disusun pentahapan pembangunan sebagai dasar penentuan tema dan focus pembangunan setiap tahun. Tahapan pembangunan Kota Medan 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Tahap Konsolidasi: Reorganisasi dan Revitalisasi Organisasi Pemerintah Kota Medan 2016;
- b. Tahap Penguatan: Rehabilitasi dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2017;
- c. Tahap Pemantapan: Penataan Lingkungan Perkotaan Tahun 2018;
- d. Tahap Percepatan: Promosi dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019; dan
- e. Tahap Perwujudan: Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius Tahun 2020-2021.

Adapun indikator kinerja daerah Kota Medan tahun 2011-2015 dan proyeksi tahun 2016-2021 diuraikan berikut ini:

I ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT													
No	IKK	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	94.78	87.40	95.00	83.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	Cakupan Kunjungan Bayi	%	86.32	87.40	98.19	93.71	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	92.16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	Angkutan Darat	%	2.40	2.40	2.39	2.39	2.23	2.19	2.15	2.11	2.08	2.04	2.04
23	Kepemilikan KTP	%	54.89	89.43	90.94	92.17	77.09	86.65	92.40	97.47	99.35	100.00	100.00
24	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk	per seribu	132	11	30	514	606	614	619	626	637	650	650
25	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	3.21	3.39	3.53	3.78	3.91	4.07	4.23	4.39	4.56	4.72	4.89
26	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun Ke Atas	%	31.50	96.00	89.60	89.75	89.75	89.90	90.05	90.20	90.35	90.50	90.50
27	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	79.00	82.00	75.43	90.74	90.74	88.22	88.39	89.13	89.74	89.99	89.99
28	Prevelensi Peserta KB Aktif	%	67.44	67.68	68.92	72.87	74.29	76.12	78.00	79.92	81.90	83.92	83.92
29	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di Setiap Desa/Kelurahan	%	111.85	111.85	111.85	106.33	104.86	103.20	101.57	99.97	98.39	96.84	96.84
30	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	22.62	22.01	21.93	21.15	22.07	21.94	21.82	21.70	21.57	21.45	21.45
31	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	104	104	104	104	104	120	140	160	180	200	200
32	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	5.75	8.00	8.00	9.89	4.81	4.95	5.09	5.23	5.38	5.53	5.53
33	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	7.64	0.01	0.01	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89
34	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	48.65	48.63	53.74	48.22	69.92	71.82	73.61	74.40	77.29	80.00	80.00
35	Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	30.04	12.39	3.66	6.10	27.75	30.03	33.14	38.91	42.10	45.00	45.00
36	Koperasi Aktif	%	55.93	19.61	20.93	21.90	28.03	30.79	33.82	37.14	40.80	44.81	44.81
37	Usaha Mikro dan Kecil	%	99.64	99.59	99.60	99.53	88.48	86.00	83.59	81.25	78.97	76.75	76.75

I ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT													
No	IKK	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
38	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Di Lestarkan	%	39.62	65.00	65.00	65.00	65.00	75.41	77.49	81.49	83.75	86.61	86.61
39	Kunjungan Wisata	orang	195,178	188,015	233,999	243,641	243,641	258,813	274,929	292,049	310,235	329,553	329,553
40	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	10.37	5.60	5.60	5.00	4.49	5.74	6.11	6.59	7.16	7.80	7.80
41	Gelanggang /Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	% per jumlah penduduk	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
42	Lapangan Olahraga	Per 10.000 penduduk	0	0	0	0	125	127	129	131	133	135	135
43	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	1	2	3	5	8	8	8	8	8	8	8
44	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	3	3	9	5	5	5	5	5	5	5	5
45	Sistem Informasi	SIM	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
46	Ketersediaan Pangan Utama	kg	160,758.03	116,733.00	118,010.00	109,628.00	110,000.42	110,374.11	110,749.06	111,125.29	111,502.79	111,881.58	111,881.58
47	PKK Aktif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
48	Posyandu	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
49	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	80.00	82.50	82.50	93.24	93.24	97.00	100.92	104.99	109.23	113.64	113.64
50	Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	%	2.00	15.00	15.00	4.00	4.00	9.77	23.85	58.23	142.17	347.13	347.13
51	Luas Lahan Bersertifikat	%	55.40	63.00	63.00	40.00	40.00	37.72	35.57	33.55	31.63	29.83	29.83
52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	71.42	82.00	82.00	82.00	82.00	85.04	88.19	91.45	94.84	98.35	98.35
53	Penyelesaian Ijin Lokasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
54	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	36.00	33.33	33.33	33.33	33.33	32.71	32.11	31.51	30.93	30.35	30.35
55	Pengunjung Perpustakaan	%	8.70	7.40	6.11	6.11	3.75	3.08	2.54	2.09	1.72	1.41	1.41

I ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT													
No	IKK	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
56	Produksi Perikanan	%	95.92	106.11	100.90	102.08	87.70	88.73	89.76	90.81	91.88	92.95	92.95
FOKUS PELAYANAN URUSAN PILIHAN													
1	Konsumsi Ikan	%	98.67	103.09	89.77	87.11	74.83	76.51	78.22	79.97	81.76	83.59	83.59
2	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	38.40	47.70	4.83	4.27	4.23	3.40	2.74	2.20	1.77	1.43	1.43
3	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	2.59	0.03	2.68	2.68	1.06	0.64	0.38	0.23	0.14	0.08	0.08
4	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	14.99	13.66	13.82	13.82	11.86	12.00	12.14	12.28	12.43	12.57	12.57
5	Pertumbuhan Industri	%	0.52	0.52	0.53	0.53	9.99	12.21	14.91	18.22	22.26	27.20	27.20
6	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	26.98	25.36	25.51	25.51	26.94	26.95	26.97	26.98	26.99	27.00	27.00
7	Ekspor Bersih Perdagangan (milyar US\$)	milyar US\$	5,061.10	4,044.95	3,996.07	4,044.95	4,032.00	4,081.32	4,131.24	4,181.78	4,232.93	4,284.70	4,284.70
III ASPEK DAYA SAING													
No	IKK		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH													
	Konsumsi Per Kapita	kg	639.6	643.76	646.92	650.62	653.09	655.67	658.06	661.35	664.65	667.98	667.98
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR													
1	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	%	100.00	100.00	48.00	66.17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Penegakkan Hukum Lingkungan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Penanganan Sampah	%	81.59	57.70	87.73	81.45	91.29	97.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

I ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT													
No	IKK	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	%	0.02	0.02	0.03	0.02	2.43	2.51	2.59	2.68	2.77	2.86	2.86
5	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	%	79.69	85.04	86.02	91.29	93.50	97.34	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Pemeliharaan Jalan Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	78.25	55.48	66.02	66.54	67.55	66.23	64.94	63.68	62.44	61.22	61.22
8	Lingkungan Permukiman Kumuh	%	2.34	2.19	2.19	2.19	0.75	0.61	0.50	0.41	0.34	0.28	0.28
9	Rumah Layak Huni	%	79.31	79.34	79.34	83.21	97.24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Persentase Rumah Bersantasi	%	76.81	77.35	82.80	82.80	82.80	84.40	86.04	87.71	89.40	91.14	91.14
11	Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	%	11.00	10.30	29.78	29.78	29.78	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
FOKUS IKLIM INVESTASI													
	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	milyar rupiah	11.45	(84.30)	16.33	(6.81)	81.12	82.03	82.54	83.68	84.52	85.11	85.11
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA													
	IPM		77.53	77.78	78.00	79.03	79.45	79.88	80.31	80.74	81.17	81.60	81.60

BAB IX PENUTUP

RPJMD Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Medan. RPJMD ini dijalankan secara terpadu dan searah dengan pembangunan regional/nasional selama lima tahun mendatang. Dengan adanya RPJMD Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan menjadi gerakan bersama untuk membangun Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 ditentukan oleh dukungan yang padu dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, dan Pemerintah Provinsi/Pusat, komitmen, dan dukungan DPRD Kota Medan, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil termasuk media masa cetak dan elektronik. Pelaksanaan RPJMD juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta.

Melalui keberhasilan pembangunan kota dengan didukung semangat dan kepedulian bersama, mari jadikan “Medan Rumah Kita.”